



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA



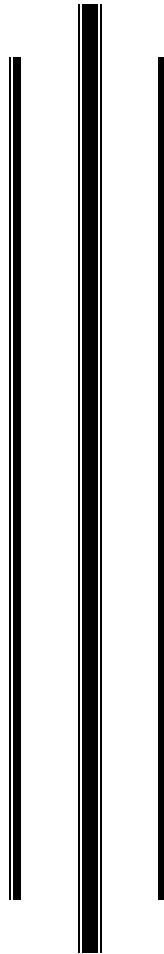
LAPORAN
**PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA**



2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023**



**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023**



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dapat disusun dengan baik. Dalam kesempatan ini kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusi dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan dalam rangka penyusunan LPPD Tahun 2023.

Laporan ini merupakan implementasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta dan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka ibu kota Indonesia akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Provinsi DKI Jakarta akan diubah sebagai Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berkedudukan sebagai pusat perkonomian nasional dan kota global. Atas peran sebagai kota global dengan 6 (enam) elemen pengukurnya, mencakup: (1) ekonomi yang mapan dan terkoreksi secara global; (2) kapasitas riset dan inovasi yang baik dan menerus; (3) ruang yang nyaman untuk dihuni; (4) budaya dan pariwisata yang menarik wisatawan untuk berkunjung; (5) lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan; (6) aksesibilitas yang terkoneksi secara intra dan interkota, dengan penuh keyakinan Jakarta berkemampuan menjadi kota yang menarik dan mempertahankan arus orang, modal dan gagasan global bertransformasi menjadi kota global yang mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia.

Substansi materi laporan ini menggambarkan dan menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indikator makro, indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil, dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan, selain itu laporan ini juga mengakomodir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Semoga dengan tersusunnya LPPD ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan guna menjawab berbagai macam tantangan dan peluang masa depan Jakarta melalui inovasi dan strategi pembangunan hingga peran dan langkah pemerintah untuk membangun kota global. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridai kita semua.

Sukses Jakarta untuk Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 7 Maret 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	I-1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-13
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-37
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH II-1	
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II-1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-1
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	II-3
2.1.3 Angka Pengangguran.....	II-4
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	II-6
2.1.5 Pendapatan Per-Kapita	II-8
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan	II-9
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-10
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	II-11
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output).....	II-17
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-42
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II-42
2.3.2 Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	II-44
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun-Tahun Sebelumnya Sesuai Dengan Dokumen RPD 2023-2026	II-170

2.3.4	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.....	II-174
2.3.5	Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.....	II-176
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI	III-1
3.1	Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-1
3.1.1	Target Kinerja	III-3
3.1.2	Realisasi.....	III-6
3.2	Permasalahan dan Kendala.....	III-8
3.3	Saran dan Tindak Lanjut	III-9
3.4	Dekonsentrasi yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-9
3.4.1	Target Kinerja	III-15
3.4.2	Realisasi.....	III-24
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1	Urusan Pendidikan.....	IV-1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah	IV-2
4.1.3	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Menengah.....	IV-2
4.1.4	Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-9
4.1.5	Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-10
4.1.6	Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-10
4.2	Urusan Kesehatan	IV-11
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-11
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah	IV-12
4.2.3	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-13

4.2.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-25
4.2.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-26
4.2.6 Permasalahan dan Solusi Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-27
4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-30
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-30
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah.....	IV-32
4.3.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar	IV-33
4.3.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-37
4.3.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-37
4.3.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-38
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-40
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-40
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah.....	IV-42
4.4.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-43
4.4.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-46
4.4.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-46
4.4.6 Permasalahan dan Solusi.....	IV-47
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat....	IV-52
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-52
4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV-53
4.5.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan	IV-54
4.5.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM.....	IV-61
4.5.5 Dukungan Personil	IV-62

4.5.6 Permasalahan dan Solusi Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-64
4.6 Urusan Sosial.....	IV-69
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-69
4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV-70
4.6.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial....	IV-72
4.6.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM.....	IV-86
4.6.5 Dukungan Personil	IV-86
4.6.6 Permasalahan dan Solusi Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-87
4.7 Program dan Kegiatan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	IV-89
4.7.1 Urusan Pendidikan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ..	IV-89
4.7.2 Urusan Kesehatan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ..	IV-100
4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	IV-102
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat Daerah Provinsi.....	IV-107
4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ...	IV-108
4.7.6 Urusan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	IV-116
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2023	I-3
Tabel I-2	Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2023	I-3
Tabel I-3	Registrasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.....	I-9
Tabel I-4	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.....	I-11
Tabel I-5	Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ..	I-11
Tabel I-6	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Periode sampai dengan 31 Desember 2023 (unreviewed)	I-12
Tabel II-1	Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.....	II-1
Tabel II-2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)	II-11
Tabel II-3	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)	II-17
Tabel II-4	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-42
Tabel II-5	Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja	II-44
Tabel II-6	Capaian IKU Indeks Kota Layak Huni	II-47
Tabel II-7	Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Indikator Indeks Kota Layak Huni	II-48
Tabel II-8	Capaian IKU Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	II-50
Tabel II-9	Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Indikator Indeks Kota Layak Huni	II-51
Tabel II-10	Tabel Indikator Sasaran Tahun 2023.....	II-54
Tabel II-11	Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023	II-54
Tabel II-12	Jumlah Perjalanan Harian dengan Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2023	II-55
Tabel II-13	Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.....	II-55
Tabel II-14	Faktor Keberhasilan Penggunaan Angkutan Umum	II-59
Tabel II-15	Faktor Penghambat Penggunaan Angkutan Umum	II-59

Tabel II-16	Tabel Rencana Aksi Penggunaan Angkutan Umum	II-60
Tabel II-17	Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-62
Tabel II-18	Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”	II-62
Tabel II-19	Capaian IKU Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	II-66
Tabel II-20	Target RPD Indikator “Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”	II-66
Tabel II-21	Capaian IKU Indeks Resiko Bencana	II-69
Tabel II-22	Target RPD Indikator Indeks Resiko Bencana	II-69
Tabel II-23	Indikator Indeks Resiko Bencana.....	II-70
Tabel II-24	Indikator Kinerja Utama.....	II-72
Tabel II-25	Capaian IKU Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	II-73
Tabel II-26	Tabel komponen penilaian	II-73
Tabel II-27	Target RPD Indikator “Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif”.....	II-74
Tabel II-28	Tabel Perbandingan Nasional	II-74
Tabel II-29	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I s.d. Triwulan IV-2023	II-77
Tabel II-30	Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan	II-86
Tabel II-31	Perbandingan secara nasional Indikator Tingkat Kemiskinan	II-89
Tabel II-32	Capaian Indikator Rasio Gini	II-91
Tabel II-33	Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem	II-94
Tabel II-34	Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem	II-96
Tabel II-35	Indeks Daya Saing Daerah	II-98
Tabel II-36	Indikator Kinerja Utama.....	II-99
Tabel II-37	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia.....	II-100
Tabel II-38	Capaian Indikator Indeks Dimensi Pendidikan.....	II-106
Tabel II-39	Capaian Indikator Angka Harapan Hidup	II-108
Tabel II-40	Pembagian perkota di Provinsi DKI Jakarta.....	II-109
Tabel II-41	Capaian Indikator Prevalensi Stunting pada balita.....	II-111

Tabel II-42	RPD Tahun 2023-2026 Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita.....	II-112
Tabel II-43	Prevalensi Stunting Tahun 2022.....	II-114
Tabel II-44	Indeks Pembangunan Gender seluruh Pemda tahun 2022	II-118
Tabel II-45	Perbandingan data capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dengan 2026	II-170
Tabel II-46	Pengukuran efisiensi anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017.....	II-174
Tabel II-47	Tabel Capaian Realisasi Program Pendukung Indikator Sasaran.....	II-176
Tabel III-1	Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	III-3
Tabel III-2	Target Kinerja Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta menurut Kementerian/Lembaga pemberi Anggaran Tahun 2023	III-4
Tabel III-3	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tugas Pembantuan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023	III-7
Tabel III-4	Instansi Pemberi dan Instansi Pelaksana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.....	III-10
Tabel III-5	Program dan Kegiatan Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	III-11
Tabel III-6	Target Kinerja Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.....	III-16
Tabel III-7	Realisasi Anggaran dan Kinerja Dekonsentrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023	III-24
Tabel IV-1	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Daerah Provinsi	IV-3
Tabel IV-2	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota.....	IV-6
Tabel IV-3	Lokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan.....	IV-9
Tabel IV-4	Dukungan Personil SPM Pendidikan	IV-10
Tabel IV-5	Permasalahan dan Solusi SPM Pendidikan.....	IV-10
Tabel IV-6	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan Daerah Provinsi	IV-13
Tabel IV-7	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota	IV-15

Tabel IV-8	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kesehatan	IV-25
Tabel IV-9	Dukungan Personil Bidang Kesehatan.....	IV-26
Tabel IV-10	Permasalahan dan Solusi	IV-27
Tabel IV-11	Target Pemenuhan SPM Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	IV-32
Tabel IV-12	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi.....	IV-33
Tabel IV-13	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.....	IV-35
Tabel IV-14	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-37
Tabel IV-15	Dukungan Personil SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV-37
Tabel IV-16	Permasalahan dan Solusi	IV-38
Tabel IV-17	Rekapitulasi capaian akses air limbah domestik Daerah Provinsi.....	IV-39
Tabel IV-18	Anggaran Bidang Sanitasi.....	IV-39
Tabel IV-19	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi	IV-43
Tabel IV-20	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat.....	IV-46
Tabel IV-21	Dukungan Personil SPM Perumahan Rakyat	IV-46
Tabel IV-22	Permasalahan dan Solusi	IV-47
Tabel IV-23	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi	IV-54
Tabel IV-24	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota.....	IV-56
Tabel IV-25	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Sub Bidang Kebencanaan Daerah Kabupaten / Kota	IV-57
Tabel IV-26	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota.....	IV-59
Tabel IV-27	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM	IV-61
Tabel IV-28	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM	IV-61
Tabel IV-29	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM	IV-62
Tabel IV-30	Dukungan Personil SPM	IV-62

Tabel IV-31	Dukungan Personil.....	IV-63
Tabel IV-32	Dukungan Personil.....	IV-63
Tabel IV-33	Permasalahan dan Solusi	IV-64
Tabel IV-34	Permasalahan dan Solusi	IV-65
Tabel IV-35	Permasalahan dan Solusi	IV-66
Tabel IV-36	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial Daerah Provinsi	IV-72
Tabel IV-37	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota	IV-80
Tabel IV-38	Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Melalui KLJ, KPDJ Dan KAJ Tahun Anggaran 2023.....	IV-85
Tabel IV-39	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sosial	IV-86
Tabel IV-40	Dukungan Personil SPM Sosial	IV-86
Tabel IV-41	Permasalahan dan Solusi	IV-87
Tabel IV-42	Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Daerah Provinsi	IV-89
Tabel IV-43	Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota	IV-94
Tabel IV-44	Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota ...	IV-101
Tabel IV-45	Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi.....	IV-102
Tabel IV-46	Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.....	IV-104
Tabel IV-47	Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi.....	IV-107
Tabel IV-48	Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi	IV-108
Tabel IV-49	Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota	IV-112
Tabel IV-50	Program dan Kegiatan SPM Sosial Daerah Provinsi	IV-116
Tabel IV-51	Program dan Kegiatan SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota	IV-118

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Sungai, Kanal, dan Flood Way yang Mengaliri Provinsi DKI Jakarta	I-2
Gambar I-2 Morfologi Tanah di Provinsi DKI Jakarta	I-5
Gambar I-3 Potongan Melintang Selatan-Utara di Provinsi DKI Jakarta	I-6
Gambar I-4 Topografi di Provinsi DKI Jakarta	I-8
Gambar I-5 Peta Pembagian Wilayah di Provinsi DKI Jakarta.....	I-10
Gambar I-6 Arah kebijakan pembangunan tahunan 2023-2026 sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.....	I-36
Gambar II-1 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) Tahun 2023	II-83
Gambar II-2 Gini Ratio menurut provinsi, Maret 2022 - Maret 2023.....	II-93
Gambar II-3 Skor IDSD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-97

DAFTAR GRAFIK

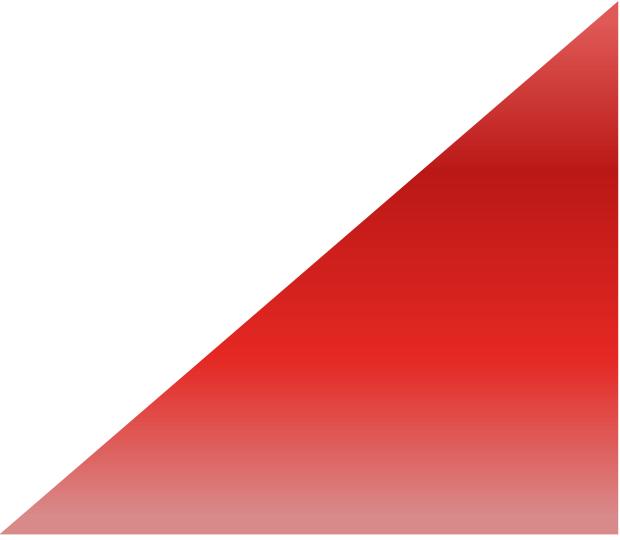
Grafik I-1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta 2019-2023	I-14
Grafik I-2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023	I-15
Grafik I-3 Indeks Gini DKI Jakarta dan Indonesia 2017-2023	I-16
Grafik I-4 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023	I-17
Grafik I-5 Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2018-2023	I-18
Grafik I-6 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2019-2023	I-19
Grafik I-7 Jumlah realisasi investasi penanaman modal tahun 2018-2023	I-20
Grafik I-8 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2017-2023.....	I-21
Grafik I-9 Jumlah Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta tahun 2021-2023 dalam juta USD dari bulan ke bulan	I-21
Grafik II-1 Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Selama Periode 2020-2023	II-2
Grafik II-2 Tren Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Di DKI Jakarta Selama Periode 2019-2023.....	II-4
Grafik II-3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Selama Periode 2020-2023.....	II-5
Grafik II-4 Pertumbuhan PDRB (c-to-c) Provinsi DKI Jakarta Selama Periode 2019-2023	II-7
Grafik II-5 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dalam Juta Rupiah Selama Periode 2019-2023.....	II-8
Grafik II-6 Gini Ratio DKI Jakarta dan Nasional, 2019-2023	II-9
Grafik II-7 Tren Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Selama Periode 2019-2023.....	II-87
Grafik II-8 Gini Ratio DKI Jakarta dan Nasional, 2019-2023	II-92
Grafik II-9 Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) DKI Jakarta (tahun), 2020-2023.....	II-109
Grafik II-10 IPM Laki-Laki dan IPM Perempuan dan IPG DKI Jakarta, Tahun 2022	II-117

Grafik II-11 Perbandingan IPG antar Kabupaten/Kota	II-117
Grafik II-12 Data Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	II-121
Grafik II-1 Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov DKI Jakarta Tahun 2018-2023	II-127



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Data Geografis Wilayah

Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim, dan geologi.

1) Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 Tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi $5^{\circ} 19' 12''$ Lintang Selatan - $6^{\circ} 23' 54''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 22' 42''$ Bujur Timur - $106^{\circ} 58' 18''$ Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 7 meter di atas permukaan laut.

Secara geografis luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta adalah 7.660 km^2 , dengan luas daratan $662,33 \text{ km}^2$ (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.998 km^2 .



Gambar I-1
Sungai, Kanal, dan Flood Way yang Mengaliri Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, dan 2 kanal yang berbatasan dengan Laut Jawa.

Letak geografis di wilayah Utara sebagai muara 13 sungai yang melintas di Jakarta, menyebabkan Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob).

Sementara itu disebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

2) Iklim

Tempratur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Kemayoran di Tahun 2023 tertinggi di bulan Oktober ($33,97^{\circ}\text{C}$) dan terendah di bulan Februari ($30,79^{\circ}\text{C}$). Curah hujan tertinggi dibulan Februari (22,45mm) dan terendah di bulan Oktober (0,00mm). Sedangkan temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Tanjung Priok di Tahun 2023 tertinggi di bulan Oktober ($33,66^{\circ}\text{C}$) dan terendah di bulan Februari ($30,05^{\circ}\text{C}$). Curah hujan tertinggi di bulan Februari (22,45mm) dan terendah di bulan Oktober (0,00mm).



Selengkapnya curah hujan di Jakarta selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1
Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan
Tahun 2023

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	25,55	28,17	31,52	25,81	28,08	31,12
Februari	25,00	27,30	30,79	25,17	27,59	30,50
Maret	25,16	27,68	31,57	25,71	27,91	31,03
April	26,08	29,06	33,25	26,75	29,23	32,72
Mei	26,93	29,42	33,25	26,62	29,67	32,87
Juni	26,24	29,05	32,99	26,64	29,21	32,71
Juli	25,96	28,77	32,61	26,31	28,85	32,43
Agustus	25,97	28,81	32,97	26,54	28,91	32,73
September	25,99	29,10	33,31	26,50	29,24	33,18
Oktober	27,06	30,00	33,97	27,88	30,14	33,66
November	26,50	29,50	33,27	26,88	29,78	33,22
Desember	26,40	29,48	33,00	26,75	29,76	32,81

Sumber : <https://dataonline.bmkg.go.id> (Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok), 2023

Tabel I-2
Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2023

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Jumlah Curah Hujan (mm ²)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm ²)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (hari)
Januari	10,68	10	3,06	11,18	15	4,22
Februari	22,45	25	2,05	18,37	24	3,03
Maret	13,11	14	4,51	10,73	16	5,62
April	7,98	13	5,53	4,05	10	6,76
Mei	5,31	13	4,23	6,92	6	6,10
Juni	4,89	9	3,50	4,53	9	6,67
Juli	0,22	3	4,50	0,49	4	6,30
Agustus	0,08	1	6,07	0,00	0	8,06
September	0,00	0	7,51	0,11	2	8,32
Oktober	0,00	0	6,71	0,00	0	8,43
November	6,79	14	3,27	8,16	12	6,32
Desember	2,10	7	4,23	0,28	4	5,65

Sumber : <https://dataonline.bmkg.go.id> (Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok), 2023



Sedangkan rata-rata suhu udara di Jakarta selama tahun 2023 sebesar $28,95^{\circ}$ C dengan rata-rata suhu maksimum dan minimum sebesar $32,56^{\circ}$ C dan $26,27^{\circ}$ C. Suhu terendah di Jakarta selama tahun 2023 terjadi di bulan Februari dengan rata-rata suhu udara sebesar $27,45^{\circ}$ C. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya frekuensi hujan yang turun selama bulan tersebut. Selengkapnya suhu maksimum, minimum dan rata-rata di Jakarta selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

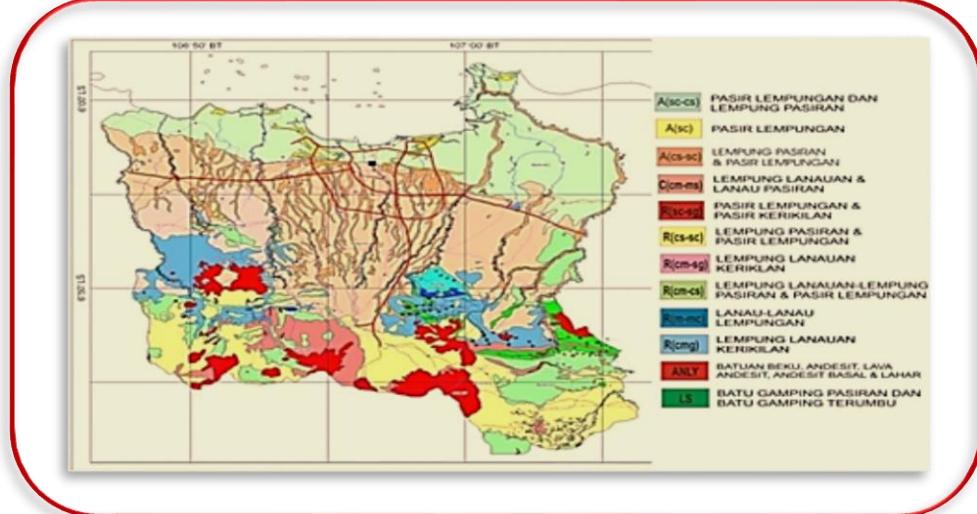
3) Geologi

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan zaman Pleitosen yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan merupakan bagian aleuvial Bogor yang terdiri atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena seluruhnya merupakan endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 meter, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8–15 meter, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter.

Berdasarkan lapisannya tanah di wilayah endapan Jakarta dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian selatan adalah tanah latosol dengan tekstur variabel dari lempung sampai sedikit berpasir. Di bagian utara dekat pantai karena merupakan endapan batuan muda, maka sifatnya tidak padat dan air tanahnya terpengaruh oleh air laut.



Gambar I-2
Morfologi Tanah di Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2023

Sedangkan dari aspek morfologi tanah di sebelah selatan tangkul-tangkul pantai seperti tersebut di atas lebih mirip tanah laterit kemerah-merahan karena merupakan hasil pelapukan dari batuan dan tanah di sebelah utara tebing lebih banyak berwarna keabu-abuan yang merujuk pada endapan lempung laut.

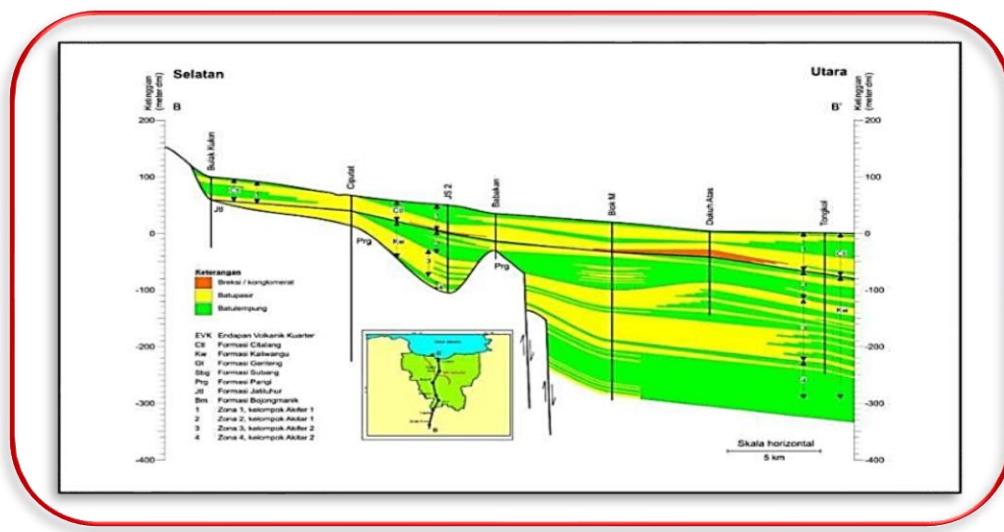
Wilayah Jakarta memiliki lithologi sebagai berikut :

1. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah Utara mendekati pantai berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara 3-12 meter dengan ketebalan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 300 meter.
2. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 meter.
3. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun berselang-selang antara lempung pasiran dan pasir lempungan.



4. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal lapisan antara 3-13, 5 meter.
5. Potongan melintang Selatan-Utara Jakarta menunjukkan endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan pada beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat, terutama di sekitar Blok M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian Utaranya lebih dari 300 meter dan Formasi Parigi di sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman 80 meter. Formasi ini di dominasi oleh batu lempung diselang-selingi oleh batu pasir.

Gambar I-3
Potongan Melintang Selatan-Utara di Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2023

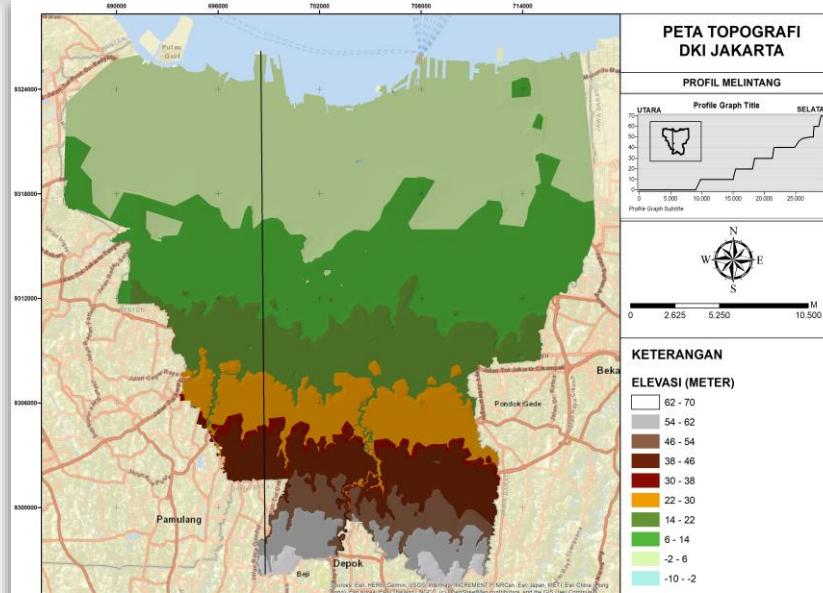


Jakarta merupakan kota delta yang dilintasi oleh 13 sungai dan diapit 2 sungai besar di sebelah timur Sungai Citarum dan sebelah barat Sungai Cisadane. Dua sungai besar ini membawa lebih banyak bahan erosi sehingga terjadi pengendapan yang lebih banyak dari sungai lainnya. Keadaan ini menyebabkan pergeseran garis pantai pada wilayah kedua muara sungai, sehingga terbentuk delta dan semenanjung yang menjorok ke laut, akibatnya terbentuklah Teluk Jakarta.

Proses pembentukan wilayah di sepanjang pantai Teluk Jakarta dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor : (1) pembentukan lahan pantai baru yang berada di muara sungai yang kandungan sendimennya tinggi lebih cepat dari pada di muara sungai-sungai yang kandungan sedimennya rendah. Dalam masa ribuan tahun terbentuklah dataran lebar yang disebut dataran alluvial (dataran endapan). Proses sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun mengakibatkan terbentuknya dataran Jakarta semakin melebar, menggeser garis pantai rata-rata enam sampai 9 (sembilan) meter per tahun. Dengan bertambah lebarnya dataran alluvial, maka dataran rendah menjadi lebih landai; (2) iklim yang menimbulkan angin pada musim angin barat meniup ke arah daratan. Hempsan air laut dapat menghalangi pembentukan lahan yang bergantung pada perbandingan antara arus sungai dan besar kecilnya kandungan sedimen yang terbawa. Akibatnya pembentukan Teluk Jakarta ada yang berlangsung cepat, agak lamban bahkan juga terjadi penggerusan dari lahan pantai. Di bagian timur antara Kalibaru sampai Marunda pantai semakin mundur, akibat terkikis oleh abrasi laut.



Gambar I-4
Topografi di Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2023

Kondisi geografis serta topografi Jakarta sebagai kota delta yang sebagian kawasan utaranya merupakan daerah rendah di bawah permukaan laut serta adanya fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan intensitas dan variabilitas curah hujan serta peninggian muka air pasang, menjadikan Jakarta sebagai wilayah rawan banjir.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebanyak 11.337.563 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.683.739 jiwa dan perempuan 5.653.824 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau disebut rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tercatat 100,53 persen, angka tersebut menjelaskan bahwa di DKI Jakarta pada tahun 2023 secara registrasi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang, sedikit terdapat kelebihan penduduk laki-laki.



Tabel I-3
Registrasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota
Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	NAMA KAB/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Kep. Seribu	15.413	15.009	30.422
2	Jakarta Pusat	552.690	549.362	1.102.052
3	Jakarta Utara	942.525	930.571	1.873.096
4	Jakarta Barat	1.312.120	1.299.395	2.611.515
5	Jakarta Selatan	1.200.089	1.205.993	2.406.082
6	Jakarta Timur	1.660.902	1.653.494	3.314.396
Grand Total		5.683.739	5.653.824	11.337.563

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebesar 0,17 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan kepadatan penduduk sebesar 17.146,16 jiwa/km².

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara, memiliki status khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan berada pada level Provinsi.



Gambar I-5
Peta Pembagian Wilayah di Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 yakni dari 5 (lima) kotamadya menjadi 1 (satu) kabupaten administrasi dan 5 (satu) kota administrasi. Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi, yakni kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km², Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km², Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km², Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km² dan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas daratan 8,70 km².

Pada pelayanan di kecamatan dan kelurahan, untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Pada Tahun 2023, jumlah RW dan RT pun mengalami perubahan sesuai pada tabel di bawah ini :



Tabel I-4

Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Kota/Kab Administrasi	Luas Area (km ²)	Jumlah				
			Kec	Kel	RW	RT	LMK
1	Jakarta Pusat	48,13	8	44	386	4.533	383
2	Jakarta Utara	146,66	6	31	460	5.315	440
3	Jakarta Barat	129,54	8	56	587	6.521	547
4	Jakarta Selatan	141,27	10	65	579	6.063	565
5	Jakarta Timur	188,03	10	65	711	7.950	709
6	Kep. Seribu	8,70	2	6	24	127	24
Jumlah		662,33	44	267	2.747	30.509	2.668

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara memiliki kewenangan khusus kelembagaan Perangkat Daerah. Selain itu, Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan bersifat administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 42 Perangkat Daerah.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 65.701 orang ASN dan 79.559 orang non ASN.

Tabel I-5
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	ASN	28.115	37.586	65.701
2	Non ASN	68.046	11.513	79.559

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023



f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan APBD Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 83.781.085.902.192,00 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam pelaksanaannya terjadi perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 79.558.253.790.537,00 yang disahkan melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Berikut tabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 periode sampai dengan 31 Desember 2023 (unreviewed):

Tabel I-6
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
Periode sampai dengan 31 Desember 2023 (unreviewed)

AKUN	NAMA AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.442.043.648.831	49.147.894.552.539	101,46
4.1.01	Pajak Daerah	43.000.000.000.000	43.515.914.558.091	101,20
4.1.02	Retribusi Daerah	462.105.437.613	454.052.283.271	98,26
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	545.869.249.882	545.869.249.987	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.434.068.961.336	4.632.058.461.190	104,47
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	20.224.315.057.470	20.159.788.646.034	99,68
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.996.577.429.044	1.730.905.119.064	86,69
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.996.577.429.044	1.730.905.119.064	86,69
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		70.662.936.135.345	71.038.588.317.637	100,53
BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASIONAL	60.383.693.518.412	57.553.313.845.369	95,31
5.1.01	Belanja Pegawai	18.778.026.066.648	17.974.278.014.020	95,72
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.281.511.012.549	25.819.444.334.532	94,64
5.1.03	Belanja Bunga	258.000.000.000	229.704.491.741	89,03
5.1.04	Belanja Subsidi	5.908.311.604.139	5.539.653.281.534	93,76
5.1.05	Belanja Hibah	3.707.368.399.302	3.622.526.940.757	97,71
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.450.476.435.774	4.367.706.782.785	98,14



AKUN	NAMA AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
5.2	BELANJA MODAL	10.850.183.726.006	8.855.982.095.755	81,62
5.2.01	Belanja Modal Tanah	837.728.164.500	442.600.308.470	52,83
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.085.131.092.839	2.821.636.242.876	91,46
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.556.806.970.333	1.654.374.384.246	64,70
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.222.738.767.561	3.797.962.401.987	89,94
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	147.778.730.773	139.408.758.176	94,34
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	554.562.887.668	-	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	554.562.887.668	-	-
5.4	BELANJA TRANSFER	356.446.480.500	356.446.480.500	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500	100,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		72.144.886.612.586	66.765.742.421.624	92,54
SURPLUS/DEFISIT		(1.481.950.477.241)	4.272.845.896.013	
PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.895.317.655.192	8.892.096.664.254	99,96
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.600.096.664.254	8.600.096.664.254	100,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	295.220.990.938	292.000.000.000	98,91
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.413.367.177.951	6.609.542.011.769	89,16
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.434.678.551.982	4.806.870.975.375	88,45
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.802.671.036.394	1.802.671.036.394	100,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	176.017.589.575	-	-
PEMBIAYAAN NETO		1.481.950.477.241	2.282.554.652.485	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		-	6.555.400.548.498	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi permasalahan strategis pemerintah daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, serta kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.



a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

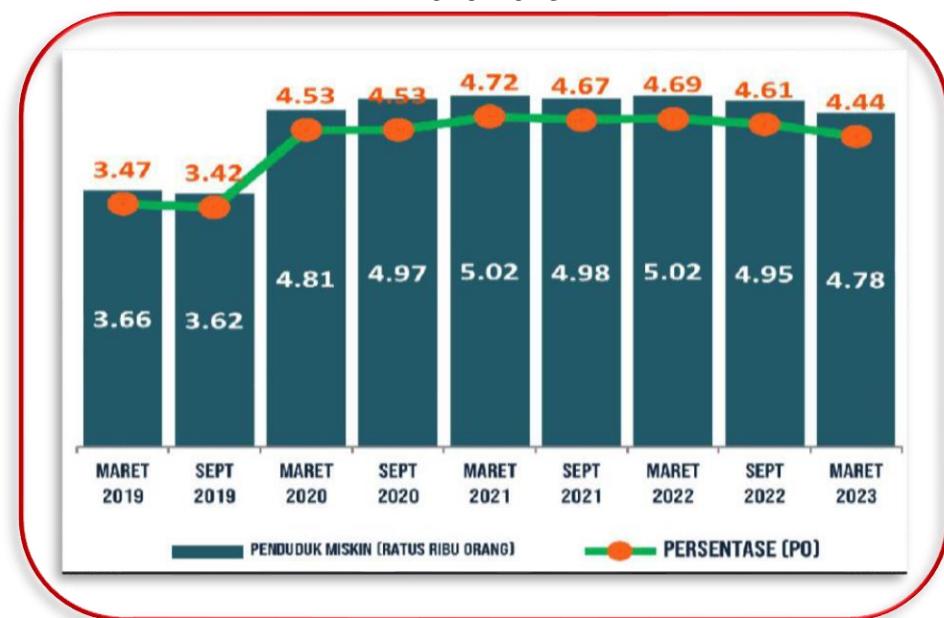
Permasalahan pembangunan merupakan perbedaan atau kesenjangan (*gap*) antara pencapaian kinerja pembangunan dan target yang direncanakan, serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan kondisi saat ini. Permasalahan pembangunan yang dijabarkan meliputi indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/target tahunan dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya/tren).

1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta yang salah satunya ditunjukkan oleh naiknya Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta dari 4,53 persen per Maret 2020 menjadi 4,69 persen per Maret 2022. Walaupun terjadi penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi 4,44 persen per Maret 2023, kondisi ini masih terpaut jauh dari pencapaian penurunan Tingkat Kemiskinan pada masa pra pandemi yakni 3,47 persen per Maret 2019.

Grafik I-1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023.



Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta juga mengalami penurunan dari sejak pandemi Covid-19 dimana TPT mencapai 8,98 persen per Agustus 2020 menjadi 6,53 persen per Agustus 2023. Namun demikian, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan angka sebelum pandemi pada 2019 yang mencapai 5,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mulai pulihnya kondisi kesejahteraan masyarakat masih terus perlu didorong oleh kebijakan pemerintah.

Grafik I-2
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023.

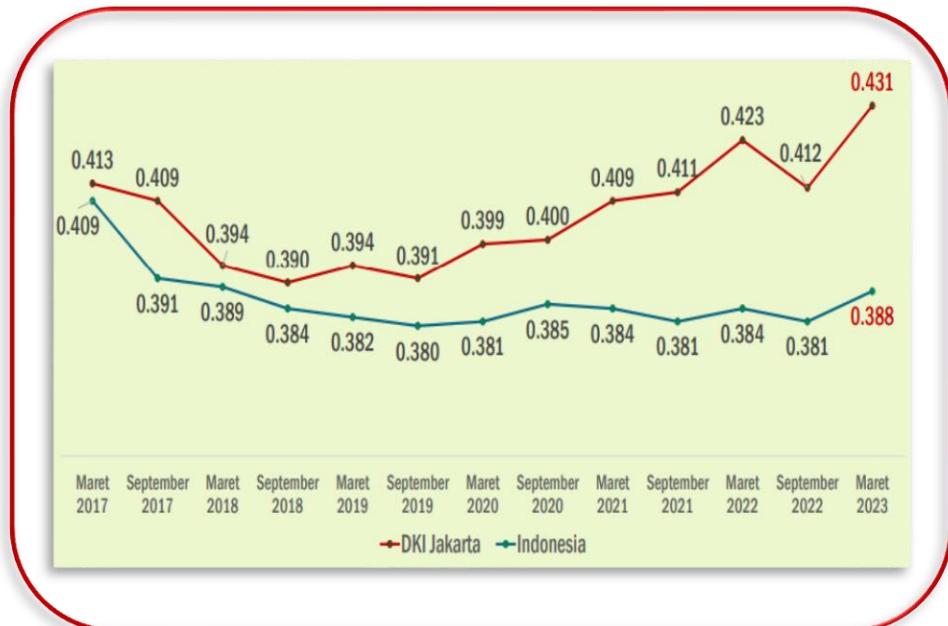
DKI Jakarta juga masih menghadapi masalah ketimpangan yang ditunjukkan oleh Indeks Gini yang mengalami tren peningkatan sejak 2020 sampai 2023 yakni 0,399 di Maret 2020 menjadi 0,431 di Maret 2023. Kondisi ini masih berada di atas angka nasional yakni 0,388 di Maret 2023.

Prevalensi balita gizi buruk juga masih menjadi permasalahan di DKI Jakarta. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, sebanyak 14,8 persen balita di DKI Jakarta mengalami stunting pada tahun 2022. Angka ini masih jauh di bawah angka rata-rata nasional yang mencapai 21,6 persen dan telah di bawah standar WFO (20 persen). Namun demikian, Pemprov. DKI Jakarta perlu mendorong agar jumlahnya semakin menurun.



Faktor penyebab yang memengaruhi tumbuh kembang balita di antaranya kualitas pendidikan, lingkungan sosial, ketahanan pangan, sistem kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan permukiman, urbanisasi, serta kecukupan gizi dan kesehatan di semua siklus kehidupan masyarakat Jakarta.

Grafik I-3
Indeks Gini DKI Jakarta dan Indonesia 2017-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023.

2) Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan, namun masih menghadapi banyak permasalahan. Di bidang layanan pendidikan, jumlah siswa putus sekolah masih meningkat seiring dengan masih kurangnya partisipasi murni di jenjang SMP dan SMA. Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa jumlah siswa putus sekolah cenderung mengalami peningkatan pada Tahun Ajaran 2020/2021 dengan jumlah siswa putus sekolah paling banyak pada jenjang SD/MI.

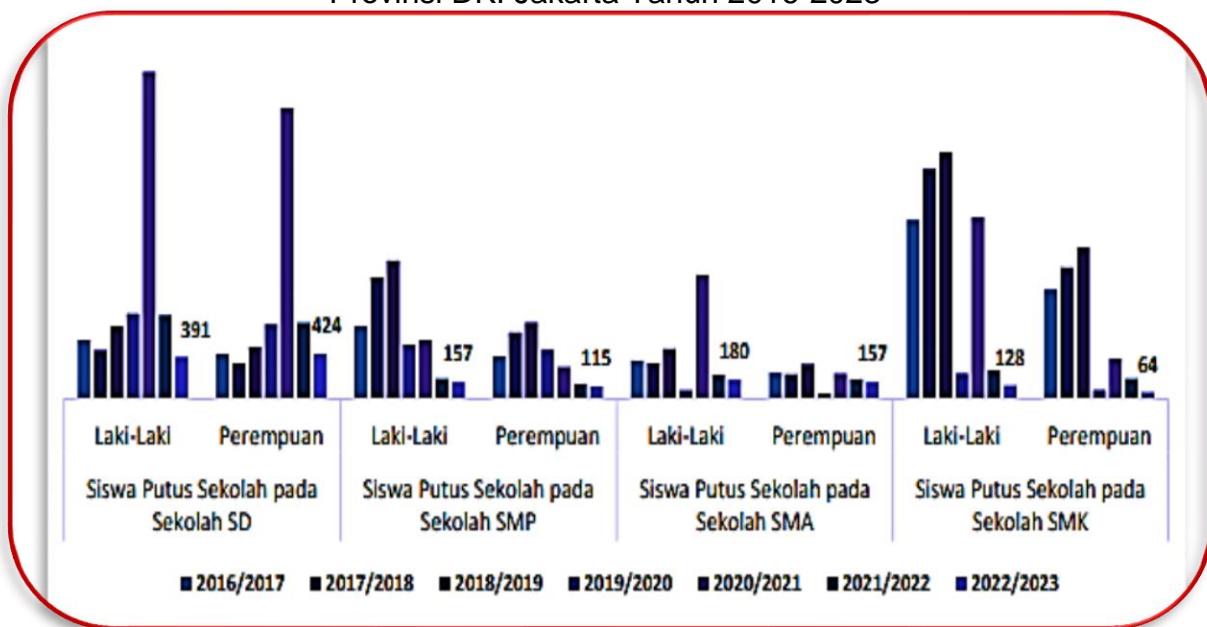
Peningkatan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI tersebut membawa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka putus sekolah murid SD terbanyak di Indonesia. Pada tahun ajaran yang sama, siswa putus sekolah pada jenjang SMP cenderung memiliki jumlah yang paling kecil dibanding jenjang sekolah lainnya. Adapun angka siswa putus sekolah kembali



menurun pada Tahun Ajaran 2021/2022 dan 2022/2023. Secara umum, pada setiap tahun dan jenjang sekolah jumlah siswa laki-laki yang putus sekolah lebih tinggi dari jumlah siswa perempuan yang putus sekolah.

Grafik I-4

Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2023

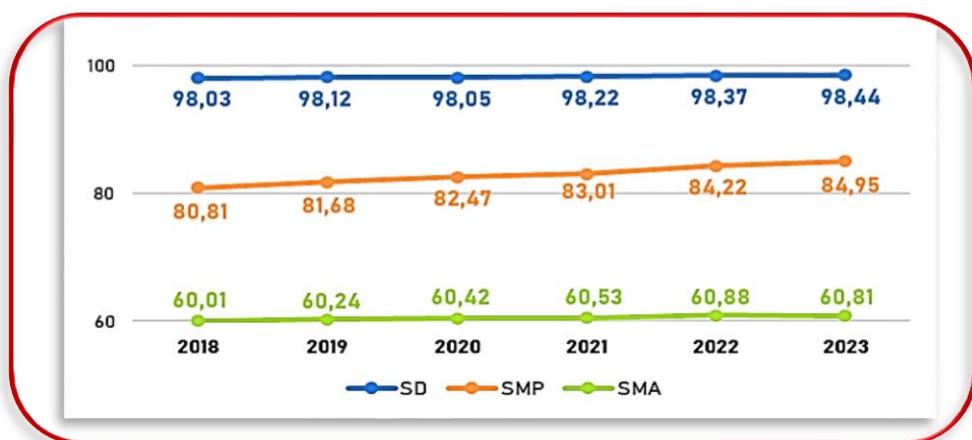


Sumber : Statistik Pendidikan Kemdikbud dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta, 2023.

Tren Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD hingga SMA/SMK/MA tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Seperti pada 2023, APM jenjang SD, SMP, dan SMA secara berurutan sebesar 98,44; 84,95; dan 60,81 atau menunjukkan partisipasi yang terus menurun. Namun demikian, APM di setiap jenjang pendidikan memiliki tren yang membaik dari tahun 2018- 2023. APM jenjang SD tahun 2023 mencapai 98,44 dari 98,37 di tahun 2022 atau meningkat 0,07 poin. APM jenjang SMP tahun 2023 mencapai 84,95 dari 84,22 di tahun 2022 atau meningkat 0,73 poin. Sementara, APM SMA tahun 2023 menurun 0,07 poin yakni dari 60,88 di 2022 menjadi 60,81 di 2023



Grafik I-5
Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta
Tahun 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023.

Masalah pendidikan juga terjadi dari sisi penyediaan pendidikan seperti sekolah yang belum mencapai akreditasi A dan kualitas tenaga didik yang rendah. Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan memiliki target Persentase Guru yang Kompeten sebesar 77 persen, namun hanya terealisasi sebesar 34,29 persen. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya penambahan ataupun pengukuran guru yang kompeten akibat dari tidak dilaksanakannya Uji Kompetensi Guru (UKG) yang merupakan wewenang Kemendikbud dan UKG (terakhir dilakukan pada tahun 2019).

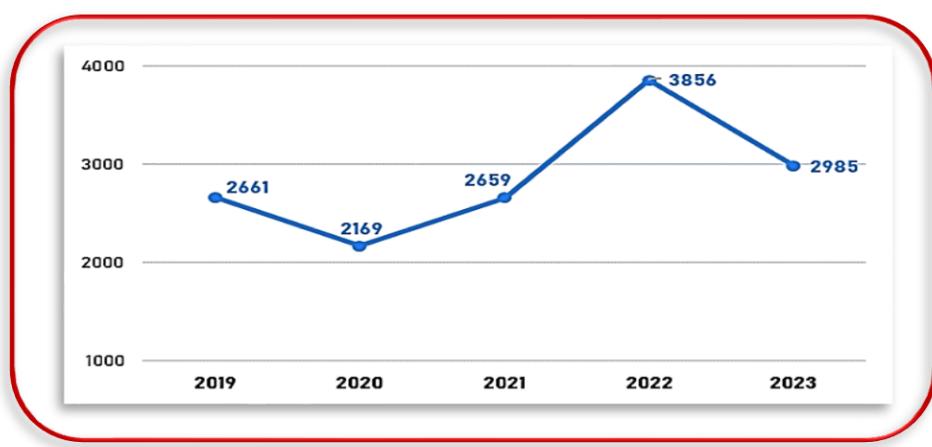
Masalah lain pada aspek pelayanan umum adalah masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, dimana sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 65 persen . Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak huni dan terjangkau baru mencapai 40 persen di tahun 2021. Banjir juga masih menjadi persoalan karena tingginya alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah setempat masih rendah dan pencemaran lingkungan akibat limbah yang tidak terolah di IPAL dan IPLT dan/atau kebocoran tangki masih tinggi.



Status mutu air sampai dengan tahun 2021 masih rendah dimana air sungai tercemar berat mencapai 71,25 persen , air tanah tercemar ringan 49,80 persen , dan air laut tercemar ringan mencapai 100 persen.

Pada urusan sosial, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah PMKS pada tahun 2022 sebanyak 3.856 orang, meningkat sebanyak 1.197 orang dibandingkan tahun 2021. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2.985 orang. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial memerlukan perhatian terhadap sarana sosial di antaranya panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, panti rehabilitasi, dan fasilitas sejenis lainnya. Pada tahun 2019 hingga 2023, jumlah sarana sosial mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan jumlah sarana sosial di tahun 2020, namun kembali menurun di tahun 2023. Pada tahun 2023, terdapat 22 sarana sosial atau berkurang sebanyak 12 sarana sosial dibandingkan tahun 2020. Namun demikian, kapasitas sarana sosial tersebut mengalami peningkatan dari 7.326 orang menjadi 7.751 orang.

Grafik I-6
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik "Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023", 2023.



3) Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi aspek penting dalam program pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap realisasi investasi tahun 2020 dimana terjadi penurunan signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.123,90 triliun atau menjadi Rp95,00 triliun. Namun demikian, realisasi investasi pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.103,30 triliun dan pada tahun 2023 mencapai Rp.166,7 triliun. Jumlah tersebut bahkan telah melampaui realisasi investasi sebelum masa pandemi.

Grafik I-7
Jumlah realisasi investasi penanaman modal tahun 2018-2023

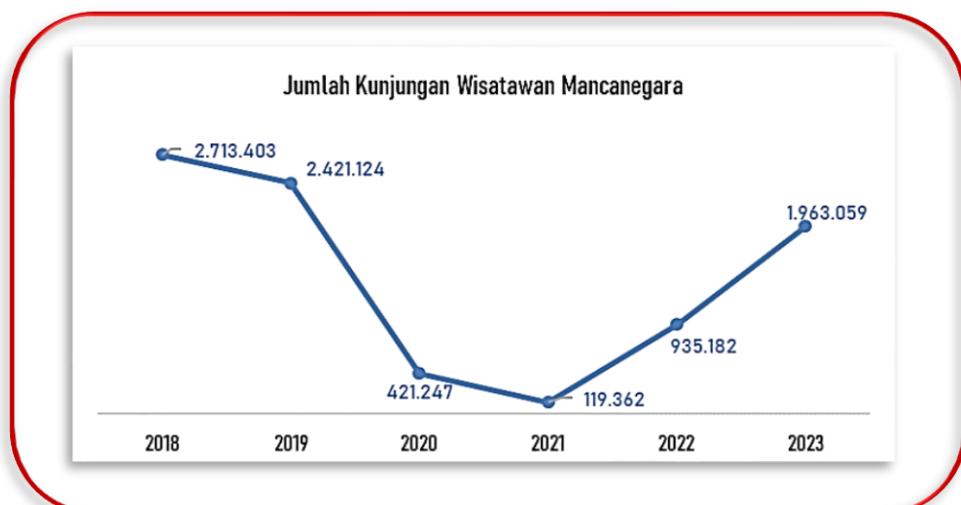


Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2023.

Di sektor pariwisata, salah satu yang masih menjadi persoalan adalah penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan signifikan sebesar 82,91% atau dari 2.658.090 kunjungan di 2017 menjadi hanya 421.247 kunjungan di 2020. Jumlah wisatawan mancanegara semakin berkurang pada tahun 2021 dengan hanya sebesar 119.362 kunjungan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan menjadi 1.963.059 pada tahun 2023, namun masih belum mencapai jumlah kunjungan seperti pada masa sebelum pandemi Covid-19.



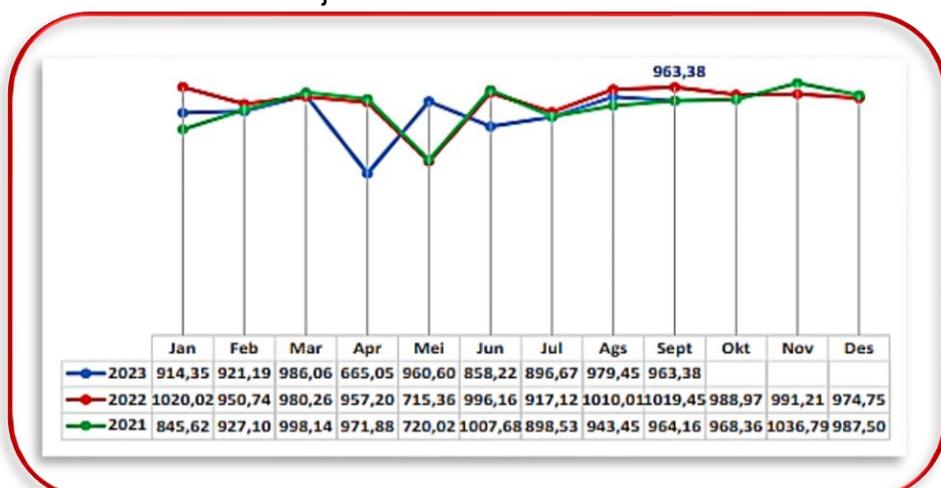
Grafik I-8
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2017-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023).

Di tengah pandemi Covid-19, kekuatan ekonomi melalui UMKM menjadi alternatif potensial. Namun, fluktuasi produktivitas UMKM menjadi masalah tersendiri. Kondisi kapasitas produksi UMKM di Provinsi DKI Jakarta secara umum cenderung mengalami stagnasi. Pada tahun 2022, nilai eksport mencapai USD 11.521 juta, mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2021 yang sebesar USD 11.269 juta. Namun pada tahun 2023, nilai eksport dari bulan ke bulan secara umum lebih rendah dari capaian tahun 2022 kecuali pada bulan Mei mencapai USD 960 juta.

Grafik I-9
Jumlah Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta tahun 2021-2023
dalam juta USD dari bulan ke bulan



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023.



Permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa kinerja pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perumusan isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2023-2026. Selain itu, perumusan isu strategis turut mempertimbangkan prioritas dan arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025; kebijakan dalam RTRW 2030; Agenda Pembangunan, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Major Projects dalam RPJMN 2020-2024; kebijakan dalam RPJMD Prov/Kab/Kota penyangga; hasil evaluasi capaian SDGs; serta isu-isu aktual di antaranya pandemi Covid-19 dan Undang-Undang Ibukota Negara. Berdasarkan pertimbangan beberapa hal di atas, dirumuskan 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026 yaitu:

1. Ketahanan Terhadap Bencana;
2. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik;
3. Ketahanan Ekonomi Inklusif;
4. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas;
5. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara; dan
6. Pemerataan Pembangunan.

b. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode transisi hingga dilantiknya Kepala Daerah baru yang terpilih melalui Pilkada serentak 2024. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun periode 2023-2026 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.



Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, arahan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, kesinambungan pembangunan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, serta 6 (enam) isu strategis 2023-2026 yang telah dijabarkan sebelumnya, teridentifikasi 4 (empat) dimensi pembangunan yang selanjutnya dijadikan fokus perencanaan dalam RPD 2023-2026, yaitu: 1) dimensi lingkungan-bangun (*built environment*), 2) dimensi perekonomian (*economic*), 3) dimensi manusia (*human*), dan 4) dimensi pemerintahan (*governance*). Keempat dimensi ini menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026.

Konsep RPD Tahun 2023-2026 adalah JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas dimana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan konsep RPD tersebut, masing-masing dimensi kemudian dielaborasikan menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Tujuan dari dimensi lingkungan-bangun (*built environment*) memiliki indikator Indeks Kota Layak Huni (*Most Livable City Index*) yang disurvei oleh IAP Indonesia. Adapun frase dan kata kunci dari tujuan pertama yaitu '*Regenerasi Kota*', '*Ketahanan*', dan '*Berkelanjutan*'. Regenerasi kota merupakan upaya pembangunan atas lingkungan fisik kota yang diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran yaitu: 1) Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas, dan 2) Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit. Kedua sasaran tersebut dianggap mampu mewakili tuntutan terhadap layanan perkotaan yang memadai dengan infrastruktur terkait



mobilitas mendapatkan *highlight* utama sehingga diangkat menjadi sasaran tersendiri.

Kata kunci selanjutnya adalah ketahanan yang dimaksudkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip *resilient city*. Kata kunci ini kemudian diturunkan menjadi sasaran Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota. Kata kunci terakhir yaitu berkelanjutan yang mewakili harapan bahwa seluruh pembangunan di DKI Jakarta akan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Untuk menjamin hal tersebut, maka dirumuskan sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.

Sasaran-sasaran pembangunan daerah telah dirumuskan secara lengkap bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana

2. Tujuan 2: Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Tujuan dari dimensi perekonomian (*economic*) ini memiliki indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang diukur oleh Bappenas. Frase dan kata kunci dari tujuan kedua ini yaitu '*Perekonomian Inklusif*', '*Daya Saing*', '*Penghidupan Layak*' dan '*Pemerataan Kesejahteraan*'. Perekonomian Inklusif merupakan suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Jakarta. Kata kunci ini kemudian diturunkan menjadi sasaran Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.



Kata kunci selanjutnya yaitu Daya Saing, mengadopsi *Global Competitiveness Index* berupa kapasitas dan potensi Jakarta yang bersaing dengan kota global lainnya untuk menarik talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Kata kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi. Kata kunci berikutnya terkait Penghidupan Layak adalah suatu kondisi dimana tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha, maupun resiliensi tenaga kerja terhadap tantangan. Untuk mencapai hal tersebut, dirumuskan sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Kata kunci terakhir yaitu Pemerataan Kesejahteraan yang sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan golongan miskin dan rentan sehingga dirumuskan sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial. Sasaran-sasaran tersebut telah dirumuskan secara lengkap bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan Rasio Gini Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah

3. Tujuan 3: Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

Tujuan dari dimensi manusia (*human*) ini memiliki indikator Indeks Pembangunan Manusia yang diukur oleh BPS. Frase dan kata kunci dari tujuan ketiga ini yaitu ‘*Pembangunan Manusia*’, ‘*Madani*’, dan ‘*Berkesetaraan*’. Pembangunan Manusia merupakan salah satu tujuan terpenting yang dapat menentukan kualitas hidup



warga Jakarta. Kata kunci ini diturunkan ke dalam dua sasaran terkait pendidikan dan kesehatan yaitu: 1) Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat, dan 2) Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.

Adapun standar hidup layak dianggap sudah terwakili oleh tujuan kedua sehingga tidak dibuatkan sasaran tersendiri pada tujuan ketiga ini. Selanjutnya, kata kunci Madani merupakan penerjemahan dari konsep *civil society* yang bermakna sebuah tatanan masyarakat modern yang demokratis dalam berinteraksi di dunia yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan memiliki kesadaran dalam mewujudkan peradaban.

Untuk itu, dirumuskan sasaran Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinnekaan Masyarakat.

Kata kunci terakhir yaitu Berkesetaraan merupakan suatu kondisi yang memastikan tidak adanya diskriminasi pembangunan berbasis gender, yang diwakili oleh sasaran Menurunnya Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender'. Secara lebih lengkap, sasaran-sasaran tersebut telah dirumuskan bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR
Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan
Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender
Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinnekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi

4. Tujuan 4: Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Tujuan dari dimensi pemerintahan (*governance*) ini memiliki indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur oleh Kementerian PAN dan RB. Frase dan kata kunci dari tujuan keempat ini yaitu '*Transformasi Pelayanan Publik*', '*Manajemen Pemerintahan*', dan '*Berintegritas*'. Kata kunci Transformasi



Pelayanan Publik menggambarkan kondisi dimana praktik dan persepsi layanan publik tidak lagi dianggap menyulitkan dan mampu menjamin pemenuhan hak-hak warga dengan memanfaatkan teknologi dan media yang tersedia secara maksimal. Untuk itu, dirumuskan 2 (dua) sasaran yaitu: 1) Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat; dan 2) Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Kota Cerdas.

Selanjutnya, kata kunci Manajemen Pemerintahan memiliki makna proses internal pemerintah yang akuntabilitasnya terjaga baik dari sisi pengelolaan kinerja maupun keuangan. Sejalan dengan kondisi yang ingin dicapai, dirumuskan 2 (dua) sasaran yaitu: 1) Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah, dan 2) Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel. Kata kunci terakhir yaitu Berintegritas dapat diaplikasikan dalam semua lini pemerintahan, namun terutama pada aparatur sipil negara. Konsep ini kemudian diturunkan menjadi sasaran Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur. Rumusan sasaran-sasaran tersebut beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Survei Penilaian Integritas
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

- c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Program Pembangunan Daerah berikut merupakan program prioritas yang dikelompokkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didukung, yang dalam pelaksanaannya diintegrasikan dengan rumusan Kegiatan Strategis Daerah sebagai



bagian dari keberlanjutan manfaat kebijakan pembangunan. Program-program tersebut sesuai dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program-program prioritas dalam mendukung pencapaian 4 tujuan dan 17 sasaran dalam RPD 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

a) Sasaran Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- Program Pengembangan Perumahan;
- Program Kawasan Permukiman;
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- Program Penatagunaan Tanah; dan
- Program Pengelolaan Persampahan.

b) Sasaran Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- Program Penyelenggaraan Jalan;
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- Program Pengelolaan Pelayaran; dan
- Program Pengelolaan Perkeretaapian.



c) Sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- Program Penataan Bangunan Gedung;
- Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- Program Pengelolaan Hutan;
- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- Program Pengelolaan Energi Terbarukan; dan
- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.



- d) Sasaran Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota
- Program yang mendukung sasaran yaitu:
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Program Penanggulangan Bencana;
 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
 - Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.
2. Tujuan Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan
- a) Sasaran Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
- Program yang mendukung sasaran yaitu:
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - Program Pemasaran Pariwisata;
 - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - Program Penuluhan Pertanian;
 - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - Program Pengembangan Ekspor;



- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
 - Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- b) Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
- Program yang mendukung sasaran yaitu:
- Program Perencanaan Tenaga Kerja;
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - Program Hubungan Industrial;
 - Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan
 - Program Pengembangan UMKM.
- c) Sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial
- Program yang mendukung sasaran yaitu:
- Program Pemberdayaan Sosial;
 - Program Rehabilitasi Sosial;
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - Program Penanganan Bencana;
 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.



- d) Sasaran Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- Program Promosi Penanaman Modal;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Program Pengembangan Kebudayaan;
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- Program Pengelolaan Permuseuman;
- Program Pembinaan Perpustakaan;
- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Tujuan Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

- a) Sasaran Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendidikan.

- b) Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- Program Pengendalian Penduduk;
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);



- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; dan
 - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- c) Sasaran Menurunnya Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender
- Program yang mendukung sasaran yaitu:
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - Program Perlindungan Perempuan;
 - Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
 - Program Perlindungan Khusus Anak.
- d) Sasaran Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinnekaan Masyarakat
- Program yang mendukung sasaran yaitu:
- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
 - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.



4. Tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintah Berintegritas

- a) Sasaran Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- Program Pendaftaran Penduduk;
- Program Pencatatan Sipil;
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- Program Pelayanan Penanaman Modal;
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- Program Pengelolaan Arsip;
- Program Pengelolaan Kecamatan;
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- b) Sasaran Terakselasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

- c) Sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

Program yang mendukung sasaran yaitu:

- Program Penataan Organisasi;
- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- Program Perekonomian dan Pembangunan;
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;



- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
- d) Sasaran Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
- Program yang mendukung sasaran yaitu:
- Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- e) Sasaran Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
- Program yang mendukung sasaran yaitu:
- Program Kepegawaian Daerah; dan
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan
- Pemantapan tujuan dan sasaran pembangunan DKI Jakarta tahun 2023-2026 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta serta mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan tahun 2023 mengacu pada dokumen RPD tahun 2023-2026 yang dijabarkan sebagai berikut:



Gambar I-6
Arah kebijakan pembangunan tahunan 2023-2026 sesuai Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2022.

Mengacu pada tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026, tema pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah **“Pemulihan dan Transformasi Menuju Ekonomi Digital dalam Rangka Pemanfaatan Kota Global yang Berdaya Saing”**. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah kebijakan untuk pemulihian serta transformasi ekonomi digital menuju kota global yang berdaya saing. Pembangunan DKI Jakarta di 2023 diarahkan pada upaya menjadi:

1. Kota yang tahan pandemi (*pandemic proof city*);
2. Kota yang tangguh menghadapi krisis (*crisis resilient city*);
3. Kota yang mengimplementasikan digitalisasi (*digitally advanced city*); dan
4. Kota yang berkelanjutan dan layak huni (*sustainable livable city*).

Perekonomian Jakarta tahun 2023 diharapkan dapat tumbuh pada kisaran 5,3-5,7 persen; tingkat pengangguran ditargetkan sebesar 8,06-6,96 persen; gini ratio diprediksi sebesar 0,409 dengan target tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 3,5-3 persen, serta indeks risiko bencana ditargetkan sebesar 63,3. Sebagai upaya untuk mencapai sasaran utama tersebut, fokus pembangunan DKI Jakarta di 2023 diarahkan pada:

1. Pengurangan Ketimpangan melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial;



2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan Masyarakat;
3. Penurunan Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender;
4. Pemerataan Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat;
5. Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan;
6. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah;
7. Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas;
8. Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja;
9. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon; dan
10. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah.



Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang berisikan tentang jenis layanan dasar terhadap 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Urusan Pemerintahan bidang :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Secara eksplisit pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dimaksud, mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara kekhususannya Otonomi Daerah berada pada level Provinsi yang melaksanakan penerapan SPM bagi seluruh jenis layanan dasar pada tingkat Provinsi.

Pelaksanaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyempurnakan dan mencabut pedoman penerapan SPM sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pedoman teknis Penerapan SPM yang mencakup layanan dasar dan mutu layanannya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;



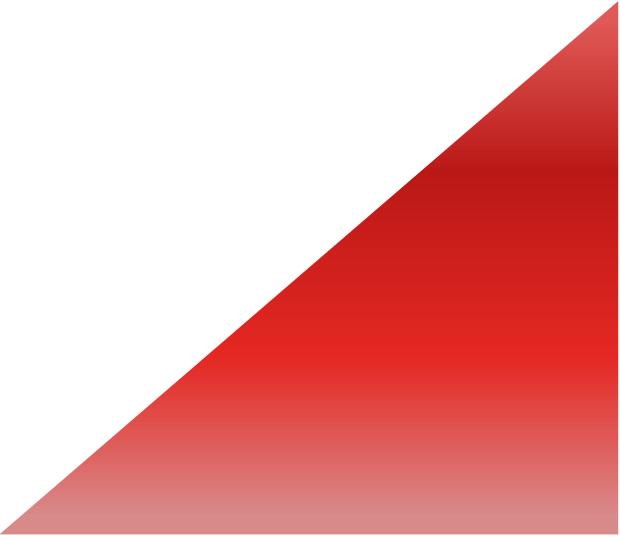
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN**



BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	82,77	83,55	0,94%
2	Angka Kemiskinan	4,61%	4,44%	-3,69%
3	Angka Pengangguran	7,18%	6,53%	-9,05%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,25%	4,96%	-5,52%
5	Pendapatan per Kapita	Rp299,67 juta	Rp322,62 juta	7,66%
6	Ketimpangan Pendapatan	0,412	0,431	4,61%

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (BPS, 2022) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu:

1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;
2. Dimensi Pengetahuan yang dibentuk oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas; dan

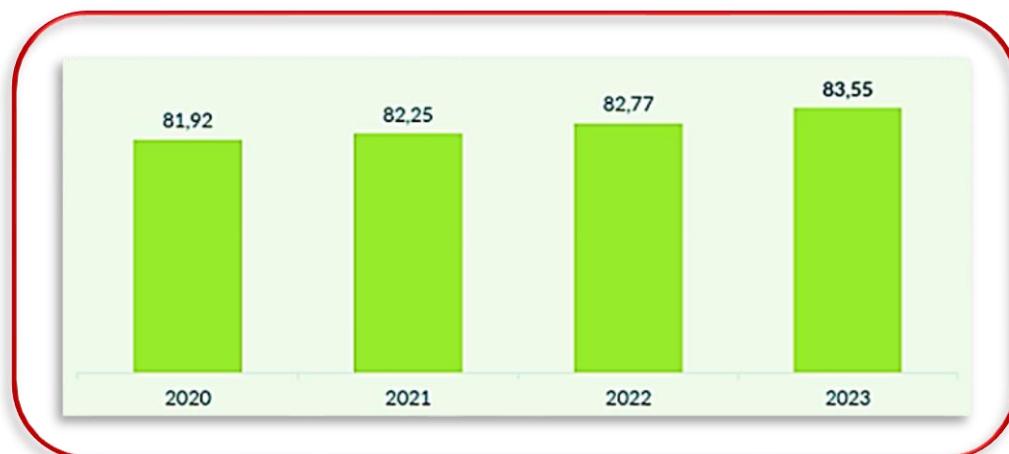


3. Dimensi Standar Hidup Layak yang direpresentasikan oleh besar pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 bersumber dari Berita Resmi Statistik No. 67/12/31/Th.XXV yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Desember 2023. IPM DKI Jakarta tahun 2023 mencapai 83,55 atau meningkat 0,78 poin (0,94 persen) dibandingkan tahun 2022 (82,77). Peningkatan IPM tersebut terjadi pada semua dimensi terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH tahun 2023 sebesar 75,81 tahun atau meningkat 0,27 tahun dari UHH tahun 2022. Pada dimensi pengetahuan, RLS dan HLS tahun 2023 sebesar masing-masing 11,45 tahun dan 13,33 tahun atau menunjukkan peningkatan masing-masing 0,14 tahun dan 0,25 tahun dari tahun 2022. Pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar Rp 19,37 juta per tahun atau meningkat Rp 446 ribu rupiah (2,36 persen) dari tahun 2022.

Capaian IPM DKI Jakarta tahun 2023 menunjukkan status pembangunan manusia DKI Jakarta yang sangat tinggi ($IPM \geq 80$) dan menjadi Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia. Selama kurun waktu 2020-2023, IPM DKI Jakarta rata-rata meningkat sebesar 0,66 persen per tahun yakni dari 81,92 pada tahun 2020 menjadi 83,55 pada tahun 2023.

Grafik II-1
Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta
Selama Periode 2020-2023



Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023



2.1.2 Angka Kemiskinan

Jumlah persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta dihitung berdasarkan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dibagi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta dikali 100 persen. Adapun Garis Kemiskinan (GK) diukur berdasarkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan (BPS, 2023). Gambaran kemiskinan di DKI Jakarta diperoleh dari rilis terakhir BPS Provinsi DKI Jakarta melalui Berita Resmi Statistik No. 42/07/31/Th.XXV pada tanggal 17 Juli 2023.

Pada Maret 2023, data BPS menunjukkan angka kemiskinan di DKI Jakarta mencapai 4,44 persen atau mengalami penurunan dibandingkan September 2022 sebesar 4,61 persen. Capaian Maret 2023 mengindikasikan bahwa penduduk Jakarta yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah Garis Kemiskinan mencapai 4,44 persen dari total populasi penduduk atau sebanyak 477,83 ribu orang. Jika dibandingkan dengan masa awal Pandemi COVID-19 pada Maret 2020, pengurangan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta telah mencapai 3.030 orang.

Jika dilihat dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan terakhir sejak September 2022, jumlah angka kemiskinan di Maret 2023 terefleksi lebih rendah dengan pengurangan sebanyak 17.100 orang¹.

Sedangkan dalam rentang 1 (satu) tahun yaitu per Maret 2022 sampai dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan sebanyak 24.000 orang di bulan yang sama. Secara umum, tren penurunan angka kemiskinan DKI Jakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut yaitu dari 4,72 persen (Maret 2021) menjadi 4,69 persen (Maret 2022) dan 4,44 persen (Maret 2023).

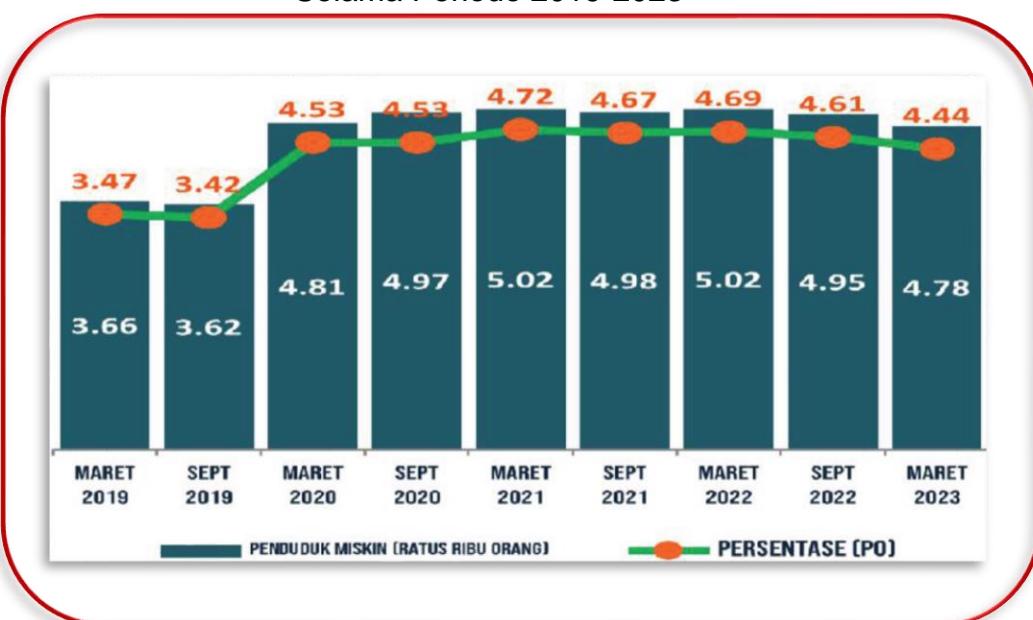
Penurunan angka kemiskinan DKI Jakarta berkaitan erat dengan geliat masyarakat yang kembali normal melakukan aktivitas ekonomi seperti bekerja, jual beli dan distribusi barang, maupun membuka usaha baru pasca diberhentikannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

¹ Data angka kemiskinan yang digunakan adalah data bulan Maret 2023, sedangkan pada September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan oleh BPS.



Selain itu, konsistensi dari upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan termasuk pemberian bantuan sosial turut berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Sebanyak 80,15 persen masyarakat miskin telah mampu mengakses perlindungan dan jaminan sosial yang pada akhirnya mampu meringankan beban pengeluaran konsumsi pada kelompok masyarakat miskin (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Grafik II-2
Tren Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Di DKI Jakarta
Selama Periode 2019-2023



Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta selama periode 2019-2023 menunjukkan angka kemiskinan tertinggi terukur pada Maret 2021 dan Maret 2022 sebanyak 502 ribu orang. Namun, penurunan tertinggi angka kemiskinan terukur pada Maret 2021 sebesar 4,72 persen dan setelahnya bergerak fluktuatif dengan kondisi akhir 4,44 persen di Maret 2023

2.1.3 Angka Pengangguran

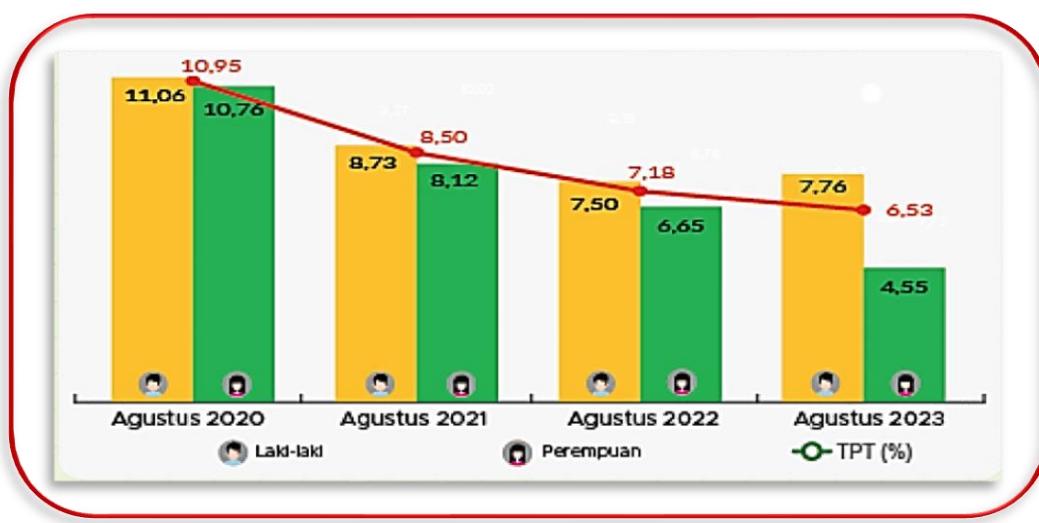
Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.



TPT dihitung dari persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran merujuk pada penduduk usia kerja (penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih) yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sementara itu, angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada 6 November 2023, TPT DKI Jakarta pada Agustus 2023 mencapai 6,53 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 7,18 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang penganggur. Lebih detil lagi, pada periode yang sama, TPT laki-laki sebesar 7,76 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 4,55 persen. Apabila dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT tamatan SMA umum merupakan yang paling tinggi (8,35 persen) sedangkan TPT pendidikan Diploma I/II/III menjadi yang paling rendah (2,77 persen).

Grafik II-3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta
Selama Periode 2020-2023



Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2023 menunjukkan tren yang semakin menurun, terakhir dengan penurunan sebesar 0,65 persen poin pada Agustus 2023 dibandingkan dengan Agustus 2022



Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023 di Jakarta, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor perdagangan sebesar 23,21 persen; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,26 persen; serta sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 11,87 persen. Adapun status pekerjaan utama penduduk Jakarta terbagi menjadi 2 (dua) kategori kegiatan yaitu formal dan informal. Kegiatan formal mencakup penduduk dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan kegiatan informal mencakup penduduk dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Pada Agustus 2023, jumlah penduduk Jakarta yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 3,23 juta orang (63,77 persen) dan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,84 juta orang (36,23 persen)².

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 07/02/31/Th.XXVI yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada 5 Februari 2024, pengukuran pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta menggunakan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2010. PDRB Jakarta atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp3.442,98 triliun sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp2.050,47 triliun.

Ekonomi Jakarta tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen, lebih lambat dibandingkan capaian tahun 2022 (c-to-c) yang tumbuh sebesar 5,25 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (14,05 persen); Jasa Lainnya (11,60 persen); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,69 persen).

² Sumber Data BPS "Keadaan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Agustus 2023", No 63/11/31/Th.XXV, 06 November 2023.



Struktur ekonomi Jakarta menurut lapangan usaha pada tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun 2022. Perekonomian masih didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor (17,67 persen); Industri Pengolahan (11,87 persen); Jasa Keuangan dan Asuransi (11,09 persen); dan Konstruksi (10,82 persen).

Grafik II-4
Pertumbuhan PDRB (c-to-c) Provinsi DKI Jakarta Selama
Periode 2019-2023



Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pertumbuhan PDRB (c-to-c) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2023 mengalami kontraksi pada tahun 2020 mencapai -2,39 persen. Pertumbuhan PDRB terus menerus mencapai angka positif sejak 2021 dan berlanjut hingga 2023, namun belum mencapai angka pertumbuhan pada 2019.

Pada tahun 2023, hampir seluruh moda transportasi (angkutan rel, darat, laut, udara dan jasa penunjang transportasi) mengalami peningkatan sehingga mendorong tumbuhnya Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel juga mendorong kinerja Jasa Lainnya dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi pada LNPRT sebesar 9,84 persen yang didorong oleh meningkatnya aktivitas partai politik menjelang pesta demokrasi 2024.



2.1.5 Pendapatan Per-Kapita

Pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah dimana pendekatan yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah.

Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku yakni dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2023, PDRB per kapita DKI Jakarta tercatat sebesar Rp322,62 juta atau meningkat 7,66 persen dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai Rp299,67 juta. Tren PDRB per kapita DKI Jakarta selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan angka yang terus meningkat meskipun sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.

Grafik II-5
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dalam Juta Rupiah Selama Periode 2019-2023



Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2019-2023 menunjukkan tren meningkat meskipun sempat turun pada 2020 dikarenakan pandemi COVID.

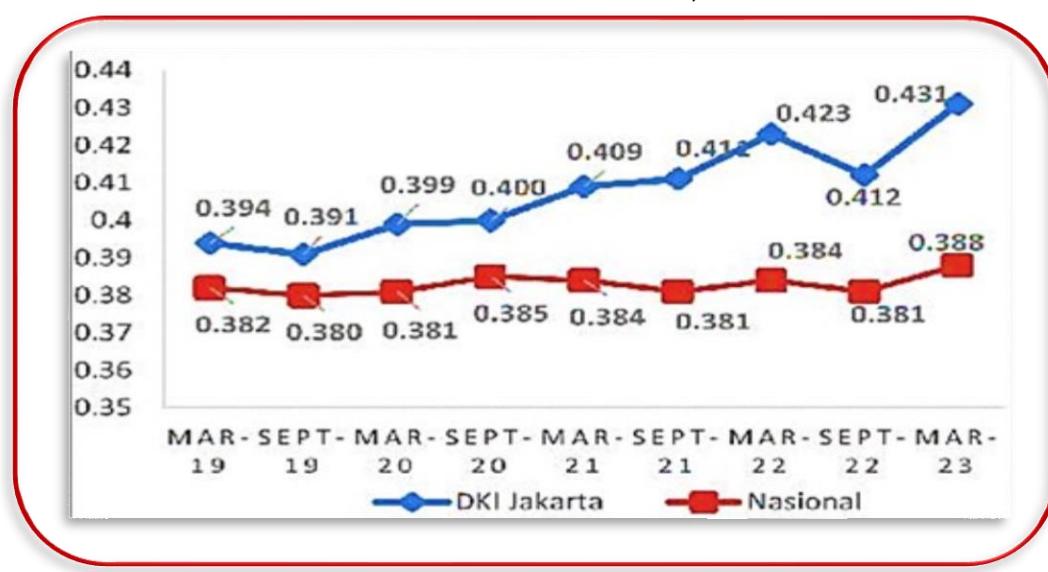


2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada 2022 dan 2023 menggunakan Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun.

Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta per Maret 2023 sebesar 0,431 atau mengalami peningkatan dibandingkan kondisi September 2022 sebesar 0,412. Angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas semakin tinggi. Peningkatan ketimpangan terjadi seiring meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan naik 0,013 poin dibandingkan September 2022 yang berarti jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Adapun indeks keparahan kemiskinan juga naik sebesar 0,017 poin yang berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi.

Grafik II-6
Gini Ratio DKI Jakarta dan Nasional, 2019-2023



Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023



Tren Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta (garis biru) secara umum berada di atas tren Rasio Gini Nasional (garis oranye) selama periode 2019-2023. Artinya, ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih besar dibandingkan kondisi nasional. Penurunan Rasio Gini di DKI Jakarta terjadi pada September 2022 namun kembali meningkat pada Maret 2023.

Berdasarkan tren rasio gini tahun 2019-2023, ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan di tingkat nasional yang ditunjukkan oleh nilai Rasio Gini DKI Jakarta yang selalu berada di atas nilai Rasio Gini Nasional selama kurun waktu tersebut.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan Provinsi tapi juga sampai pada kewenangan Kabupaten/Kota Administrasi



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

Tabel II-2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Ket
1 INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	97,97	Dinas Pendidikan	
	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	95,02		
Kesehatan	1.b.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	2,42	Dinas Kesehatan	
	1.b.2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	95,41		
	1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100		
	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	91,04	Dinas Sumber Daya Air	
	1.c.1.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	63,99		
	1.c.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	0		
	1.c.3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	77,55		
	1.c.4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	78,17		
	1.c.5	Rasio kemantapan jalan	97,27		Dinas Bina Marga
	1.c.6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100		SDA, DBM, DISNAKERTRANSGI, DCKTRP, BPPBJ
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan	
	1.d.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100		
	1.d.3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	45,63		
	1.d.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100		



Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Ket
Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94,61	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100		
	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100		
	1.e.4	Persentase penanganan pra bencana	100		
	1.e.5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100		
Sosial	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	
	1.f.2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
	1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
	1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
	1.f.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100		
2 INDEKS CAPAIAN Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja	2.a.1.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	2.a.1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	94,08		
	2.a.2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40.421.350.197,33		
	2.a.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	95,86		
	2.a.4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	88,79		
	2.a.5	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundungan bidang ketenagakerjaan	95,86		
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	13,02	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.b.2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,95		
	2.b.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12,92		
Pangan	2.c.1	Persentase cadangan pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	



Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Ket
Pertanahan	2.d.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibandingkan dengan luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	100	SDA, DBM, DPRKP, DCKTRP, DISTAMHUT, DPMPTSP	
	2.d.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100		
	2.d.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	0		
Lingkungan Hidup	2.e.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	54,57	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.e.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	74,43		
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1.1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.f.1.2	Pemanfaatan data kependudukan	35,71		
Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	0		
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,84	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.h.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	60,20		
	2.h.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,70		
Perhubungan	2.i.1	Rasio konektivitas Provinsi	0,94	Dinas Perhubungan	
	2.i.2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,59		
Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100		
	2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	99,99		



Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Ket
Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	12,42	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.k.2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	2,18		
Penanaman Modal	2.l	Persentase peningkatan investasi di provinsi	16,57	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,99	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.m.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7,20		
	2.m.3	Peningkatan prestasi olahraga	640	Dinas Pemuda dan Olahraga	
Statistik	2.n.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.n.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		
Persandian	2.o	Tingkat keamanan informasi pemerintah	97,98		
Kebudayaan	2.p	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dinas Kebudayaan	
Perpustakaan	2.q.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,68	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	93,17		
Kearsipan	2.r.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	61,91		
	2.r.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100		
3 INDEKS CAPAIAN URUSAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	149,85	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	3.a.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	82		
Pariwisata	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	109,06	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	71,96		
	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	53,61		
	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,68		



Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Ket
Pertanian	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	503,55	Dinas Ketahanan Pangan, Kelauatan dan Pertanian	
	3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	300		
Kehutanan	3.d.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	
	3.d.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0		
	3.d.3	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0		
Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	3.e.2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100		
Perdagangan	3.f.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-3,80	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.f.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100		
	3.f.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	99,98	Dinas Ketahanan Pangan, Kelauatan dan Pertanian	
	3.f.4	Tertib Usaha	0	DPPKUKM, DPMPTSP	
Perdagangan	3.f.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	53,55	Dinas Ketahanan Pangan, Kelauatan dan Pertanian	
	3.f.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	63,53		
	3.f.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,10		
Perindustrian	3.g.1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	4,22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	77,48		
	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100		
	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100		



Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian	Sumber Data	Ket
Transmigrasi	3.h		100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
4 INDEKS CAPAIAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	11,70	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	4.a.2	Rasio PAD	69,17		
	4.a.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	86,20		
	4.a.4	Opini Laporan Keuangan	6		
	4.a.5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3		Inspektorat
	4.a.6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3		
Pengadaan	4.i.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
	4.i.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	84,06		
	4.i.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	50,78		
	4.i.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	30,65		
Kepegawaian	4.j.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	68,73	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	
	4.j.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,92		
	4.j.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100		
Manajemen Keuangan	4.k.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	10,51	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	4.k.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,89		
	4.k.3	Assets management	4	Badan Pengelolaan Aset Daerah	
	4.k.4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	10,08	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Transparansi dan Partisipasi Publik	4.l.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	92,86	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	4.l.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100		



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

Tabel II-3
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
1 INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan	1.a.1	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	117	Dinas Pendidikan	
	1.a.1	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	63.613		
	1.a.1	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	105.982		
	1.a.1	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	110.588		
	1.a.1	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	126.857		
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	5.334		
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	5.451		
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	11.482		
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	11.098		
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	2.994		
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	3.390		
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	3.794		
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	3.729		
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	4.425		
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.826		
	1.a.1	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	244		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Pendidikan	1.a.1	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	287	Dinas Pendidikan	
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/sederajat	74		
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/sederajat	43		
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/sederajat	1.580		
	1.a.1	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/sederajat	1.700		
	1.a.2	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	87		
	1.a.2	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.321		
	1.a.2	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3.299		
	1.a.2	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	775		
	1.a.2	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	1.262		
	1.a.2	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	534		
	1.a.2	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	376		
	1.a.2	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	553		
	1.a.2	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	65		
	1.a.2	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/sederajat	128		
Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	159	Dinas Kesehatan	
	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	196		
	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.086		
	1.b.3	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	149		
	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	1.341		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Kesehatan	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	748	Dinas Kesehatan	
	1.b.3	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	235		
	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	87.114		
	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	76		
	1.b.4	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	52		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	1.155,23	Dinas Sumber Daya Air	
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	32.083,55		
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	227		
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	40.491		
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	2		
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	2		
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	86		
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	0		
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0		
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0		
	1.c.3	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1		
	1.c.3	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	1		
	1.c.3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM	1		
	1.c.3	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		
	1.c.3	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	2		
	1.c.4	Jumlah SPALD Regional	70		
	1.c.4	Total kapasitas SPALD Regional	17.762		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.4	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	13.884,80	Dinas Sumber Daya Air	
	1.c.4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	70		
	1.c.4	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	0		
	1.c.5	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	6.492.329	Dinas Bina Marga	
	1.c.5	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	0		
	1.c.5	Panjang jalan yang dibangun	2.040		
	1.c.5	Panjang jembatan yg dibangun	147,61		
	1.c.5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	46.432,66		
	1.c.5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0		
	1.c.5	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0		
	1.c.5	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		
	1.c.5	Panjang jalan yang dipelihara	0		
	1.c.5	Panjang jembatan yang dipelihara	270.875,56		
	1.c.6	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	0	SDA, DBM, DISNAKERTRANSGI, DCKTRP, BPPBJ	
	1.c.6	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	4.345		
	1.c.6	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	2.984		
	1.c.6	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	1		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	2.965		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	2.965		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.6	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	SDA, DBM, DISNAKERTRANSGI, DCKTRP, BPPBJ	
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan	
	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0		
	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0		
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1.100		
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	3.360		
	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	9.288		
	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	113		
	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	373.059		
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	29		
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	742		
	1.d.3	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	10.751		
	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0		
	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	1.578		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	78	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan	
	1.d.4	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0		
	1.d.4	Jumlah pengembang yang terregistrasi	0		
	1.d.4	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	274.043	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0		
	1.e.1	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	1.802		
	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8		
	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	238		
	1.e.1	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkeda serta penanganan gangguan Trantibum	74		
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1		
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	1		
	1.e.4	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	3		
	1.e.4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	1		
	1.e.5	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	1		
	1.e.5	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	3		
	1.e.5	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	4		
	1.e.5	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	9		
Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	4.841	Dinas Sosial	
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	4.841		
	1.f.1	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	4.841		
	1.f.1	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	33		
	1.f.1	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	4.841		
	1.f.1	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.1	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	0		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Sosial	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	Dinas Sosial	
	1.f.1	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	4.841		
	1.f.1	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	4.841		
	1.f.1	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	344		
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	990		
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4.841		
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	968		
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	678		
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	1.449		
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	1.449		
	1.f.2	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	1.449		
	1.f.2	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0		
	1.f.2	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	1.449		
	1.f.2	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.2	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.2	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.2	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	177		
	1.f.2	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1.449		
	1.f.2	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1.449		
	1.f.2	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	416		
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1.449		
	1.f.2	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	492		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Sosial	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	567	Dinas Sosial	
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	1.658		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	1.658		
	1.f.3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1.658		
	1.f.3	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	58		
	1.f.3	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1.658		
	1.f.3	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.3	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1.658		
	1.f.3	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.3	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	165		
	1.f.3	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1.658		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	215		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	1.658		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	104		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	54		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	192		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	6.479		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	6.479		
	1.f.4	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	6.479		
	1.f.4	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0		
	1.f.4	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	6.479		
	1.f.4	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Sosial	1.f.4	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	6.479	Dinas Sosial	
	1.f.4	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.4	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	115		
	1.f.4	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	6.479		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	6.479		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	1.542		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6.479		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	703		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	4.252		
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	153.912		
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	76.110		
	1.f.5	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	77		
	1.f.5	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	9.811		
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	2.831		
	1.f.5	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	1.495		
2 INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja	2.a.1.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi.	1	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	2.a.1.1	Percentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0		
	2.a.1.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.	0		
	2.a.1.1	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan.	0		
	2.a.1.2	Percentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.	100		
	2.a.1.2	Percentase instruktur bersertifikat kompetensi	100		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Tenaga Kerja	2.a.1.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	2,95	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	2.a.1.2	Persentase penganggur yang dilatih	2,42		
	2.a.1.2	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	91,76		
	2.a.1.2	Persentase penyerapan lulusan.	25,74		
	2.a.1.2	Persentase LPK yang terakreditasi	33,17		
	2.a.1.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0		
	2.a.1.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0		
	2.a.2	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0		
	2.a.2	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0		
	2.a.2	Data tingkat produktivitas total.	0		
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	87,72		
	2.a.3	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB.	92,37		
	2.a.3	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n.	332.406		
	2.a.3	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	100		
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.	57,10		
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.	66,20		
	2.a.3	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,41		
	2.a.3	Jumlah mogok kerja	1		
	2.a.3	Jumlah penutupan perusahaan	0		
	2.a.3	Jumlah perselisihan kepentingan	21		
	2.a.3	Jumlah perselisihan hak	170		
	2.a.3	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0		
	2.a.3	Jumlah Perselisihan PHK	741		
	2.a.3	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	1.952		
	2.a.3	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0		
	2.a.3	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	0		
	2.a.3	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.	4.901.798		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket	
Tenaga Kerja	2.a.3	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	23,61	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi		
	2.a.4	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	4			
	2.a.4	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0			
	2.a.4	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	36.421			
	2.a.4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	72			
	2.a.4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	34			
	2.a.4	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	7			
	2.a.4	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi.	6			
	2.a.4	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi.	117			
	2.a.4	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).	100			
	2.a.4	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepuangannya.	100			
	2.a.4	Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan.	0			
	2.a.4	Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	0			
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.	2.011			
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI).	2.157			
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.	2.077			
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.	1.649			
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan.	2.203			
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	1.674			
	2.a.5	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.	0			
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online.	228.060			



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	44	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.b.1	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	0		
	2.b.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1		
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1		
	2.b.2	Percentase korban kekerasan anak yang terlayani	100		
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1		
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1		
	2.b.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0		
	2.b.3	Jumlah lembaga penyedian layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1		
	2.b.3	Percentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100		
	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	1		
	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1		
Pangan	2.c.1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	2.c.1	Tersedianya dan tersalirkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0		
	2.c.1	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	0		
	2.c.1	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokcal	0		
	2.c.1	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	200		
	2.c.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	7		
	2.c.1	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1		
	2.c.1	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	1		
	2.c.1	Tersalirkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	0		
	2.c.1	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	402		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Pertanahan	2.d.1	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	1	SDA, DBM, DPRKP, DCKTRP, DISTAMHUT, DPMPTSP	
	2.d.1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	1		
	2.d.1	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	1		
	2.d.1	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	1		
Lingkungan Hidup	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	40,76	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	68,46		
	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	27,17		
	2.e.2	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	0		
	2.e.2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	0,40		
	2.e.2	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	0		
	2.e.2	Terfasilitasnya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		
	2.e.2	Terfasilitasnya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		
	2.e.2	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	2.369		
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1	Fasilitasi pelayanan Adminduk	6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.g.1	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0		
	2.g.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0		
	2.g.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.h.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23,80		
	2.h.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	5,40		
	2.h.1	Percentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	79,19		
	2.h.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	327		
	2.h.2	Percentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	89,04		
	2.h.2	Percentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	40,60		
	2.h.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	7		
	2.h.2	Percentase pelayanan KB Pasca Persalinan	80,83		
	2.h.3	Percentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	58,70		
	2.h.3	Percentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	0		
Perhubungan	2.i.1	Percentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	59,17	Dinas Perhubungan	
	2.i.1	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	100		
	2.i.2	Percentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan provinsi	100		
Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Percentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.j.1	Percentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100		
	2.j.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 te	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100		
	2.j.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	30,13		
	2.j.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100		
	2.j.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100		
	2.j.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	70,59		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	82,35		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100		
	2.j.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100		
	2.j.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	38,71		
	2.j.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	12		
	2.j.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100		
	2.j.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	93,03		
	2.j.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	93,21		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
	2.k.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,90		
	2.k.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	20		
	2.k.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12,19		
	2.k.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,43		
	2.k.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,45		
	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5,80		
	2.k.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	15,37		
	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	4,08		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0		
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0		
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	5,71		
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,78		
	2.k.2	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	12,16		
	2.k.2	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	4,05		
Penanaman Modal	2.l.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.l.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		
	2.l.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0		
	2.l.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	5		
	2.l.1	Kegiatan pameran penanaman modal	1		
	2.l.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	14		
	2.l.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	447.658		
	2.l.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	593.464		
	2.l.1	Laporan realisasi penanaman modal	4		
	2.l.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	1		
	2.l.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	6		
	2.l.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	100		
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	13.854	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	4.553		
	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1.605		
	2.m.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	266	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.m.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	554		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.3	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	1.253	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.m.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	50		
	2.m.3	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	2.785		
	2.m.3	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	6.492		
Statistik	2.n.1,2.n.2	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.n.1,2.n.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	25		
	2.n.1,2.n.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	76		
	2.n.1,2.n.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	37		
	2.n.1,2.n.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0		
	2.n.1,2.n.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100		
	2.n.1,2.n.2	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100		
Persandian	2.o.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.o.1	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	72,14		
	2.o.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	23,37		
	2.o.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100		
Kebudayaan	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	11	Dinas Kebudayaan	
	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	16		
	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	200		
	2.p.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	1.845		
	2.p.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	12		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Kebudayaan	2.p.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	27	Dinas Kebudayaan	
	2.p.1	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		
	2.p.1	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	1		
	2.p.1	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	29		
	2.p.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	5.501		
	2.p.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	2.249.186		
	2.p.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0		
	2.p.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1		
	2.p.1	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1		
	2.p.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	3		
	2.p.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	428		
	2.p.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	1.677		
	2.p.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1		
	2.p.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	71		
Perpustakaan	2.q.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	28,88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.q.1	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	34,59		
	2.q.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,01		
	2.q.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	43,54		
	2.q.1	Jumlah pemasarakan gemar membaca di masyarakat	248		
	2.q.1	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	30,77		
	2.q.1	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	34,25		
	2.q.1	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	6		
	2.q.1	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	6,20		
	2.q.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	17,77		
	2.q.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		
	2.q.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Kearsipan	2.r.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	67,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.r.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	51,64		
	2.r.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100		
	2.r.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,25		
	2.r.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1		
	2.r.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1		
	2.r.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	2		
	2.r.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	2		
	2.r.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	2		
	2.r.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	1		
3 INDEKS CAPAIAN URUSAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	3.a.1	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	1.115		
	3.a.1	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	20		
	3.a.1	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	545		
	3.a.1	Jumlah kapal yang terdaftar	1.474		
	3.a.1	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	0		
	3.a.2	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku	18,50		
	3.a.2	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	107.948,32		
	3.a.2	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku	89		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundungan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	3.a.2	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundungan yang berlaku	165		
	3.a.2	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundungan yang berlaku	100		
	3.a.2	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	15		
	3.a.2	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	373		
Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	40		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	5.207.842		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	12.183		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	77.105		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,51		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,68		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1.963.059		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	32.391.067		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	7		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	4		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	126		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	1,60		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	44		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Pertanian	3.c.1,3.c.2	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	27	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	3.c.1,3.c.2	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	21		
	3.c.1,3.c.2	Dokumen pengawasan benih yang beredar	67		
	3.c.1,3.c.2	Prasarana pertanian yang digunakan	3		
	3.c.1,3.c.2	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	15.016		
	3.c.1,3.c.2	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	442.117		
	3.c.1,3.c.2	Penerbitan izin usaha pertanian	0		
	3.c.1,3.c.2	Persentase sarana pertanian yang digunakan	90		
	3.c.1,3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0		
	3.c.1,3.c.2	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100		
Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanga	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Jumlah ketersediaan penyuluhan kehutanan	7		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	19		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	2		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	3.e.1,3.e.2	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait IUJP	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	0		
	3.e.1,3.e.2	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0		
	3.e.1,3.e.2	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0		
	3.e.1,3.e.2	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	1		
	3.e.1,3.e.2	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/majoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	0		
	3.e.1,3.e.2	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	0		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	23,56		
	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	34,35		
	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	177,78		
	3.f.1	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	6		
	3.f.2	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	73		
	3.f.2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	100		
	3.f.3	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	38	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	3.f.3	Indeks Kinerja BPSMB	0		
	3.f.4	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	100		
	3.f.4	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	100		
	3.f.4	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	100		
	3.f.4	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	84,21	DPPKUKM, DPMPTSP	
	3.f.4	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100		
	3.f.5	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	0		
	3.f.6	Jumlah barang beredar yang diawasi	414		
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi	144		
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	144		
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	144		
	3.f.7	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	7,10		
	3.f.7	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	0		



Urusan Pemerintahan	No IKK	IKK Output	Capaian	Sumber Data	Ket
Perindustrian	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	74,41	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.g.3,3.g.4	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	100		
	3.g.3,3.g.4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0		
	3.g.3,3.g.4	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0		
	3.g.6	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	88,85		
Transmigrasi	3.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	3.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		
	3.h.1	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	0		



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 4 Tujuan dengan 4 Indikator Kinerja Tujuan dan 17 Sasaran dan 22 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis.

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur No/340/2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, sesuai pada tabel di bawah ini :

Tabel II-4
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN / SASARAN		NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan			Indeks Kota Layak Huni	65	Indeks
	1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	69.06	Persen
	2	Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit		Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	18.78	Persen
	3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	54.93	Indeks
	4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	19.3	Persen
2	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan			Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	7.69	Indeks



NO	TUJUAN / SASARAN		NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN
	5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah		Laju pertumbuhan ekonomi	5.6-6.2	Persen
	6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja		Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	8.21	Persen
	7	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1	Rasio Gini	0.411	Koefisien
			2	Tingkat Kemiskinan	4.13	Persen
			3	Tingkat Kemiskinan Ektrem	1.06	Persen
	8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	3.96	Indeks
3	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia		81.55	Indeks
	9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat		Indeks dimensi pendidikan	12.14	Tahun
	10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan		Angka Harapan Hidup	73.21	Tahun
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	13.7	Persen
	11	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender		Indeks Pembangunan Gender	95.04	Indeks
	12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	76.82	Indeks
4	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		82	Indeks
	13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	88.5	Indeks
	14	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.5	Indeks
	15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 (A)	Predikat
			2	Indeks Survei Penilaian Integritas	70	Indeks
	16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	Opini
	17	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit	326	Indeks

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
(Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023)



2.3.2 Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 berdasarkan Tabel di atas, dari 26 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023, sebanyak 19 (sembilan belas) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, dan 7 (tujuh) indikator belum mencapai sesuai target yang ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-5
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni	Indeks	65	71,3	109,69%
	1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	1	Persentase penuhan layanan dasar perkotaan	Persen	69,06	77,24	111,84%
	2	Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	2	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	18,78	18,86	100,43%
	3	Tercapainya pemulihian ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	3	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,93	54,57	99,34%
			4	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	19,3	25,4	131,61%
	4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,12	61,31	104,09%
2		Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,69	7,93	103,12%
	5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	6	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,6-6,2	4,96	91,85%
	6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	7	Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	Persen	8,21	6,53	120,46%
	7	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	8	Rasio Gini	Koefisien	0,411	0,431	95,36%
			9	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,13	4,44	93,02%
			10	Tingkat Kemiskinan Ektrem	Persen	1,06	0,57	185,96%
	8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi	11	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,96	4,01	101,26%



NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3		Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,55	83,55	102,45%
	9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	12	Indeks dimensi pendidikan	Tahun	12,14	12,39	97,98%
	10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	13	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,21	75,81	103,5%
		Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender	14	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	13,7	9,2	149%
	11		15	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,04	94,93	99,88%
	12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat	16	Indeks Demokrasi	Indeks	76,82	82,13	106,91%
4		Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	82,47	100,57%
	13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	91,76	103,68%
	14	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,5	4,21	120,28%
	15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	19	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	82 (A)	81,06	98,85%
			20	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	70	76,96	109,94%
	16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel	21	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%
	17	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur	22	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	335,5	107,5%

Sumber : Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023



a. Terwujudnya Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan BerkelaJutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mencapai tujuan pertama ini yaitu ‘Regenerasi Kota’, ‘Ketahanan’, dan ‘BerkelaJutan’. Regenerasi kota merupakan upaya pembangunan atas lingkungan fisik kota yang diturunkan menjadi dua sasaran yaitu ‘Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas’ dan ‘Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit’. Kedua sasaran ini dianggap mampu mewakili tuntutan terhadap layanan perkotaan yang memadai, dengan infrastruktur terkait mobilitas mendapatkan highlight utama sehingga diangkat menjadi sasaran tersendiri. Kata kunci selanjutnya yaitu ketahanan, ketahanan dimaksud mengadopsi prinsip-prinsip resilient city yang kemudian diturunkan menjadi sasaran ‘Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota’. Kata kunci terakhir yaitu berkelalaJutan, mewakilkan V-323 harapan bahwa seluruh pembangunan di Jakarta akan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga untuk menjamin hal tersebut dirumuskan sasaran ‘Tercapainya Pemulihhan Ekosistem dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon’. Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya regenerasi kota yang berketaJahanan dan berkelalaJutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	65	71,3	109,69%
Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	69,06	77,24	131,61%
Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	18,78	18,86	100,43%
Tercapainya pemulihhan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,93	54,57	99,34%
	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	19,3	25,4	131,61%
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks resiko bencana	Indeks	60,12	61,31	104,09%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023



1) Indeks Kota Layak Huni

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 berdasarkan Laporan Final *Most Livable City Index* (MLCI/Indeks Kota Layak Huni) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), terdapat 28 kriteria penilaian yang mengindikasikan tingkat kelayakhunian sebuah kota, dan Provinsi DKI Jakarta memperoleh skor 71,3 dengan 5 indeks tertinggi yaitu pada fasilitas peribadatan, Fasilitas Administrasi dan Pelayanan Publik Pemerintahan, Jaringan Telekomunikasi, Fasilitas Kesehatan dan Ketahanan Pangan. Sementara 5 indeks terendah yaitu berada pada Sektor Informal Kota, Perumahan, Keselamatan Kota, Perekonomian Kota dan Fasilitas Kesenian dan Budaya.

Tabel II-6
Capaian IKU Indeks Kota Layak Huni

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya regenerasi kota yang berketahtaan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	65	71.3	109.69%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan Laporan *Final Most Livable City Index* (MLCI/Indeks Kota Layak Huni) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), terdapat 28 kriteria penilaian yang mengindikasikan tingkat kelayakhunian sebuah kota, dan Jakarta mendapat skor 71,3 dengan 5 indeks tertinggi yaitu pada fasilitas peribadatan, Fasilitas Administrasi dan Pelayanan Publik Pemerintahan, Jaringan Telekomunikasi, Fasilitas Kesehatan dan Ketahanan Pangan. Sementara 5 indeks terendah yaitu berada pada Sektor Informal Kota, Perumahan, Keselamatan Kota, Perekonomian Kota dan Fasilitas Kesenian dan Budaya.

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berasal dari data MLCI yang diselenggarakan oleh IAP Tahun 2017 dan Jakarta mendapat skor 62,6 dari 28 kriteria. 5 aspek tertinggi yaitu ketercukupan pangan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan/pelayanan keagamaan, dan fasilitas kesehatan.



Sementara 5 aspek terendah yaitu Informasi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat, Fasilitas Pejalan Kaki, Sektor Informal Kota, Fasilitas Kesenian dan Kebudayaan, dan Transportasi.

Tabel II-7

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Indikator Indeks Kota Layak Huni

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target		
			2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya regenerasi kota yang berketahtaan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	65	71.3	66	67	68

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Program/Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahtaan dan Berkelanjutan, pada Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, antara lain :

1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
2. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
4. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penilaian capaian MLCI terbaru dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga tidak memakai APBD TA 2023. Adapun untuk APBD 2023 dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahtaan dan Berkelanjutan yang terkait bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp.9.648.699.838.225, dengan realisasi sebesar Rp.8.456.284.338.427,-.



Dalam pelaksanaan Penilaian MCLI dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga tidak berasal dari APBD 2023.

Berdasarkan Laporan *Final Most Livable City Index* (MLCI/Indeks Kota Layak Huni) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), rata-rata skor indeks kota layak huni di Indonesia adalah dengan skor 69. Jakarta termasuk dalam kategori berada di atas rata-rata skor nasional dan berada pada peringkat 14 dari 26 kota, namun masih berada di bawah Solo (nilai 77), Yogyakarta (nilai 75) dan Cirebon (nilai 74).

Prov/Kota	Indeks
Solo	77.1 poin
Yogyakarta	75.3 poin
Cirebon	74.4 poin
Magelang	73.4 poin
Semarang	73.3 poin
Kediri	72.5 poin
Mataram	72.2 poin
Pangkal Pinang	72.1 poin
DKI Jakarta	71.3 poin

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dalam mencapai capaian IKU ada beberapa sumber daya yang mendukung diantaranya :

1. koordinasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM terkait arahan kebijakan dalam rangka perwujudan Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan.
2. Koordinasi dan diskusi dengan ahli/pakar tata kota terkait pencapaian Kota Layak Huni.

Adapun kendala yang terjadi dalam pencapaian nilai Indeks kota layak huni yaitu masih kurang/rendahnya tingkat kemudahan memperoleh pekerjaan (skor 56), tingkat kemudahan menemukan sanggar kesenian (skor 59), frekuensi menikmati festival budaya (skor 58), frekuensi mengikuti musyawarah pembangunan (skor 56), tingkat kemudahan memiliki rumah (skor 50), tingkat persepsi kondisi lalu lintas/kemacetan (skor 53), dan frekuensi menggunakan angkutan umum (skor 55).



Berdasarkan 5 indeks terendah, diharapkan dalam perencanaan kedepannya dapat berfokus juga kepada Sektor Informal Kota, Perumahan, Keselamatan Kota, Perekonomian Kota dan Fasilitas Kesenian dan Budaya.

2) Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan

Indikator Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan merupakan pengukuran terhadap capaian 3 sub indikator layanan dasar perkotaan yaitu: 1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Provinsi; 2) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak; serta 3) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak.

Berdasarkan data hasil publikasi BPS yang dirilis pada tanggal 12 Desember 2023 (detail disampaikan terlampir), disampaikan capaian pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau menurut provinsi, yaitu sebesar 38,80 persen;
2. Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak, yaitu sebesar 99,42 persen; dan
3. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak, yaitu sebesar 93,50 persen.

Sehingga rata-rata realisasi ketiga sub indikator dimaksud yaitu sebesar 77,24 persen

Tabel II-8
Capaian IKU Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	69.06	77.24	131.61%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, adapun realisasi pada tahun 2023 berdasarkan data BPS sebesar 77.24 persen, dimana target pada dokumen Perjanjian kinerja sesuai dengan target RPD Tahun 2023-2026, adapun target pada tahun 2026 pada indikator yaitu 70.1.



Tabel II-9

Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Indikator Indeks Kota Layak Huni

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target		
			2023		2024	2025	2026
Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	69.06	77.24	69.56	69.84	70.1

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan indikator persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan melaksanakan beberapa program yaitu :

1. Program Pengembangan Perumahan (Hunian Layak)

Dilaksanakan dengan anggaran Rp.223.389.922.397 dengan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi adapun realisasinya 100.296.764.305 dengan capaian 44,89 persen.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Air Minum)

Dilaksanakan dengan anggaran APBD-P Rp.37.43 Miliar dengan realisasi sebesar Rp.22.71 Miliar dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota serta mempunyai rencana aksi KSD terdiri dari :

- Pembangunan sistem distribusi IPA Setu Babakan (segmen 1 s.d 4)
- Subsidi Air Bersih dan Verifikasi Pemberian Subsidi Air Bersih untuk Daerah Krisis Air dan Kepulauan Seribu
- Penerapan Zona Bebas Air Tanah dalam mendukung percepatan peningkatan layanan air bersih perpipaan
- Pemenuhan SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Air Limbah/Sanitasi)



Dilaksanakan dengan anggaran APBD-P Rp.482.75 miliar dengan realisasi sebesar Rp.382.85 miliar dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional dan Pengeolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota, dan terdapat juga beberapa rencana aksi yaitu :

- Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan SPALD
- Pembangunan JSS Zona 1
- Kolaborasi penyediaan layanan sanitasi dengan berbagai stakeholder
- Revitalisasi Tangki Septik (Subsidi)
- Pemenuhan SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan

Target nasional, SPM Pekerjaan Umum Sub Urusan air Minum dan sub urusan air limbah, 100 persen, realisasi air minum dan sanitasi layak tahun 2023, 96,64 persen.

Adapun beberapa kendala yang ada :

Air Minum :

- Kondisi daerah yang tidak memiliki sumber air baku dengan kuantitas dan kualitas air yang memadai untuk dijadikan sumber air minum sehingga bergantung/membutuhkan pasokan air dari daerah lain.
- Masih belum sinkronnya data terkait jumlah penduduk/rumah tangga dengan akses sanitasi layak.

Air Limbah/Sanitasi :

- Adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan SPALD skala permukiman.
- Adanya kekosongan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik yang menjadi instrumen/alat untuk mengikat dan memaksa masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- Kepadatan penduduk yang tinggi (>150 jiwa/ha) idealnya menggunakan SPALD Terpusat, namun biaya investasi pengembangan SPALD-T sangat mahal.



- Pengelolaan setempat/tangki septic yang dimiliki masyarakat belum dapat terinventarisir sepenuhnya sesuai dengan standar SNI.
- Belum optimalnya pemanfaatan SPALD yang sudah terbangun.

Adapun beberapa rencana yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian :

Hunian Layak :

Provinsi DKI Jakarta akan selalu berupaya dan melanjutkan dalam menyediaan Hunian Layak Bagi Seluruh Masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

- Air Minum :

- Rencana 100 persen cakupan air perpipaan di tahun 2030.
- Pembangunan dan pengembangan IPA komunal.
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pendampingan pembangunan SPAM Jatiluhur-Hilir (4000 Lps), SPAM Karian Serpong-Hilir (3200 Lps).

- Air Limbah/Sanitasi :

- Lanjutan pembangunan jaringan pipa air limbah JS DP (Jakarta Sewerage Development Project) Zona 1 Paket 5 dan Paket 6.
- Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman (sistem perpipaan dan interceptor).
- Peningkatan kapasitas Jumlah Sambungan Rumah (SR) dan Optimalisasi Jaringan Perpipaan.
- Pembangunan SPALD-Setempat.
- Penyiapan Kebijakan terkait Revitalisasi Tangki Septik.

3) Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik

Indikator Persentase Perjalanan Penduduk

Menggunakan Moda Transportasi Publik merupakan sasaran dari Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit. Indikator ini merupakan penggambaran besar prevalensi warga untuk menggunakan transportasi umum dalam pergerakannya.



Indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan total jumlah perjalanan dalam periode waktu tertentu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 mempunyai target Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik sebesar 18,78 persen yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Tabel II-10
Tabel Indikator Sasaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	18,78

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Realisasi Capaian nilai Persentase Perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik pada tahun 2023 mempunyai nilai Capaian sebesar 18,86 persen berdasarkan hasil perolehan jumlah perjalanan dengan angkutan umum sebesar 4.102.277 perjalanan/hari dan hasil perhitungan data lalu lintas tahun 2023 sebesar 21.750.860 perjalanan/hari.

Tabel II-11
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	18,78	18,86	100,43

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026



Adapun realisasi jumlah perjalanan penumpang angkutan umum sebanyak 12 moda pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II-12
Jumlah Perjalanan Harian dengan Angkutan Umum di DKI Jakarta
Tahun 2023

No	Jenis Angkutan Umum	Jumlah	Satuan
1.	Transjakarta	962.471	Perjalanan/hari
2.	KRL	863.513	Perjalanan/hari
3	MRT	123.293	Perjalanan/hari
4.	LRT Jakarta	4.363	Perjalanan/hari
5.	LRT Jabodetabek	17.515	Perjalanan/hari
6.	Railink	5.377	Perjalanan/hari
7.	Bus/Angkot reguler	213.849	Perjalanan/hari
8.	Ojek (Online)	1.131.227	Perjalanan/hari
9.	Taxi Bajaj	152.176	Perjalanan/hari
10.	ASK	584.640	Perjalanan/hari
11.	Kapal	3.701	Perjalanan/hari
12.	Bus Sekolah	40.152	Perjalanan/hari
Jumlah perjalanan dengan angkutan umum		4.102.277	Perjalanan/hari

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan data perbandingan antara jumlah perjalanan menggunakan 12 moda angkutan umum dengan jumlah perjalanan per hari pada tahun 2023, maka persentase jumlah perjalanan yang menggunakan angkutan umum di DKI Jakarta pada tahun 2023 sebesar 18,86 persen.

Sasaran Indikator kinerja utama persentase jumlah perjalanan dengan angkutan umum di DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Tabel II-13
Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target		
			2023	2024	2025	2026	
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	18.78	18.68	20.97	21.87	23.01

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan target pada tabel di atas, target akhir untuk persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik sebesar 23,01 persen.



Adapun capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum pada tahun 2023 sebesar 18,86 persen. Selisih capaian untuk mencapai target akhir sebesar 4,15 persen sehingga diperlukan peningkatan kinerja dalam implementasi strategi manajemen kebutuhan lalu lintas (*Transport Demand Management*).

Sehubungan dengan capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum Tahun 2023, ada beberapa program yang dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan capaian tersebut terdiri dari :

Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

INDIKATOR	NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Percentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.896.396.371.874	4.482.475.291.477	91,55%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.739.689.768.144	4.349.304.463.879	91,76%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	225.975.348	159.483.449	70,58%
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	101.139.585.552	84.570.224.513	83,62%
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan	45.258.010.000	38.641.199.030	85,38%
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	5.330.101.086	5.261.633.976	98,72%
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	4.141.931.744	4.098.629.282	98,95%
	2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	161.776.674.760	153.900.618.204	95,13%
	3	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8.065.061.458	7.084.482.032	87,84%
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	149.931.716.725	143.464.935.346	95,69%
	3	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	3.779.896.577	3.351.200.826	88,66%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	3.308.124.275	2.512.135.232	75,94%
		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	3.308.124.275	2.512.135.232	75,94%



INDIKATOR	NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	77.286.342.069	49.493.544.684	64,04%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.945.736.001	19.679.654.427	73,03%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.673.252.044	17.733.289.085	51,14%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.667.354.024	12.080.601.172	77,11%
		TOTAL	5.138.156.512.978	4.687.941.932.249	91,24%

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Realisasi anggaran dalam program penunjang persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik tahun 2023 terlaksana sebesar Rp.4.687.941.932.249 dari total pagu anggaran sebesar Rp.5.138.156.512.978, atau capaian sebesar 91,24 persen dengan efisiensi sebesar 8,33 persen dari nilai total pagu anggaran.

Selain program di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang menunjang pencapaian indikator tersebut, seperti KSD nomor 2 Penanganan Kemacetan dan 8 Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan, dengan renaksi sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengoperasian Sarana Angkutan Umum Massal Berbasis Rel;
2. Peningkatan Fasilitas dan Layanan Transportasi Terintegrasi;
3. Pengembangan Transit Oriented Development (TOD);
4. Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya.

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) di atas telah dilaksanakan dan hasilnya mencapai target yang ditetapkan dalam KSD guna mendorong pencapaian indikator persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik.

Secara nasional, penggunaan angkutan umum di Indonesia mengalami peningkatan pada masing-masing moda perjalanan. Jumlah angkutan udara domestik pada periode Januari-Agustus 2023 sebesar 41,6 juta orang dan jumlah penumpang internasional sebesar 9,9 juta orang, meningkat sebesar 22,46 persen dan 212,55 persen dari tahun 2022 (BPS, 2023).



Adapun jumlah penumpang angkutan laut mencapai 13,2 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 11,81 persen dari tahun sebelumnya dan jumlah penumpang angkutan kereta api sebesar 238,5 juta orang, atau naik 42,63 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh beberapa institusi, persentase penggunaan angkutan umum di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 12,25 persen sedangkan 71,65 persen dari responden menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda utama perjalanan (Statista, 2024).

Secara umum capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik tahun 2023 telah tercapai karena koordinasi dan kolaborasi antar *stakeholder* yang baik serta adanya komitmen bersama untuk mewujudkan peningkatan penggunaan moda angkutan umum di DKI Jakarta. Selain itu, implementasi strategi integrasi antar moda, seperti integrasi layanan, integrasi tarif, dan fisik juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target penggunaan angkutan umum, yaitu adanya layanan *feeder* di beberapa titik simpul transportasi, penataan kawasan stasiun, integrasi tarif antar moda, dan peningkatan infrastruktur *skywalk/jembatan penghubung* antar titik simpul yang memudahkan perjalanan pengguna angkutan umum sehingga aspek kenyamanan dan kemudahan dapat terpenuhi yang dapat meningkatkan penggunaan moda angkutan umum.

Adapun penggunaan angkutan umum masih didominasi oleh angkutan *online*. Harapan mendatang transportasi publik dapat lebih berperan sebagai moda utama perjalanan dengan meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat. Beberapa kendala, seperti aspek keandalan, contohnya *headway* yang tidak selalu sesuai pada moda angkutan massal berbasis jalan karena lajur masih bersinggungan dengan kendaraan lain, keterbatasan lahan sehingga kenyamanan pada titik simpul tidak dapat optimal. Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan persentase penggunaan angkutan publik Tahun 2023 antara lain:



Tabel II-14
Faktor Keberhasilan Penggunaan Angkutan Umum

No	Faktor	Kegiatan
1.	Koordinasi antar stakeholder yang intensif	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum massal (BRT, MRT, LRT) secara berkala; - Pembahasan Rencana pengembangan angkutan massal MRT East - West - Pembahasan LRT Velodrome - Manggarai - Penandatanganan perjanjian kerja sama e-ticketing angkutan perairan
2.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada layanan angkutan umum	Pengawasan pelaksanaan SPM pada Transjakarta, MRT, LRT
3.	Dukungan Pengoperasian angkutan umum massal	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan feeder dan prasarana lalu lintas pada pengoperasian layanan angkutan umum baru, seperti Kereta Cepat, LRT Jabodebek - Penyiapan kantong parkir atau park&ride pada area titik simpul angkutan umum
4.	Perluasan layanan angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Uji coba layanan Transjakarta pada Bandara Soekarno Hatta - penambahan jam operasional layanan angkutan umum pada acara-acara besar (event musik, tahun baru, dll)
5.	Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peluncuran fitur Pay As You Go pada aplikasi Jaklingko - integrasi LRT Jabodebek - Pembangunan Jembatan Penyeberangan di Stasiun KRL - Pemasangan prasarana lalu lintas pada simpul transportasi terintegrasi (Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Duren Kalibata, Stasiun Klender, Stasiun Cikini) - Aplikasi JaketBoat
6.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan fasilitas Terminal Kalideres - Modernisasi Terminal Kampung Rambutan - Peningkatan fasilitas dermaga pelabuhan di Kepulauan Seribu - Inspeksi Keselamatan (<i>Ramp Check</i>) pada Bus-Bus AKAP
7.	Inklusivitas dalam transportasi umum	Keberpihakan pada disabilitas dengan pemberian kartu khusus disabilitas bagi penyandang disabilitas dan berhak mendapatkan tarif gratis pada Transjakarta

Sumber : Biro Perekonominan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Dalam upaya mencapai target perjalanan menggunakan transportasi publik, terdapat tantangan yang dihadapi sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang menjadi tantangan optimalisasi penggunaan perjalanan menggunakan transportasi publik tersebut antara lain:

Tabel II-15
Faktor Penghambat Penggunaan Angkutan Umum

No	Kendala	Rekomendasi/Mitigasi
1.	Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi	diperlukan kebijakan disincentif penggunaan kendaraan pribadi
2.	Keterbatasan lahan dalam pengembangan dan peningkatan prasarana angkutan umum	koordinasi dan penyesuaian desain

Sumber : Biro Perekonominan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023



Beberapa strategi praktik yang sesuai untuk keberhasilan penggunaan transportasi publik, adalah sosialisasi dan komunikasi publik secara konsisten. Selain itu, secara proaktif merencanakan layanan, dan fokus terhadap kelompok pengguna tertentu seperti pekerja, komunitas dan kesetaraan sosial serta memperkuat aspek keselamatan (APTA, 2023). Upaya lain adalah dengan memanfaatkan peluang untuk memperluas jumlah penumpang angkutan umum dan terus mengikuti perubahan. Guna meningkatkan persentase perjalanan dengan menggunakan angkutan umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

Tabel II-16
Tabel Rencana Aksi Penggunaan Angkutan Umum

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2024
1	Pemberian subsidi Transjakarta	penambahan armada dan penambahan jumlah pelanggan
2	Pemberian subsidi MRT	rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
3	Pemberian subsidi LRT	rencana pola operasi dan penambahan jumlah pelanggan
4	Pelayanan Angkutan Bus Sekolah	rencana pola operasi dan penambahan jumlah penumpang
5	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum Provinsi DKI Jakarta	Pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum
6	Komunikasi publik	Sosialisasi dan Kampanye penggunaan transportasi publik
7	Peningkatan dan pengembangan Angkutan Perairan	<ul style="list-style-type: none">- kajian untuk mengoptimalkan kelembagaan layanan pergerakan angkutan perairan agar lebih fleksibel dan adaptif.- pengadaan kapal angkutan perairan
8	Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Bus	Pemeliharaan Terminal Tipe A dan Terminal Tipe B
9	Pengembangan Angkutan Umum Massal	<ul style="list-style-type: none">- program pembentukan Perda RITJ- Dukungan Pembangunan LRT Velodrome - Manggarai- Pengadaan Lahan MRT Fase 2
10	Peningkatan pelabuhan dan dermaga di wilayah DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi Gedung Pelabuhan Pulau Tidung- Revitalisasi Pelabuhan Untung Jawa- Pendalaman Kolam Labuh dan Alur Masuk Sudinhub Kab. P. Seribu- Pemeliharaan Gedung Pelabuhan Muara Angke

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023



4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Penghitungan IKLH dilakukan melalui agregasi terhadap empat komponen pembentuk indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut) yang telah dibobot. Bobot dari masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar.

Rumus yang digunakan untuk penghitungan IKLH adalah:

$$\text{IKLH} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

Keterangan:

IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

IKAL = Indeks Kualitas Air Laut.

1. Perhitungan nilai IKA diperoleh dari data hasil pemantauan Kualitas Air Sungai dan hasil pemantauan Kualitas Air Waduk/Danau/Situ yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran kualitas air sungai yang dilakukan sebanyak 8 parameter yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecal coli, Total Fosfat, dan Nitrat. Sedangkan pengukuran kualitas air Waduk/Danau/Situ dilakukan sebanyak 10 parameter yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecalcoli, Total Fosfat, Kecerahan, klorofil-q, Total nitrogen.
2. Perhitungan nilai IKU diperoleh dari data pengukuran kualitas udara dengan menggunakan metode Passive Sampler dengan memasang alat di 5 Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah. Pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan sebanyak 2 parameter yaitu SO₂ dan NO₂.



3. Perhitungan nilai IKAL diperoleh dari data hasil pemantauan Kualitas Air Laut dan Muara Teluk Jakarta yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Pengukuran kualitas air laut sebanyak 5 parameter yaitu : TSS, DO, N-NH₃, Orthoposfat dan Minyak Lemak.
4. Perhitungan nilai IKTL diperoleh dari data spasial dan non-spasial. Data spasial yang digunakan antara lain dari berbagai peta resmi di jakartasatu.jakarta.go.id dan hasil pengolahan citra satelit resolusi tinggi wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data non-spasial diperoleh dari data kawasan hutan dan data kawasan hutan produksi yang tertuang dalam SK MenKLHK No.452lMenlhk-Setjen/2015 serta berbagai SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tentang Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun capaian pada indikator kinerja utama yaitu :

Tabel II-17
Capaian IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54.93	54.57	99.34%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, adapun realisasi pada tahun 2023 sebesar 54.97 dengan capaian 99.34 persen, dimana target pada dokumen Perjanjian kinerja yaitu 54.93 sesuai dengan target RPD Tahun 2023-2026, adapun target pada tahun 2026 pada indikator yaitu 56.43.

Tabel II-18
Target RPD Indikator “Indeks Kota Layak Huni”

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target		
			2023	2024	2025	2026	
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54.93	54.97	55.43	55.93	56.43

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, KSD Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan dan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.

Alokasi Anggaran perhitungan IKLH dan pemantauan kualitas air, udara serta pengelolaan SPKU dan laboratorium Sebesar Rp.44.405.412.159 dengan Realisasi Rp.43.019.124.540.

Dalam mencapai capaian IKLH ada beberapa sumber daya yang mendukung diantaranya :

1. konsultasi teknis dengan KLHK RI Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait dengan pelaksanaan penyusunan IKLH
2. koordinasi dengan SKPD terkait data hasil pemantauan
3. monitoring pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, air laut dan tutupan lahan
4. peningkatan kapasitas terkait pengambilan dan pengujian sampel air dan udara
5. expose hasil IKLH ke OPD dan stakeholder terkait

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2A21 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, rumusan perhitungan IKLH dilakukan dengan agregasi terhadap 4 (empat) komponen pembentuk indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 34 persen, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot sebesar 42,8 persen, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLT) bobotnya sebesar 13,3 persen dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan bobot sebesar 9,9 persen.

Adapun beberapa kendala yang terjadi yaitu terdiri dari :

1. Kebijakan penataan ruang khususnya area bantaran dan sempadan sungai.
2. Beban pencemar dari limbah domestik rumah tangga.



3. Minimnya upaya pengendalian pencemaran air baik program ataupun kebijakan pengendalian pencemaran sungai lintas sectoral.
4. Rendahnya curah hujan akibat *fenomena el nino*.
5. Rendahnya curah hujan akibat *fenomena el nino*.
6. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
7. Kebijakan penataan ruang yaitu minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan hutan konservasi.
8. Diperlukan OPD lain sebagai pengampu khususnya untuk IKA dikarenakan dominasi beban pencemar dari limbah domestik yang sebagian besar tugas dan fungsinya berada di Dinas Sumber Daya Air, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup hanya melaksanakan pemantauan kualitas sungai dan pengawasan pada kegiatan/usaha.
9. Tidak adanya kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi hulu sungai-sungai di Jakarta sedangkan pemulihan kualitas sungai memerlukan penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir serta koordinasi yang kuat dengan Lembaga pengelola Daerah Aliran Sungai yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Lembaga Pengelola Koridor Sungai Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Adapun Tindak lanjut untuk pencapaian Target IKLH pada Tahun 2024 yaitu akan dilakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait metodologi, pengambilan sampel dan rumusan perhitungan nilai.

5) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 guna guna tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon pada penurunan emisi gas rumah kaca mengalami penurunan Nilai persentase yang menggambarkan penurunan emisi GRK dari nilai baseline-nya setelah dilakukan perhitungan emisi GRK dari aksi mitigasi pada sektor Energi, Limbah, AFOLU (*Agriculture, Forestry and Other Land Use*), dan IPPU (*Industrial Processes and Product Use*).



1. Inventarisasi emisi GRK untuk direct emission merujuk *Guidelines Intergovernmental Panel on Climate Change 2006* (IPCC 2006 GL), dimana penghitungan CO₂ menggunakan pendekatan Tier-2 sedangkan CH₄ dan N₂O menggunakan pendekatan Tier-1. Pusdatin ESDM, dalam hal ini Lemigas dan Tekmira telah menetapkan faktor emisi lokal (Tier 2) untuk gas karbon dioksida pada beberapa jenis bahan bakar (BBM, batubara dan gas).
2. Perhitungan inventarisasi emisi GRK di sektor IPPU didapatkan dari adanya penggunaan bahan baku selama proses produksi di industri yang menghasilkan gas rumah kaca. Selain itu, penggunaan produk (misalnya pelumas, paraffin, wax dan sebagainya) selama proses produksi di industri juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Terbentuknya gas di kedua kondisi tersebut dikategorikan sebagai bagian dari emisi GRK di sektor IPPU. Sedangkan penggunaan bahan bakar selama proses produksi di industri dikategorikan sebagai bagian dari emisi GRK di sektor energi. Pemisahan ini harus jelas agar penghitungan emisi GRK dilakukan agar tidak terjadi double counting.
3. Berdasarkan pedoman IPCC 2006, kategori peternakan (3A) dibagi ke dalam sub-kategori: fermentasi enterik (3A1) dan pengelolaan kotoran ternak (3A2). Data-data yang digunakan dalam proses kuantifikasi yang dilakukan yaitu bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Metodologi estimasi emisi dari sub-sektor peternakan.
4. Tingkat emisi GRK sektor limbah bergantung jumlah limbah yang dibuang/diolah, karakteristik limbah, dan proses pengolahan/ pembuangan limbah. Perhitungan GRK berdasarkan metodologi dalam panduan IPCC 2006 dengan menggunakan metode FOD (*First Order Decay*). Namun ada beberapa parameter yang menggunakan parameter lokal, diantaranya komposisi sampah dan kandungan bahan kering (*dry matter content*).



Pada tahun 2023 tingkat persentase penurunan emisi gas rumah kaca mengalami penurunan yaitu sebesar 25.4 persen, dimana target pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yaitu 19.3 persen.

Adapun capaian pada indikator kinerja utama yaitu :

Tabel II-19
Capaian IKU Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya pemulihian ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	19.3	25.4	131.61%

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, adapun pada tahun 2022 belum dijadikan target, sehingga realisasi pada tahun 2023 sebesar 25.4 dengan capaian 131.61 persen tidak dapat diperbandingkan, indikator tersebut memiliki target pada dokumen Perjanjian kinerja yaitu 19.3 sesuai dengan target RPD Tahun 2023-2026, adapun target pada tahun 2026 pada indikator yaitu 22.3.

Tabel II-20
Target RPD Indikator “Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca”

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target		
			2023	2024	2025	2026	
Tercapainya pemulihian ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	19.3	25.4	20	20.5	22.3

Sumber : Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 mempunyai program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, selain program tersebut ada beberapa rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan dan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim.



Alokasi Anggaran untuk Perhitungan Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Rp.1.982.121.782 dengan realisasi Rp.1.975.469.477 dengan efisiensi anggaran sebesar 0,34 persen.

Target NDC dipandang dapat memicu pengembangan investasi hijau di Indonesia, di mana target tanpa syarat secara nasional dapat tercapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 17.2 persen pada sektor kehutanan, 11 persen pada sektor energi, 0.32 persen pada sektor pertanian, 0.10 persen pada sektor industri, dan 0.38 persen pada sektor limbah.

Pada penurunan emisi gas rumah kaca terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih sulitnya mendapatkan data primer yang diampu oleh pengampu data Perangkat Daerah.

Kedepannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengarus-utama-kan target GRK 2030 dan 2050, DKI Jakarta berupaya memasukkan indikator penurunan GRK dalam perencanaan-perencanaan daerah jangka pendek, menengah maupun panjang. Melalui kegiatan inventarisasi dan pelaporan penurunan emisi GRK yang dilakukan tahun ini, telah dilakukan proyeksi tingkat emisi GRK dan penurunan emisi GRK periode 2023-2030 yang merupakan bagian dari hasil proyeksi target 2030 dan NZE 2050.

6) Indeks Resiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana adalah menghitung kemungkinan terjadinya bencana semakin kecil nilai IRB maka semakin kecil nilai terjadinya bencana. Tujuan dari IRB adalah untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sehingga IRB merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan Risiko Bencana yang ada dan dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lainnya.



Terdapat 7 Prioritas pada pencapaian Indeks Ketahanan Daerah yaitu :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Indeks Resiko Bencana diperoleh dengan menghitung beberapa komponen penilaian yaitu :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI
1	Bahaya (<i>Hazard</i>)
2	Kerentanan (<i>Vulnerability</i>)
3	Kapasitas (<i>Capacity</i>)

Rumus Indeks Risiko Bencana

$$\text{Resiko} = \frac{\text{Hazard} \text{ (bahaya)} \times \text{Vulnerability} \text{ (Kerentanan)}}{\text{Capacity} \text{ (Kapasitas)}}$$

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) memiliki luas wilayah 1.671,83 km². DKI Jakarta memiliki struktur geologi yang terdiri dari endapan Pleistocene yang terdapat di +50 m di bawah permukaan tanah, sementara kondisi topografinya terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 m dpl. Sekitar 40 persen wilayah Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada pada 1-1,5 m di bawah muka laut pasang. Secara klimatologi cuaca di Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam, dimana pada bulan Januari umumnya terjadi curah hujan tertinggi dan terendah pada bulan Juli dan Agustus.

Pada tahun 2022 Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat 3 jenis bencana alam yang dominan terjadi di DKI Jakarta adalah banjir, puting beliung dan tanah longsor.



Indeks Resiko Bencana Tahun 2022 adalah 62,58. berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, sedangkan pada tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks risiko sebesar 61,31 (sedang).

Adapun capaian pada indikator kinerja utama yaitu :

Tabel II-21
Capaian IKU Indeks Resiko Bencana

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Resiko Bencana	Indeks	60,12	61,31	104,09%

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan Indeks IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 yaitu sebesar 1,27 dari tahun sebelumnya yaitu 62,58 (tetap dalam kategori sedang).

Tabel II-22
Target RPD Indikator Indeks Resiko Bencana

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target		
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Resiko Bencana	Indeks	60.21	62.58	59.66	59.16	58.72

Sumber : BPBD Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	IRB 2023
Kepulauan Seribu	47,47
Jakarta Selatan	51,05
Jakarta Timur	73,46
Jakarta Pusat	55,67
Jakarta Barat	69,53
Jakarta Utara	70,69

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2023

Sehubungan dengan capaian nilai IRBI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ada beberapa Instansi terkait yang terlibat dalam pengisian indikator Ketahanan Daerah yaitu :

Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Sumber Daya Air	PLN
Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Dinas Kesehatan	BUMD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pendidikan	DKPKP
Dinas Komunikasi dan Informatika	NGO	Biro PLH
Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	PMI	Polda Metro
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geografi	Satuan Polisi PP	PDAM
Dinas Cipta Karya	Dinas Pemuda dan Olahraga	BBWSCC
Sekretariat Dewan DPRD	Bulog	Dinas Sosial
Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023



Adapun program yang mendukung pencapaian Indikator Indeks Resiko Bencana yaitu :

Tabel II-23
Indikator Indeks Resiko Bencana

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Nilai IKD dan IRB	BPBD	Program Penanggulangan Bencana	33,755,570,666	32,974,602,614	97%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 mencapai realisasi sebesar Rp.32.974.602.614dari total pagu anggaran sebesar Rp.33.755.570.666 Atau capaian sebesar 97 persen dari nilai total anggaran.

Berikut capaian Nilai/Predikat IRBI seluruh Pemda tahun 2022 oleh BNPB secara Nasional diumumkan pada Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia 2023 :

NO	PROVINSI	IRBI 2021	IRBI 2022	STATUS	CAPAIAN
1	ACEH	149.99	149.10	▼	TURUN
2	BALI	124.19	123.98	▼	TURUN
3	BANTEN	149.08	144.51	▼	TURUN
4	BENGKULU	157.14	155.35	▼	TURUN
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	126.34	119.56	▼	TURUN
6	DKI JAKARTA	60.43	62.58	▲	NAIK
7	GORONTALO	123.06	120.61	▼	TURUN
8	JAMBI	135.32	133.49	▼	TURUN
9	JAWA BARAT	134.94	131.62	▼	TURUN
10	JAWA TENGAH	125.73	115.38	▼	TURUN
11	JAWA TIMUR	125.86	121.70	▼	TURUN
12	KALIMANTAN BARAT	138.69	136.72	▼	TURUN
13	KALIMANTAN SELATAN	141.66	128.81	▼	TURUN
14	KALIMANTAN TENGAH	130.75	123.56	▼	TURUN
15	KALIMANTAN TIMUR	153.28	146.67	▼	TURUN
16	KALIMANTAN UTARA	157.03	157.47	▲	NAIK
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	160.98	158.52	▼	TURUN
18	KEPULAUAN RIAU	114.71	110.93	▼	TURUN
19	LAMPUNG	145.42	142.55	▼	TURUN
20	MALUKU	160.84	162.47	▲	NAIK
21	MALUKU UTARA	146.63	149.22	▲	NAIK
22	NUSA TENGGARA BARAT	122.33	119.83	▼	TURUN
23	NUSA TENGGARA TIMUR	142.52	139.23	▼	TURUN
24	PAPUA	122.38	122.15	▼	TURUN
25	PAPUA BARAT	146.46	146.77	▲	NAIK
26	RIAU	142.41	141.26	▼	TURUN
27	SULAWESI BARAT	164.85	165.23	▲	NAIK
28	SULAWESI SELATAN	154.87	150.07	▼	TURUN
29	SULAWESI TENGAH	146.07	143.44	▼	TURUN
30	SULAWESI TENGGARA	157.90	155.79	▼	TURUN
31	SULAWESI UTARA	133.29	129.62	▼	TURUN
32	SUMATERA BARAT	147.36	144.39	▼	TURUN
33	SUMATERA SELATAN	137.31	132.99	▼	TURUN
34	SUMATERA UTARA	143.83	142.51	▼	TURUN



Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan nilai/predikat Indeks Resiko Bencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 antara lain:

No	Hambatan	Tindak Lanjut
1	Melibatkan SKPD terkait sehingga memerlukan koordinasi lebih intensif dalam pemenuhan 71 indikator. Hal ini memperlambat terselesaikannya pemenuhan target	Mengadakan Focus Group Discussion, Rapat koordinasi antar SKPD
2	Proses pembuatan kebijakan yang membutuhkan waktu lama	Lebih proaktif dalam proses penyusunan kebijakan (Proses Perbal)

Guna memperbaiki nilai/predikat IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2024	Target
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana 2023 - 2027	Peraturan Gubernur Rencana Penanggulangan Bencana 2023 - 2027 sampai pengesahannya
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyusunan RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana)	RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana)
3	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pembentukan Peta Kelurahan Tangguh Bencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD 2022	Peta kapasitas penanggulangan bencana tingkat Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta
4	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Pelaksanaan Bimbingan Teknis JITUPASNA untuk Aparatur	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA)
5	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Penyusunan Dokumen Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Dokumen Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi

b. Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tujuan kedua ini yaitu ‘Perekonomian Inklusif’, ‘Daya Saing’, ‘Penghidupan Layak’ dan ‘Pemerataan Kesejahteraan’. Perekonomian inklusif merupakan suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Jakarta. Kata kunci ini kemudian diturunkan menjadi sasaran ‘Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah’.



Kata kunci selanjutnya yaitu terkait daya saing, mengadopsi global *competitiveness index* berupa kapasitas dan potensi Jakarta bersaing dengan kota global lainnya untuk menarik talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Kata kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran V-327 ‘Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi’. Kata kunci berikutnya terkait penghidupan layak adalah suatu kondisi dimana tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha, maupun resiliensi tenaga kerja terhadap tantangan. Untuk mencapai hal tersebut dirumuskan sasaran ‘Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja’. Kata kunci terakhir yaitu pemerataan kesejahteraan, hal ini sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan golongan miskin dan rentan, sehingga dirumuskan sasaran ‘Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial’. Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel II-24
Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan	Indeks pembangunan ekonomi inklusif	Indeks	7.69	7,93	103,12
Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	Laju pertumbuhan ekonomi	persen	5.40 – 6.20	4,96	91,85
Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	8.21	6,53	120
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan	Tingkat kemiskinan	Persen	4.13	4,44	93,02
	Rasio gini	Koefisien	0.411	0,431	95,36
	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	1.06	0,57	185,96
Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks daya saing daerah	Persen	3.96	4,01	101,26

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023



Berikut analisis capaian indikator masing-masing sebagai berikut :

1) Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan tujuan/sasaran dari Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 mempunyai target Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yaitu 7,69 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai data terakhir pada tahun 2021 oleh Bappenas mempunyai nilai Capaian sebesar 7,93 poin atau kategori memuaskan.

Tabel II-25
Capaian IKU Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,69	7,93 (tahun 2021)	103.12%

Sumber : Biro Perekonominan Setda Provinsi DKI Jakarta

Keterangan : *data realisasi tahun 2021, untuk data tahun 2022 dan 2023 belum dirilis Bappenas

Adapun beberapa rincian dari beberapa komponen penilaian yang dinilai yaitu :

Tabel II-26
Tabel komponen penilaian

NO	PILAR YANG DINILAI	BOBOT	NILAI*
1	Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian	50%	7,58
2	Pemerataan, Pendapatan, dan Pengurangan Kemiskinan	25%	7,54
3	Perluasan Akses dan Kesempatan	25%	9,11
	Nilai Hasil Keseluruhan	100%	7,93
	Skala Nilai Hasil Keseluruhan		Memuaskan

Sumber : Biro Perekonominan Setda Provinsi DKI Jakarta

Ket : Skala 1-3 = kurang memuaskan, 4-7 = memuaskan, 8-0 = sangat memuaskan

* menggunakan data terakhir tahun 2021, untuk data tahun 2022 dan 2023 belum dirilis Bappenas



Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Tabel II-27
Target RPD Indikator “Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif”

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target		
			2023	2024	2025	2026	
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif <i>Keterangan: *data tahun 2021, untuk data tahun 2022 dan 2023 belum dirilis Bappenas</i>	Indeks	7,69	7,93	7,81	7,93	8,04

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, adapun realisasi pada tahun 2021 sebesar 7.93 jika dibandingkan dengan target memiliki capaian 103.12 persen, dimana target tahun 2023 pada dokumen Perjanjian kinerja yaitu 7.69 sesuai dengan target RPD Tahun 2023-2026, adapun target pada tahun 2026 pada indikator yaitu 8.04.

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif terpenuhi namun masih menggunakan data terakhir Bappenas tahun 2021.

Berikut capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif peringkat 1 s.d. 3 tertinggi seluruh Indonesia serta capaian nasional tahun 2021 oleh Bappenas yang dirilis pada website Bappenas:

Tabel II-28
Tabel Perbandingan Nasional

No	Pemda	Indeks 2021*
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	7,93
2	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	6,66
3	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	6,49
	Indonesia	6

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Sumber : website Bappenas (<https://inklusif.bappenas.go.id/data>)

Keterangan : * menggunakan data terakhir tahun 2021, untuk data tahun 2022 dan 2023 belum dirilis Bappenas



terkait dengan efisiensi sumber daya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa diantaranya :

1. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait dengan pembangunan ekonomi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta
2. Meningkatkan kompetensi SDM untuk pelaksanaan program pengembangan UMKM Jakarta Entrepreneur, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta reformasi perizinan untuk investasi.

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 antara lain :

No	Indikator Keberhasilan	Keterangan																								
1	<p>Pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, pilar 3. Perluasan Akses dan Kesempatan, dan sub-Pilar 3.1. Kapabilitas Manusia. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Salah satu indikator yang digunakan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian Angka Harapan Lama Sekolah DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 13,33 tahun.</p> <p>The chart shows HLS values for seven locations: Kota Jakarta Timur (14.06), Kota Jakarta Selatan (13.66), Provinsi DKI Jakarta (13.33), Kota Jakarta Pusat (13.29), Kota Jakarta Barat (12.87), Kota Jakarta Utara (12.67), and Kabupaten Kep. Seribu (12.66). The legend indicates 2023 is orange and 2020 is teal.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kabupaten/Kota</th><th>2023</th><th>2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kota Jakarta Timur</td><td>14,06</td><td>13,86</td></tr><tr><td>Kota Jakarta Selatan</td><td>13,66</td><td>13,33</td></tr><tr><td>Provinsi DKI Jakarta</td><td>13,33</td><td>12,98</td></tr><tr><td>Kota Jakarta Pusat</td><td>13,29</td><td>13,25</td></tr><tr><td>Kota Jakarta Barat</td><td>12,87</td><td>12,80</td></tr><tr><td>Kota Jakarta Utara</td><td>12,67</td><td>12,63</td></tr><tr><td>Kabupaten Kep. Seribu</td><td>12,66</td><td>12,57</td></tr></tbody></table> <p>Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Gambar 5.4 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi DKI Jakarta menurut Kabupaten/Kota (tahun), 2020 dan 2023</p> <p>Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2023 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023)</p>	Kabupaten/Kota	2023	2020	Kota Jakarta Timur	14,06	13,86	Kota Jakarta Selatan	13,66	13,33	Provinsi DKI Jakarta	13,33	12,98	Kota Jakarta Pusat	13,29	13,25	Kota Jakarta Barat	12,87	12,80	Kota Jakarta Utara	12,67	12,63	Kabupaten Kep. Seribu	12,66	12,57	<ul style="list-style-type: none">• Pada tahun 2023, anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan di Kota Jakarta Timur diharapkan dapat bersekolah selama 14,06 tahun atau diperkirakan dapat masuk ke Diploma Dua, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu, anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 12,66 tahun atau diperkirakan dapat mencapai Diploma Satu.• Kelima kota memiliki HLS yang cukup merata. Pada tahun 2023, Disparitas HLS antara Kota Jakarta Timur dengan HLS tertinggi dan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan HLS terendah sekitar 1,40 tahun.• Dilihat dari sisi pertumbuhan HLS, selama periode tahun 2020-2023 berturut-turut dari yang tertinggi adalah Kota Jakarta Selatan sebesar 2,48 persen diikuti oleh Kota Jakarta Timur sebesar 1,44 persen, Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 0,72 persen, Kota Jakarta Barat sebesar 0,55 persen, Kota Jakarta Utara sebesar 0,32 persen, Kota Jakarta Pusat sebesar 0,30 persen.
Kabupaten/Kota	2023	2020																								
Kota Jakarta Timur	14,06	13,86																								
Kota Jakarta Selatan	13,66	13,33																								
Provinsi DKI Jakarta	13,33	12,98																								
Kota Jakarta Pusat	13,29	13,25																								
Kota Jakarta Barat	12,87	12,80																								
Kota Jakarta Utara	12,67	12,63																								
Kabupaten Kep. Seribu	12,66	12,57																								



Adapun kendala yang ada :

- Data tidak tersedia sejak tahun 2022. Data terakhir dirilis oleh Bappenas untuk Indeks tahun 2021 (<https://inklusif.bappenas.go.id/data>)

Guna meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Rencana Aksi					Target
		No	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Penanggung jawab KSD	No	Sub Kegiatan Strategia Daerah (Sub KSD)	
1	Peningkatan pendapatan melalui program pengembangan UMKM Jakarta Entrepreneur, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta reformasi perizinan untuk investasi	3 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi	Asisten Perekonomian dan Keuangan	5	Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif	6 Penerapan strategi <i>Grand Design</i> Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Penguatan Wisata, Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibition (MICE) Pengembangan kawasan destinasi Jakarta (Kota Tua, Kepulauan Seribu, Monas, Anjungan dan Graha Wisata, serta destinasi wisata urban)	
2	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat antara lain melalui pemberian bantuan sosial	4 Penanggulangan Kemiskinan	Asisten Kesejahteraan Rakyat	10	Percepatan penanggulangan kemiskinan	6 Peningkatan produktivitas penduduk miskin Pelaksanaan perlindungan sosial universal dan adaptif Integrasi data sasaran dalam rangka konvergensi program lintas sektor	
5	Penurunan Stunting	5 Penurunan Stunting	Asisten Kesejahteraan Rakyat	12	Penghormatan, pelindungan, dan pementahan hak penyandang disabilitas	6 Peningkatan ketahanan pangan, keamanan pangan, jaminan ketersediaan pangan serta kestabilan harga pangan	

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu tujuan dari Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 mempunyai target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 persen – 6,2 persen yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.



Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai data terakhir BPS sampai dengan triwulan IV-2023 mempunyai nilai capaian sebesar 4,96 persen (*cummulative-to-cummulative*).

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,4-6,2	4,96

Sumber : Biro Perekonominan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi dirilis Badan Pusat Statistik, dengan rumus perhitungan:

$$r = \{Y_{it} \times 100 / Y_{i(t-1)}\} - 100.$$

Keterangan : r = Laju pertumbuhan ekonomi (%)

Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)

$Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)

Berdasarkan dengan data realisasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi triwulan I s.d. triwulan IV-2023 **belum mencapai target**.

Sasaran Indikator kinerja utama pada Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Tabel II-29

Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I s.d. Triwulan IV-2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,40 – 6,20	5,40 – 6,20	5,60 – 6,40	5,60 – 6,40

Sumber : Biro Perekonominan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023



Berdasarkan dengan target pada tabel di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi pada target akhir 2023 mempunyai Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,40 persen – 6,20 persen. Sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta menurut data terakhir BPS periode triwulan I-2023 s.d. triwulan IV-2023 sebesar 4,96 persen belum tercapai.

Berikut capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi yang dirilis terakhir oleh BPS pada Februari 2024 adalah:

No	Pertumbuhan Ekonomi	Jakarta	Indonesia
1	YoY (Year-on-Year) Triwulan IV-2023	4,85%	5,04%
2	C to C (Cummulative-to-Cummulative) Triwulan I s.d. Triwulan IV-2023	4,96%	5,05%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 antara lain:

Indikator Keberhasilan	Keterangan																					
a. Konsumsi (C): Kenaikan pendapatan dan gaji masyarakat akan meningkatkan daya beli, mendorong konsumsi, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. b. Investasi (I): Kondisi ekonomi yang stabil, kebijakan pro-investasi, dan prediksi kestabilan politik dapat meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis, mendorong investasi perusahaan. c. Pengeluaran Pemerintah (G): Penggunaan APBD dalam hal belanja publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan dapat memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. d. Net Ekspor (X-M): Kemampuan Pemerintah untuk bersaing di pasar internasional dapat memengaruhi neraca perdagangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.	<p>DISTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELOUARAN <i>Triwulan III-2023 (y-on-y)</i></p> <p>The chart displays the distribution of PDRB by expenditure category and the corresponding year-over-year growth rate (% y-on-y). The categories include Konsumsi Rumah Tangga, PMTB, Konsumsi Pemerintah, Konsumsi LNPR, Ekspor, and Impor. The growth rates range from -15.87% for Konsumsi Pemerintah to 6.27% for Konsumsi Rumah Tangga.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Distribusi (%)</th><th>Pertumbuhan (% y-on-y)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Konsumsi Rumah Tangga</td><td>62.74</td><td>5.49</td></tr><tr><td>PMTB</td><td>35.11</td><td>4.17</td></tr><tr><td>Konsumsi Pemerintah</td><td>10.53</td><td>-15.87</td></tr><tr><td>Konsumsi LNPR</td><td>2.14</td><td>6.27</td></tr><tr><td>Ekspor</td><td>67.96</td><td>5.82</td></tr><tr><td>Impor</td><td>-79.36</td><td>2.82</td></tr></tbody></table>	Kategori	Distribusi (%)	Pertumbuhan (% y-on-y)	Konsumsi Rumah Tangga	62.74	5.49	PMTB	35.11	4.17	Konsumsi Pemerintah	10.53	-15.87	Konsumsi LNPR	2.14	6.27	Ekspor	67.96	5.82	Impor	-79.36	2.82
Kategori	Distribusi (%)	Pertumbuhan (% y-on-y)																				
Konsumsi Rumah Tangga	62.74	5.49																				
PMTB	35.11	4.17																				
Konsumsi Pemerintah	10.53	-15.87																				
Konsumsi LNPR	2.14	6.27																				
Ekspor	67.96	5.82																				
Impor	-79.36	2.82																				



Adapun beberapa kendala yang ada, yaitu :

No	Kendala	Keterangan
1	<p>Pertumbuhan ekonomi Jakarta belum mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 karena hal-hal diluar kendali Pemerintah Daerah, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Faktor geopolitik-ekonomi seperti berlangsungnya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan terbatasnya pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global, ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok yang berdampak kepada menurunnya volume perdagangan dunia, serta perang Israel dan Palestina. Pada akhirnya, proses pemulihan ekonomi global terhambat disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi oleh harga energi dan pangan dunia. Hal ini sesuai dengan <i>outlook</i> Bank Dunia (Januari 2024) bahwa pertumbuhan ekonomi dunia 2023 sebesar 2,6%, melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,0%.b. Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral khususnya di negara maju untuk mengatasi inflasi dengan menaikkan suku bunga, sehingga menarik aliran modal di negara berkembang. <i>The Federal Reserve/Bank Sentral Amerika</i> telah menaikkan <i>Federal Funds Rate</i> (suku bunga acuan) beberapa kali dari 4,5% pada awal tahun 2023 menjadi 5,5% di akhir tahun 2023 yang turut memengaruhi <i>BI rate</i> dan penyaluran kredit di sektor riil.c. Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data BPS (2024), pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 sebesar 5,05% (ctc), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 sebesar 5,64% (ctc). Perlambatan ini salah satunya karena masyarakat menengah ke atas menahan belanja yang bersifat konsumsi dan lebih banyak menabung, hal ini di dukung data Otoritas Jasa Keuangan (2023) yang menunjukkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Jakarta untuk periode Januari – November 2023 sebesar Rp46.744 triliun, meningkat dibandingkan periode Januari – November 2022 sebesar Rp43.527 triliun.d. Perlambatan pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasarkan data BPS (2024), pertumbuhan PMTB pada tahun 2023 sebesar 3,89% (ctc), melambat dibandingkan pertumbuhan PMTB pada tahun 2022 sebesar 4,51% (ctc). Perlambatan ini mungkin disebabkan sebagian pelaku usaha masih bersikap <i>wait and see</i> untuk melakukan investasi terkait adanya Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2024.e. Terjadi kontraksi pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam struktur PDRB tahun 2023. Berdasarkan data BPS (2024), pertumbuhan konsumsi pemerintah turun sebesar -3,86% secara ctc dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.f. Pertumbuhan ekspor serta impor barang dan jasa Jakarta mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data BPS (2024), ekspor 2023 tumbuh sebesar 7,67% (ctc), melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 12,59% (ctc). Impor 2023 tumbuh sebesar 5,25% (ctc), melambat dibandingkan impor tahun 2022 sebesar 8,44% (ctc). Penurunan nilai ekspor dan impor mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang dipengaruhi oleh situasi perekonomian global yang melambat dan penuh ketidakpastian.g. Faktor-faktor dari point (a) sampai (f) tersebut turut memengaruhi capaian perekonomian nasional dan Jakarta yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022	Data dirangkum dari berbagai sumber seperti Laporan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023, Otoritas Jasa Keuangan (2023), Badan Pusat Statistik (2024), dan Bank Dunia (2024)

Terkait dengan penggunaan sumber daya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan beberapa hal yaitu :

1. Pelatihan peningkatan SDM layanan transportasi terintegrasi.
2. peningkatan sarana dan prasarana fasilitas transportasi terintegrasi.



Guna meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Rencana Aksi					Target		
1	Peningkatan pendapatan melalui program pengembangan UMKM Jakarta Enterpreneur, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta reformasi perizinan untuk investasi	No	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Penanggung jawab KSD	No	Sub Kegiatan Strategis Daerah (Sub KSD)	Ruang Lingkup		
		1	2	3	4	5	6		
		3 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi	Asisten Perkonomian dan Keuangan	5 Pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif	6	Penerapan strategi <i>Grand Design</i> Ekonomi Kreatif DKI Jakarta			
						Pengembangan Wisata, Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibition (MICE)			
						Pengembangan kawasan destinasi Jakarta (Kota Tua, Kepulauan Seribu, Monas, Anjungan dan Graha Wisata, serta destinasi wisata urban)			
						Pembinaan dan pengembangan UMKM			
						Peningkatan jumlah UMKM naik kelas			
						Peningkatan pelayanan dan penyederhanaan proses perizinan serta fasilitasi investasi			
						Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
						Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan layanan online pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah			
						Peningkatan penerimaan dari pemanfaatan aset daerah, BUMD, BLUD dan lain-lain PAD yang sah			
2	Pembangunan dan pengoperasian sarana angkutan umum massal berbasis rel serta peningkatan fasilitas dan layanan transportasi terintegrasi	No	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Penanggung jawab KSD	No	Sub Kegiatan Strategis Daerah (Sub KSD)	Ruang Lingkup		
		1	2	3	4	5	6		
		2 Percepatan Pemanangan Kemacetan	Asisten Perkonomian dan Keuangan	3 Pembangunan dan pengoperasian sarana angkutan umum massal berbasis rel	4	Pembangunan MRT Jakarta:			
						1. MRT Fase 2A (Bundaran HI-Kota)			
						2. MRT Fase 2B (Kota-Ancol Barat)			
						3. MRT East-West Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria)			
						4. Perencanaan pembangunan MRT Patmawati-TMII			
						Pembangunan LRT Jakarta:			
						1. Fase 1B (Velodrome-Manggarai)			
						2. Pulo Gebang-Joglo			
						Pembangunan fasilitas integrasi moda pada simpul transportasi (antara lain penataan Kawasan stasiun KA, revitalisasi halte Transjakarta, terminal, dan lainnya)			

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) merupakan sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mempunyai target Tingkat Pengangguran terbuka (periode Agustus) sebesar 8.21 persen yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.



Realisasi capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (periode Agustus) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebesar 6,53 persen berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 63/11/31/TH.XXV, 06 November 2023 tentang Keadaan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Agustus 2023 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, penurunan TPT dipengaruhi oleh :

1. Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Meningkatnya TKK menunjukkan bahwa terjadi penyerapan atau penambahan tenaga kerja yang bekerja, dimana penduduk bekerja bertambah sebanyak 197 ribu orang dengan penambahan tenaga kerja terbesar pada sektor industri pengolahan (61 ribu orang); sektor pendidikan (60 ribu orang); serta sektor administrasi pemerintahan (49 ribu orang).
2. Terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang didominasi oleh pekerja terdidik dengan latar belakang pendidikan SMA/K/sederajat ke atas pada sektor formal.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	Persen	8,21	6,53	120,46

Sumber : Dinas Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Sasaran Indikator kinerja utama pada Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	Persen	8.21	7.91	7.61	7.31

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta,2023

Apabila dibandingkan dengan target RPD Tahun 2023, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka telah melebih dari target yang diharapkan dengan nilai TPT Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,53 persen. Tentunya, kinerja ini perlu dipertahankan dan diharapkan upaya-upaya dalam penurunan Tingkat pengangguran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi kondisi pengangguran di DKI Jakarta dengan baik, dan serta menurunkan Tingkat pengangguran pada periode berikutnya.



Dalam mendukung pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) Tahun 2023, terdapat beberapa program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Adapun program-program tersebut antara lain:

INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN 2023	REALISASI s/d 31 DES 2023	CAPAIAN ANGGARAN
Tingkat pengangguran terbuka (periode agustus) tahun 2023	Program perencanaan tenaga kerja	96.900.000	96.900.000	100%
	Program penempatan tenaga kerja	41.057.513.856	40.211.148.899	97,94%
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	101.065.159.084	98.037.272.956	97%
	Program hubungan industrial	2.191.998.980	2.188.577.000	99,84%
	Program pengawasan ketenagakerjaan	3.014.144.763	2.984.245.135	99,01%
Total		147.425.716.683	143.518.143.990	97,35%

Terdapat beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023, antara lain:

1. Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri, dimana kegiatan ini dilaksanakan dan dianggarkan oleh 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 4.000 orang
2. Pameran Bursa Kerja (*Job Fair*) dan Bazar, dimana Kegiatan ini dilaksanakan dan dianggarkan oleh 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 15 kali kegiatan
3. Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan dan MTU, Kegiatan ini dilaksanakan dan dianggarkan oleh 7 Pusat Pelatihan Kerja Volume Total Peserta Pelatihan 7.562 Orang (Terdiri atas Pelatihan Reguler 5.190 Orang dan Volume Pelatihan MTU 2.372)
4. Pelatihan SIM A, dimana kegiatan ini dilaksanakan dan dianggarkan oleh 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 6.000 orang



5. Pelatihan Satuan Pengamanan, dimana kegiatan ini dilaksanakan dan dianggarkan oleh 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 500 orang
6. Pelatihan Kejuruan di Pulau Seribu, dimana kegiatan ini dilaksanakan dan dianggarkan oleh Sudin TKTE Pulau Seribu dengan output pencari kerja yang dilatih kejuruan Bahasa Inggris, Operator Komputer, Tata Boga, Komputer Akuntansi, Teknisi Komputer, Teknik Pendingin, Teknik Kelistrikan, Tata Busana, dan Desain Grafis dengan total volume 230 Orang
7. Pelatihan Peningkatan Produktivitas, kegiatan ini dilaksanakan dan dianggarkan oleh UPT Pusat Pembangan Produktivitas Daerah dengan volume 700 orang

Berikut capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (periode Agustus) Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan Berita Resmi Statistik No. 77/11/Th.XXVI, 6 November 2023 tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023.

Gambar II-1
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) Tahun 2023

Provinsi	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Ags 2021-Ags 2022 (persen poin)	Perubahan Ags 2022-Ags 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,30	6,17	6,03	-0,13	-0,14
Sumatera Utara	6,33	6,16	5,89	-0,17	-0,27
Sumatera Barat	6,52	6,28	5,94	-0,24	-0,34
Riau	4,42	4,37	4,23	-0,05	-0,14
Jambi	5,09	4,59	4,53	-0,50	-0,06
Sumatera Selatan	4,98	4,63	4,11	-0,35	-0,52
Bengkulu	3,65	3,59	3,42	-0,06	-0,17
Lampung	4,69	4,52	4,23	-0,17	-0,29
Kepulauan Bangka Belitung	5,03	4,77	4,56	-0,26	-0,21
Kepulauan Riau	9,91	8,23	6,80	-1,68	-1,43
DKI Jakarta	8,50	7,18	6,53	-1,32	-0,65
Jawa Barat	9,82	8,31	7,44	-1,51	-0,87
Jawa Tengah	5,95	5,57	5,13	-0,38	-0,44
D.I. Yogyakarta	4,56	4,06	3,69	-0,50	-0,37
Jawa Timur	5,74	5,49	4,88	-0,25	-0,61
Banten	8,98	8,09	7,52	-0,89	-0,57
Bali	5,37	4,80	2,69	-0,57	-2,11
Nusa Tenggara Barat	3,01	2,89	2,80	-0,12	-0,09
Nusa Tenggara Timur	3,77	3,54	3,14	-0,23	-0,40
Kalimantan Barat	5,82	5,11	5,05	-0,71	-0,06
Kalimantan Tengah	4,53	4,26	4,10	-0,27	-0,16
Kalimantan Selatan	4,95	4,74	4,31	-0,21	-0,43
Kalimantan Timur	6,83	5,71	5,31	-1,12	-0,40
Kalimantan Utara	4,58	4,33	4,01	-0,25	-0,32
Sulawesi Utara	7,06	6,61	6,10	-0,45	-0,51
Sulawesi Tengah	3,75	3,00	2,95	-0,75	-0,05
Sulawesi Selatan	5,72	4,51	4,33	-1,21	-0,18
Sulawesi Tenggara	3,92	3,36	3,15	-0,56	-0,21
Gorontalo	3,01	2,58	3,06	-0,43	0,48
Sulawesi Barat	3,13	2,34	2,27	-0,79	-0,07
Maluku	6,93	6,88	6,31	-0,05	-0,57
Maluku Utara	4,71	3,98	4,31	-0,73	0,33
Papua Barat	5,84	5,37	5,38	-0,47	0,01
Papua	3,33	2,83	2,67	-0,50	-0,16

Sumber : Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021, Agustus 2022 dan Agustus 2023



Berdasarkan data Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi dan nasional, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta (6,53 persen) masih diatas nilai rata-rata Tingkat Pengangguran Nasional (5,32 persen). Namun demikian, Perkembangan penurunan TPT Provinsi DKI Jakarta menunjukan tren positif dengan perubahan Tingkat pengangguran yang cukup besar dari tahun ke tahun.

Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) Tahun 2023 masih dihadapkan pada berbagai kendala/hambatan yang diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Kendala/Hambatan
Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	<ul style="list-style-type: none">Berkurangnya Pegawai Fungsional tertentu diantaranya Fungsional Pengantar Kerja, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Instruktur di Pusat Pelatihan Kerja yang berpotensi menghambat kinerja untuk mendukung Penanganan Tingkat Pengangguran TerbukaLaju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja.Ketidak-sesuaian keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan;Informasi kesempatan kerja belum sepenuhnya diketahui oleh para pencari kerja.Masih relatif rendahnya tingkat produktivitas pencari kerja serta kurangnya pemahaman kewirausahaan.

Sebagai upaya untuk terus menurunkan tingkat pengangguran terbuka serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka merealisasikan target, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) yakni :

1. Pengembangan pelatihan baru yakni Pelatihan SIM B1 pada wilayah Jakarta Utara dan Jakarta sebagai pilot project. Ke depan, akan dilakukan spesialisasi pelatihan-pelatihan keterampilan kerja kejuruan pada Pusat-pusat pelatihan kerja sehingga terdapat *comparative advantage* pada setiap lokasi pusat pelatihan kerja.
2. Dari segi infrastruktur, telah dirancang dan dianggarkan pembangunan *Command Centre* serta *website* yang akan digunakan untuk memonitor data pencari kerja dan peserta pelatihan agar dapat lebih efektif dalam proses penyaluran pencari kerja tersebut menjadi pekerja. Pembentukan website diharapkan mempermudah perluasan informasi pasar kerja (lowongan kerja) kepada pencari kerja serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja.



3. Pemutakhiran sarana dan prasarana pelatihan kerja sehingga kualitas peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri.
4. Pelaksanaan pameran bursa kerja/*job fair*.
5. Pelaksanaan dan peningkatan kolaborasi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) tingkat SMK dan Perguruan Tinggi sebagai salah satu Lembaga penempatan di tingkat satuan Pendidikan dalam bentuk pemberian pembinaan kelembagaan, jejaring pasar kerja yang langsung mempertemukan dengan perusahaan, mendukung terselenggaranya *job fair* di BKK dengan memfasilitasi Perusahaan yang ikut serta
6. Peningkatan kolaborasi dengan pelaksana penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri dalam bentuk pemberian pembinaan terkait penempatan tenaga kerja, kerja sama rekrutmen bersama, walk in interview, penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan, hingga penempatan lulusan PPKD ke mitra LPTKS baik untuk tenaga kerja umum maupun tenaga kerja penyandang disabilitas.
7. Pemberian pembinaan kepada calon pencari kerja untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja mulai dari penggalian potensi minat dan bakat, pembuatan CV, surat lamaran, tips interview, informasi ketenagakerjaan terkini, informasi jabatan dan sebagainya dengan mengajak langsung tim dari Kementerian Ketenagakerjaan RI serta dari sektor swasta.
8. Peningkatan perluasan kesempatan kerja di sektor informal melalui program Tenaga Kerja Mandiri (Jakpreneur) yang memberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas seperti pembinaan pembangunan merk produk, manajemen produksi, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan.



4) Tingkat Kemiskinan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai indikator penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 berdasarkan berita resmi statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Nomor 42/07/31/Th.XXV, 17 Juli 2023 mempunyai target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 4,13.

Tabel II-30
Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan	Persen	4,13	4,44	93,02

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Setelah tiga tahun mengalami kenaikan terdampak COVID-19, akhirnya angka kemiskinan Maret 2023 di Jakarta turun. Angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen poin atau turun 0,09 persen poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen. Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin. Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Setelah tiga tahun mengalami kenaikan terdampak COVID-19, akhirnya angka kemiskinan Maret 2023 di Jakarta turun. Angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen poin atau turun 0,09 persen poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen. Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin. Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di sisi lain, secara konsisten bantuan sosial yang dikucurkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi telah berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin. Data Susenas Maret 2023 mencatat, sebanyak 80,15 persen masyarakat miskin telah mendapatkan akses pada perlindungan dan jaminan sosial. Hal ini sangat meringankan beban pengeluaran konsumsi khususnya pada kelompok masyarakat miskin.



Grafik II-7
Tren Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Selama Periode 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Sasaran Indikator kinerja utama pada tingkat kemiskinan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan	Persen	4,13	3,79	3,25	2,91

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pemerintah Provinsi dalam menurunkan tingkat kemiskinan memiliki beberapa program yang mendukung diantaranya adalah :

INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Kemiskinan , Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	20.618.627.309	19.348.907.650	93,84%
	DINAS SOSIAL	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	20.618.627.309	19.348.907.650	93,84%
	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	879.230.078.598	867.737.699.831	98,69%
	DINAS SOSIAL	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	118.000.000	118.000.000	100%
	DINAS SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	879.112.078.598	867.619.699.831	98,69%



INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	30.179.574.862	29.863.930.775	98,95%
	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	30.179.574.862	29.863.930.775	98,95%
	TOTAL		930.028.280.769	916.950.538.256	98,59%

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem tahun 2023 mencapai realisasi sebesar Rp.916.950.538.256 dari total pagu anggaran sebesar Rp.930.028.280.769 Atau capaian sebesar 98,59 persen dengan capaian efisiensi sebesar 1,41 persen dari nilai total anggaran.

Selain didukung dengan program-program yang ada diatas, terdapat beberapa rencana aksi yaitu :

1. Pemberian Intervensi Sosial berupa Perlindungan Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan
2. Pemenuhan SPM Urusan Wajib Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
3. Penyediaan aplikasi berbasis web basis data untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Pelaksanaan sinergi pemberdayaan bagi Warga Binaan Sosial berusia produktif dan potensial dengan Program Pelatihan Keterampilan Kerja dan/atau Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
5. Penyediaan Akses Data Anggota Keluarga Penerima Bantuan Sosial yang Berusia Produktif dan/atau Potensial untuk Memperoleh Intervensi Sosial dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan capaian Rasi Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.



Terkait dengan penggunaan sumber daya guna anggaran, teknologi, sarana dan SDM guna menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem yaitu selaras dengan rencana yang telah dilakukan diatas.

Berdasarkan dengan data BPS pusat:

Tabel II-31
Perbandingan secara nasional Indikator Tingkat Kemiskinan

38 Provinsi	Percentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)					
	Perkotaan		Perdesaan		Jumlah	
	2023		2023		2023	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
ACEH	9.79	-	16.92	-	14.45	-
SUMATERA UTARA	8.23	-	8.03	-	8.15	-
SUMATERA BARAT	4.67	-	7.23	-	5.95	-
RIAU	6.73	-	6.65	-	6.68	-
JAMBI	10.19	-	6.28	-	7.58	-
SUMATERA SELATAN	11.07	-	12.21	-	11.78	-
BENGKULU	14.21	-	13.96	-	14.04	-
LAMPUNG	8.02	-	12.65	-	11.11	-
KEP. BANGKA BELITUNG	3.54	-	5.85	-	4.52	-
KEP. RIAU	5.05	-	10.69	-	5.69	-
DKI JAKARTA	4.44	-	-	-	4.44	-
JAWA BARAT	7.19	-	9.3	-	7.62	-
JAWA TENGAH	9.78	-	11.87	-	10.77	-
DI YOGYAKARTA	10.27	-	13.36	-	11.04	-
JAWA TIMUR	7.5	-	13.98	-	10.35	-
BANTEN	6	-	6.79	-	6.17	-
BALI	3.77	-	5.5	-	4.25	-
NUSA TENGGARA BARAT	13.76	-	13.95	-	13.85	-
NUSA TENGGARA TIMUR	9.12	-	23.76	-	19.96	-
KALIMANTAN BARAT	4.44	-	8.07	-	6.71	-
KALIMANTAN TENGAH	4.78	-	5.35	-	5.11	-
KALIMANTAN SELATAN	3.84	-	4.72	-	4.29	-
KALIMANTAN TIMUR	4.68	-	9.28	-	6.11	-
KALIMANTAN UTARA	5.18	-	8.74	-	6.45	-
SULAWESI UTARA	4.91	-	10.38	-	7.38	-
SULAWESI TENGAH	8.9	-	14.09	-	12.41	-
SULAWESI SELATAN	5.01	-	11.91	-	8.7	-
SULAWESI TENGGARA	7.4	-	13.94	-	11.43	-



38 Provinsi	Percentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)					
	Perkotaan		Perdesaan		Jumlah	
	2023		2023		2023	
	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
GORONTALO	4.47	-	23.73	-	15.15	-
SULAWESI BARAT	9.08	-	12.1	-	11.49	-
MALUKU	5.49	-	24.64	-	16.42	-
MALUKU UTARA	6.23	-	6.55	-	6.46	-
PAPUA BARAT	8.23	-	29.2	-	20.49	-
PAPUA	5.68	-	34.49	-	26.03	-
INDONESIA	7.29	-	12.22	-	9.36	-

Sumber : BPS.go.id, 2023

Adapun beberapa faktor yang membuat tingkat penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. Perekonomian Jakarta terus menunjukkan geliat positif. Hal ini didorong dengan sudah kembali mulai normalnya aktivitas masyarakat setelah diberhentikannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat COVID-19
2. hampir semua lapangan usaha yang ada di Jakarta terlihat adanya pertumbuhan yang positif. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 17,43 persen, diikuti sektor Jasa Lainnya sebesar 13,16 persen serta sektor Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 8,27 persen.
3. Tingginya pertumbuhan di sektor Transportasi dan Pergudangan disebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat yang langsung berdampak pada meningkatnya aktivitas transportasi di Jakarta
4. meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata
5. Banyaknya pengunjung tempat rekreasi dan event hiburan di Jakarta seperti konser musik pada awal tahun 2023 berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel di Jakarta, serta aktivitas makan minum di restoran



6. berkurangnya jumlah pengangguran yang juga berarti bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 0,43 persen.
7. pemerintah provinsi telah melakukan upaya untuk menahan inflasi dengan operasi pasar, bantuan pangan dan bantuan sosial lainnya agar masyarakat miskin tetap mampu membeli barang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Adapun masih terdapat beberapa permasalahan yang masih menjadi “PR” yaitu masih terjadinya ketimpangan pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,431 atau naik 0,019.

5) Rasio Gini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mempunyai target koefisien 0,411. Adapun indikator gini ratio ini merupakan salah satu indikator dari sasaran “berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial”.

Sekalipun jumlah penduduk miskin sudah berkurang pada periode ini, namun masih menyisakan “PR” ketimpangan yang semakin meningkat. Artinya gap antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas justru semakin tinggi.

Tabel II-32
Capaian Indikator Rasio Gini

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Rasio Gini	Persen	4,13	4,44	93,02

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Naiknya tingkat ketimpangan pada periode Maret 2023 ini juga sekaligus dibarengi dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Angka ketimpangan pada periode ini sebesar 0,431 atau naik 0,019 persen poin dibandingkan kondisi September 2022.



Grafik II-8
Gini Ratio DKI Jakarta dan Nasional, 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada periode ini, distribusi penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah turun 0,60 persen poin menjadi 16,39 persen dibandingkan periode September 2022. Walaupun demikian, menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan menengah.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin.

Pada periode September 2022 s.d Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks kedalaman kemiskinan naik 0,013 yang berarti jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan. Dan indeks keparahan kemiskinan juga naik sebesar 0,017 yang berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin tinggi.

Pada pelaksanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program yang sama guna mengurangi ketimpangan kemiskinan (gini ratio), tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem). Adapun program tersebut ada pada pembahasan capaian tingkat kemiskinan.



Sasaran Indikator kinerja utama pada Gini Ratio pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Gini Ratio	Koefisien	0,411	0,410	0,410	0,409

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada Maret 2023 berdasarkan berita resmi statistik BPS pusat Nomor 48/07/Th.XXVI, 17 Juli 2023, provinsi dengan Gini Ratio tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 0,449. Sementara itu, provinsi dengan Gini Ratio terendah tercatat di Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,245 (Tabel 2). Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,388; terdapat empat provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (0,449), **DKI Jakarta (0,431)**, Jawa Barat (0,425), dan Gorontalo (0,417).

Gambar II-2
Gini Ratio menurut provinsi, Maret 2022 - Maret 2023

Provinsi	Maret 2022			September 2022			Maret 2023		
	(1) Kota	(2) Desa	(3) K+D	(5) Kota	(6) Desa	(7) K+D	(8) Kota	(9) Desa	(10) K+D
Aceh	0,348	0,272	0,311	0,327	0,252	0,291	0,318	0,265	0,296
Sumatera Utara	0,343	0,249	0,312	0,358	0,259	0,326	0,340	0,242	0,309
Sumatera Barat	0,329	0,247	0,300	0,316	0,243	0,292	0,305	0,232	0,280
Riau	0,363	0,282	0,326	0,350	0,293	0,323	0,369	0,274	0,324
Jambi	0,351	0,292	0,320	0,376	0,302	0,335	0,365	0,320	0,343
Sumatera Selatan	0,358	0,311	0,339	0,348	0,311	0,330	0,360	0,305	0,338
Bengkulu	0,370	0,262	0,315	0,371	0,264	0,315	0,386	0,283	0,333
Lampung	0,341	0,284	0,314	0,352	0,275	0,313	0,359	0,287	0,324
Bangka Belitung	0,248	0,206	0,236	0,263	0,222	0,255	0,265	0,202	0,245
Kepulauan Riau	0,342	0,247	0,342	0,328	0,264	0,325	0,339	0,248	0,340
DKI Jakarta	0,423	-	0,423	0,412	-	0,412	0,431	-	0,431
Jawa Barat	0,428	0,322	0,417	0,427	0,306	0,412	0,439	0,321	0,425
Jawa Tengah	0,404	0,322	0,374	0,392	0,326	0,366	0,399	0,318	0,369
DI Yogyakarta	0,446	0,332	0,439	0,468	0,342	0,459	0,453	0,362	0,449
Jawa Timur	0,388	0,323	0,371	0,381	0,322	0,365	0,404	0,337	0,387
Banten	0,367	0,287	0,363	0,384	0,266	0,377	0,372	0,256	0,368
Bali	0,371	0,294	0,363	0,371	0,282	0,362	0,367	0,290	0,362

Sumber : BPS.go.id, 2023

6) Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Merupakan indikator yang mulai dicantumkan dalam Metadata Indikator TPB/SDGs edisi II (dirilis oleh Bappenas pada September 2020). Indikator tersebut mengukur proporsi penduduk dengan pendapatan (pengukuran di tanah air masih menggunakan proksi pengeluaran).



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,57 persen, dimana realisasi tersebut berbanding dengan target yang ada pada dokumen Perjanjian kinerja tahun 2023 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yaitu :

Tabel II-33
Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan Ekstrem	Persen	1,06	0,57	185,96%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Sasaran Indikator kinerja utama pada tingkat kemiskinan ekstrem pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	1,06	0,88	0,83	0,68

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada pelaksanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program bersama guna mengurangi ketimpangan kemiskinan (gini ratio), tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem). Adapun program tersebut ada pada pembahasan capaian tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data BPS dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dari 18 provinsi tersebut, kemiskinan ekstrem paling rendah terdapat di Kalimantan Timur, sebesar 0,10 persen.

Sementara DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,57 persen di Timur Indonesia, Maluku Utara, juga telah tercatat memiliki masyarakat yang miskin ekstrem sebesar 0,67 persen.



BPS per bulan maret 2023 mengkategorikan kemiskinan ekstrem menggunakan US\$1,9 per hari yang diukur melalui paritas daya beli atau *purchasing power parity* (PPP). Standar tersebut setara dengan Rp.351,957.4 per kapita.

Berikut Daftar 18 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Ekstrem di bawah 1 Persen (Per Maret 2023)

1. Kalimantan Timur 0,10 persen
2. Bali 0,19 persen
3. Kepulauan Bangka Belitung 0,24 persen
4. Kalimantan Utara 0,34 persen
5. Kepulauan Riau 0,35 persen
6. Kalimantan Tengah 0,35 persen
7. Sumatera Barat 0,41 persen
8. Kalimantan Selatan 0,47 persen
- 9. DKI Jakarta 0,57 persen**
10. Riau 0,67 persen
11. Maluku Utara 0,67 persen
12. Sulawesi Barat 0,75 persen
13. Sumatera Utara 0,78 persen
14. Sulawesi Utara 0,78 persen
15. Jawa Barat 0,79 persen
16. Jambi 0,81 persen
17. Jawa Timur 0,82 persen
18. Kalimantan Barat 0,99 persen

7) Indeks Daya Saing Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menguatkan daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi mempunyai indikator Indeks Daya Saing Daerah menjadi Indikator sasaran pada dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh



sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) baru mengeluarkan IDSD Tahun 2022 yang dirilis pada oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan masih menunggu rilis hasil penilaian tahun 2023 yang direncakan akan dipublikasikan pada triwulan I tahun 2024, adapun pengukuran IDSD tahun 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *global competitiveness index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan *stakeholder global* untuk mengukur GCI bagi Indonesia.

Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Penyusunan IDSD 2022 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi.

Tabel II-34
Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,96	4,01 (Tahun 2022)	101,26%

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Realisasi pada tahun 2023 masih menunggu hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan akan dipublikasikan pada triwulan I tahun 2024.



Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Daya Saing Daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,96	3,98	4,01	4,03

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Gambar II-3
Skor IDSD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai program guna mendorong meningkatnya indikator Indeks Daya Saing Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu program penelitian dan pengembangan daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.787.711.433,- dengan realisasi anggaran sebesar 1.546.940.600,- dengan capaian 86,53 persen.

Adapun skor Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2022 diperbandingkan dengan beberapa provinsi dan nasional yaitu :



Tabel II-35
Indeks Daya Saing Daerah

Provinsi	Satuan	Nilai	Provinsi	Satuan	Nilai
Nasional	Indeks	3,26	NTB	Indeks	3.22
Aceh	Indeks	3.15	NTT	Indeks	3.20
Sumatera Utara	Indeks	3.24	Kalimantan Barat	Indeks	2.94
Sumatera Barat	Indeks	3.41	Kalimantan Tengah	Indeks	3.13
Riau	Indeks	3.16	Kalimantan Selatan	Indeks	3.14
Jambi	Indeks	2.99	Kalimantan Timur	Indeks	3.27
Sumatera Selatan	Indeks	3.06	Kalimantan Utara	Indeks	3.19
Bengkulu	Indeks	3.29	Sulawesi Utara	Indeks	3.15
Lampung	Indeks	3.02	Sulawesi Tengah	Indeks	3.23
Kep. Bangka Belitung	Indeks	3.04	Sulawesi Selatan	Indeks	3.35
Kep. Riau	Indeks	3.36	Sulawesi Tenggara	Indeks	3.30
DKI Jakarta	Indeks	4.01	Gorontalo	Indeks	3.15
Jawa Barat	Indeks	3.64	Sulawesi Barat	Indeks	3.10
Jawa Tengah	Indeks	3.63	Maluku	Indeks	3.22
DI Yogyakarta	Indeks	3.61	Maluku Utara	Indeks	3.36
Jawa Timur	Indeks	3.74	Papua Barat	Indeks	2.92
Banten	Indeks	3.62	Papua	Indeks	2.73
Bali	Indeks	3.39			

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional 2022 (cetakan pertama 2023)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan indikator indeks daya saing daerah di tahun ke depan perlu meningkatkan skor pada masing-masing pilar yaitu :

1. Infrastruktur
2. Pasar Produk

c. Tercapainya Pembangunan Manusia Madani Yang Berkesetaraan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tujuan ketiga ini yaitu ‘Pembangunan Manusia’, ‘Madani’, dan ‘Berkesetaraan’. Pembangunan manusia merupakan salah satu tujuan yang terpenting yang dapat menentukan kualitas hidup warga Jakarta. Kata kunci ini diturunkan ke dalam dua sasaran terkait pendidikan dan kesehatan yaitu ‘Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat’ dan ‘Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan’. Adapun terkait standar hidup layak dianggap sudah terwakili oleh tujuan kedua sehingga tidak dibuatkan sasaran tersendiri pada tujuan ketiga ini. Selanjutnya kata kunci madani merupakan penerjemahan dari konsep civil society yang bermakna sebuah tatanan masyarakat modern yang demokratis dalam berinteraksi di dunia yang semakin plural dan heterogen.



Dalam keadaan seperti ini masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan memiliki kesadaran dalam mewujudkan peradaban. Untuk itu dirumuskan sasaran ‘Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan masyarakat’. Kata kunci terakhir yaitu berkesetaraan merupakan suatu kondisi yang memastikan tidak adanya diskriminasi pembangunan berbasis gender, yang diwakili oleh sasaran ‘Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan *responsif gender*’.

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator yaitu :

Tabel II-36
Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,55	83,55	102,45
Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,14	12,39	97,98
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,21	75,81	103,5
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	13,7	9,2	149
Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,04	94,93	99,88
Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan kebhinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	76,82	82,13	106,91

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Predikat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tujuan dari Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan, pada Tahun 2023 mempunyai target nilai/predikat IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yaitu 81,55 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.



IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia, yang terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita). IPM diterbitkan oleh BPS dengan rumus perhitungan: $IPM = \sqrt{(I_{kesehatan}) \times (I_{pendidikan}) \times (I_{pengeluaran})} \times 100$. Capaian IPM dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah ($IPM < 60$), Sedang ($60 \leq IPM < 70$), Tinggi ($70 \leq IPM < 80$), dan Sangat tinggi ($IPM = 80$).

Realisasi Capaian indeks IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mempunyai nilai Capaian sebesar 83,55 poin berdasarkan Katalog: 4102002.31 ISSN 2746-606X Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Volume 5,2023 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dan Berita Resmi BPS No. 80/11/Th.XXVI, 15 November 2023.

Tabel II-37
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,55	83,55	102,45%

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Daya Saing Daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,55	81,77	81,99	82,11

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

(Katalog: 4102002.31 ISSN 2746-606X Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Volume 5,2023 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dan Berita Resmi BPS No. 80/11/Th.XXVI, 15 November 2023)

Nilai Komponen Pembentukan IPM yaitu :

No	Komponen	
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	75.81 Tahun
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.33 Tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah (PLS)	11.45 Tahun
4	Pengeluaran per KApita (PPP)	Rp.19.37 Juta
	Nilai IPM	83,55



Target indikator kinerja sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 untuk angka IPM tahun 2023 tumbuh sebesar 0,78 point dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 82,77, dari tiga nilai komponen pembentuk IPM DKI Jakarta tahun 2023 yaitu;

1. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) 75,81 tahun,
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,33 tahun,
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 11,45 tahun
4. dan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) Rp.19,37 juta,

Laju pertumbuhan IPM pada tahun 2023 ini kembali menguat. Penguatan ini didukung oleh pertumbuhan semua komponen pembentuknya yakni UHH, HLS RLS dan PPP.

Sasaran Indikator Kinerja utama pada Indeks Pembangunan Manusia pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks pembangunan manusia	Indeks	81,55	81,77	81,99	82,11

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Selama kurun waktu 2020-2023, IPM DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 81,92 dan meningkat 1,63 poin menjadi 83,55. Pada tahun 2023 atau tumbuh 1,99 persen selama 4 tahun terakhir. Jika kita lihat, selama kurun waktu 2020-2023 pertumbuhan IPM DKI Jakarta terus meningkat. Percepatan pertumbuhan terbesar pada tahun 2023, tumbuh sebesar 1,99 persen. Penguatan ini didukung oleh pertumbuhan semua komponen pembentuknya yakni UHH, HLS RLS dan PPP. Proses pemulihan.

Sehubungan dengan capaian nilai IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari : Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :



INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	3.854.736.064.225	2.676.191.092.123	69,43%
	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.906.931.512.295	2.811.710.970.235	96,7%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.226.371.230.102	1.190.673.817.594	97,1%
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	296.929.291	258.024.000	86,9%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	486.385.968	470.214.000	96,7%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.390.545.737.606	5.881.273.273.907,47	79,6%
TOTAL		15.379.367.859.487	12.560.577.391.859,50	81.67 %	

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai IPM tahun 2023 mencapai realisasi sebesar Rp.12.560.577.391.859,50,- dari total pagu anggaran sebesar Rp.15.379.367.859.487,- Atau capaian sebesar 81,67 persen dengan capaian efisiensi sebesar 18,33 persen dari nilai total anggaran.

Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebagai berikut :

1. KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan (SUB KSD : Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang Satuan Pendidikan dengan beberapa renaksi yaitu:



- Kampanye Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 Tahun sebelum SD
 - Evaluasi Implementasi Pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada Mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu
 - Peningkatan kualitas pemantauan penggunaan dana penerima KJP
 - Pemenuhan kewajiban pengembang diluar lahan perencanaan untuk sarana dan/atau prasarana pendidikan
 - Peningkatan keterserapan tamatan SMK melalui bekerja melanjutkan dan wirausaha (BMW)
 - Peningkatan jumlah pendidik profesional di semua jenjang
 - Pelaksanaan program Jakarta Sekolah Komunitas.
2. KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan (SUB KSD : Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terintegrasi.
- Pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang Anak Usia Dini di PAUD melalui PIKUMBANG
 - Integrasi rekam medis elektronik di RSUD/ RSKD Provinsi DKI Jakarta.
 - Skrining TBC HIV penyakit menular (TBC-HIV) dan penyakit tidak menular (hipertensi, DM, penyakit akibat asap rokok, obesitas, kanker) tahunan.
 - Perujukan warga sekolah terduga/ berisiko TBC-HIV
 - Implementasi registrasi online Jaksehat di RSUD/ RSKD
 - Implementasi registrasi online Jaksehat di Puskesmas
 - Persiapan program sister hospital dan stratifikasi layanan unggulan rumah sakit menjadi *Center of Excellence*.
 - Persiapan penguatan sistem rujukan yang terintegrasi
 - Persiapan penerapan sentralisasi fungsi (*Shared Service Center* dan *Center of Excellence*).
3. KSD Penurunan Stunting (SUB KSD : Percepatan Penurunan Stunting)
- Optimalisasi pemanfaatan buku rapor kesehatanku dalam memantau kesehatan anak usia sekolah dan remaja
 - Pemantauan minum tablet tambah daerah untuk siswi SMP dan SMA.



4. KSD Penangulangan Kemiskinan (SUB KSD : Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas
 - Penataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas
 - Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan nilai capaian IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Berikut capaian Nilai/Predikat IPM seluruh Pemda tahun 2023 oleh Katalog : 4102002.31 ISSN 2746-606X Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Volume 5,2023 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dan Berita Resmi BPS No.80/11/Th.XXVI,15 November 2023.

No	Pemda	Nilai	No	Pemda	Nilai
1	DKI Jakarta	83,55	6	Sumatera Barat	75,64
2	D.I. Yogyakarta	81,09	7	Sumatera Utara	75,13
3	Kepulauan Riau	79,08	8	Banten	75,77
4	Bali	78,01	9	Riau	74,95
5	Kalimantan Timur	78,2	10	Aceh	74,7

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan nilai/predikat IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 antara lain :

No	Faktor Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	<ul style="list-style-type: none">a. Pada tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan status universal health coverage (UHC) dengan cakupan 98,68%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 31 Rumah Sakit Umum/ Khusus Daerah, 44 Puskesmas di seluruh wilayah kecamatan, dan 292 puskesmas pembantu (Pustu) yang tersebar di 267 Kelurahan di Provinsi DKI Jakartab. Dalam rangka memperkuat sistem rujukan Kesehatan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk UPT Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) yang bertugas menyelenggarakan penanggulangan krisis kesehatan dan kegawatdaruratan kesehatan di Provinsi DKI Jakartac. Pengendalian faktor lingkungan dan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit dalam bentuk skrining penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan kepada seluruh masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	<ul style="list-style-type: none">a. Pemprov DKI Jakarta sendiri sejak tahun 2012 sudah menggulirkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai program untuk memperluas akses pendidikan dengan memberikan bantuan sosial biaya pendidikan kepada seluruh peserta didik baik yang bersekolah di satuan pendidikan negeri maupun swasta melalui KJP Plus



No	Faktor Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bantuan sosial pendidikan diperluas dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar masyarakat dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kedua program tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi anak untuk bersekolah, khususnya dari keluarga yang tidak mampu. c. Mendorong ketersediaan guru di semua satuan jenjang pendidikan negeri dan memberikan tambahan penghasilan bagi guru-guru di sekolah swasta menjadi pendorong peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan d. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi dan penambahan gedung sekolah terus dilakukan; selain itu untuk menjamin aksesibilitas ke sekolah telah disediakan moda transportasi dan bus sekolah gratis
3	Pengeluaran per Kapita (PPP)	Mendorong roda perekonomian dan memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat tidak mampu. Berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya Jakpreneur yang merupakan program pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) untuk menjaga daya beli pekerja Jakarta

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Guna memperbaiki nilai/predikat IPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Rencana Aksi 2024	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan KJP PLUS - Pemberian bantuan BPMS - Penyelenggaraan PPDB Bersama yang melibatkan sekolah swasta 	Membentuk Tim Penanganan Anak Putus Sekolah (ATS) yang melibatkan lintas sektor	
2	Sinkronisasi dan Integrasi Data Dasar Penduduk untuk Sasaran pelaksanaan program kesehatan	Menyusun Kegiatan Strategis Daerah terkait integrasi data data dasar penduduk	

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

2) Indeks Dimensi Pendidikan

Indeks Dimensi Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun, Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu

1. Harapan Lama Sekolah dan
2. Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan, Rata-rata Lama Sekolah (MYS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.



Tabel II-38
Capaian Indikator Indeks Dimensi Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,14	12,39	97,98%

Sumber : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Indeks Indikator Kinerja (Tujuan) Harapan Lama Sekolah/HLS yang memiliki sasaran Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran serta Indikator Kinerja (Sasaran) Rata-rata Lama Sekolah/RLS dengan sasaran Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan.

Realisasi Capaian nilai Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mempunyai nilai Capaian atas Indikator Kinerja (Tujuan) Harapan Lama Sekolah/HLS yang memiliki sasaran Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran serta Indikator Kinerja (Sasaran) Rata-rata Lama Sekolah/RLS dengan sasaran Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,09	13,33	101,83%
2	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,33	11,45	101,06%

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2023

Sasaran Indikator kinerja utama pada Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,09	13,09	13,13	13,15
2	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,33	11,21	11,23	11,25

Berdasarkan target pada tabel diatas Harapan Lama Sekolah (HLS) target pada tahun 2026 sebesar 13,15. Capaian HLS Tahun 2023 sebesar 13,33 lebih tinggi dari target tahun 2026 yaitu selisih 0.18, sehingga perlu ditingkatkan kembali target untuk tahun 2024 s.d 2026.



Sedangkan Indikator Kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) target pada tahun 2026 sebesar 11,25 dengan capaian tahun 2023 sebesar 11,45 lebih tinggi dari target tahun 2026 yaitu selisih 0.20, sehingga perlu ditingkatkan kembali target untuk tahun 2024 s.d 2026.

Berikut capaian Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023 Sebagai berikut :

No	Pemda	HLS	RLS
1	Pemerintah Provinsi DIY	15,66	9,83
2	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	13,38	8,11
3	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	13,33	11,45
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	12,86	8,83
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12,85	8,01
6	Nasional	13,15	8,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2023

Guna meningkatkan capaian IKU indeks dimensi pendidikan terdapat beberapa program yang mendukung diantaranya adalah :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks dimensi pendidikan	Dinas Pendidikan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	7.467.640.616.638	7.334.062.221.644	98,21%
	Dinas Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	9.494.541.170.405	8.871.086.830.994	93,43%
Jumlah			16.962.181.787.043	16.205.149.052.638	95,54%

Adapun salah satu kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama adalah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang perlu penanganan lintas sektor karena terdapat beberapa penyebab yang memang tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan. Adapun upaya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 antara lain :

1. Pemberian bantuan KJP PLUS
2. Pemberian bantuan BPMS
3. Penyelenggaran PPDB Bersama yang melibatkan sekolah swasta

Guna meningkatkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mempunyai rencana aksi untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) akan membentuk Tim Penanganan Anak Putus Sekolah (ATS) yang melibatkan lintas sektor.



3) Angka Harapan Hidup

Umur harapan hidup penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 telah melampaui umur harapan hidup nasional. Pada tahun 2021 angka umur harapan hidup di DKI Jakarta mencapai 73,01 tahun, sedangkan umur harapan hidup nasional pada tahun 2021 sebesar 71,57 tahun. Adapun angka harapan hidup standar nasional adalah 69 tahun (WHO, 2016). Hal ini bermakna kesehatan penduduk di DKI Jakarta telah melampaui standar nasional.

Sasaran strategis peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan memiliki indikator kinerja utama sasaran angka harapan hidup tahun 2023 dengan target sebesar 73,21.

Sasaran strategis peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan memiliki indikator sasaran angka harapan hidup tahun 2023 dengan target sebesar 73,21.

Tabel II-39
Capaian Indikator Angka Harapan Hidup

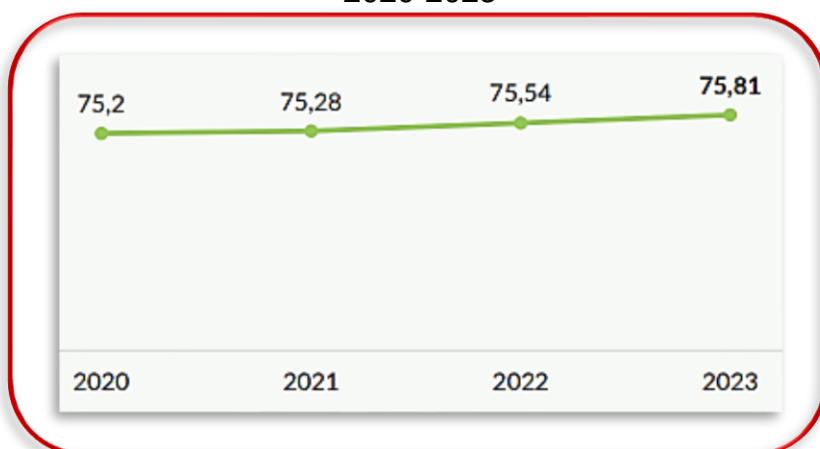
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,21	75,81	103,5%

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,61 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH DKI Jakarta adalah 75,20 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 75,81 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,27 tahun (0,36 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,23 persen per tahun).



Grafik II-9
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) DKI Jakarta (tahun),
2020-2023



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Adapun pembagian angka harapan hidup di Provinsi DKI Jakarta ke masing-masing wilayah:

Tabel II-40
Pembagian perkota di Provinsi DKI Jakarta

Provinsi	UHH	
	2022	2023
Kabupaten Kepulauan Seribu	74,54	74,89
Kota Jakarta Selatan	75,77	76,02
Kota Jakarta Timur	75,12	75,37
Kota Jakarta Pusat	76,07	76,34
Kota Jakarta Barat	75,62	75,81
Kota Jakarta Utara	74,96	75,07
DKI Jakarta	75,54	75,81

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Sasaran Indikator kinerja utama pada Angka Harapan Hidup pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,21	73,32	73,42	73,53

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan dengan target pada tabel diatas, Indikator Angka Harapan Hidup pada target akhir di 2026 memiliki target 73,53 tahun. Capaian tahun 2023 sebesar 75,81 telah melampaui target tersebut.



Sehubungan dengan capaian Angka Harapan Hidup ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari :

Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	486,385,968	470,2140	96,7%
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	2,906,931,512,295	2,811,710,970,235	96,7%
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1,226,371,230,102	1,190,673,817,594	97,1%
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	7,390,545,737,606	5,881,273,273,907.47	79,6%
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	96,929,291	258,0240.00	86,9%

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Terkait realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Angka Harapan Hidup di Dinas Kesehatan secara keseluruhan mencapai realisasi sebesar Rp.9.884.386.299.736 atau mencapai 85,8 persen.

Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 22 yaitu Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang terintegrasi dengan beberapa rencana aksi yaitu:

1. Integrasi Rekam Medis Elektronik di RSUD/ RSKD Provinsi DKI Jakarta
2. Implementasi Registrasi Online Jaksehat di RSUD/RSKD
3. Implementasi Registrasi Online Jaksehat di Puskesmas
4. Persiapan Program sister hospital dan stratifikasi layanan unggulan rumah sakit menjadi *Center of Excellence*
5. Persiapan penguatan sistem rujukan yang terintegrasi
6. Persiapan Penerapan sentralisasi fungsi (*Shared Service Center* dan *Center of Excellence*).



Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Adapun beberapa renaksi diatas telah mencakup beberapa penggunaan sumber daya guna meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi DKI Jakarta.

Capaian umur harapan hidup (UHH) penduduk Indonesia mencapai 73,93 tahun pada 2023, selisih 1,88 dari usia harapan hidup di Provinsi DKI Jakarta 75,81.

4) *Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita*

Sasaran strategis peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan memiliki pada indikator sasaran prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dengan target sebesar 13,7 persen.

Sasaran strategis peningkatan kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan memiliki pada indikator sasaran prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dengan target sebesar 13,7 persen dan realisasi sebesar 9,2 persen.

Tabel II-41
Capaian Indikator Prevalensi Stunting pada balita

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	persen	13,7	9,2	149%

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator Prevalensi Stunting pada Balita memiliki telah mencapai target Prevalensi Stunting mencapai 149 persen.

Sasaran Indikator kinerja utama pada Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target-target sebagai berikut:



Tabel II-42
RPD Tahun 2023-2026
Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	persen	13,7	13,2	12,7	12,2

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan dengan target pada tabel diatas, Indikator prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita menurun dari tahun ke tahun dengan target akhir di tahun 2026 sebesar 12,2 persen. Capaian tahun 2023 untuk indikator prevalensi stunting sebesar 9,2 telah melampaui target tersebut.

Adapun perbandingan dengan provinsi lain yaitu :

1. Provinsi DKI Jakarta 9,2 Persen

2. Provinsi Jawa Tengah 6,7 persen
3. Provinsi Jawa Barat 6,01 persen
4. Provinsi DIY Yogyakarta 16,4 persen

Sehubungan dengan capaian *Prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	Dinas Kesehatan	Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) dalam upaya skrining dan pemantauan ibu dan balita	1.750.000	1.750.000	100%
		Pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	19.000.000	19.000.000	100%
		Monitoring dan bimtek kader Kesehatan termasuk Kesehatan remaja, saka bhakti husada dan pos pembinaan terpadu PTM oleh petugas puskesmas	260.375.000	249.243.356	96%
		Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	4.822.682.899	4.022.683.123	83%
		Surveilans gizi, kesehatan ibu dan bayi	10.561.554.654	9.137.865.902	87%
		Percepatan perbaikan gizi Masyarakat seperti PMT pemulihan, PMT bumil KEK, PMT balita	14.814.984.430	10.342.723.156	70%
		Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	31.795.000	31.795.000	100%
		Imunisasi dasar dan lanjutan	354.250.495	335.029.250	95%
		Pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, pasangan usia subur	422.636.040	182.229.033	43%
		Pendampingan ibu hamil, ibu nifas dan bayi	379.065.000	375.680.000	99%
		Pengkajian Hasil Audit Kematian Maternal Perinatal	11.485.000	11.485.000	100%



Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
		Skrining faktor risiko serta penanganan penyakit menular diantaranya TBC, HIV, Hepatitis, Syphilis, pneumonia balita, diare dan ISPA dan penyakit tidak menular seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung serta Pemeriksaan Skrining Hipotyroid Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir	4.711.380.653	3.506.873.253	74%
		Peningkatan Kesehatan Kepada Anak Berkebutuhan Khusus (SLB)	30.720.000	30.720.000	100%
		Pembinaan Kesehatan tentang Kesehatan Reproduksi pada Anak Sekolah, pemantauan kesehatan anak usia sekolah dan peningkatan kualitas kesehatan remaja putri termasuk pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)	248.114.360	241.351.000	97%
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan <i>caregiver informal</i>	6.640.000	6.520.000	98%
		Promosi Kesehatan	862.941.128	834.388.850	97%
		Penatalaksanaan pelayanan Kesehatan dan Kesehatan lingkungan pada TPM dan TTU terstandar	77.870.000	77.870.000	100%
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	69.721.000	69.721.000	100%
		Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat	367.228.000	362.778.000	99%

Secara umum terkait realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Angka Harapan Hidup di Dinas Kesehatan secara keseluruhan mencapai realisasi sebesar Rp.9.884.386.299.736 atau mencapai 85,8 persen. Adapun anggaran untuk menurunkan *Prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita tahun 2023, merupakan bagian dari anggaran Dinas Kesehatan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup dengan realisasi sebesar Rp.29.839.705.923 dari total pagu anggaran sebesar Rp.38.054.193.659, atau capaian sebesar 78 persen dengan capaian efisiensi sebesar Rp.8.214.487.736 dari nilai total anggaran.

Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 22 yaitu Penyediaan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan bagi Masyarakat yang terintegrasi dengan beberapa rencana aksi yaitu:



1. Mengoordinasikan penggerakan kunjungan balita ke posyandu
2. Mengoordinasikan pelaporan, monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting
3. Terbentuknya dashboard informasi digital sumber daya manusia (SDM) kader masyarakat
4. Penyebarluasan informasi stunting dan optimalisasi dukungan kepada ibu dan bayi kurang dari usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif
5. Sosialisasi/penyebarluasan informasi stunting di bus sekolah
6. Implementasi pos Jakarta Beraksi di setiap kelurahan
7. Pemutakhiran data balita
8. Pembinaan pokjanal posyandu
9. Optimalisasi dan dukungan kepada ibu dan bayi kurang dari usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif
10. Sosialisasi/penyebarluasan informasi stunting
11. Pendampingan keluarga berisiko stunting
12. Pemutakhiran data keluarga berisiko stunting
13. Optimalisasi pemanfaatan buku rapor kesehatanku dalam memantau kesehatan anak usia sekolah dan remaja
14. Pemantauan minum tablet tambah darah untuk siswi SMP dan SMA
15. Sosialisasi/ penyebarluasan informasi stunting di stasiun dan jalur MRT, LRT, serta halte dan bus transjakarta
16. Pembentukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) di 5 Kota

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Tabel II-43
Prevalensi Stunting Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi Kabupaten Kota	Prevalensi Provinsi DKI Jakarta	Prevalensi Nasional
1	Kepulauan Seribu	20,5		
2	Jakarta Selatan	11,9		
3	Jakarta Timur	14,4		
4	Jakarta Pusat	14,0		
5	Jakarta Barat	15,2		
6	Jakarta Utara	18,5	14,8	21,6

Sumber : SSGI Tahun 2022



Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan capaian *Prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 antara lain :

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Perlu peningkatan kegiatan dalam Upaya percepatan penurunan stunting yang menyasar pada sasaran utama 1000 HPK dan sasaran pendamping remaja putri dan calon pengantin	Penyusunan regulasi terkait pelayanan kesehatan balita.
Perlunya dukungan lintas sektor dan lintas penurunan stunting	Meningkatkan koordinasi dan dukungan lintas sektoral dan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan intervensi spesifikasi dan sensitif kepada sasaran 1000 HPK remaja putri dan calon pengantin

Guna memperbaiki capaian Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

No	Kegiatan	Rencana Aksi	Target
	Penurunan Stunting	Pemadaman data sasaran balita	Tersedianya data sasaran balita berdasarkan data yang terkumpul dari Perangkat Daerah
		Regulasi terkait penetapan data balita	Tersedianya Keputusan Gubernur terkait penetapan data balita
		Mengoordinasikan penggerakan kunjungan balita ke Posyandu	Laporan koordinasi penggerakan kunjungan balita ke Posyandu
		Terbentuknya dashboard informasi digital sumber daya manusia (SDM) kader masyarakat	tersedianya dashboard dengan data terkini
		Optimalisasi dan dukungan kepada Ibu dan Bayi kurang dari usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Laporan kader dasawisma yang telah memberikan informasi/edukasi tentang ASI Eksklusif kepada masyarakat
		Penyebarluasan Informasi Stunting dan Optimalisasi dukungan kepada Ibu dan Bayi kurang dari usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Terlaksananya pengukuran melalui survey menerima/informasi terkait stunting/ASI Eksklusif
		Optimalisasi Pemanfaatan Buku Rapor Kesehatanku dalam memantau Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	60 persen Buku Rapor Digital Kesehatanku dimanfaatkan oleh peserta didik (SD Negeri, SMP Negeri, dan SLB Negeri) DKI Jakarta
		Pemantauan Minum Tablet Tambah Darah untuk Siswi SMP dan SMA	100 persen Siswi SMP Negeri dan SMA Negeri meminum Tablet Tambah Darah
		Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi Stunting di Stasiun dan Jalur MRT, LRT, Serta Halte dan Bus Transjakarta	Terlaksananya Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi Stunting berupa Videotron milik MRT, LRT, Serta Halte dan Bus Transjakarta (BUS BRT)
		Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi Stunting di Bus Sekolah	100 persen Bus Sekolah yang memiliki pemutar video melaksanakan Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi Stunting berupa Video di Bus Sekolah
		Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi stunting	Sosialisasi Publik Melalui Webinar dan Media Sosial (Kader dan Masyarakat Binaan DPPAPP)
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Pendampingan Keluarga untuk 5 Kriteria Keluarga Berisiko Stunting Secara Digital
		Pemutakhiran Data Keluarga Berisiko Stunting	Tersedianya data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang terupdate pada sistem informasi keluarga dashboard keluarga Jakarta
		Pembentukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif	Evaluasi Pelaksanaan Pembentukan GP2SP
		Mengoordinasikan Pelaporan,	Tersedianya laporan hasil monitoring dan



No	Kegiatan	Rencana Aksi	Target
		Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting	evaluasi Sub KSD Percepatan Penurunan Stunting
		Mengusulkan, menyusun, mendistribusikan bahan renaksi penurunan Stunting	Tersedianya bahan renaksi penurunan Stunting dari Dinas Kesehatan yang dibutuhkan Perangkat Daerah

5) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki – Laki. Semakin mendekati angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki – laki.

Data capaian IPG dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian IPG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 baru akan dirilis oleh BPS pada pertengahan Tahun 2024 (Bulan Juni). Sampai dengan saat ini data capaian yang sudah terpublikasi dalam website BPS adalah data capaian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, yaitu sebesar 94,93 persen yang dirilis pada bulan juni 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender	Indeks pembangunan gender	persen	95,04	94,93 (data tahun 2022)	99,88%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Indeks Pembangunan Manusia laki-laki dan perempuan terus meningkat. Perbedaan percepatan pencapaian IPM laki-laki dengan perempuan menjadi kunci bagaimana pola Indeks Pembangunan Gender terbentuk. Itulah sebabnya mengapa IPG tahun 2022 sebesar 94,93 meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 94,84 padahal IPM laki-laki maupun IPM perempuan meningkat hanya saja percepatan kenaikan IPM perempuan masih lebih tinggi.

Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

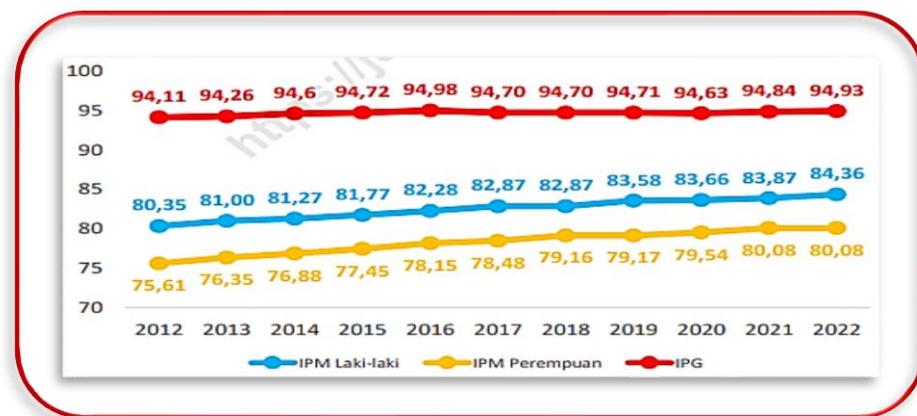


Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender	Indeks pembangunan gender	Indeks	95,04	95,14	95,24	95,34

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan dengan target pada tabel diatas, terdapat peningkatan target capaian dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu realisasi 2022 adalah sebesar 94,93 persen dan pada 2023 ditetapkan target 95,04 persen.

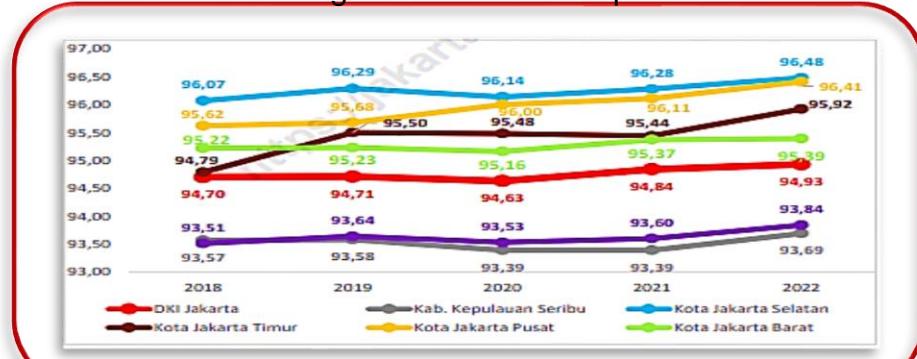
Grafik II-10
IPM Laki-Laki dan IPM Perempuan dan IPG DKI Jakarta,
Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Selama periode 2018-2022 IPG semua kabupaten/kota meningkat, walaupun nilai setiap tahunnya beberapa wilayah berfluktuasi. Pada tahun 2022 IPG semua wilayah naik.

Grafik II-11
Perbandingan IPG antar Kabupaten/Kota



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2022 nilai IPG tertinggi dicapai oleh Jakarta Selatan 96,48 diikuti oleh Jakarta Pusat sebesar 96,41, Jakarta Timur sebesar 95,92, Jakarta Barat sebesar 95,39, Jakarta Utara sebesar 93,84 dan Kepulauan Seribu sebesar 93,69. Dapat



dilakukan bahwa pembangunan antara laki-laki dengan perempuan di Jakarta Selatan paling setara dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Jika dibandingkan dengan capaian IPG nasional, IPG Provinsi DKI Jakarta terlihat lebih tinggi, lebih mendekati angka 100, dapat dikatakan bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan lebih setara di DKI Jakarta dibandingkan dengan nasional.

Tabel II-44
Indeks Pembangunan Gender seluruh Pemda tahun 2022

No	Pemda	Indeks	No	Pemda	Indeks
1.	ACEH	92,24	18.	NUSA TENGGARA BARAT	91,08
2.	SUMATERA UTARA	91,06	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	92,96
3.	SUMATERA BARAT	94,72	20.	KALIMANTAN BARAT	87,61
4.	RIAU	88,71	21.	KALIMANTAN TENGAH	89,20
5.	JAMBI	88,95	22.	KALIMANTAN SELATAN	89,44
6.	SUMATERA SELATAN	92,95	23.	KALIMANTAN TIMUR	86,61
7.	BENGKULU	94,72	24.	KALIMANTAN UTARA	87,85
8.	LAMPUNG	90,58	25.	SULAWESI UTARA	94,89
9.	KEP. BANGKA BELITUNG	89,55	26.	SULAWESI TENGAH	92,24
10.	KEP. RIAU	93,50	27.	SULAWESI SELATAN	93,14
11.	DKI JAKARTA	94,93	28.	SULAWESI TENGGARA	91,04
12.	JAWA BARAT	89,80	29.	GORONTALO	88,12
13.	JAWA TENGAH	92,83	30.	SULAWESI BARAT	89,79
14.	D. I. YOGYAKARTA	94,99	31.	MALUKU	93,20
15.	JAWA TIMUR	92,08	32.	MALUKU UTARA	90,30
16.	BANTEN	92,18	33.	PAPUA BARAT	83,61
17.	BALI	94,36	34.	PAPUA	81,04
INDONESIA					91,63

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

sehubungan dengan capaian Indeks Pembangunan Gender ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

Indikator	No	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2,142,451,307	2,063,087,927	96,30%
	2	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2,809,769,012	2,513,613,050	89,46%
	3	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49,5000	45,1000	91,11%

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2023



Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 mencapai realisasi sebesar Rp.4,621,800,977 dari total pagu anggaran sebesar Rp.51,720,319 (capaian 92,40 persen).

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan capaian Indeks Pembangunan Gender Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 antara lain :

Kendala	Faktor Keberhasilan
Kendali Perangkat Daerah terhadap capaian IPG masih rendah.	Telah dilakukan Anggaran Berbasis Gender pada proses perencanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Publikasi data bergantung pada publikasi yang dilakukan pihak eksternal	Berbagai sektor ikut terlibat dalam pembangunan berbasis gender secara kolaboratif
Pola publikasi yang dilakukan adalah paruh tahun setelah akhir tahun berjalan	

Guna memperbaiki capaian Indeks Pembangunan Gender Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

Kegiatan	Rencana Aksi 2024
Membuat Program/Kegiatan yang mendorong capaian Indeks Pembangunan Gender dilaksanakan sebagai salah satu prioritas pembangunan.	Mendorong semua Perangkat Daerah untuk melakukan <i>tagging</i> terhadap kegiatan yang ada di organisasinya yang mendorong peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender

6) Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi merupakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi DKI Tahun 2023 yang merupakan indikator dari sasaran strategis Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinnekaan Masyarakat. Target Indeks Demokrasi pada Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dengan target sebesar 76,82.

Dalam publikasi resmi dari BPS Provinsi DKI Jakarta berjudul “Profil Demokrasi Provinsi DKI” (paling baru diterbitkan pada bulan Desember 2023 berjudul Profil Demokrasi Provinsi DKI 2022) dijelaskan bahwa penghitungan angka IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) menggunakan metode triangulasi yang mengombinasikan metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi data yang didapat dengan metode lain.



Adapun pengumpulan data dalam rangka penyusunan IDI bersumber pada: 1) Surat Kabar, 2) Dokumen, 3) *Big Data (scrapping* terhadap portal berita *online*), 4) *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka mengonfirmasi, mengklarifikasi/koreksi, serta eksplorasi data baru atau menambah informasi dari *stakeholder*. Dijelaskan pula bahwa pada tahun 2022 dilakukan penghitungan Angka IDI yang terdiri dari : 1) indeks demokrasi di tingkat provinsi, 2) indeks demokrasi di tingkat pusat, dan 3) indeks demokrasi di tingkat nasional yang didapatkan dari nilai provinsi dan pusat, di mana aspek IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang dikembangkan oleh Thomas Saaty. AHP dilakukan oleh para ahli dan praktisi yang memiliki pengalaman, pengetahuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa hasil Indeks Demokrasi didapatkan dari tahapan proses yang panjang, sehingga angka Indeks Demokrasi pada tahun berjalan (N) baru dapat diperoleh di tahun berikutnya (N+1). Oleh karena itu, terkait dengan target Indeks Demokrasi Tahun 2023 sebagai IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 didefinisikan dengan "indeks IDI Tahun 2022 yang dipublikasikan hasilnya pada Tahun 2023".

Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada laman <https://jakarta.bps.go.id/indicator/34/1096/1/-metode-baru-indeks-demokrasi-indonesia.html>, capaian IDI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah sebesar 82,13 indeks, adapun persentase capaiannya adalah 106,91 persen.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	76,82	82,13	106.91%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta



IDI terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Proporsi penilaian IDI untuk tiap aspeknya adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK	NILAI	BOBOT	INDEKS
1	Kebebasan	87,39	0,310	27,09
2	Kesetaraan	85,34	0,376	32,08
3	Kapasitas Lembaga Demokrasi	73,12	0,314	22,96
Indeks Demokrasi Indonesia				82,13

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DKI Jakarta diketahui terdapat peningkatan capaian IDI Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 0,05 indeks dari tahun sebelumnya.

Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Demokrasi pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

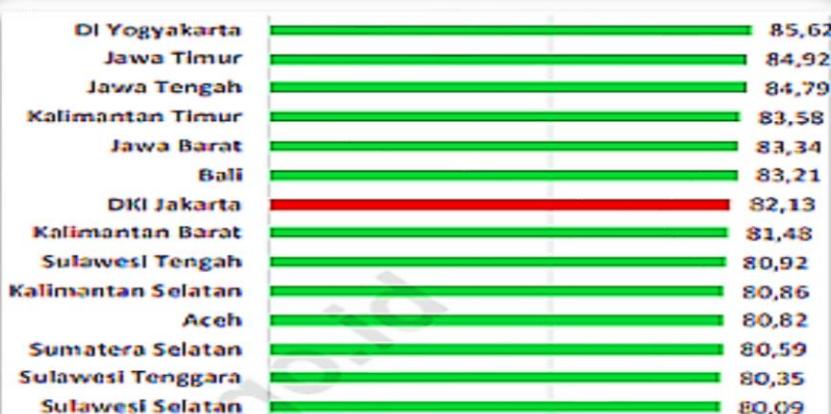
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	76,82	77,07	77,32	77,57

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Dari tabel diatas bahwa indikator indeks demokrasi pada capaian tahun 2023 sebesar 82,13 jika dibandingkan dengan target RPD tahun 2023-2026 telah mencapai target, dimana target pada tahun 2026 yaitu sebesar 77,57 atau selisih 4,56.

Adapun perbandingan 34 provinsi yang dihitung nilai IDI nya, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi ke-7 setelah DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Bali. Nilai capaian IDI DKI Jakarta tersebut berada dalam kategori tinggi (>80).

Grafik II-12
Data Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)



Sumber : LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023



Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

IKU	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Indeks Demokrasi	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	6.922.529.585	6.729.568.585	97,21
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasayarakatan	13.048.636.400	10.043.988.000	76,97
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1.342.419.940	1.340.802.600	99,88
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	651.216.977.078	650.902.687.400	99,95
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	524.195.040.235	523.958.272.820	99,95
		1.196.726.026.238	1.192.975.319.405	94,79

Sumber : Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2023

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Indeks Demokrasi tahun 2023 mencapai realisasi sebesar Rp.1.192.975.319.405 dari total pagu anggaran sebesar Rp.1.196.726.026.238 (capaian 94,79 persen) tingkat efisiensi 5,21 persen.

Dalam rangka terciptanya optimalisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya, dapat disampaikan strategi-strategi yang telah dilakukan sebagai berikut :

a) Aspek Sumber Daya Manusia

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dengan mengikutsertakan dalam pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, diskusi, maupun rapat-rapat pembahasan terkait IDI.
2. Melakukan penugasan-penugasan teknis yang terkait dengan tugas dan fungsinya, khususnya yang mendukung capaian IDI.
3. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaksanaan tugas pegawai secara berkala.



b) Aspek Teknologi

1. Pemanfaatan aplikasi/sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait capaian dan peningkatan Indeks Demokrasi.
2. Optimalisasi penggunaan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi yang terkait tugas dan fungsi pendukung capaian Indeks Demokrasi.

Selain Program-program diatas capaian Indeks Demokrasi juga mempunyai rencana aksi yaitu :

1. Sosialisasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
2. Penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
3. Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah terkait fasilitasi dukungan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Faktor keberhasilan capaian Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari :

1. Koordinasi pelaksanaan tugas forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) (TNI/Polri/Kejaksaan), sosialisasi-sosialisasi dan koordinasi terkait nilai-nilai demokrasi yang melibatkan tokoh agama, perkumpulan penghayat kepercayaan, forum kerukunan umat beragama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi etnik, partai politik, generasi muda(pelajar dan mahasiswa) dan stakeholder lainnya.

Dalam Publikasi “Profil Demokrasi Provinsi DKI 2022”, Badan Pusat Statistik memberikan beberapa catatan terkait capaian IDI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Rekomendasi/Catatan	Tindak Lanjut
Aspek Kebebasan		
1	Masih ada kasus-kasus terkait kebebasan berkeyakinan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2022 (capaian indeks 70,56 dari 100)	Bakesbangpol telak melaksanakan upaya-upaya yang kontinu untuk meningkatkan semangat persatuan dan toleransi khususnya terkait toleransi dalam beragama/berkeyakinan, antara lain dengan kegiatan sosialisasi/diskusi/dialog yang melibatkan tokoh agama, ormas keagamaan, organisasi penghayat keyakinan, kalangan pemuda/pelajar/masyarakat umum lainnya, mengaktifkan dan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama selaku wadah pembangun kerukunan antar-umat beragama, serta berkolaborasi dengan tokoh agama/ormas keagamaan/organisasi penghayat/umat beragama dalam melaksanakan kegiatan dan pembangunan di DKI Jakarta.



No	Rekomendasi/Catatan	Tindak Lanjut
Aspek Kesetaraan		
2	Masih ada kekuasaan yang belum tersebar atau masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini karena demokrasi akan tercapai ketika kekuasaan sudah tersebar dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu atau telah terjadi demonopolisasi kekuasaan dan sumber daya di ranah politik, ekonomi, dan sosial (capaian indeks 76,83 dari 100)	Di bidang Politik, Bakesbangpol terus melaksanakan upaya-upaya untuk terciptanya kesetaraan di bidang Politik antara lain melalui sosialisasi/diskusi/dialog terkait penguatan kapasitas perempuan di lembaga politik, Peningkatan Etika dan Budaya Politik Dalam Berdemokrasi, serta Peningkatan Kesadaran Politik Cerdas Berintegritas.

Guna meningkatkan Indeks Demokrasi Provinsi DKI

Jakarta ke depan, terdapat beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

1. Aspek Kebebasan

Bakesbangpol akan terus meningkatkan upaya-upaya yang kontinu dan efektif untuk meningkatkan semangat persatuan dan toleransi khususnya terkait toleransi dalam beragama/berkeyakinan

2. Aspek Kesetaraan

Bakesbangpol akan terus meningkatkan upaya-upaya yang kontinu untuk menciptakan kesetaraan di bidang politik, melalui metode-metode yang efektif.

d. Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Frase dan kata kunci dari tujuan keempat ini yaitu ‘Transformasi Pelayanan Publik’, ‘Manajemen Pemerintahan’, dan ‘Berintegritas’. Kata kunci transformasi pelayanan publik menggambarkan kondisi dimana praktik dan persepsi layanan publik tidak lagi dianggap menyulitkan dan mampu menjamin pemenuhan hak-hak warga dengan memanfaatkan teknologi dan media yang tersedia secara maksimal. Untuk itu dirumuskan dua sasaran yaitu ‘Meningkatnya kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan layanan masyarakat’ dan ‘Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan kota cerdas’. Selanjutnya kata kunci manajemen pemerintahan memiliki makna proses internal pemerintah yang akuntabilitasnya terjaga baik dari sisi pengelolaan kinerja maupun keuangan.



Sejalan dengan kondisi yang ingin dicapai dirumuskan dua sasaran yaitu ‘Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah’ dan ‘Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel’. Kata kunci terakhir yaitu berintegritas dapat diaplikasikan kepada semua lini pemerintahan, namun terutama pada aparatur sipil negara. Sehingga konsep integritas ini diturunkan menjadi sasaran ‘Berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur’. Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	82,47	100,57%
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	91,76	103,68%
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,50	4,21	120,28%
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Indeks	82 (A)	81,06 (A)	98,85%
	Indeks Survei Penilaian Integritas	Predikat	70	76,96	109,94%
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur I	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	335,5	107,5%

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Adapun capaian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi membuat perubahan yang mendasar atas pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Sesuai Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sasaran RB 2020-2024 terbagi dalam RB general dan RB tematik.

Kementerian PANB telah melakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 739 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi , dengan target tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu nilai 82, kategori A, dan predikat memuaskan.

Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	82	82,47	100,57%

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan, karena memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari program atau kegiatan tersebut. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan Kementerian PANRB diawali dengan menyampaikan praktek baik sebanyak 122 praktek baik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, penyusunan penentuan prioritas dan target dari kegiatan utama reformasi birokrasi, penyusunan rencana aksi atas kegiatan utama RB General dan Tematik yang kemudian diunggah pada portal RB beserta laporan evaluasi internal. Berikut capaian Indeks RB Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 -2023 yaitu:



Grafik II-13
Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov DKI Jakarta
Tahun 2018-2023



Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 739 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam Surat Kementerian PANRB Nomor B/100/RB.06/2024, tanggal 1 Februari 2024, hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	71.87
2	RB Tematik	20	10.60
	Indeks RB	120	82.47
	Kategori		A-

Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi 82,47 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dibandingkan dengan pema lainnya dikarenakan laporan hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB tersebut baru ditetapkan pada awal bulan Februari 2024 sehingga belum dapat diinformasikan dengan pada laporan tahun 2023.



sehubungan dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 berikut program yang dilaksanakan guna mempertahankan capaian tersebut terdiri dari :

INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi dan RB	Penataan organisasi	255.249.579	254.689.695	99,78
		pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada PD/UKPD	47.874.777	47.314.893	98,83
		Monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi	207.374.802	207.374.802	100.00

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan data diatas didukung dengan program penataan organisasi dimana dalam program tersebut terdapat beberapa anggaran dimana total anggaran tersebut di realisasikan sebesar Rp.254.689.695,- dari pagu anggaran sebesar Rp.255.249.579,- dengan capain anggaran sebesar 99,78 persen.



Adapun tindak lanjut hasil evaluasi implementasi RB tahun 2022 yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta pada Tahun 2023 dapat terlihat dalam matrik di bawah ini:

No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
1	Melengkapi rencana aksi yang telah dibuat oleh tim reformasi birokrasi dengan timeline pelaksanaan dan membuat laporan perkembangan capaian rencana aksi agar dapat terlihat sudah sejauh mana capaian rencana aksi tersebut diimplementasikan:	Penyusunan rencana kerja/aksi Tim RB tahun 2022 telah disertai timeline pelaksanaanya, sedangkan perkembangan pelaksanaan rencana kerja/aksi terhadap rencana tersebut disertainya nota dinas progress per tri wulan	tersedianya rencana kerja beserta timeline dan laporan Monitoring dan evaluasi	Januari - Desember 2023
2	Melanjutkan proses identifikasi seluruh peraturan yang ada di Provinsi DKI Jakarta disertai dengan analisis dan pemetaan, sehingga tergambar peraturan yang tumpang tindih, tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat dengan kebijakan lainnya sampai ke level perangkat daerah. Selain itu memastikan identifikasi peraturan dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan dan penyesuaian peraturan agar mempermudah proses dan prosedur dalam pelayanan sehingga memberikan kontribusi positif di daerah:	Biro Hukum menjalankan sesuai ketentuan peraturan perundangan, memedomani tahap-tahap pembentukan produk hukum daerah. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa tahapan pembentukan produk hukum daerah meliputi: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. penetapan; e. penomoran; f. pengundangan; g. autentifikasi; h. penyebarluasan; dan i. pendokumentasi Perencanaan menjadi tonggak terpenting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya sekadar perencanaan, namun perencanaan ini juga meliputi aspek evaluasi terhadap produk hukum daerah yang sudah ada. Proses evaluasi ini meliputi pula identifikasi dan pemetaan terhadap produk hukum daerah.	1. Teridentifikasinya seluruh peraturan yang ada di Provinsi DKI Jakarta 2. Adanya analisis dan pemetaan, peraturan yang tumpang tindih, tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat dengan kebijakan lainnya sampai ke level perangkat daerah. 3. Adanya identifikasi peraturan dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan dan penyesuaian peraturan agar mempermudah proses dan prosedur dalam pelayanan	1. Analisis, identifikasi, dan pemetaan -à dilakukan secara reguler dan sepanjang tahun 2. Propempergub dan Propemperda à dilakukan pada akhir tahun setiap tahunnya



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
		<p>Tahap ini dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa. Setiap tahun, Sekretaris Daerah menugaskan kepala perangkat daerah mengajuan/mengusulkan baik pencabutan, perubahan, penggantian maupun rancangan baru Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Dasar pengusulan tersebut adalah kajian yang dilakukan oleh masing-masing kepala perangkat daerah atas produk hukum daerah pada urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, yang lazimnya meliputi identifikasi dan pemetaan produk hukum daerah.</p> <p>Sekretaris Daerah menugaskan kepala Biro Hukum untuk membuat perancanaan penyusunan Propempergub untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Gubernur. Perencanaan penyusunan ini dibuat berdasarkan usulan kepala perangkat daerah yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum.</p> <p>Biro Hukum kemudian menginventarisir dan merekap usulan-usulan tersebut untuk dibahas bersama dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Hasil inventarisasi usulan yang telah disepakati/disetujui kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Sekretaris Daerah, yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa propempergub ditetapkan paling lambat bulan Desember setiap tahunnya.</p>		



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
		<p>Proses Penyaringan (<i>Filtering</i>) Produk Hukum Daerah</p> <p>Pentahapan pembentukan produk hukum daerah dengan melibatkan baik internal (oleh Biro Hukum) maupun eksternal Pemerintah daerah, menjadi penyaringan (<i>filtering</i>) substansi dan teknis peraturan perundang-undangan yang berkualitas baik.</p> <p>(1) Fasilitasi/Evaluasi Produk Hukum Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Sesuai dengan Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah bahwa atas Rancangan Produk Hukum Daerah dilakukan Fasilitasi/evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.</p> <p>(2) Harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>Atas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM</p> <p>Evaluasi/Deregulasi yang dilakukan oleh Biro Hukum</p> <p>Pada Tahun 2022, Biro Hukum melakukan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Nota Dinas Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0165/HK.00.00 Tanggal 21 Juni 2022 hal Evaluasi Produk Hukum Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
		2. Nota Dinas Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor 496/-75.31 Tanggal 2 Maret 2022 hal Laporan Hasil Inventarisasi Peraturan Daerah Lingkup Perekonomian dan Keuangan yang akan dilakukan Evaluasi 3. Nota Dinas Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0022/HK.03.00 Tanggal 28 Maret 2022 hal Laporan Penyusunan Produk Hukum Hasil Inventarisasi dan Evaluasi Bidang Perizinan, Penataan Ruang dan Investasi		
3	Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan SOP yang telah disusun untuk melihat tingkat efisiensi dan efektivitasnya dalam hubungan kerja antar unit organisasi dengan kinerja	Proses Bisnis : 1. Harmonisasi Peta Proses Bisnis dengan Permenpan 132/2022, RPD DKI Jakarta dengan prioritas pada a. Pendidikan b. Kesehatan c. Sosial d. Pengendalian Bencana e. Pengendalian Lingkungan f. Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban g. Perizinan h. Pendapatan i. Pemerintahan umum 2. Penyusunan Peta Proses Bisnis akan menggunakan notasi BPMN yang akan memudahkan dalam menilai efisiensi dan efektifitas Proses Bisnis. SOP : 1. Update data SOP yang ada pada PD/UKPD 2. Melakukan pendampingan untuk perbaikan SOP (PD prioritas) 3. Membuat laporan hasil monitoring dan Evaluasi	Peta Proses Bisnis dan Laporan Evaluasi SOP dari PD	Februari s.d. Desember 2023



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
4	Melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar mutasi internal pegawai dan pengembangan kompetensi:	Kegiatan Uji Kompetensi Pegawai (UKP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan proses penilaian kompetensi yang menggunakan metode assessment center untuk mengukur kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan mengacu pada standar kompetensi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017. Penyelenggaraan UKP diprioritaskan bagi pejabat struktural dan pegawai potensial. Pada tahun 2022 UPT PPKP telah menyelenggarakan UKP sebanyak 1.400 pegawai. Dengan demikian, persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti UKP sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 6.161 pegawai (72,18%) dari total 8.536 pegawai prioritas yang mengikuti UKP. Rencana aksi tindak lanjut pada tahun 2023 : 1. Dalam rangka mendukung kegiatan manajemen talenta, maka pada tahun 2023 kegiatan Uji Kompetensi Pegawai memprioritaskan update data profil kompetensi bagi pejabat struktural dan pegawai potensial dengan jumlah 1.500 pegawai dengan menggunakan metode assessment center.	1500 pegawai	Februari - Desember 2023



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
		<p>2. Dalam rangka melakukan pemetaan kompetensi seluruh PNS Pemprov. DKI Jakarta yang berjumlah 54.577 orang (berdasarkan data SIMPEG 1 Desember 2022), maka perlu dikembangkan alat ukur assessment berbasis online. Alat ukur yang akan disusun bertujuan untuk mengetahui prediktor kompetensi pegawai (situational judgment test dan general management aptitude test) dengan mengacu pada PERMENPAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.</p> <p>Dengan adanya alat ukur ini, maka memungkinkan dilaksanakan secara cepat dengan hasil yang dapat segera diketahui dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Alat ukur akan disusun untuk level kompetensi 2, 3, dan 4 dengan tahapan pengembangan alat ukur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Persiapan : Dalam tahap ini akan dilakukan telaah terhadap level kompetensi yang akan disusun menjadi alat ukur. Kemudian dilakukan penentuan konstruk ukur.b. Penyusunan : Tahap ini dilakukan penyusunan butir item alat ukur dan telaah per soal.c. Uji coba alat ukur dan analisis butir soal.d. Evaluasi property psikometrise. Finalisasi alat ukur		



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
5	Memanfaatkan hasil pemetaan talenta dalam proses penempatan jabatan kritisikl dan rencana suksesi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta:	<p>BPSDM : Dalam rangka pemanfaatan hasil pemetaan talenta dalam proses penempatan jabatan kritisikl dan rencana suksesi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka BPSDM Provinsi DKI Jakarta sesuai tupoksinya akan melaksanakan program diklat tahunan dalam rangka pembinaaan dan pengembangan kompetensi untuk pegawai sebagai tindak lanjut dari pemetaan manajemen talenta oleh Badan Kepegawaian Negara. Secara umum program diklat yang ada di BPSDM dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan Permenpan RB No 38 Tahun 2017 mengenai Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kompetensi Teknis, 2. Pengembangan Kompetensi Fungsional, dan 3. Pengembangan Kompetensi Manajerial, dan 4. Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural. <p>Selain itu BPSDM juga melaksanakan pengembangan terkait kompetensi teknis strategis yang dilaksanakan oleh Jakarta <i>Public Policy Centre</i></p>	<p>Target BPSDM Tahun 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> Diklat PKA 3 Angkatan; Diklat PKP 10 Angkatan; Latsar CPNS 12 Angkatan; Latsar Orientasi PPK 67 Angkatan; Latsar Bimtek PNS Baru 95 Angkatan; Diklat Pol PP 20 Angkatan; Diklat Kepala Sekolah 20 Angkatan; Diklat Bendahara Penerimaan 5 Angkatan; Diklat Barang Jasa 10 Angkatan; Diklat Bendahara Pengeluaran 5 Angkatan; Diklat Pengelolaan Barang Daerah 5 Angkatan; Diklat Arsip Aris 3 Angkatan; Diklat Manajemen Kinerja 1 Angkatan; Diklat Pemeriksa Pajak 1 Angkatan; Diklat Manajemen BLUD Pendidikan 1 Angkatan; Diklat Pengelola Rusun 1 Angkatan; Diklat Penyusunan Perancangan Perundungan 1 Angkatan; 	Januari 2023 - Desember 2023
6	Peta risiko yang ada perlu direviu untuk memastikan bahwa seluruh potensi yang menghambat pencapaian kinerja utama telah dipetakan dan dibangun lingkungan pengendaliannya:	Dalam rangka penerapan manajemen risiko dan peningkatan kualitas SPIP di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta Inspektorat pada Tahun 2021 s.d triwulan I Tahun 2023, Inspektorat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:	Target Tahun 2023: 51 (lima puluh satu) Perangkat Daerah telah dilakukan pendmpingan dan reviu dalam rangka penerapan managemen risiko, mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, penilaian risiko, peta risiko dan rencana	Januari 2023 - Desember 2023



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
		<ol style="list-style-type: none">1. Telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko dengan tujuan agar seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan manajemen risiko melalui aplikasi SIPERISAI (Sistem Pengelolaan Risiko dan Pengendalian) mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, penilaian risiko, peta risiko dan rencana tindak pengendalian;3. Telah dilaksanakan Sosialisasi/bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala dalam rangka mendorong penerapan manajemen risiko melalui SIPERISAI;4. Penguatan kapabilitas penerapan manajemen risiko bagi Auditor dan P2UPD serta pelaksanaan pendampingan penilaian dan penanganan risiko sekaligus reviu terhadap hasil penilaian dan penanganannya terhadap Perangkat Daerah. Reviu dilaksanakan dengan berkolaborasi Bersama BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 8 Juni 2022;5. Telah melakukan reviu terhadap penerapan manajemen risiko melalui aplikasi SIPERISAI terdapat sebanyak 1299 identifikasi risiko dari sebanyak 88 Perangkat Daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat wilayah	tindak pengendalian;	



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
7	Melakukan monitoring dan evaluasi konsistensi kepatuhan dalam pelayanan publik dimana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:	Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan tindak lanjut Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Biro ORB pada tahun 2022 telah melakukan pendampingan penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Pada TW 2 telah dilakukan di: a. Dinas PM dan PTSP (Standar Pelayanan Dinas, Standar Pelayanan Unit Pengelola PM dan PTSP Kota Administrasi (5 wilayah), Standar Pelayanan Unit Pengelola PM dan PTSP Kabupaten Administrasi, Standar Pelayanan UP PM dan PTSP Kecamatan, Standar Pelayanan UP PM dan PTSP Kelurahan) dengan total sebanyak 318 Standar Pelayanan b. Dinas Dukcapil (Standar Pelayanan Dinas, Standar Pelayanan Suku Dinas Dukcapil Kota Administrasi (5 wilayah), Standar Pelayanan Sektor Dukcapil Kecamatan, Standar Pelayanan Satpol Administrasi Dukcapil Kelurahan) dengan total sebanyak 51 Standar Pelayanan Pada TW 3 telah dilakukan di: Dinas PPKUkm, Sudin PPKUkm Jakarta Timur, Sudin PPKUkm Jakarta Selatan, Sudin PPKUkm Jakarta Barat, Sudin PPKUkm Jakarta Utara, Sudin PPKUkm Jakarta Pusat, Sudin PPKUkm Kepulauan Seribu dan Laboratorium Kesehatan Daerah dengan total sebanyak 7 Standar Pelayanan	Target Tahun 2023: a. 35 Standar yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unit Pelayanan Publik b. 20 Unit Pelayanan Publik yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan	Januari 2023-Desember 2023



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
		<p>Pada TW 4 telah dilakukan di: RSUD Tebet, RSUD Cipayung, RSUD Kemayoran, RSUD Pademangan, RSUD Taman Sari, Puskesmas Kecamatan Makasar, Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Puskesmas Kecamatan Cilandak, Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, Puskesmas Kecamatan Gambir , Puskesmas Kecamatan Menteng, Puskesmas Kecamatan Cilincing , Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Puskesmas Kecamatan Tambora, Puskesmas Kecamatan Kembangan, Puskesmas Kecamatan Pademangan dan Puskesmas Kecamatan Matraman dengan total sebanyak 17 Standar Pelayanan</p> <p>untuk monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan telah dilakukan di 16 Unit Pelayanan Publik yaitu di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Puskesmas Kecamatan Senen, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, RSUD Tanah Abang, RSUD Kembangan, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya , Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia, Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1, Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Pusat, Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Timur, Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Barat, SMKN 57 Jakarta dan Unit Pengelola Jakarta Smart City</p>		



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
		<p>Rencana aksi pada tahun 2023 dalam pendampingan penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan :</p> <p>1. Lingkup Sub kelompok TLPP 1 akan melakukan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial (5 wilayah)b. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II (12 wilayah)c. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Suku Dinas (5 wilayah) <p>2. Lingkup Sub kelompok TLPP 2 akan melakukan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dinas PRKP dan Suku Dinas (5 wilayah)b. Unit Pelayanan Rumah Susun I sd VIII <p>3. Lingkup Sub kelompok TLPP 3 akan melakukan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bapendab. Suku Badan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten (5 UPP)c. Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan (6 UPP)d. UP Jakarta Smart City <p>Pada Tahun 2023 akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada 20 Lokus Unit Pelayanan Publik</p> <p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tim P3DN) mendorong seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah untuk segera</p>		



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
		<p>menginput realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Sistem Pengawasan P3DN BPKP (https://siera.bpkp.go.id/p3dn) dengan melakukan monitoring progress penginputan realisasi P3DN setiap harinya sehingga tercapai realisasi penggunaan PDN pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 20.454.334.345.010 atau 80.63 % dari Anggaran Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia. Pada tanggal 15 Maret 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan sebagai Juara 1 Pengguna Produk Dalam Negeri Terbaik Kategori Pemerintah Provinsi yang diberikan langsung oleh Bapak Presiden RI dalam acara Penghargaan P3DN di Istora Senayan.</p> <p>Untuk Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan hal-hal sbb:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengeluarkan Surat Edaran Sekda yang mewajibkan Perangkat Daerah untuk meminta persetujuan tertulis dari Gubernur untuk belanja Produk Impor atau PDN dengan TKDN dibawah 25%;2. Memperbarui Instruksi Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;3. Memasukkan target realisasi penggunaan PDN untuk masing-masing Perangkat Daerah ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah;4. Memberlakukan sistem Reward & Punishment terkait capaian penggunaan Produk Dalam Negeri		



No	Rekomendasi Kementerian PANRB	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target/Output	Waktu Pelaksanaan
8	Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai kinerja lainnya pada komponen hasil.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tim P3DN) mendorong seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah untuk segera menginput realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Sistem Pengawasan P3DN BPCKP (https://siera.bpkp.go.id/p3dn) dengan melakukan monitoring progress penginputan realisasi P3DN setiap harinya sehingga tercapai realisasi penggunaan PDN pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 20.454.334.345.010 atau 80.63 % dari Anggaran Pengadaan Barang Jasa Melalui Penyedia. Pada tanggal 15 Maret 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan sebagai Juara 1 Pengguna Produk Dalam Negeri Terbaik Kategori Pemerintah Provinsi yang diberikan langsung oleh Bapak Presiden RI dalam acara Penghargaan P3DN di Istora Senayan. Untuk Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan hal-hal sbb:1. Mengeluarkan Surat Edaran Sekda yang wajibkan Perangkat Daerah untuk meminta persetujuan tertulis dari Gubernur untuk belanja Produk Impor atau PDN dengan TKDN dibawah 25%;2. Memperbaharui Instruksi Sekretaris Daerah tentang Rencana Aksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;3. Memasukkan target realisasi penggunaan PDN untuk masing-masing Perangkat Daerah ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah;4. Memberlakukan sistem Reward & Punishment terkait capaian penggunaan Produk Dalam Negeri	Target 2023 :Target berdasarkan hasil telah anggaran yang dilakukan oleh BPKD dan dicantumkan dalam RAPBD. Komitmen belanja PDN Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 15,847 triliun.	Januari 2023-Desember 2023

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023



Adapun analisis terhadap implementasi RB di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu

1. Implementasi RB di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencakup seluruh aspek pengelolaan pemerintahan. Dari aspek perubahan struktural dalam organisasi pemerintahan hingga pelayana yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan utama dari semua perubahan yang telah dilakukan adalah meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Reformasi birokrasi juga berperan dalam mewujudkan untuk menjadi kota yang berkelanjutan. Dengan memastikan tata kelola yang baik dan kebijakan yang bijak, RB mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkesinambungan dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
3. Implementasi budaya kerja memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Penting untuk melibatkan seluruh anggota organisasi dalam proses ini dan menjadikannya sebagai bagian integral dari strategi keseluruhan organisasi. Budaya kerja yang kuat dan positif dapat berdampak positif pada produktivitas, moral, dan keberhasilan jangka panjang organisasi
4. Transformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, responsivitas, dan kualitas layanan pemerintahnya agar dapat bersaing dan memenuhi standar internasional. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Transformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia adalah upaya jangka panjang yang memerlukan komitmen, kepemimpinan yang kuat, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan.



6. Hambatan yang mungkin dihadapi selama evaluasi reformasi birokrasi, ada beberapa hambatan yang mungkin dihadapi, seperti: pertama, keterbatasan data: keterbatasan data yang akurat dan terkini dapat menghambat evaluasi yang mendalam. Kedua, Resistensi terhadap Perubahan: Resistensi dari dalam birokrasi terhadap perubahan bisa menjadi kendala serius dalam implementasi reformasi, dan ketiga, Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan reformasi.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan atau sasaran dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah mengukur sejauh mana kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan atau kinerja pelayanan. IKM memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan, persepsi, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat: Persentase responden yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap layanan atau kinerja lembaga tertentu
2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat: Persentase masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap lembaga atau pelayanan yang disediakan
3. Responsif Terhadap Keluhan: Waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan masyarakat dan tingkat kepuasan setelah penanganan keluhan
4. Ketersediaan Informasi: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan informasi mengenai kebijakan, program, atau layanan yang diberikan
5. Partisipasi Masyarakat: Tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau evaluasi program



Realisasi Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mempunyai nilai capaian sebesar 103.68, dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88.50	91.76	103.68

Sasaran Indikator kinerja utama pada Kepuasan Masyarakat pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	88,5	88,6	88,7	90

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator indeks kepuasan masyarakat sudah melampaui target dari akhir tahun RPD Tahun 2023-2026.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diatas diperoleh berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh 12 Dinas Daerah dan 6 Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM pada Tahun 2023, yaitu :

No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah
1	Kota Adm. Jakarta Utara	11	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	12	Dinas PM dan PTSP
3	Kota Adm. Jakarta Timur	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Kota Adm. Jakarta Barat	14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Kota Adm. Jakarta Selatan	15	Dinas Kebudayaan
6	Kabupaten Adm. Kepulauan 1000	16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Dinas Sosial	17	Dinas Perhubungan
8	Dinas Kesehatan	18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Dinas Pendidikan		
10	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota		

Adapun unsur-unsur pelayanan yang dilakukan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana



Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 menggunakan aplikasi Jak-Survey dan JAKI yang dikelola oleh Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta UP. Bidang Statistik dan Unit Pengelola Jakarta Smart City.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori dengan nilai range dan kategori makna sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Interval	Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.59	25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.06	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.07 - 3.53	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.54 - 4.00	88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

a) Nilai IKM Dinas Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup 12 Dinas dilakukan 3 (tiga) bulan sekali pada masing-masing Dinas, dengan hasil sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	TW I	TW II	TW III	TW IV	IKM
1	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	84,87	88,22	87,33	89,28	87,43
2	Dinas Kebudayaan	89,87	90,75	90,3	90,42	90,34
3	Dinas Kesehatan	88,22	88,48	89,33	89,32	88,84
4	Dinas Pendidikan	83,63	82,86	82,77	85,69	83,74
5	Dinas Perhubungan	86,32	88,35	88,73	89,02	88,11
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,06	88,89	90,55	90,13	89,66
7	Dinas Sosial	88,21	90,06	90,87	90,02	89,79
8	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	86,88	89,44	87,6	88,12	88,01
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,89	92,17	92,69	92,42	90,79
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	82,33	82,55	82,24	84,14	82,82
11	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	89,87	83,67	83,92	85,07	85,63
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,26	97,47	98,24	98,49	98,12
				IKM Dinas		88,60

b) Nilai IKM Kabupaten/Kota Administrasi 2023

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup wilayah dilakukan 6 (enam) bulan sekali pada masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Pelaksanaan (SKM) dilakukan terhadap 7 (tujuh) bidang pelayanan yakni PPSU, Ketertiban Umum, RPTRA, PKK, Posyandu, Jumantik dan RT/RW, LMK, dan FKDM, dengan hasil sebagai berikut:



Perangkat Daerah	Semester I	Semester II	IKM
Kota Adm. Jakarta Utara	95,44	95,37	95,41
Kota Adm. Jakarta Pusat	97,08	98,22	97,65
Kota Adm. Jakarta Timur	94,96	95,42	95,19
Kota Adm. Jakarta Barat	93,99	95,53	94,76
Kota Adm. Jakarta Selatan	92,07	95,4	93,74
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	89	93,33	91,17
IKM Wilayah			94,65

Berdasarkan nilai IKM 12 Dinas dan Kota/Kabupaten Administrasi maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 diperoleh dari rata-rata nilai IKM 12 Dinas dan Kota/Kabupaten Administrasi:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IKM Provinsi} &= \frac{\text{IKM 12 Dinas} + \text{IKM Kota/Kabupaten Administrasi}}{2} \\
 &= \frac{88,60 + 94,65}{2} \\
 &= 91,76 (\text{A}) \text{ Sangat Baik}
 \end{aligned}$$

Berikut data capaian IKM jika dibandingkan dengan data pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023:

No.	Tahun	IKM Provinsi
1	2018	83,76
2	2019	84,41
3	2020	86,34
4	2021	88,44
5	2022	90,43
6	2023	91,76

Sesuai dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Adapun program yang mendukung indikator tersebut yaitu:

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pemahaman aparatur, pembinaan dan evaluasi terkait survei kepuasan masyarakat	7,600.000	7,600.000	100	-
	Total	7,600.000	7,600.000	100	

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023



Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut masuk pada program penataan organisasi dan kegiatan terkait dengan pelaksanaan SKM guna mendapatkan nilai IKM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman aparatur, pembinaan dan evaluasi terkait SKM dengan pagu anggaran 7.600.000 dengan capaian sebesar 100 persen.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat maka IKM masuk dalam Perjanjian Kinerja para Kepala Perangkat Daerah 18 PD tersebut. Kemudian untuk memastikan kualitas dan keakuratan data, pelaksanaan SKM sudah menggunakan sistem Jaksurvey dan JAKI.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat :

1. Perlu ditingkatkannya pengetahuan SDM terkait dengan pelaksanaan SKM pada masing-masing unit pelayanan, agar pelayanan tidak kendala dengan ketidakpahaman pelayanan dalam melayani layanan.
2. Kurangnya batas waktu jangka waktu pengolahan data survei
3. Pelaksanaan survei yang terlalu dekat, sehingga evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan SKM kurang maksimal

Perlu ditingkatkan prasarana dan sarana guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pengguna layanan.

Guna mengingkatkan IKM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

1. Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia kepada petugas yang melaksanakan pelayanan dan petugas survei
2. Mencari solusi terkait dengan batas waktu pengolahan data survei
3. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dengan waktu pelaksanaan survei.



3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mempunyai target SPBE sebesar 3,50 dimana target tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.



Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Realisasi Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mempunyai nilai capaian sebesar 103,68, dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,50	4,21	120,28%

Berdasarkan dengan data capaian diatas, berikut domain dan aspek penilaian terhadap capaian indeks SPBE:

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,50%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,50%
Domain 4 - Layanan SPBE	45%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Elektronik	27,50%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE		
No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian Predikat Baik
(Indeks minimal 2,6)



Berikut detail rincian terhadap capaian indeks SPBE :

Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	4,21
Domain Kebijakan SPBE	4,50
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4,50
Domain Tata Kelola SPBE	3,70
Perencanaan Strategis SPBE	3,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4
Penyelenggara SPBE	3,50
Domain Manajemen SPBE	2,55
Penerapan Manajemen SPBE	2,63
Audit TIK	2,33
Domain Layanan SPBE	5
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	5
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5

Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks SPBE pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terakselerasinya transformasi digital dan berkembangnya ekosistem kota cerdas	Indeks SPBE	Indeks	3,50	3,50	3,57	3,57

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Berdasarkan dengan data realisasi capaian pada tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa capaian indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melampaui target RPD Tahun 2023-2026 yaitu sebesar 4,21 dimana target pada akhir dokumen RPD 2023-2026 sebesar 3,57.

Berikut tabel perolehan nilai tingkat kematangan indikator:

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3



No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	5
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan capaian Indeks SPBE mempunyai beberapa program yaitu:

Indikator Sasaran	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Penataan Organisasi	646.950.000	646.950.000	100%	-
	Dinas Kominfotik	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	15.262.419.623	14.710.520.000	96,38%	3,62
			15.909.369.623	15.357.470.000	97,95%	2,05



Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut masuk pada program penataan organisasi dan kegiatan terkait dengan Indeks SPBE guna mendukung peningkatan Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan beberapa program dengan anggaran Rp.15.357.470.000,- dengan capaian sebesar 97,95 persen.

Selain program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 mempunyai rencana aksi yaitu :

1. Pengembangan dan inovasi peta proses bisnis SPBE Provinsi DKI Jakarta
2. Monitoring program kerja tim koordinasi SPBE
3. Penyusunan program kerja tim koordinasi SPBE
4. Implementasi manajemen resiko SPBE

Berikut hasil Indeks SPBE seluruh provinsi secara nasional, sebagai berikut :

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	3,62	Baik
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,21	Baik
3	Pemerintah Provinsi Riau	3,01	Baik
4	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3,62	Sangat baik
5	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,75	Baik
6	Pemerintah Provinsi Jambi	3,31	Baik
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2,62	Baik
8	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4,21	Memuaskan
9	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,14	Sangat Baik
10	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,22	Memuaskan
11	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,26	Memuaskan

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sudah menggambarkan predikat Memuaskan dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Adapun salah satu Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek kebijakan terdapat pada pada kebijakan terkait peta rencana



SPBE, pengelolaan jaringan dan sistem penghubung layanan pemerintah kebijakan sudah memuat pengaturan yang lengkap dan sudah ada pengaturan interkoneksi dengan jaringan infra dan sistem penghubung instansi lain dan juga sudah dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut.

Namun disisi lain, penerapan SPBE pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki beberapa kelemahan yaitu :

1. Pada aspek TIK, pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah belum terdapat bukti dukung yang dapat menjustifikasi sudah dilakukan dan implementasi untuk seluruh OPD.
2. Pada pelaksanaan tugas tim koordinasi SPBE perlu bukti dukung yang lebih lengkap untuk dapat menjustifikasi bahwa seluruh tugas tim koordinasi sudah dilakukan sesuai SK Tim Koordinasi.
3. Pada beberapa manajemen SPBE seperti manajemen resiko, data, asset TIK, pengetahuan dan perubahan, pelaksanaan manajemen sudah ada
4. pada peta rencana SPBE namun pelaksanaannya masih belum memenuhi muatan yang lengkap sesuai pedoman dan arahan yang menjadi acuan.
5. pada Audit TIK karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum melaksanakan audit TIK yang memenuhi standar sesuai arahan BRIN untuk audit aplikasi dan infrastruktur.
6. Pada Aspek kebijakan internal beberapa kebijakan yang pengaturannya masih perlu ditingkatkan khususnya untuk pengaturan interkoneksi pusat data dan jaringan infra.
7. Pada Aspek Perencanaan Strategis perlu dilanjutkan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE untuk kemudian direview untuk perbaikan berkelanjutan kedepan, serta perlu mulai adanya implementasi inovasi yang lebih banyak lagi dari Proses Bisnis yang diimplementasikan pada aplikasi/ layanan SPBE.
8. Pada Aspek TIK, pemanfaatan SPLP perlu dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh OPD.



9. Pada aspek manajemen perlu ditingkatkan lagi khususnya untuk yang praktiknya belum memenuhi muatan pengaturan yang lengkap, perlu disusun pedoman internal manajemen sesuai arahan nasional yang lengkap.
10. Untuk Audit aplikasi dan infrastruktur perlu pelaksanaan audit dengan koordinasi BRIN.
11. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan yang sudah sangat baik perlu dipertahankan dan selalu dilakukan evaluasi periodic dan perbaikan berkelanjutan. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Guna meningkatkan capaian indeks SPBE di tahun berikutnya:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pelaksanaan penguatan fungsi tim koordinasi SPBE Provinsi DKI Jakarta dengan Tim koordinasi nasional.
2. Peningkatan fungsi manajemen SPBE seperti manajemen audit, manajemen resiko, data, asset TIK, pengetahuan dan perubahan.
3. Sinkronisasi perencanaan TIK dalam sistem perencanaan Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan sasaran dari Tercapainya perbaikan manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 mempunyai target nilai/predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yaitu 82 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	82

Sumber : Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023



Realisasi Capaian nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mempunyai nilai Capaian sebesar 81.06 poin berdasarkan dengan hasil evaluasi yang telah dikeluarkan oleh Menteri PANRB tanggal 27 November 2023 nomor B/290/AA.05/2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	82	81.06	98.85

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Adapun beberapa rincian dari beberapa komponen penilaian yang dinilai yaitu :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	25.56
2	Pengukuran Kinerja	30	24.41
3	Pelaporan Kinerja	15	12.59
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81.06
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 yaitu sebesar 0.55 poin dari tahun sebelumnya yaitu 80.51.

Sasaran Indikator kinerja utama pada nilai/predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	82	84	87	90.5

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan dengan target pada tabel diatas nilai/predikat AKIP pada target akhir mempunyai nilai/predikat AKIP sebesar 90.5 poin. Sehingga nilai/predikat AKIP Tahun 2023 sebesar 81.06 masih jauh dari target akhir yaitu selisih 9.44 poin yang akan dicapai, sehingga perlu ditingkatkan kembali mengenai beberapa program/kegiatan/renaksi kegiatan guna meningkatkan nilai tersebut.



Berikut capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2022 oleh Menpan RB secara Nasional diumumkan pada Link Youtube dan website KemenPANRB :

No	Pemda	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DIY	AA
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	A
3	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	A
4	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	A
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	A
6	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	A
7	Pemerintah Kota Bandung	A
8	Pemerintah Kota Madiun	A
9	Pemerintah Kota Malang	A
10	Pemerintah Kota Surabaya	A
11	Pemerintah Kota Yogyakarta	A

Sumber : website KementerianPANRBRI

sehubungan dengan capaian nilai AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ada beberapa program yang dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut terdiri dari :

Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Nilai / Predikat AKIP	Inspektorat	Program penyelenggaraan pengawasan	489.925.500	129.350.000	26,40%
	Bappeda	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	16.283.911.188	14.832.891.127	91,09%
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.910.148.392	2.740.161.000	94,16%
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Program Penataan Organisasi	24.700.000	24.700.000	100%
			19.708.685.080	17.727.102.127	98,90%

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai AKIP tahun 2023 mencapai realisasi sebesar Rp.17.727.102.127,- dari total pagu anggaran sebesar Rp.19.708.685.080,- Atau capaian sebesar 98,90 persen dengan capaian efisiensi sebesar 1,1 persen dari nilai total anggaran.



Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dengan beberapa renaksi yaitu :

1. Fasilitasi penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Sekda, Deputi dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024
2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
3. Penyusunan BAB II LPPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023
4. Pelaksanaan Reviu Informasi Capaian Akuntabilitas Kinerja pada BAB II LPPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023
5. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah
6. Penyusunan Pemanfaatan Dashboard Kinerja

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan nilai capaian/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Penggunaan sumber daya lain terkait dengan capaian IKU yaitu :

1. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan LKIP Perangkat Daerah dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB.
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen kinerja dan penyusunan LKIP Perangkat Daerah.
3. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan tim SAKIP Provinsi DKI Jakarta.

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 antara lain :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
a	Mereviu kembali seluruh perencanaan kinerja Perangkat Daerah agar dapat dipastikan sasaran strategis yang ditetapkan dapat berorientasi outcome dan indikator kinerja yang ditetapkan relevan mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sehingga akan dapat mendorong <i>continuous improvement</i> dari kondisi kinerja yang telah ditetapkan;	Telah dilakukan reviu terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah. Perbaikan perencanaan kinerja dituangkan dalam RPD dan Renstra PD 2023-2026.



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
b	Memastikan kembali penjenjangan kinerja yang telah dimiliki mengacu pedoman penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja yang dilakukan berdasarkan kerangka berfikir logis/logical framework dan mengutamakan <i>critical success factor</i> (CSF) sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja;	<ul style="list-style-type: none">- Telah dilakukan reviu terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja Perangkat Daerah. Perbaikan perencanaan kinerja dituangkan dalam RPD dan Renstra PD 2023-2026.- Berdasarkan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021, penyusunan penjenjangan kinerja yang dilakukan berdasarkan kerangka berfikir logis/logical framework dan mengutamakan <i>critical success factor</i> (CSF) sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja merupakan tupoksi Bappeda sebagai Penyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
c	Memastikan kembali ukuran keberhasilan penerapan crosscutting KSD yang dikawal oleh setiap Perangkat Daerah dapat menggambarkan kontribusi sesuai dengan peran Perangkat Daerah tersebut sehingga mempercepat terciptanya kondisi kinerja yang menjawab isu strategis daerah;	Telah dilakukan reviu terhadap crosscutting KSD dan perbaikannya telah dituangkan dalam Bab 6 RPD 2023-2026.
d	Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh Perangkat Daerah untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan Perangkat Daerah terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;	<ul style="list-style-type: none">- Pimpinan Perangkat Daerah akan berkomitmen untuk melakukan evaluasi kinerja berdasarkan data analisis pada sistem.- Pemanfaatan aplikasi Pengukuran dan pengumpulan data kinerja sudah terintegrasi dengan sistem eTPP, sehingga pimpinan Perangkat Daerah bisa melakukan monitoring dan evaluasi kinerja- Sudah dilakukan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah pada tanggal 24 Mei 2023 di Ruang Pola Bappeda Lantai 2
e	Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja baik tingkat Perangkat Daerah dan individu sebagai pegawai sehingga akan terjaga kesesuaian antara kinerja Perangkat Daerah dan kinerja individu pegawai;	Sistem telah terintegrasi dari tahun 2020, namun terdapat rasionalisasi kegiatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang menyebabkan perbedaan kinerja Perangkat Daerah dan individu
f	Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;	<ul style="list-style-type: none">- Telah dilakukan tindak lanjut dengan penyusunan Surat Edaran terkait kewajiban melakukan matriks peran hasil sebelum disusunnya SKP- Perangkat daerah mengirimkan MPPH dan SKP masing-masing pegaw
g	Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat Perangkat Daerah dengan cara memastikan informasi secara detail pencapaian kinerja setiap indikator kinerja yang dimiliki sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pencapaian realisasi indikator kinerja yang dimiliki;	Telah dilakukan tindak lanjut dengan: <ul style="list-style-type: none">- <i>coaching</i> klinik- Diklat Manajemen Kinerja- Sosialisasi dan pendampingan ke SKPD



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
h	Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja ke depan dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja;	Telah dilaksanakan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan yang hasilnya menjadi masukan target kinerja tahun berikutnya
i	Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi agar semakin konkret dan sesuai dengan akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap Perangkat Daerah; dan	Laporan Hasil Evaluasi telah diberikan kepada KemenpanRB melalui link ESR
j	Mendorong adanya monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan secara berkala, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat Perangkat Daerah dan akan berpengaruh juga pada tingkat pemerintah daerah.	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan monitoring TLHE SAKIP setiap tahun

Guna memperbaiki nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

1. Pengukuran

- Melakukan evaluasi capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah setiap triwulan
- Melakukan koordinasi dengan Tim SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah terkait capaian IKU yang belum mencapai target.

2. Pelaporan

- Melakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- Membuat kegiatan pendidikan dan pelatihan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi terkait program/kegiatan perencanaan kedepan

3. Evaluasi

- Melakukan monitoring tindak lanjut seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya
- Melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (42 Perangkat Daerah) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



5) Indeks Survei Penilaian Integritas

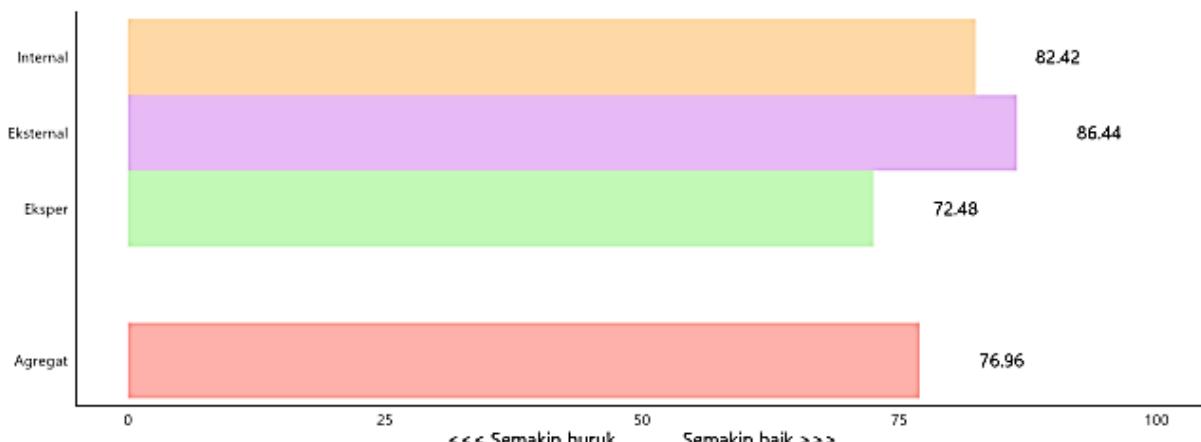
Indeks Survei Penilaian Integritas merupakan indikator dari sasaran Tercapainya perbaikan manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 mempunyai target Indeks Survei Penilaian Integritas yaitu 70 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Realisasi Capaian Indeks Survei Penilaian Integritas pada tahun 2023 memperoleh Capaian sebesar 76,96 berdasarkan dengan hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2023 melalui Booklet Hasil SPI Tahun 2023 dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	70	76,96	109,94%

Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Adapun hasil skor agregat, internal, eksternal dan eksper dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. yaitu :



Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian Indeks Survei Penilaian Integritas di tahun 2023 yaitu sebesar 3,66 poin dari tahun sebelumnya yaitu 73,30



Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Survei Penilaian Integritas pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja Pemerintah	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	70	75	80	85

Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas Indeks Survei Penilaian Integritas ditargetkan sebesar 85 pada target akhir tahun 2026. Sehingga Indeks Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 sebesar 76,96 masih jauh dari target akhir yaitu selisih 8,04 poin yang akan dicapai, sehingga perlu ditingkatkan kembali mengenai beberapa program/kegiatan/renaksi kegiatan guna meningkatkan nilai tersebut.

Berikut capaian Indeks Survei Penilaian Integritas seluruh Pemerintah Daerah tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara Nasional :

No	Pemda	Indeks
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	76,96
2	Pemerintah Provinsi Banten	69,09
3	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	69,60
4	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	75,33
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	77,91
6	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	77,33
7	Pemerintah Provinsi Bali	78,45
8	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	72,55
9	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	72,75
10	Pemerintah Provinsi Maluku	64,01
11	Pemerintah Provinsi Jambi	71,45

Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Berdasarkan dengan hasil Survei Penilaian Integritas, berikut rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil SPI Tahun 2023 secara kepada seluruh lembaga publik, yaitu :

1. Perbaikan sistem politik dan sistem pendanaan partai politik di seluruh Indonesia khususnya dalam hal ini di Provinsi DKI Jakarta
2. Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa melalui implementasi *e-catalogue*, *e-procurement*, *hingga e-audit*



3. Adopsi sistem digitalisasi layanan perizinan yang terpadu di seluruh lembaga publik terkait, khususnya bagi dunia usaha. Digitalisasi bukan sekedar elektronifikasi layanan, sehingga disertakan dengan perbaikan proses bisnis dan regulasinya.
 4. Pengelolaan SDM di lembaga publik yang mendorong peningkatan kinerja pegawai, khususnya meritokrasi dan peningkatan sistem remunerasi.
 5. Penyusunan regulasi dan perangkat pendukung pencegahan dan mitigasi *conflict of interest*.
 6. Perlunya komitmen nyata pimpinan lembaga publik di Indonesia.
- 6) Opini Laporan Keuangan Daerah

Indikator Opini Laporan Keuangan Daerah merupakan sasaran dari Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 mempunyai target Opini Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 yaitu WTP yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Realisasi Capaian Opini Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Sumber : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Sasaran Indikator kinerja utama Opini Laporan Keuangan Daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP



Berdasarkan pada tabel diatas Opini Laporan Keuangan Daerah mencapai yaitu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sesuai dengan target tahunan RPD 2023-2026.

Berikut beberapa data pemerintah daerah terkait opini laporan keuangan daerah :

No	Pemerintah Daerah	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	WTP
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	WTP
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	WTP
4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	WTP
5	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	WTP

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

sehubungan dengan capaian Opini Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 ada beberapa program yang dilaksanakan guna mempertahankan capaian tersebut terdiri dari :

Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Opini Laporan Keuangan Daerah	BPKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.236.689.915.064	650.826.794.148	52,63%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.633.289.978	1.570.601.800	96,16%
	BPAD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	106.594.917.138	99.862.368.174	93,68%
	BAPENDA	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	245.783.075.396	234.264.359.692	95,31%
	BPPBJ	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	3.980.260.232	3.752.590.240	94,28%
				1.594.681.457.808	990.276.714.054
					62,10%

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program yang mendukung capaian Opini Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023 yaitu sebesar Rp.990.276.714.054,- dari total pagu anggaran sebesar Rp.1.594.681.457.808,- Atau capaian sebesar 62.10 persen dengan capaian efisiensi sebesar 37.90 persen dari nilai total anggaran. Realisasi anggaran Program pengelolaan keuangan daerah sebesar 52.63 persen dikarenakan adanya anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.554.562.887.668,- yang tidak terserap dikarenakan tidak ada kegiatan yang menggunakan anggaran BTT dimaksud.

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempertahankan Opini Laporan Keuangan



Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 antara lain :

1. Peningkatan akuntabilitas Piutang Daerah melalui rekonsiliasi Pendapatan
2. Memastikan akuntabilitas Belanja Daerah dengan didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai
3. Optimalisasi penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIERA dan e-Persediaan
4. Integrasi antara aplikasi penatausahaan BMD (Aset Tetap/Lain2 & Persediaan) dengan SIPD

Guna mempertahankan Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

Kegiatan	Rencana Aksi 2024
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Keuangan BUMD secara tepat waktu
	Manajemen Kas Daerah, Kas BLUD, kas BOS/BOP melalui pengembangan aplikasi
	Pendataan informasi SIPPT/ HPL oleh SKPD/UKPD secara berkala sebagai data dukung Laporan Keuangan
	Percepatan penyerahan dan pencatatan aset fasos fasum dr pengembang.
	Rekonsiliasi data oleh Bidang yang menangani Fasos Fasum dengan SKPD/UKPD terkait secara berkala
	Pendataan dan pemetaan aset yang berpotensi menjadi Properti Investasi.
	Pendataan dan pemetaan penggunaan tanah HPL

7) Indeks Sistem Merit

Indikator Indeks Sistem Merit merupakan sasaran dari berkembangnya kapasitas, profesionalitas, dan iklim kerja aparatur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 mempunyai target Indeks Sistem Merit Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yaitu 326 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 26/KEP.KASN/C/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai capaian Indeks Sistem Merit sebesar 335.5 dengan Kategori IV (Sangat Baik).



Pada diktum keempat disebutkan bahwa hasil penilaian sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dimaksud berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan selaras dengan kebijakan yang diatur dalam pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara bahwa Instansi Pemerintah yang mendapatkan kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Berdasarkan penjabaran diatas, sebagai upaya untuk mempersiapkan proses penilaian dan evaluasi penerapan sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem merit dan diperoleh nilai capaian sebesar 350,5 dengan Kategori IV (Sangat Baik).

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Berkembangnya kapasitas, profesionalitas dan iklim kerja aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	350,5	107,5%

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Adapun beberapa rincian dari beberapa komponen penilaian yang dinilai yaitu :

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kebutuhan	40	40
2	Pengadaan	40	40
3	Pengembangan Karir	130	82.5
4	Promosi dan Mutasi	40	37.5
5	Manajemen Kinerja	80	75
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	37.5
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	16
8	Sistem Informasi	24	22
Total Nilai Indeks Sistem Merit			350,5
Tingkat Kategori			IV (Sangat Baik)

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian nilai Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 yaitu sebesar 15 poin dari tahun sebelumnya yaitu 335,5.



Sasaran Indikator kinerja utama pada Indeks Sistem Merit Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 mempunyai target yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Berkembangnya kapasitas, professional, dan iklim kerja aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	335.5	335.5	345.5

Berdasarkan dengan target pada tabel diatas Indeks Sistem Merit pada target akhir mempunyai Indeks Sistem Merit sebesar 345.5. Capaian Indeks Sistem Merit tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian mandiri sebesar 350.5 telah melebihi dari target akhir yang akan dicapai sementara apabila dibandingkan dengan capaian Indeks Sistem Merit tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar 335.5 masih terdapat selisih sebesar 10 poin dengan target akhir yang akan dicapai sehingga perlu konsistensi dalam melaksanakan program/kegiatan/renaksi kegiatan guna meningkatkan nilai tersebut.

Sehubungan dengan capaian Indeks Sistem Merit Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdapat beberapa program yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan nilai capaian tersebut meliputi :

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Merit	Badan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	19.917.457.708	16.613.802.813	83.00%
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah	17.090.017.169	13.413.245.541	78.49%
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.364.708.561	28.313.469.449	84.86%
TOTAL			70.372.183.438	58.340.517.803	93.21%

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai AKIP tahun 2023 mencapai realisasi sebesar Rp.58.340.517.803,- dari total pagu anggaran sebesar Rp.70.372.183.438,- Atau capaian sebesar 82.90 persen.



Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Sub Kegiatan Strategis Daerah Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta dengan beberapa renaksi yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
2. Penyusunan Kajian Kelembagaan, Perencanaan dan Pemenuhan SDM serta Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2023-2026)

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan nilai capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Berikut capaian Indeks Sistem Merit beberapa Pemerintah Daerah tahun 2022 hasil penilaian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diumumkan dalam laporan tahunan KASN yang dipublikasikan melalui website KASN:

No	Pemda	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	396.5
2	Pemerintah Provinsi Bali	386.5
3	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	353
4	Pemerintah Provinsi DIY	349
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	340.5
6	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	337.5
7	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	335.5
8	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	335.5
9	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	332
19	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	331

Berikut beberapa faktor keberhasilan/pendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :

1. Pada aspek perencanaan kebutuhan telah dilakukan penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun) serta penyediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;
2. Pada aspek pengadaan telah ditetapkan kebijakan internal terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetatif,



- transparan dan tidak diskriminatif serta pelaksanaan pelatihan dasar (latsar) bagi CPNS secara tepat waktu;
3. Pada aspek manajemen kinerja telah ditetapkan kontrak kinerja yang terukur dan pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala;
 4. Pada aspek penggajian, penghargaan dan disiplin telah ditetapkan kebijakan internal tentang pembayaran kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja dan kebijakan yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap pegawai berprestasi serta kebijakan yang terkait penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku.
 5. Pada aspek sistem informasi telah dilakukan pembangunan SIMPEG yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai serta penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan
 6. Penyelenggaraan Diklat dengan Akreditasi A dari LAN RI
 7. Gedung BPSDM yang belum dikelola secara mandiri dalam rangka integrasi dan percepatan konektivitas antar penyelenggara diklat dan narasumber, pengajar dan pihak ketiga lainnya
 8. Merencanakan kegiatan pengembangan JakCorpU untuk dapat diimplementasikan secara penuh dan berdampak dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta yang selaras dengan tujuan strategis pimpinan tertinggi
 9. Pendekatan dan pencarian data pendukung ke OPD secara terus menerus yang menaungi JFT tertentu serta membuka koordinasi dengan instansi pembina JFT untuk mendapatkan arahan terkait metode uji kompetensi dan penjadwalan kegiatan.

Guna mengoptimalkan capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

No	KSD	Renaksi 2024	Target
1	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup	RA1. Penyusunan Grand Design Kelembagaan serta Dukungan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi	T/O1. Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN berbasis Corporate University Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



No	KSD	Renaksi 2024	Target
1	BPSDM	SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global	Menuju Kota Global
		RA2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	T/O2.1. Tersedianya Laporan Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023
3	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	RA1. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	T/O1.1. Surat Edaran akses materi <i>e-learning</i> terkait sensitivitas penyandang disabilitas kepada Perangkat Daerah
			T/O1.2. Tersedianya 40% pegawai pemprov DKI Jakarta yang mengakses materi elearning terkait sensitivitas penyandang disabilitas
		RA2.1. Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi	T/O2.1. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi untuk mencapai IP ASN dengan Pengelola Kepegawaian
		RA2.2. Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi	T/O2.2. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi untuk mencapai IP ASN dengan Pengelola Kepegawaian



2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun-Tahun Sebelumnya Sesuai Dengan Dokumen RPD 2023-2026

Perbandingan data capaian Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2023 dengan 2026 dapat terlihat pada table di bawah ini.

Tabel II-45
Perbandingan data capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dengan 2026

NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL	2023		2024	2025	2026	TARGET AKHIR
							TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni		Indeks	62,6	65	71,3	66	67	68	68	68
	1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan berkualitas	1	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	68,76	69,06	77,24	69,56	69,84	70,1	70,1
	2	Tercapainya perbaikan aktifitas pola dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	2	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	18,45	18,78	18,86	20,97	21,87	23,01	23,01
	3	Tercapainya pemulihian ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	3	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,65	54,93	54,57	55,43	55,93	56,43	56,43
	4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	5	Indeks Risiko Bencana	Indeks	62,58	60,12	61,31 (2021)	59,66	59,16	58,72	58,72



NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL	2023		2024	2025	2026	TARGET AKHIR
							TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	
2		Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	-	7,69	7,93	7,81	7,93	8,04	8,04
	5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	6	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,25	5,6 - 6,2	4,96	5,40- 6,20	5,60- 6,40	5,60- 6,40	5,60- 6,40
	6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	7	Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	Persen	7,18	8,21	6,53	7,91	7,61	7,31	7,31
	7	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan social	8	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,61	4,13	4,44	3,79	3,25	2,91	2,91
			9	Rasio Gini	Koefisien	0,412	0,411	0,431	0,410	0,410	0,409	0,409
			10	Tingkat Kemiskinan Ektrem	Persen	0,89	1,06	0,57	0,88	0,83	0,68	0,68
	8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi	11	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	-	3,96	4,01	3,98	4,01	4,03	4,03



NO		TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL	2023		2024	2025	2026	TARGET AKHIR
							TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	
3		Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11	81,55	83,55	81,77	81,99	82,11	82,11
	9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	12	Indeks dimensi pendidikan	Tahun	12,12	12,14	12,39	12,16	12,18	12,20	12,20
	10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	13	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01	73,21	75,81	73,32	73,42	73,53	73,53
			14	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	16,8	13,7	9,2	13,2	12,7	12,2	12,2
	11	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender	15	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,84	95,04	94,93	95,14	95,24	95,34	95,34
	12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat	16	Indeks Demokrasi	Indeks	76,07	76,82	82,13	77,07	77,32	77,57	77,57



NO	TUJUAN / SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	KONDISI AWAL	2023		2024	2025	2026	TARGET AKHIR	
						TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET		
4	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,54	82	82,47	83	84	85	85	
	13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	88,5	91,76	88,6	88,7	90	90
	14	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47	3,50	4,21	3,50	3,57	3,57	3,57
	15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	19	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	80,1 (A)	82 (A)	81,06 (A)	84 (A)	87 (A)	90,5 (A)	90,5 (A)
			20	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	68,7	70	76,96	75	80	85	85
	16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel	21	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	17	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur	22	Indeks Sistem Merit	Indeks	310,5	326	350,5	335,5	335,5	345,5	345,5



2.3.4 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut.

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel dibawah:

Tabel II-46
Pengukuran efisiensi anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017

No	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		Efisiensi
			Pagu	Realisasi	
1	Indeks Kota Layak Huni	109.69	33,755,570,666	32,974,602,614	2,31
2	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	111.84	743.569.922.397	505.853.764.305	31,97
3	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	100.43	5,138,767,512,978	4,688,381,589,597	8,76
4	Indeks kualitas lingkungan hidup	99.34	44,405,412,159	43,019,124,540	3,12
5	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	131.61	1,982,121,782	1,975,469,477	0,34
6	Indeks Resiko Bencana	101.98	33,755,570,666	32,974,602,614	2,31
7	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	103.12	-	-	-
8	Laju pertumbuhan ekonomi	91.85	-	-	-
9	Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	125.73	147,425,716,683	143,518,143,990	2,65
10	Tingkat Kemiskinan	93.02	930,028,280,769	916,950,538,256	8,29
11	Rasio Gini	95.36	-	-	-
12	Tingkat Kemiskinan Ektrem	185.96	-	-	-



No	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		Efisiensi
			Pagu	Realisasi	
13	Indeks Daya Saing Daerah	101.26	1,787,711,433	1,546,940,600	13,47
14	Indeks Pembangunan Manusia	102.45	15,379,367,859,487	12,560,577,391,859	13,33
15	Indeks dimensi pendidikan	97.98	16,962,181,787,043	16,205,149,052,638	6,39
16	Angka Harapan Hidup (menggunakan program yang sama dengan IPM)	103.55			
17	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	148.91	38,054,193,659	29,839,705,923	21,59
18	Indeks Pembangunan Gender	99.88	9,953,940,638	9,198,501,954	7,70
19	Indeks Demokrasi	106.91	1,196,725,603,238	1,192,975,319,405	0,31
20	Indeks Reformasi Birokrasi	98.89	255,249,579	254,689,695	0,22
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	103.68	7,6000	7,6000	0
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	120.29	15,909,369,623	15,357,4700	3,47
23	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	98.85	19,708,685,080	17,727,102,127	10,05
24	Indeks Survei Penilaian Integritas	109.94	-	-	-
25	Opini Laporan Keuangan Daerah	100.00	1,594,681,457,808	990,276,714,054	37,90
26	Indeks Sistem Merit	107.52	70,372,183,438	58,340,517,803	17,10

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Berdasarkan data realisasi anggaran diatas maka apabila dilakukan perhitungan secara komulatif capaian realisasi serapan anggaran mencapai Rp.45.870.208.577.264,- dari total pagu anggaran gabungan yang programnya mendukung capaian indikator sasaran yaitu Rp.51.977.640.016.685,- atau capaian 88,25 persen dengan nilai efisiensi 11,75%, lebih lanjut, dengan menggunakan rumus nilai efisiensi $NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 79,38 persen, yang artinya secara umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisiensi (*cost-effective*).



2.3.5 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari dilaksanakan program prioritas. Oleh Karena itu, Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemprov DKI Jakarta kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-47
Tabel Capaian Realisasi Program Pendukung Indikator Sasaran

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Program	Anggaran		Capaian
						Pagu	Realisasi	
	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	9,648,699,838,225	8,456,284,338,427	87.64
1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		Percentase pemenuhan layanan dasar perkotaan		Program pengembangan perumahan (hunian layak)	223,389,922,397	100,293,764,305	44.90
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (Air Minum)	37,43000	22,71000	60.67
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (Air Limbah/ Sanitasi)	482,75000	382,85000	79.31
2	Tercapainya perbaikan pola aktifitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit		Percentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	4,896,396,371,874	4,482,475,291,477	91.55
					Program Pengelolaan Pelayaran	161,776,674,760	153,900,618,204	95.13
					Program pengelolaan perkeretaapian	3,308,124,275	2,512,135,232	75.94
					Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	77,286,342,069	49,493,544,684	64.04



No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Program	Anggaran		Capaian
						Pagu	Realisasi	
3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	44,405,412,159	43,019,124,540	96.88
		2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1,982,121,782	1,975,469,477	99.66
4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota		Indeks Risiko Bencana		Program penanggulangan bencana	33,755,570,666	32,974,602,614	97.69
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif			-	-	-	-
1	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah		Laju Pertumbuhan ekonomi		-	-	-	-
2	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja		Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)		program perencanaan tenaga kerja	96,9000	96,9000	100.00
					program penempatan tenaga kerja	41,057,513,856	40,211,148,899	97.94
					program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	101,065,159,084	98,037,272,956	97.00
					program hubungan industrial	2,191,998,980	2,188,5770	99.84
					program pengawasan ketenagakerjaan	3,014,144,763	2,984,245,135	99.01
3	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1	Tingkat Kemiskinan		program pemberdayaan sosial	20,618,627,309	19,348,907,650	93.84
					program perlindungan dan jaminan sosial	879,230,078,598	867,737,699,831	98.69
					program rehabilitasi sosial	30,179,574,862	29,863,930,775	98.95
		2	Rasio Gini		-			



No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Program	Anggaran		Capaian
						Pagu	Realisasi	
					-	-	-	-
		3	Tingkat Kemiskinan Ektrem		-	-	-	-
4	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah		program penelitian dan pengembangan daerah	1,787,711,433	1,546,940,600	86.53
Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia			program pengelolaan pendidikan	3,854,736,064,225	2,676,191,092,123	69.43
					program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	2,906,931,512,295	2,811,710,970,235	96.72
					program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1,226,371,230,102	1,190,673,817,594	97.09
					program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	296,929,291	258,0240	86.90
					program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	486,385,968	470,2140	96.68
					program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	7,390,545,737,606	5,881,273,273,907	79.58
5	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat		Indeks dimensi pendidikan		program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	7,467,640,616,638	7,334,062,221,644	98.21
					program pengelolaan pendidikan	9,494,541,170,405	8,871,086,830,994	93.43
6	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1	Angka Harapan Hidup		program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-	-	-
					program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya	-	-	-



No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Program	Anggaran		Capaian
						Pagu	Realisasi	
7	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender		Indeks Pembangunan Gender		kesehatan masyarakat			
					program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	-	-	-
					program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	-	-	-
					program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	-	-	-
				2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Program terkait stunting	38,054,193,659	29,839,705,923
8	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	2,142,451,307	2,063,087,927	96.30
					program peningkatan kualitas keluarga	2,809,769,012	2,513,613,050	89.46
					program pengelolaan sistem data gender dan anak	51,720,319	4,621,800,977	92.40
9	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat		Indeks Kesejahteraan Masyarakat		program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	6,922,529,585	6,729,568,585	97.21
					program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	13,048,636,400	10,043,9880	76.97
					program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1,342,419,940	1,340,802,600	99.88
					program peningkatan kewaspadaan nasional	651,216,977,078	650,902,687,400	99.95



No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Program	Anggaran		Capaian
						Pagu	Realisasi	
					dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			
					program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	524,195,040,235	523,958,272,820	99.95
	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		Penataan Organisasi	255,249,579	254,689,695	99.78
1	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat		Penataan Organisasi	7,6000	7,6000	100.00
2	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	15,262,419,623	14,710,5200	96.38
					Penataan Organisasi	646,9500	646,9500	100.00
3	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		program penyelenggaraan pengawasan	489,925,500	129,3500	26.40
					program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	16,283,911,188	14,832,891,127	91.09
					program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2,910,148,392	2,740,1610	94.16
		2	Indeks Survei Penilaian Integritas		Penataan Organisasi	24,7000	24,7000	100.00
4	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah		Program pengelolaan keuangan daerah	1,236,689,915,064	650,826,794,148	52.63
					program pengelolaan barang milik daerah	1,633,289,978	1,570,601,800	96.16



No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Program	Anggaran		Capaian
						Pagu	Realisasi	
5	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit		program pengelolaan barang milik daerah	106,594,917,138	99,862,368,174	93.68
					program pengelolaan pendapatan daerah	245,783,075,396	234,264,359,692	95.31
					program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	3,980,260,232	3,752,590,240	94.28
5	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit		program kepegawaian daerah	19,917,457,708	16,613,802,813	83.41
					program kepegawaian daerah	17,090,017,169	13,413,245,541	78.49
					program pengembangan sumber daya manusia	33,364,708,561	28,313,469,449	84.86

Sumber : LKIP Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

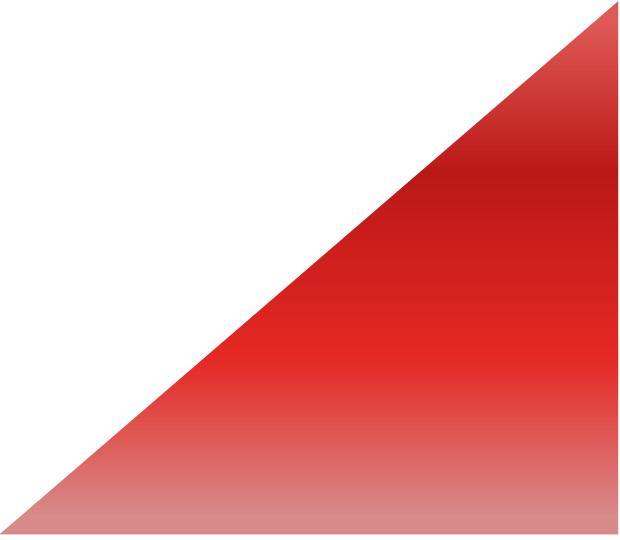
BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN DAN

DEKONSENTRASI



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN**



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

3.1 Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, bahwa otonomi di Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi, dengan demikian di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat kabupaten/kota otonom dan desa, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pemberian tugas pembantuan untuk kabupaten/kota dan desa.

Pada awal tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp.2.621.854.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Anggaran tersebut disampaikan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang melekat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang melekat pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Terkait adanya *refocusing* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi anggaran tugas pembantuan mengalami perubahan. Sehingga pada akhir Triwulan 4 (empat) anggaran tugas pembantuan bertambah menjadi Rp.2.701.004.000,- (dua miliar tujuh ratus satu juta empat ribu rupiah). Berikut kami sampaikan program dan kegiatan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2023 menurut Kementerian/Lembaga selaku pemberi dana tugas pembantuan antara lain :



Tabel III-1

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia			
1	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap SP DIPA-032.03.4.019062/2023	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
Kementerian Pertanian Republik Indonesia			
2.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan SP DIPA-018.06.4.019057/2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Program Dukungan Manajemen	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

3.1.1 Target Kinerja

Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) Satuan Kerja (Satker) tugas pembantuan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Satker 019062 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor SP-DIPA 032.03.4.019062/2023 dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Satker 019057 dengan DIPA nomor SP-DIPA 018.06.4.019057/2023 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendapat 1 (satu) Satker tugas pembantuan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta yaitu Satker 640001 dengan DIPA nomor SP-DIPA 040.01.4.640001/2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan target kinerja sebagai berikut :



Tabel III-2
Target Kinerja Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta menurut
Kementerian/Lembaga pemberi Anggaran Tahun 2023

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL (Rp)	ANGGARAN hasil Revisi (Rp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia					
1.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap				
	Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	150.000.000	0
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		17.700.000	0
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia				167.700.000	0
Kementerian Pertanian Republik Indonesia					
2.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian				
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	85.000.000	85.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		251.550.000	501.550.000
		Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak		421.706.000	428.556.000
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner		452.500.000	452.500.000
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		173.398.000	163.398.000
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia				1.384.154.000	1.631.004.000



No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL (Rp)	ANGGARAN hasil Revisi (Rp)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia					
3.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80.000.000
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		80.000.000
			Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata		300.000.000
			Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)		500.000.000
		Program Dukungan Manajemen	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan		110.000.000
		Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia		1.070.000.000	1.070.000.000
TOTAL ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI DKI JAKARTA				2.621.854.000	2.701.004.000

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Anggaran tugas pembantuan yang diterima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah sebesar Rp.167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) melekat pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor SP DIPA-032.03.4.019062/2023. Dalam rangka penguatan tugas kerja Pemerintah, anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di *refocusing* seluruhnya sehingga pada akhir Triwulan 4 (empat) anggaran tugas pembantuan yang diterima Provinsi DKI Jakarta menjadi Rp.0,- (nol rupiah).

Anggaran tugas pembantuan yang diterima dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah sebesar Rp.1.384.154.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) melekat pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor SP DIPA-018.06.4.019057/2023. Karena adanya *refocusing* dari



kementerian terkait, alokasi anggaran mengalami perubahan seiring berjalannya waktu yaitu penambahan anggaran pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak sebesar Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), pengurangan anggaran pada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen peternakan dan kesehatan hewan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga pada akhir Triwulan 4 (empat) anggaran tugas pembantuan yang diterima Provinsi DKI Jakarta berubah menjadi Rp.1.631.004.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ribu rupiah).

Anggaran tugas pembantuan yang diterima dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia adalah sebesar Rp.1.070.000.000,- (satu miliar tujuh puluh juta rupiah) melekat pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor SP DIPA-040.01.4.640001/2023.

3.1.2 Realisasi

Dalam pelaksanaanya, sampai dengan 31 Desember 2023 total anggaran tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.701.004.000,- (dua miliar tujuh ratus satu juta empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.2.631.880.121,- (dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah) atau 97,44 persen, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :



Tabel III-3
Realisasi Anggaran dan Kinerja Tugas Pembantuan Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2023

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia						
1.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap					
	Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	0	0	0,00
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		0	0	0,00
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia				0	0	0,00
Kementerian Pertanian Republik Indonesia						
2.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan					
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	85.000.000	84.196.947	99,06
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		501.550.000	497.975.508	99,29
		Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak		428.556.000	421.742.724	98,41
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner		452.500.000	446.077.820	98,58
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		163.398.000	157.314.054	96,28
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia				1.631.004.000	1.607.307.053	98,55



No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia						
3.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80.000.000	79.371.850	99,21
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata		80.000.000	76.364.396	95,46
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		300.000.000	291.749.700	97,25
		Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata		500.000.000	469.916.286	93,98
		Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)		110.000.000	107.170.836	97,43
		Program Dukungan Manajemen		Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	1.070.000.000	1.024.573.068
TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI DKI JAKARTA				2.701.004.000	2.631.880.121	97,44

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

3.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta ada beberapa kendala dan permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penyerapan diantaranya sebagai berikut :

1. Penyampaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tugas pembantuan dari Kementerian/Lembaga dilakukan pada awal Triwulan 2 (dua) tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
2. Belum adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dari Kementerian/Lembaga pemberi tugas pembantuan kepada satuan kerja penerima sehingga ada kendala-kendala teknis dari Perangkat Daerah yang tidak dapat termonitor dan tereksekusi secara langsung oleh Kementerian/Lembaga.



3. Adanya pergantian pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran berjalan sehingga membutuhkan proses administrasi yang memperlambat realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran.

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran dan tindak lanjut dari permasalahan pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan satuan kerja terus berkoordinasi aktif dengan Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Biro Pemerintahan selaku sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sekaligus sebagai unit kerja bidang pemerintahan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi. Diharapkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan kepada seluruh satuan kerja penerima tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta dapat membantu dalam mendapatkan solusi atas kendala teknis yang dihadapi oleh perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan.
3. Para satuan kerja untuk berkoordinasi aktif dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait proses administratif pergantian pejabat agar efektif dan efisien.

3.4 Dekonsentrasi yang Dilaksanakan oleh Daerah

Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi.



Adapun penyelenggaraan Dekonsentrasi pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Instansi Pemberi Dekonsentrasi dan Instansi Pelaksana

Pada awal tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari 12 (dua belas) Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kepada 8 (delapan) Perangkat Daerah yang terdiri dari :

Tabel III-4

Instansi Pemberi dan Instansi Pelaksana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT KERJA ESELON I	INSTANSI PELAKSANA
1	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
2	Kementerian Kesehatan	Sekretariat Jenderal	Dinas Kesehatan
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretariat Jenderal	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
		Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
		Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
		Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
		Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
		Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
		Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
4	Kementerian Pertanian	Direktorat Jenderal Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
		Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
		Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
5	Badan Pangan Nasional	-	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
6	Kementerian Perindustrian	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	Kementerian Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	UNIT KERJA ESELON I	INSTANSI PELAKSANA
9	Kementerian Ketenagakerjaan	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
		Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
		Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
		Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
10	Kementerian Pemuda dan Olahraga	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Perpustakaan Nasional	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

2) Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 menurut Kementerian/Lembaga dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel III-5

Program dan Kegiatan Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No.	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
1	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan SP DIPA-010.04.3.019080/2023	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia			
2.	Sekretariat Jenderal SP DIPA-024.01.3.010024/2023	Program Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat di Provinsi
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi
			Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
			Pengelolaan Krisis Kesehatan



No.	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia			
3.	Sekretariat Jenderal SP DIPA-032.01.3.010076/2023	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN
			Pengelolaan Data dan Informasi
4.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap SP DIPA-032.03.3.019020/2023	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
			Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
5.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya SP DIPA-032.04.3.019022/2023	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
			Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya
6.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.05.3.019023/2023	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan PSDKP
7.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.06.3.019024/2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
			Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Perikanan dan Kelautan
			Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP



No.	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
8.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut SP DIPA-032.07.3.603201/2023	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Perencanaan Ruang Laut
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
9.	Direktorat Jenderal Hortikultura SP DIPA-018.04.3.019031/2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Holtikultura
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perlindungan Hortikultura
			Perbenihan Hortikultura
10.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan SP DIPA-018.03.3.019044/2023	Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
11.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian SP SIPA-018.10.3.019071/2023	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
12.	Badan Pangan Nasional RI SP DIPA-125.01.3.690699/2023	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasukan dan Harga Pangan
			Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
			Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional
13.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka SP DIPA-019.05.3.019070/2023	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Indunstri Kecil, Menengah dan Aneka
		Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka
14.	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI SP DIPA-044.01.3.010007/2023	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah
15.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri SP DIPA-090.02.3.019043/2023	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah



No.	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
16.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri SP DIPA-090.03.3.019016/2023	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri
17.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja SP DIPA-026.13.3.019013/2023	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
			Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
18.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas SP DIPA-026.13.3.019015/2023	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas
			Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalovitas
			Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalovitas
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
19.	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja SP DIPA-026.13.3019041/2023	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
			Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
20.	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja SP DIPA-026.13.3.019069/2023	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
21.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI SP DIPA-092.01.3.010026/2023	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga



No.	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
22.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI SP DIPA-065.01.3.650101/2023	Program Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
23.	Perpustakaan Nasional RI SP DIPA-057.01.3.015112/2023	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

3.4.1 Target Kinerja

Pada awal tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi sebesar Rp.23.411.334.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Anggaran tersebut disampaikan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian; Badan Pangan Nasional; Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Perdagangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Perpustakaan Nasional yang melekat pada 8 (delapan) Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta, yaitu : Biro Pemerintahan; Dinas Kesehatan; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Karena adanya *refocusing* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi anggaran dekonsentrasi mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Sehingga, pada akhir Triwulan 4 (empat) anggaran tugas pembantuan berkurang menjadi Rp.21.856.011.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta sebelas ribu rupiah).



Tabel III-6
Target Kinerja Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN HASIL REVISI			
				(Rp)	(Rp)			
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia								
1.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan							
	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	Biro Pemerintahan	320.000.000	229.146.000			
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan			320.000.000	229.146.000			
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia				320.000.000	229.146.000			
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia								
2.	Sekretariat Jenderal							
	Program Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat di Provinsi	Dinas Kesehatan	4.186.449.000	3.433.735.000			
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi		2.071.135.000	1.449.688.000			
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi		497.568.000	487.968.000			
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi		2.066.168.000	1.148.603.000			
		Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji		1.632.682.000	1.632.682.000			
		Pengelolaan Krisis Kesehatan		105.410.000	105.410.000			
	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara		258.580.000	258.580.000			
		Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan		623.360.000	281.850.000			
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		314.244.000	260.504.000			
Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan				11.755.596.000	9.059.020.000			
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia				11.755.596.000	9.059.020.000			



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN HASIL REVISI		
				(Rp)	(Rp)		
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia							
3.	Sekretariat Jenderal						
	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	296.842.000	158.988.000		
		Pengelolaan Data dan Informasi		45.636.000	22.711.000		
	Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perikanan			342.478.000	181.699.000		
4.	Direktorat Jenderal Perikanan						
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	39.990.000	30.354.000		
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		123.120.000	0		
		Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan		32.318.000	18.121.000		
		Pengelolaan Sumber Daya Ikan		11.150.000	6.177.000		
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		175.915.000	125.411.000		
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan			382.493.000	180.063.000		
5.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya						
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	36.050.000	36.050.000		
		Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan		58.000.000	58.000.000		
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditiej Perikanan Budidaya		204.936.000	143.455.000		
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			298.986.000	237.505.000		
6.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	61.850.000	61.850.000		
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan PSDKP		56.252.000	56.252.000		
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			118.102.000	118.102.000		



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN HASIL REVISI	
				(Rp)	(Rp)	
7.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan					
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	82.500.000	0	
		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan		70.250.000	0	
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Perikanan dan Kelautan		100.000.000	0	
		Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan		88.230.000	0	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP		175.650.000	177.920.000	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			616.630.000	177.920.000	
8.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut					
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	25.000.000	0	
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Perencanaan Ruang Laut		172.500.000	172.500.000	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut		45.000.000	45.000.000	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut			242.500.000	217.500.000	
	Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kelautan Republik Indonesia			2.001.189.000	1.112.789.000	
	Kementerian Pertanian Republik Indonesia					
9.	Direktorat Jenderal Hortikultura					
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	78.168.000	78.168.000	
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perlindungan Hortikultura		110.000.000	110.000.000	
		Perbenihan Hortikultura		940.750.000	360.750.000	



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN HASIL REVISI	
				(Rp)	(Rp)	
	Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		386.000.000	386.000.000	
	Total Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Hortikultura				1.514.918.000	
10.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan					
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	84.000.000	84.000.000	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		29.400.000	29.400.000	
	Total Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan				113.400.000	
11.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian					
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	546.952.000	570.352.000	
	Anggaran Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian				546.952.000	
	Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia				2.175.270.000	
					1.618.670.000	



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN HASIL REVISI	
				(Rp)	(Rp)	
Badan Pangan Nasional Republik Indonesia						
12.	Badan Pangan Nasional Republik Indonesia	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasukan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	934.634.000	
			Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi		466.695.000	
			Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		1.194.172.000	
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional		50.000.000	
		Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia			2.645.501.000	
Total Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia				2.645.501.000	2.645.501.000	
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia						
13.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Indunstri Kecil, Menengah dan Aneka	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.036.910.000	
			Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka		69.840.000	
			Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka		1.106.750.000	
		Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia		1.106.750.000	1.106.750.000	
		Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN HASIL REVISI				
				(Rp)	(Rp)				
14.	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	325.608.000	330.166.000				
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			325.608.000	330.166.000				
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				325.608.000	330.166.000				
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia									
15.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri								
	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	317.242.000	317.242.000				
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri			317.242.000	317.242.000				
16.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri								
	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	179.030.000	86.684.000				
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri		98.720.000	73.720.000				
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri			277.750.000	160.404.000				
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia				594.992.000	477.646.000				
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia									
17.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	565.775.000	565.775.000				
		Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		189.630.000	189.630.000				
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		95.520.000	95.520.000				
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				850.925.000	850.925.000				



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN HASIL REVISI	
				(Rp)	(Rp)	
18.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas					
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	195.400.000	195.400.000	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalovitas		1.196.865.000	1.196.865.000	
		Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalovitas		121.805.000	121.805.000	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas		188.790.000	188.790.000	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas			1.702.860.000	1.702.860.000	
19.	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja					
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	70.715.000	70.715.000	
		Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja		144.000.000	144.000.000	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		133.150.000	151.105.000	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			347.865.000	365.820.000	



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN HASIL REVISI	
				(Rp)	(Rp)	
20.	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	61.823.000	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		151.120.000	
			Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan		64.120.000	
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		145.156.000	
		Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			422.219.000	
		Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia			3.323.869.000	
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia						
21.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.346.950.000	
					1.346.950.000	
					1.346.950.000	
		Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga			1.346.950.000	
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia				1.346.950.000	1.346.950.000	
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia						
22.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Program Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	239.208.000	
					369.667.000	
					369.667.000	
		Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal			239.208.000	
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia				239.208.000	369.667.000	



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN HASIL REVISI			
				(Rp)	(Rp)			
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia								
23.	Perpustakaan Nasional							
	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	221.902.000	221.902.000			
	Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional			221.902.000	221.902.000			
Total Anggaran Dekonsetrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				221.902.000	221.902.000			
TOTAL DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI DKI JAKARTA				23.411.334.000	21.856.011.000			

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

3.4.2 Realisasi

Dalam pelaksanaanya, sampai dengan 31 Desember 2023 total anggaran dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah sebesar Rp.21.856.011.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta sebelas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.20.280.336.877,- (dua puluh miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 99,88 persen, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III-7
Realisasi Anggaran dan Kinerja Dekonsentrasi
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023

No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN HASIL REVISI	REALISASI ANGGARAN	PERSEN		
				(Rp)	(Rp)			
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia								
1.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan							
	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	Biro Pemerintahan	229.146.000	228.869.002	96,57		
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan			229.146.000	228.869.002	96,57		
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia				229.146.000	228.869.002	96,57		



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN HASIL REVISI	REALISASI ANGGARAN	PERSEN		
				(Rp)	(Rp)			
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia								
2.	Sekretariat Jenderal							
	Program Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat di Provinsi	Dinas Kesehatan	3.433.735.000	2.699.162.000	78,61		
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi		1.449.688.000	1.322.546.595	91,23		
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi		487.968.000	447.883.500	91,79		
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi		1.148.603.000	1.047.605.800	91,21		
		Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji		1.632.682.000	1.517.478.500	92,94		
		Pengelolaan Krisis Kesehatan		105.410.000	103.810.000	98,48		
	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara		258.580.000	228.112.810	88,22		
		Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan		281.850.000	268.928.000	95,42		
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		260.504.000	257.554.600	98,87		
Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan				9.059.020.000	7.893.081.805	87,13		
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia				9.059.020.000	7.893.081.805	87,13		
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia								
3.	Sekretariat Jenderal							
	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	158.988.000	145.559.000	91,55		
		Pengelolaan Data dan Informasi		22.711.000	15.895.000	69,99		
	Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perikanan			181.699.000	161.454.000	88,89		



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN HASIL REVISI	REALISASI ANGGARAN	PERSEN	
				(Rp)	(Rp)		
4.	Direktorat Jenderal Perikanan						
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	30.354.000	29.420.000	96,92	
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		0	0	0,00	
		Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan		18.121.000	13.349.000	73,67	
		Pengelolaan Sumber Daya Ikan		6.177.000	0	0,00	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		125.411.000	122.614.540	97,77	
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan				180.063.000	165.383.540	91,85	
5.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya						
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	36.050.000	36.050.000	100	
		Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan		58.000.000	57.656.000	99,41	
		Program Dukungan Manajemen		143.455.000	141.373.655	98,55	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			237.505.000	235.079.655	98,98	
	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						
6.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	DKPKP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	61.850.000	61.689.250	99,74	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan PSDKP		56.252.000	52.406.728	93,16	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			118.102.000	114.095.978	96,61	



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN HASIL REVISI	REALISASI ANGGARAN	PERSEN	
				(Rp)	(Rp)		
7.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan						
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	0	0	0,00	
		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan		0	0	0,00	
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Perikanan dan Kelautan		0	0	0,00	
		Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan		0	0	0,00	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP		177.920.000	177.233.219	99,61	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			177.920.000	177.233.219	99,61	
8.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut						
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	0	0	0,00	
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Perencanaan Ruang Laut		172.500.000	170.688.000	98,95	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut		45.000.000	44.214.242	98,25	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut			217.500.000	214.902.242	98,81	
	Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kelautan Republik Indonesia			1.112.789.000	1.068.148.634	95,99	



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN HASIL REVISI	REALISASI ANGGARAN	PERSEN	
				(Rp)	(Rp)		
9.	Direktorat Jenderal Hortikultura						
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Holtikultura	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	78.168.000	78.168.000	100	
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perlindungan Hortikultura		110.000.000	109.390.060	99,45	
		Perbenihan Hortikultura		360.750.000	356.982.599	98,96	
	Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		386.000.000	384.348.664	99,57	
Total Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Hortikultura				934.918.000	928.889.323	99,36	
10.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan						
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	84.000.000	83.452.006	99,35	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan		29.400.000	29.400.000	100	
	Total Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan			113.400.000	112.852.066	99,52	
11.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian						
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	570.352.000	562.579.797	98,64	
	Anggaran Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian			570.352.000	562.579.797	98,64	
	Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia			1.618.670.000	1.604.321.186	99,11	



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN HASIL REVISI	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
				(Rp)	(Rp)	
Badan Pangan Nasional Republik Indonesia						
12.	Badan Pangan Nasional Republik Indonesia		Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	934.634.000	894.331.340	95,69
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasukan dan Harga Pangan		466.695.000	371.927.792	79,69
		Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi		1.194.172.000	1.135.508.481	95,09
		Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		50.000.000	49.560.846	99,12
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional		2.645.501.000	2.451.328.459	92,66
Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia						
Total Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia				2.645.501.000	2.451.328.459	92,66
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia						
13.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.036.910.000	1.029.489.752	99,28
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Indunstri Kecil, Menengah dan Aneka		69.840.000	69.840.000	100
	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka		1.106.750.000	1.099.329.752	99,33
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka						
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia				1.106.750.000	1.099.329.752	99,33



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN HASIL REVISI	REALISASI ANGGARAN	PERSEN		
				(Rp)	(Rp)			
Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia								
14.	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	330.166.000	307.477.498	93,13		
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			330.166.000	307.477.498	93,13		
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				330.166.000	307.477.498	93,13		
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia								
15.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri							
	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	317.242.000	317.114.000	99,96		
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri			317.242.000	317.114.000	99,96		
16.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri							
	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	86.684.000	82.805.630	95,53		
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri		73.720.000	73.533.484	99,75		
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri			160.404.000	156.339.114	97,47		
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia				477.646.000	473.453.114	99,12		



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN HASIL REVISI	REALISASI ANGGARAN	PERSEN			
				(Rp)	(Rp)				
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia									
17.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja								
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Disnakertransgi	565.775.000	561.948.700	99,32			
		Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		189.630.000	185.190.000	97,66			
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		95.520.000	95.461.000	99,94			
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			850.925.000	842.599.700	99,02			
18.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas								
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	195.400.000	195.100.000	99,85			
		Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalovitas		1.196.865.000	1.171.059.000	97,84			
		Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalovitas		121.805.000	121.805.000	100			
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas		188.790.000	164.071.801	86,91			
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas				1.702.860.000	1.652.035.801	97,02			



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN HASIL REVISI	REALISASI ANGGARAN	PERSEN
				(Rp)	(Rp)	
19.	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja					
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	70.715.000	70.700.000	99,98
		Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja		144.000.000	129.681.500	90,06
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		151.105.000	148.629.322	98,36
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			365.820.000	349.010.822	95,41
20.	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	57.803.000	57.536.000	99,54
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		151.120.000	149.820.000	99,14
		Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan		64.120.000	62.666.500	97,73
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		145.156.000	140.504.943	96,80
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			418.199.000	410.527.443	98,17
	Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia			3.337.804.000	3.254.173.766	97,49
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia						
21.	Kementerian Pemuda dan Olahraga					
	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.346.950.000	1.342.378.348	99,66
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga			1.346.950.000	1.342.378.348	99,66
	Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia			1.346.950.000	1.342.378.348	99,66
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia						



No	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN HASIL REVISI	REALISASI ANGGARAN	PERSEN			
				(Rp)	(Rp)				
22.	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal								
	Program Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	369.667.000	339.478.000	91,83			
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal			369.667.000	339.478.000	91,83			
	Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia			369.667.000	339.478.000	91,83			
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia									
23.	Perpustakaan Nasional								
	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	221.902.000	218.297.313	98,38			
	Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional			221.902.000	218.297.313	98,38			
Total Anggaran Dekonsetrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				221.902.000	218.297.313	98,38			
TOTAL DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI DKI JAKARTA				21.856.011.000	20.280.336.877	92,79			

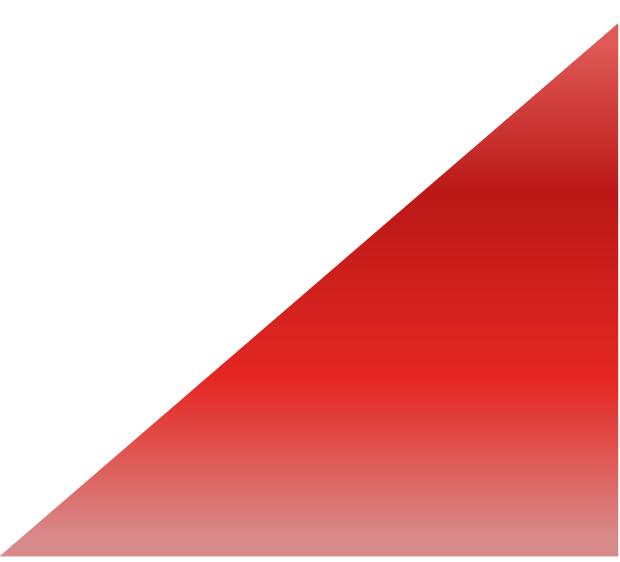
Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN**



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menjadi 2 (dua) lingkup penyelenggara baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta, otonomi daerah terletak di provinsi oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan secara keseluruhan pelayanan dasar urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang terdiri atas :

1. Pendidikan Menengah;
2. Pendidikan Khusus;
3. Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Pendidikan Dasar; dan
5. Pendidikan Kesetaraan.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan :

1. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
2. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
3. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
4. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
5. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.



Lebih lanjut jenis layanan serta mutu pelayanan dasar bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target capaian pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan adalah 100 persen.

4.1.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Menengah

Dalam rangka pemenuhan target SPM di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta untuk memastikan penduduk anak usia sekolah telah mendapatkan akses dan kualitas pendidikan yang tuntas dan berkualitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa program untuk mencapai hal tersebut antara lain :

1. Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
2. Perluasan akses pendidikan bagi peserta didik tidak mampu yang tidak diterima pada satuan pendidikan negeri melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama, dan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS);
3. Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus; dan
4. Tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).



Tabel IV-1
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Daerah Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			95.92%
1	Pendidikan Menengah					97.30%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.38%
A	Jumlah yang Harus Dilayani		538.165	527.254	10.911	97.97%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18,93%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	SMA					
1)	Angka partisipasi kasar	%	100	100.49	-1.49	100.00%
2)	Angka partisipasi sekolah	%	100	72,5	27.5	72,50%
3)	Angka partisipasi murni	%	100	79.55	20.45	79.55%
4)	Kemampuan literasi	Nilai	78.19	75	3.05	96,10%
5)	Kemampuan numerasi	Nilai	64.43	62.47	1.96	96.96%
6)	Perbedaan skor literasi	Nilai	5.71	5.71	0	100.00%
7)	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3.18	3.18	0	100.00%
8)	Indeks iklim keamanan	Nilai	89.63	86.24	3.39	96.22%
9)	Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	Nilai	100	90	9.14	90.86%
10)	Kecukupan formasi guru ASN	%	37.5	37.5	0	100.00%
11)	Indeks distribusi guru	%	0.45	0.45	0	100.00%
12)	Proporsi PTK bersertifikat	%	86.9	86.9	0	100.00%
13)	Proporsi PTK penggerak	%	0.13	0.13	0	100.00%
14)	Pengalaman pelatihan guru	%	36.9	36.9	0	100.00%
	SMK					
1)	Angka partisipasi kasar	%	100	10	-1.49	100.00%
2)	Angka partisipasi sekolah	%	100	72	27.5	72.50%
3)	Angka partisipasi murni	%	100	79	20.45	79.55%
4)	Kemampuan literasi	Nilai	68.93	66.04	2.89	95.81%
5)	Kemampuan numerasi	Nilai	56.45	54	2.45	95.66%
6)	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	30	86.80	-56.8	100.00%
7)	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	77	72.51	4.49	94.17%
8)	Perbedaan skor literasi	Nilai	4.99	4.99	0	100.00%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	9) Perbedaan skor numerasi	Nilai	3.22	3.22	0	100.00%
	10) Indeks iklim keamanan	%	100	82	18	82.00%
	11) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	100	87	13	87.00%
	12) Kecukupan formasi guru ASN	%	50	50	0	100.00%
	13) Indeks distribusi guru	%	0.34	0.34	0	100.00%
	14) Proporsi PTK bersertifikat	%	89.25	89.25	0	100.00%
	15) Proporsi PTK penggerak	%	0.05	0.05	0	100.00%
	16) Pengalaman pelatihan guru	%	32.5	32	0	100.00%
1	Pendidikan Khusus					94.54%
	Percentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.88%
A	Jumlah yang Harus Dilayani		23.749	22.527	1.222	94.85%
	Percentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					18.65%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	1) Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	0.00%
	2) Angka partisipasi sekolah	%	100	29.4	70.6	29.40%
	3) Angka partisipasi murni	%	0	0	0	0.00%
	4) Kemampuan literasi	Nilai	62.11	59	3.11	94.99%
	5) Penyediaan biaya personil peserta didik	Nilai	55.97	53	2.97	94.69%
	6) Perbedaan skor literasi	Nilai	4.3	4.3	0	100.00%
	7) Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.04	2.04	0	100.00%
	8) Indeks iklim keamanan	Nilai	80	80	0	100.00%
	9) Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	80.03	80	0	100.00%
	10) Kecukupan formasi guru ASN	%	50	50	0	100.00%
	11) Indeks distribusi guru	%	0.39	0.39	0	100.00%
	12) Proporsi PTK bersertifikat	%	91.35	91.35	0	100.00%
	13) Proporsi PTK penggerak	%	0.04	0.04	0	100.00%
	14) Pengalaman pelatihan guru	%	48.2	48.2	0	100.00%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2023



Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pendidikan menengah pada tahun 2023 sebesar 97,97 persen dari target 100 persen. Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 16 s.d 18 tahun pada tahun 2023 sebanyak 538.165 orang, sebanyak 527.254 bersekolah pada pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong dan memastikan penduduk anak usia sekolah mendapatkan akses dan kualitas pendidikan yang tuntas dan berkualitas.

Sementara itu Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pendidikan khusus pada tahun 2023 sebesar 94,85 persen dari target 100 persen. Berdasarkan data penduduk DKI penyandang Disabilitas usia 4 s.d 18 tahun sebanyak 23.749 orang, sementara itu sebanyak 22.527 orang bersekolah baik pada sekolah khusus (SLB) maupun pada sekolah formal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah memfasilitasi anak penyandang disabilitas untuk dapat bersekolah, Pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta terdapat jalur khusus Anak penyandang Disabilitas memiliki kuota 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar di Satuan Pendidikan Formal (SD, SMP, SMA, dan SMK). Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0051 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0037 Tahun 2023 tentang Alur Proses Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024. Dengan demikian peserta didik anak disabilitas di DKI Jakarta sudah terfasilitasi bersekolah di Satuan Pendidikan Formal selain di Sekolah Luar Biasa (SLB).



Tabel IV-2
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			85.60 %
1	Pendidikan Dasar Usia Dini					78.36%
	Percentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	60.06%
A.	Jumlah yang Harus Dilayani		371.020	278.542	92.478	75.07 %
	Percentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					18.30%
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	60.55	39.45	60.55%
	2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	70	65.98	4.02	94.26%
	3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	100	77.175	22.825	77.18%
	4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0.51	0.51	0	100.00%
	5. Kecukupan formasi guru ASN	%	Tutup Indikator	Tutup Indikator	Tutup Indikator	0.00%
	6. Indeks distribusi guru	%	0.17	0.17	0	100.00%
	7. Proporsi PTK bersertifikat	%	27.5	27.5	0	100.00%
	8. Proporsi PTK penggerak	%	0.1	0.1	0	100.00%
	9. Pengalaman pelatihan guru	%	0.03	0.03	0	100.00%
2	Pendidikan Dasar					98.58%
	Percentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.12%
A.	Jumlah yang Harus Dilayani		1.710.522	1.691.688	18.834	98.90%
	Percentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					19.46%
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	97.28%
	Sekolah Dasar					
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	100.65	-0.65	100.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	99	1	99.00%
	3. Angka partisipasi murni	%	100	94.97	5.03	94.97%
	4. Kemampuan literasi	Nilai	60	60	0	100.00%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	44	44	0	100.00%
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	1.8	1.8	0	100.00%
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.44	0.44	0	100.00%
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	100	86.94	13.06	86.94%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	100	89.06	13.94	86.06%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	35	35	0	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.38	0.38	0	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	89.85	89.85	0	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0.1	0.1	0	100.00%
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	57.2	57.2	0	100.00%
	SMP					
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	105.6	-5.6	100.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	99	1	99.00%
	3. Angka partisipasi murni	%	100	88.07	11.93	88.07%
	4. Kemampuan literasi	Nilai	71	71	0	100.00%
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	58	58	0	100.00%
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	4.9	4.9	0	100.00%
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.44	2.44	0	100.00%
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	100	84.84	15.16	84.84%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	100	84.94	15.06	84.94%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	39	39	0	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.34	0.34	0	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	90.15	90.15	0	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0.07	0.07	0	100.00%
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	48	48	0	100.00%
3	Pendidikan Kesetaraan					79.88%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	62.45%
A.	Jumlah yang Harus Dilayani		29.745	23.219	6.526	78.06%
B.	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	78.06%
	1. Angka partisipasi kasar	%	Tutup Indikator	Tutup Indikator	Tutup Indikator	0.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	10	90	10.00%
	3. Angka partisipasi murni	%	Tutup Indikator	Tutup Indikator	Tutup Indikator	0.00%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	4. Kemampuan literasi	Nilai	60.43	60.43	0	100.00%
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	47.7	47.7	0	100.00%
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	4.13	4.13	0	100.00%
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	2.5	2.5	0	100.00%
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	69.33	69.33	0	100.00%
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	Nilai	60.75	60.75	0	100.00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	Tutup Indikator	Tutup Indikator	Tutup Indikator	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	%	Tutup Indikator	Tutup Indikator	Tutup Indikator	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	Tutup Indikator	Tutup Indikator	Tutup Indikator	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak	%	Tutup Indikator	Tutup Indikator	Tutup Indikator	100.00%
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	Tutup Indikator	Tutup Indikator	Tutup Indikator	100.00%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2023



Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2023 sebesar 75.07 persen dari target 100 persen. Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 3 s.d 6 tahun pada tahun 2023 sebanyak 371.020 orang, sebanyak 278.542 mengenyam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk meningkatkan partisipasi anak usia dini serta menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan terus melakukan kampanye pentingnya PAUD 1 tahun sebelum SD secara berjenjang yang merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dengan melibatkan Kader PKK, RT, RW dan tokoh masyarakat. Orang tua memiliki peran yang besar dalam menyekolahkan anaknya ke PAUD. Latar belakang sosial-ekonomi dan pendidikan orang tua secara langsung berpengaruh terhadap paradigma terhadap PAUD. Kampanye pentingnya layanan PAUD 1 Tahun Sebelum SD sudah dilakukan secara masif, meski demikian, perlu ada pensasaran (targeting) yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas Kampanye Layanan PAUD.

Sementara itu Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar pendidikan Dasar pada tahun 2023 sebesar 98,90 persen dari target 100 persen. Berdasarkan data penduduk DKI usia 7 s.d 15 tahun sebanyak 1.710.522 orang, sebanyak 1.691.688 bersekolah pada pendidikan dasar.

4.1.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-3
Lokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1.	APBD DKI Jakarta	79.558.253.790.537
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Pendidikan)	16.962.181.787.043
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	9.494.541.170.405
	APBD	9.494.541.170.405
	a) APBD Murni	9.494.541.170.405
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasi	0
	f) Kerjasama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	a) APBD DAK Fisik	0



No	Pendanaan	Pagu (Rp)
	APBN	0
	b) APBN - Dekonsentrasi	0
	c) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.1.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-4
Dukungan Personil SPM Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	4.761	2.897	14.763
2.	Pengelolaan Pendidikan Khusus	413	215	744
3.	Pendidikan Dasar	17.282	12.357	25.591
4.	Pendidikan Kesetaraan	-	308	1.434
5.	Pendidikan Anak Usia Dini	101	156	12.603
	Jumlah	22.557	15.933	55.135

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.1.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-5
Permasalahan dan Solusi SPM Pendidikan

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	1. Data yang terinput di dalam Aplikasi Dapodik (Data Pokok Kependidikan) yang menjadi data acuan dalam kependidikan masih belum terinput dengan baik oleh Sekolah 2. Adanya perubahan data dikarenakan adanya perubahan jumlah siswa serta jumlah tenaga kependidikan di tahun berjalan 3. Belum terintegrasinya data <i>Education Management Information System</i> (EMIS) dengan Dapodik	Perlu dilakukan rekonsiliasi data antara data riil dengan data yang diinput kedalam sistem Dapodik Perlu disepakati adanya cut off data pada Dapodik untuk pelaporan Melakukan koordinasi antara Kemendikbudristek dengan Kemenag terkait data pendidikan-
2.	Penghitung Kebutuhan	Adanya penambahan ataupun pengurangan kebutuhan pada beberapa indikator, sehingga harus dilakukan penghitungan secara merinci dan didukung dengan data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan	Perlu dilakukan perhitungan mandiri untuk menambah maupun mengurangi data dasar kebutuhan, dengan menggunakan data pembanding dari Dapodik



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
3.	Perencanaan dan Penganggaran	1. Belum terintegrasi secara langsung sistem penganggaran dengan anggaran SPM 2. Tagging SPM pada <i>Smart Planning Budgeting</i> tidak muncul pada saat export data	Perlu dilakukan koordinasi dengan Bappeda selaku pengelola sistem <i>Smart Planning Budgeting</i> agar anggaran SPM dapat menjadi perhatian Mengoptimalkan anggaran yang ada
	4. Pelaksanaan	-	-
	5. Lain-lain	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta, SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh perangkat daerah mengikuti bentuk otonomi tunggal Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
3. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
4. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
5. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
6. Pelayanan kesehatan balita;
7. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
8. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
9. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
10. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
11. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;



12. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
13. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
14. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Adapun ketentuan terhadap mutu pelayanan dasar dan tata cara pemenuhannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, target capaian pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100 persen.



4.2.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-6
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan Daerah Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	80.00 %
A.	Jumlah yang Harus Dilayani		34.393	34.393	0	100.00 %
Pra Krisis Kesehatan						
Percentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)						
A.	Jumlah Mutu Barang /Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Edukasi pengurangan risikokrisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal diwilayah berpotensi bencana	Orang	18.519	18.519	0	100.00 %
	2. Petugas Kesehatan	Orang	536	536	0	100.00 %
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
Ya Terjadi Kejadian Luar Biasa						
A	Jumlah Yang Harus Dilayani		11.249.585	11.249.585	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	4.510	4.510	0	100.00 %
	2) Profilaksis/ Vitamin/Obat /Vaksin	Unit	390	390	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	3) Wadah Pengiriman Spesimen	Unit	218	218	0	100.00 %
	4) Tempat sampah biologis	Unit	28.958	28.958	0	100.00 %
	5) Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	*	2.405	2.405	0	100.00 %
	6) Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	2.685	2.685	0	100.00 %
	7) Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	2.458	2.458	0	100.00 %
	8) Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	1.161	1.161	0	100.00 %
	9) Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	62	62	0	100.00 %
	10) Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan Lingkungan	Orang	264	264	0	100.00 %
	11) Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	4	4	0	100.00 %
	12) Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	335	335	0	100.00 %
	13) Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluhan/promosi kesehatan	Orang	49	49	0	100.00 %
	14) Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	1.471	1.471	0	100.00 %

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2023

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan Daerah Provinsi memiliki 2 indikator yaitu Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi dan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi dengan capaian kedua indikator tersebut adalah 100 persen. Adapun faktor pendorong capaian Indikator SPM ini adalah sudah terbentuknya tim Penanggulangan bencana di tingkat wilayah dan adanya serta adanya koordinasi dan kolaborasi tim Gawat darurat Dinas Kesehatan dengan lintas sektor seperti Dishub, Satpol PP, BPBD sehingga proses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana dapat segera dilaksanakan.



Tabel IV-7
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			99.86 %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					99,33%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Yang belum Terlayani	79.43 %
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	206.607	205.131	1.476	99%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					19.90 %
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	99,52%
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	206.607	205.131	1.476	99,29%
2)	Tablet tambah darah	Tablet	206.607	205.131	1.476	99,29%
3)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	206.607	205.131	1.476	99,29%
4)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	206.607	205.131	1.476	99,29%
5)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	206.607	205.131	1.476	99,29%
6)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	206.607	205.131	1.476	99,29%
7)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	206.607	205.131	1.476	99,29%
8)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	206.607	205.131	1.476	99,29%
9)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	356	356	0	100.00 %
10)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	740	740	0	100.00 %
11)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	63	63	0	100.00 %
12)	Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	206.607	206.607	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Jumlah Yang belum Terlayani	80.00 %
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	197.220	197.220	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					20.00 %
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang belum Terlayani	100%
1)	Formulir Partografi	Formulir	197.220	197.220	0	100.00 %
2)	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	197.220	197.220	0	100.00 %
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	197.220	197.220	0	100.00 %
4)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	475	475	0	100.00 %
5)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.215	1.215	0	100.00 %
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	179	179	0	100.00 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					99,51%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	79.50 %
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	202.027	200.958	1.069	99.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					19,93%
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	99,65%
1)	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	202.027	200.958	1.069	99,47%
2)	Vitamin K1 injeksi	Ampul	202.027	200.958	1.069	99,47%
3)	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	202.027	200.958	1.069	99,47%
4)	Formulir bayi baru lahir	Formulir	202.027	200.958	1.069	99,47%
5)	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	202.027	200.958	1.069	99,47%
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	202.027	200.958	1.069	99,47%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	7) Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	520	520	0	100.00 %
	8) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.174	1.174	0	100.00 %
	9) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	573	573	0	100.00 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	80.00 %
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	685.696	685.696	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					20.00 %
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1) Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	685.696	685.696	0	100.00 %
	2) Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	685.696	685.696	0	100.00 %
	3) Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	685.696	685.696	0	100.00 %
	4) Vitamin A Biru	Kapsul	685.696	685.696	0	100.00 %
	5) Vitamin A Merah	Kapsul	685.696	685.696	0	100.00 %
	6) Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	685.696	685.696	0	100.00 %
	7) Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	685.696	685.696	0	100.00 %
	8) Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	685.696	685.696	0	100.00 %
	9) Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	685.696	685.696	0	100.00 %
	10) Vaksin Hepatitis B0Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	685.696	685.696	0	100.00 %
	11) Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	685.696	685.696	0	100.00 %
	12) Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	685.696	685.696	0	100.00 %
	13) Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	685.696	685.696	0	100.00 %
	14) Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	685.696	685.696	0	100.00 %
	15) Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	685.696	685.696	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian (%)
	16) Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	685.696	685.696	0 100.00 %
	17) Peralatan Anafilaktik	Paket	371	371	0 100.00 %
	18) Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	841	841	0 100.00 %
	19) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.180	1.180	0 100.00 %
	20) Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	761	761	0 100.00 %
	21) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	354	354	0 100.00 %
	22) Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	30.432	30.432	0 100.00 %
	23) Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	6.359	6.359	0 100.00 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				99,50%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani 79,55%
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1.792.705	1.782.598	10.107 99.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)				19,95%
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani 99,77%
	1) Buku raport kesehatanku	Buku	1.792.705	1.782.598	10.107 99,44%
	2) Buku pemantauan kesehatan	Buku	1.792.705	1.782.598	10.107 99,44%
	3) Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	1.792.705	1.782.598	10.107 99,44%
	4) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	1.792.705	1.782.598	10.107 99,44%
	5) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	1.792.705	1.782.598	10.107 99,44%
	6) Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	313	313	0 100.00 %
	7) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	46	46	0 100.00 %
	8) Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	380	380	0 100.00 %
	9) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	33	33	0 100.00 %
	10) Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	2	2	0 100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	11) Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	44	44	0	100.00 %
	12) Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	6.534	6.534	0	100.00 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	80.00 %
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	7.661.046	7.661.046	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					20.00 %
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
1)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedom-an	309	309	0	100.00 %
2)	Alat ukur berat badan	Unit	324	324	0	100.00 %
3)	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	322	322	0	100.00 %
4)	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	327	327	0	100.00 %
5)	Alat : Tensimeter	Unit	325	325	0	100.00 %
6)	Alat : Glukometer	Unit	405	405	0	100.00 %
7)	Alat : Tes strip gula darah	Unit	6.403.278	6.403.278	0	100.00 %
8)	Alat : Lancet	Unit	6.403.278	6.403.278	0	100.00 %
9)	Alat : Kapas alkohol	Unit	6.415.753	6.415.753	0	100.00 %
10)	Alat : KIT IVA Tes	Unit	113.462	113.462	0	100.00 %
11)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	6	6	0	100.00 %
12)	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	714	714	0	100.00 %
13)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	768	768	0	100.00 %
14)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	821	821	0	100.00 %
15)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	343	343	0	100.00 %
16)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	134	134	0	100.00 %
17)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	8.632	8.632	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	80.00 %
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	998.691	998.691	0	100.00 %
	Percentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
1)	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	998.691	998.691	0	100.00 %
2)	<i>Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)</i>	Paket	998.691	998.691	0	100.00 %
3)	Buku kesehatan lansia	Buku	998.691	998.691	0	100.00 %
4)	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	396	396	0	100.00 %
5)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	599	599	0	100.00 %
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1	1	0	100.00 %
7)	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	305	305	0	100.00 %
8)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	165	165	0	100.00 %
9)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	991	991	0	100.00 %
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	80.00 %
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	879.045	879.045	0	100.00 %
	Percentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
1)	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	308	308	0	100.00 %
2)	Tensimeter	Unit	331	331	0	100.00 %
3)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	6	6	0	100.00 %
4)	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	716	716	0	100.00 %
5)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	735	735	0	100.00 %
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	809	809	0	100.00 %
7)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	135	135	0	100.00 %
8)	Obat Hipertensi	Paket	19.078.500	19.078.500	0	100.00 %
9)	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	80.00 %
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	295.296	295.296	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					20.00 %
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
1)	Alat : Glukometer	Unit	413	413	0	100.00 %
2)	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	252.941	252.941	0	100.00 %
3)	Alat : Kapas Alkohol	Unit	265.416	265.416	0	100.00 %
4)	Alat : Lancet	Unit	265.416	265.416	0	100.00 %
5)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	6	6	0	100.00 %
6)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	312	312	0	100.00 %
7)	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	716	716	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	8) Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	744	744	0	100.00 %
	9) Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	809	809	0	100.00 %
	10) Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	335	335	0	100.00 %
	11) Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	135	135	0	100.00 %
	12) Obat Diabetes Melitus	Paket	6.030.612	6.030.612	0	100.00 %
	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	80.00 %
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	18.261	18.261	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					20.00 %
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	78	78	0	100.00 %
	2) Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	67	67	0	100.00 %
	3) Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	162	162	0	100.00 %
	4) Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	1.335	1.335	0	100.00 %
	5) Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	186	186	0	100.00 %
	6) Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	91	91	0	100.00 %
	7) Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	26	26	0	100.00 %
11	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	80.00 %
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	107.032	107.032	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					20.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
1)	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	14.620	14.620	0	100.00 %
2)	Reagen Zn TB	Paket	877	877	0	100.00 %
3)	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	22.380	22.380	0	100.00 %
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	212.905	212.905	0	100.00 %
5)	Catridge tes cepat molekuler	Paket	182.750	182.750	0	100.00 %
6)	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	26.758	26.758	0	100.00 %
7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	554	554	0	100.00 %
8)	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	1.570	1.570	0	100.00 %
9)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.366	1.366	0	100.00 %
10)	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	620	620	0	100.00 %
11)	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	260	260	0	100.00 %
12)	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	44	44	0	100.00 %
13)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	77	77	0	100.00 %
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80 %)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	80.00 %
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	443.935	443.935	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20 %)					20.00 %
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
1)	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	443.935	443.935	0	100.00 %
2)	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	443.935	443.935	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian (%)
	3) Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	443.935	443.935	0 100.00 %
4)	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	443.935	443.935	0 100.00 %
5)	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	196	196	0 100.00 %
6)	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	196	196	0 100.00 %
7)	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	131	131	0 100.00 %
8)	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	195	195	0 100.00 %
9)	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	44	44	0 100.00 %
10)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	199	199	0 100.00 %

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta , 2023



Pada capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 memiliki 12 indikator dan terdapat 9 indikator mencapai target 100 persen meliputi Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*). Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang capaian dibawah 100% terdapat 3 indikator meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir dan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.

Adapun faktor penghambat capaian ini pada indikator pelayanan ibu hamil adalah sistem pelaporan data KIA belum seragam dan terintegrasi di fasilitas kesehatan dan masih ada kehamilan yang tidak diinginkan sehingga tidak memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan. Faktor penghambat pada indikator pelayanan bayi baru lahir adalah Sistem pelaporan pelayanan dari luar Puskesmas belum real time dan masih ada pelayanan yang belum terintergrasi antara layanan ibu nifas dengan bayi baru lahir serta masih ada fasilitas kesehatan yang belum melaksanakan SHK pada bayi baru lahir yang lahir di fasilitas kesehatan. Sedangkan pada indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar disebabkan masih terdapat sekolah yang menolak pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala.

4.2.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-8
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kesehatan

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1	APBD DKI Jakarta	79.558.253.790.537
2	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Kesehatan)	174.428.801.713
3	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	
	APBD	174.428.801.713
	a) APBD Murni	11.524.631.795.262
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasi	0
	f) Kerjasama	0
	g) Otonomi Khusus	0



No	Pendanaan	Pagu (Rp)
	NON APBD	0
	a) APBD DAK Fisik	0
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2023

Alokasi anggaran satker perangkat daerah pada Dinas Kesehatan adalah 11.524.631.795.262 dan alokasi anggaran untuk penerapan SPM pada APBD adalah 174.428.801.713. Anggaran tersebut sesuai dengan taging SPM pada sistem aktivitas Bapeda dan belum termasuk anggaran pendukung SPM seperti kebutuhan barang/alat kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai dan lain-lain. Dinas Kesehatan memiliki anggaran BLUD pada masing - masing fasyankes, anggaran ini juga digunakan untuk kebutuhan SPM, namun terdapat kendala dalam menghitung total penggunaannya karena belum terfasilitasinya taging anggaran SPM secara rinci pada anggaran BLUD sehingga menjadi sulit untuk dilakukan perhitungan secara rinci.

4.2.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-9
Dukungan Personil Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana			536
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	948		2.398
3	Pelayanan ibu hamil	331		828
4	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	200		1.687
5	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	243		2.065
6	Pelayanan kesehatan Balita	612		2.524
7	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	6.765		587
8	Pelayanan kesehatan pada usia Produktif	910		10.502
9	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	93		2.364
10	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	801		1.594
11	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	908		1.831
12	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	66		237
13	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.018		2.919
14	Pelayanan kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	221		719
	Jumlah	12.168		28.393

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2023



4.2.6 Permasalahan dan Solusi Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-10
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none">1. SPM terduga Tuberculosis (TB): Masih ada permasalahan pengumpulan data dari Poli lain (selain dari Poli TB/DOTS/Paru) yang mengakibatkan timbulnya potensi <i>Under Reporting</i> kasus terduga TBC pada fasilitas kesehatan yang sistem jejaring internalnya belum berjalan maksimal, khususnya Rumah Sakit2. Pada penginputan masih adanya faskes yang belum <i>Realtime</i>, sehingga terjadi <i>Delay Reporting</i> pada pelaporan kasus terduga TB3. Indikator Resiko HIV: Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melakukan penginputan data secara <i>realtime</i>4. Sistem pencatatan dan pelaporan HIV (SIHA) belum stabil dan Penginputan belum dilakukan secara terbagi, masih terfokus pada RR	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kolaborasi dengan Suku Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota2. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Supervisi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara rutin <p>Melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan <i>feedback</i> (umpan balik) secara berkala</p> <p>Kolaborasi dengan sudinkes untuk melakukan validasi data rutin setiap bulan</p>
		<ol style="list-style-type: none">5. Indikator PTM (Kesehatan Usia Produktif, Hipertensi, DM, dan ODGJ)<ol style="list-style-type: none">a. Belum ada petugas khusus untuk admin penginputan data di PTMb. Masih ada inputan data yang tidak lengkap terutama NIK KTP, FORMAT TANGGAL LAHIR tidak sesuai aturan karena masih banyak masyarakat yang tidak membawa KTP saat skrining/berobatc. Masih ada puskesmas yang mengirim laporan tidak sesuai jadwal /tidak tepat waktud. <i>Cleaning data by name</i> masih secara manuale. Belum mendukungnya fasilitas (laptop/komputer) untuk pengolahan data SIPTM sehingga pengolahan tidak efektif dan tidak efisien	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dengan Simpus terkait pencatatan dan pelaporan pemantauan Hipertensi Terkendali2. Kolaborasi dengan program promosi kesehatan dan beberapa sektor untuk mengedukasi masyarakat pentingnya pencegahan penyakit3. Penyusunan analisa beban kerja PJ PTM di Puskesmas sehingga dapat menjadi dasar advokasi ke Pimpinan baik level Dinas, Suku Dinas, dan Puskesmas untuk menambah personil yang bertugas dalam pelaksanaan Pelayanan Program PTM"



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
2	Perhitungan Kebutuhan	1. Indikator TB : perhitungan kebutuhan Logistik Non Obat Anti Tuberculosis (Non OAT) terutama untuk orang terduga TB khususnya cartridge TCM sering masih terjadi kekurangan stok, dikarenakan distribusi dari Kemenkes masih menjadi kendala dan Jumlah permintaan sesuai kebutuhan yang direncanakan tidak sesuai dengan jumlah logistik yang diberikan kemenkes	Melakukan perencanaan alokasikan penganggaran logistik Catridge melalui APBD mulai tahun 2024
		2. Indikator HIV : Logistik utk non ARV dan IMS droping Kementerian Kesehatan tidak mencukupi	
		3. Untuk SPM Krisis Bencana: Kesulitan untuk menghitung sasaran penduduk terkena bencana. terkait untuk menyusun peta risiko bencana	Advokasi ke BPBD, OPD di DKI Jakarta sehingga bisa dengan mudah menghitung jumlah penduduk yang beresiko terkena bencana melalui pendataan riil
3	Perencanaan dan Penganggaran	Tidak semua fasyankes bisa menganggarkan pemeriksaan <i>viral load</i> , Sel CD4, obat non ARV dan obat IMS	Advokasi bersama suku dinas kesehatan agar layanan dapat mengalokasikan anggaran terkait pemeriksaan <i>viral load</i> , CD4, obat non-ARV dan obat IMS
4	Pelaksanaan	1. Penderita Diabetes Melitus yang datang ke puskesmas lebih banyak usia diatas 59 tahun, sehingga capaian pada usia 15-59 tidak sebanyak kelompok usia lansia	Memperbanyak kegiatan posbindu di perkantoran, sekolah dan tempat-tempat umum
		2. Indikator ODGJ : a. Rotasi / Mutasi pegawai cepat (Kurang dari 2 Tahun) sehingga mengganggu sistem (petugas terlatih pindah) b. Petugas di Puskesmas memiliki tugas rangkap c. Masih terdapat stigma terhadap ODGJ di masyarakat d. Belum semua Puskesmas memiliki tenaga Psikolog Klinis e. Belum ada Dukungan Kebijakan Pemda terkait Upaya Kesehatan Jiwa Masyarakat	1. Membuat Kebijakan yang mengatur tentang petugas yang sudah terlatih Keswa agar tetap bertugas pada Program Kesehatan Jiwa minimal 2 Tahun 2. Membuat Kebijakan yang mengatur tentang petugas yang sudah terlatih Keswa agar tetap bertugas pada Program Kesehatan Jiwa minimal 2 Tahun 3. Alih Informasi / Pengetahuan tentang Program Kesehatan Jiwa kepada petugas lain



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
			<ol style="list-style-type: none">4. Meningkatkan sosialisasi tentang kesehatan jiwa bagi masyarakat5. Mengusulkan penambahan jumlah tenaga Psikolog Klinis (minimal 1 orang per Puskesmas)6. Segera menyelesaikan proses Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
		<ol style="list-style-type: none">3. Indikator ibu hamil:<ol style="list-style-type: none">a. Sistem pelaporan data KIA belum seragam dan terintegrasi di faskesb. Masih ada kehamilan yang tidak diinginkan sehingga tidak memeriksakan kehamilan dan bersalin di fasilitas kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan orientasi USG bagi petugas puskesmas yang menerima USG dari Kemenkes2. Integrasi data KIA di faskes3. Edukasi kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada ibu hamil agar memeriksakan kehamilan dan bersalin di fasilitas kesehatan4. Sosialisasi pentingnya KIE <i>discharge planning</i> oleh petugas kepada ibu pasca persalinan di Fasilitas pelayanan kesehatan
		<ol style="list-style-type: none">4. Indikator Anak Usia Pendidikan Dasar: Masih terdapat sekolah yang menolak pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala	Melaksanakan sosialisasi kebijakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala yang tidak hanya menyasar tenaga kesehatan Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas, tetapi juga TP UKS/M Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan sehingga koordinasi pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala di satuan pendudukan mendapat dukungan dari jajaran Dinas Pendidikan. Memanfaatkan Rapor Kesehatanku Digital yang dibangun oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan program, serta meningkatkan kualitas penyampaian hasil skrining kepada orang tua peserta didik.



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		5. Indikator balita: a. Belum terintegrasinya pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan balita dari tingkat pelayanan kesehatan b. Kurangnya tenaga terlatih dalam kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak c. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program	a. Penguatan pencatatan dan pelaporan berkoordinasi dengan UPT Pusdatin b. Menyelenggarakan pelatihan fasilitator SDIDTK c. Peningkatan monitoring dan evaluasi program mulai tingkat fasyankes, Sudinkes dan Dinas Kesehatan
		6. Indikator Bayi Baru Lahir: a. Sistem pelaporan pelayanan dari luar Puskesmas belum <i>real time</i> b. Masih ada pelayanan yang belum terintegrasi antara layanan ibu nifas dengan bayi baru lahir c. Masih ada faskes belum melaksanakan SHK pada bayi baru lahir yang lahir di faskes	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan bayi baru lahir yang terintegrasi dengan pelayanan nifas (maternal) b. Penguatan pencatatan dan pelaporan berkoordinasi dengan UPT Pusdatin
		7. Indikator usia lanjut : a. Layanan One Stop Service belum dilakukan semua Puskesmas b. Belum adanya data RS Geriatri Terpadu sebagai Rujukan	a. Melakukan pemetaan RS Geriatri Terpadu sesuai kategori di Provinsi DKI jakarta b. Meningkatkan status Puskesmas Santun Lansia

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, Pasal 4 ayat (3), terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar.



Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:

1. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima Air Minum curah lintas kabupaten/kota; dan
2. Setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima Air Minum curah lintas kabupaten/kota; dan
2. Warga Negara, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM; dan

Mutu pelayanan dasar:

1. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum;
2. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas Air Minum; dan
3. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.



Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana Sub Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

SPM yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terdiri dari SPM Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah. Target pemenuhan SPM kedua urusan tersebut tercantum sebagai target pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air 2023-2026 yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel IV-11
Target Pemenuhan SPM Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah
Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2023-2026
Peningkatan Terhadap Akses Layanan Dasar	Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak	2023 : 97.74 % 1) Air Minum : 99.86% 2) Sanitasi : 95.62%) 2024: 98.51 % 1) Air Minum: 99.86% 2) Sanitasi: 97.16% 2025 : 98.84 % 1) Air Minum : 99.86% 2) Sanitasi : 97.82% 2026 : 99.19 % 1) Air Minum : 99.86% 2) Sanitasi : 98.53%
Peningkatan Akses Air Minum yang Layak, Aman, dan Berkelaanjutan	Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan	1. 2023 : 64.24 % 2. 2024 : 70.03 % 3. 2025 : 81.95 % 4. 2026 : 89.02 %
Peningkatan Akses Pengolahan Air Limbah yang Layak, Aman, dan Berkelaanjutan	Persentase akses layanan air limbah aman	1. 2023 : 18.636 % 2. 2024 : 20.182 % 3. 2025 : 20,839 % 4. 2026 : 21,546 %

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2023



4.3.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar

Tabel IV-12
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		TUNTAS UTAMA			96.07 %
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota					98.93 %
	Percentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.71 %
A	Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	9.513.200	9.478.480	34.720	99.64 %
	Percentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.22 %
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	96.10 %
	1) Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum	liter/detik	21.682	20.836,36	845,64	96.10%
	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	liter/detik	21.682	20.836,36	845.64	96.10%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					93.22 %
	Percentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.57 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	9.513.200	8.867.865	645.335	93.22 %
	Percentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					18.64 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	B. Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	93.22 %
	1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	1.902.640	1.773.573	129.067	93.22%
	2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	1.902.640	0	1.902.640	0,00%
	3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	1.902.640	1.773.573	129.067	93.22%

Sumber : SPM Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan Tabel IV-12 diatas diperoleh capaian SPM Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah tahun 2023 sebesar 96.07 persen dengan rincian capaian SPM Urusan Air Minum sebesar 98.93 persen dan capaian SPM Urusan Air limbah sebesar 93.22 persen Adapun data jumlah penerima layanan air bersih dan sanitasi (air limbah) yang dilaporkan dalam sistem e-SPM diperoleh berdasarkan data *Dashboard Keluarga Jakarta* pada sistem <https://carik.jakarta.go.id/>.



Tabel IV-13

Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		TUNTAS UTAMA			95.78 %
1	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari - hari					98.35 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.71 %
A	Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	9.513.200	9.478.480	34.720	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18.64 %
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	93.22%
	1) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	1.902.640	1.895.696	6.944	99.64%
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	1.902.640	1.895.696	6.944	99.64%
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	1.902.640	1.895.696	6.944	99.64%
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	1.902.640	1.895.696	6.944	99.64%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					93.22 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.57 %
A	Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	9.513.200	8.867.865	645.335	93.22 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18.64 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	93.22 %
	1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	1.902.640	1.773.573	129.067	93.22%
	2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	1.902.640	1.773.573	129.067	93.22%
	3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	1.902.640	1.773.573	129.067	93.22%
	4) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	1.902.640	1.773.573	129.067	93.22%

Sumber : SPM Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-13 menjelaskan Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 dengan capaian 95.78 persen dengan rincian capaian SPM Air Minum sebesar 98,35 persen dan SPM Air Limbah sebesar 93,22 persen.



4.3.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-14
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1	APBD DKI Jakarta	79.558.253.790.537
2	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas)	4.039.255.328.507
3	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	520.184.080.570
	APBD	520.184.080.570
	a. APBD Murni	520.184.080.570
	b. APBD DAU	0
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	a) APBD DAK Fisik	0
	APBN	0
	b) APBN - Dekonsentrasi	0
	c) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-14 diatas menjelaskan anggaran yang digunakan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu sebesar Rp. 520.184.080.570,- dengan rincian Rp. 37.434.348.497,- untuk urusan air minum dan Rp. 482.749.732.073 untuk urusan air limbah pada komponen kegiatan/subkegiatan berupa perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan operasi/pemeliharaan.

4.3.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-15
Dukungan Personil SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	18		50
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	19		263
	Jumlah	37		313

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan Tabel IV-15 diatas, terkait dengan pemenuhan SPM Pekerjaan Umum sub urusan Air minum dan Air Limbah, Dinas Sumber Daya Air didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 350 orang dengan rincian 37 orang PNS yang bertugas dan 313 orang Non ASN.



4.3.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-16
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	-	-
2.	Perhitungan Kebutuhan	-	-
3.	Perencanaan dan Penganggaran	-	-
4.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">1. SPM Air Minum :<ul style="list-style-type: none">a. Kondisi daerah yang tidak memiliki sumber air baku dengan kuantitas dan kualitas air yang memadai untuk dijadikan sumber air minum sehingga bergantung/membutuhkan pasokan air dari daerah lain.b. Masih belum sinkronnya data terkait jumlah penduduk/rumah tangga dengan akses sanitasi layak2. SPM Air Limbah :<ul style="list-style-type: none">a. Adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan SPALD skala permukiman.b. Adanya kekosongan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik yang menjadi instrumen/alat untuk mengikat dan memaksa masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.c. Kepadatan penduduk yang tinggi (>150 jiwa/ha) idealnya menggunakan SPALD Terpusat, namun biaya investasi pengembangan SPALD-T sangat mahal.d. Pengelolaan setempat/tangki septik yang dimiliki masyarakat belum dapat terinventarisir sepenuhnya sesuai dengan standar SNI.e. Belum optimalnya pemanfaatan SPALD yang sudah terbangun	<ul style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait.2. Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2023



Pada laporan SPM ini juga dilaporkan capaian air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel IV-17
Rekapitulasi capaian akses air limbah domestik Daerah Provinsi

No	Kabupaten/ Kota	Air Limbah Domestik							
		Akses Layak (%)				Akses Aman (%)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Provinsi DKI Jakarta	92,79	93,22	98,53	-5,31	20,585	21,188	21,546	-0,358

Catatan :

Kolom 1 : diisi dengan capaian tahun sebelumnya (N-1)

Kolom 2 : diisi dengan capaian tahun berjalan (N)

Kolom 3 : diisi dengan target pada akhir tahun periode Dokumen RSP

Kolom 4 : diisi dengan gap/selisih Kolom 2 dan Kolom 3

Tabel IV-18
Anggaran Bidang Sanitasi

No	Kabupaten / Kota	Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun (N-1) (Rp.)			Anggaran Tahun ini Tahun(N) (Rp.)			Realisasi Penyerapan (Rp.)			Rencana Anggaran Tahun Selanjutnya Tahun (N+1) (Rp.)			OPD Pelaksana
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	Provinsi DKI Jakarta		122.484.689.032			482.749.732.073		382.847.448.021			680.148.129.002			Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta

Catatan :

Kolom 1 : diisi dengan anggaran yang bersumber dari APBN

Kolom 2 : diisi dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi

Kolom 3 : diisi dengan anggaran yang bersumber dari sumber pendanaan lainnya



Target sanitasi nasional dalam sesuai RPJMN 2020-2024 dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 adalah terpenuhinya rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi untuk Air Limbah Domestik 90 persen layak dan termasuk 15 persen aman. Berdasarkan Tabel IV-16 diatas, capaian air limbah layak dan aman di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 berturut-turut terhitung sebesar 93,22 persen dan 21,188 persen, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target sanitasi nasional sesuai RPJMN 2020-2024 telah dapat dipenuhi dan dilampaui.

Untuk kedepan terkait peningkatan akses sanitasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan akses air limbah aman di Provinsi DKI jakarta melalui pembangunan SPAL Skala Perkotaan *Jakarta Sewerage Development Project (JSDP)*, Pembangunan SPAL Skala Komunal, Pembangunan MCK Komunal, dan Revitalisasi/rehabilitasi tangki septik.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, Pasal 8 ayat (2) terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh perangkat daerah di Daerah Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal Daerah Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM Daerah Provinsi.



Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas mutu barang dan jasa.

1. Mutu barang untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan:
 - rehabilitasi rumah;
 - pembangunan kembali rumah; dan
 - pemukiman kembali;
2. Mutu jasa untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni dengan kriteria pemenuhan meliputi:
 - besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa; dan
 - jangka waktu pemberian akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah.

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.



4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah 100 persen.



4.4.3 Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-19
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100 %
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi					100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
A	Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	0	0	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100 %
	1. Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	Tutup indikator	Tutup indikator	0	100 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi					100 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A	Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	2143	2143	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100.00%
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Pengusahaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	87	87	0	100.00%
	2. Subsidi Uang Sewa	Rumah	1	0	1	0.00%
	3. Penyediaan rumah layak huni	Rumah	579	579	0	100.00%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, 2023



Pada Tahun 2023, tidak terdapat satupun surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan penetapan bencana meskipun terdapat bencana banjir dan kebakaran pada rentang waktu tahun 2023, untuk itu Pelayanan Minimal dalam urusan Bidang Perumahan dalam hal penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi tidak ada satupun rumah tangga yang menjadi sasaran target pelayanan. Sehingga pencapaian atas target tersebut diatas dipenuhi sebesar 100 persen.

Dalam rangka mendukung SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi, Terdapat warga yang dilayani sebanyak 2.143 Orang dari target 2.143 Orang. Sehingga, capaian pada SPM ini terpenuhi sebesar 100 persen. adapun rincian dari SPM ini dapat terlihat pada Mutu Minimal Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Provinsi DKI Jakarta. Mutu Minimal Pelayanan Dasar (1) Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan tercapai sebanyak 87 Rumah yang penanganannya tersebar pada perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pembebasan lahan yang mengakibatkan relokasi warga. Mutu Minimal Pelayanan Dasar (2) Subsidi Uang Sewa, dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan subsidi uang sewa. Namun, Provinsi DKI Jakarta memberikan unit layak huni dengan skema Rumah Susun Sewa. Pada Mutu Minimal Pelayanan Dasar (3) Penyediaan rumah layak huni, terdapat 579 Unit Hunian yang harus terlayani dan sampai dengan akhir TW IV Tahun 2023 sebesar 579 Unit Hunian juga yang terlayani dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat 2 Unit Hunian yang terlayani pada Unit Pengelola Rumah Susun I dengan jumlah orang yang terlayani adalah sebanyak 7 Orang;
2. Terdapat 510 Unit Hunian yang terlayani pada Unit Pengelola Rumah Susun III dengan jumlah orang yang terlayani adalah sebanyak 1.879 Orang;
3. Terdapat 7 Unit Hunian yang terlayani pada Unit Pengelola Rumah Susun IV dengan jumlah orang yang terlayani adalah sebanyak 25 Orang;



4. Terdapat 21 Unit Hunian yang terlayani pada Unit Pengelola Rumah Susun VII dengan jumlah orang yang terlayani adalah sebanyak 82 Orang;
5. Terdapat 39 Unit Hunian yang terlayani pada Unit Pengelola Rumah Susun VIII dengan jumlah orang yang terlayani adalah sebanyak 150 Orang;

4.4.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-20
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1	APBD DKI Jakarta	79.558.253.790.537
2	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)	1.705.976.159.928
3	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	481.655.194.830
	APBD	481.655.194.830
	a) APBD Murni	481.655.194.830
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasi	0
	f) Kerjasama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	a) APBD DAK Fisik	0
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta,
2023

4.4.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-21
Dukungan Personil SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	-		-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	304	6	2.809
	Jumlah	304	6	2.809

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta,
2023



4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel IV-22
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	<p>1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum ada data primer dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi di Pemerintah Daerah Provinsi.	Melakukan koordinasi dan permohonan data rencana penertiban ruang kota kepada Instansi/PD terkait untuk mengantisipasi kebutuhan jumlah unit rusunawa yang dibutuhkan untuk relokasi masyarakat terdampak.
		<p>2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Beberapa proses terjadi ketidaksinkronan data warga terdampak antara yang disampaikan oleh pihak Kelurahan, Kecamatan dan Walikota atas data yang diterima oleh dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Warga mengumpulkan data lama, karena warga keberatan untuk direlokasi.b. Pada beberapa proses, atas penyampaian data warga terdampak tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pergub Nomor 111/2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa, karena ada pihak kelurahan yang langsung menyampaikan data kepada pihak UPRS karena salah menginterpretasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Lurah. Padahal yang dimaksud di dalam rekomendasi lurah adalah dikeluarkan apabila warga terdampak tidak memiliki KTP setempat, tidak memiliki Buku Nikah dan Keterangan Penghasilan, bukan rekomendasi langsung ke Kepala Dinas atau UPRS sebagaimana yang dilakukan oleh Walikota.	<ul style="list-style-type: none">1. Mengajukan proses bisnis penghunian warga terprogram yang melibatkan PD yang terlibat dalam proses relokasi sebagaimana disebutkan dalam Pergub Nomor 111/2014 yaitu Kelurahan, Kecamatan, Walikota dan PD yang mengajukan permohonan unit rusunawa untuk kebutuhan relokasi karena adanya program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, penertiban ruang kota dan kondisi lain yang sejenis.2. Membuat SOP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Penghunian Warga Terprogram



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		<ul style="list-style-type: none">c. Pada warga terdampak pada lokasi yang memerlukan pengadaan tanah maka pada beberapa kasus penyampaian data ke Dinas oleh Walikota dilakukan sebelum adanya kegiatan pengadaan tanah oleh SKPD yang berwenang dan belum adanya verifikasi kepemilikan atas penguasaan tanah, namun kegiatan kegiatan pendataan warga terdampak tetap dilakukan oleh pihak Kelurahan karena adanya tuntutan Kegiatan Strategis Daerah yang harus dilaksanakan oleh Walikota.d. Beberapa data usulan warga terdampak disampaikan langsung kepada pimpinan oleh pihak tertentu tanpa adanya dokumen secara tertulis dan selanjutnya disampaikan langsung kepada Pengelola/UPRS sehingga tidak ada pencatatan dengan alur yang sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Gubernur 111/2014.	
2.	Perhitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.<ul style="list-style-type: none">1. Perhitungan Perencanaan kebutuhan perumahan masih berdasarkan data spasial IRK yang dimiliki.	Tetap melakukan perencanaan, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada RPD dan Renstra yang berlaku



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		<p>2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak pernah melakukan perhitungan kebutuhan terhadap warga yang akan direlokasi namun penyediaan Hunian yang layak melalui pembangunan rusunawa dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan backlog yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dan atau BPS dan selanjutnya ditetapkan melalui RPD dan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.</p>	
3.	Perencanaan dan Penganggaran	<p>1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi</p> <p>Perencanaan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Adanya perbedaan peraturan antara stakeholder terkait yang saling bersinggungan, sehingga terjadi kendala dalam teknis perencanaan, maupun perizinan yang dilakukan;b. Perubahan ketentuan perundangan yang mendadak, dan harus segera di terapkan, tanpa adanya sosialisasi;c. Lamanya proses evaluasi jalan, penataan kegiatan pada SKPD terkait, sehingga memperlambat proses perencanaan;d. Pada lokasi tertentu, dalam kebutuhan sarpras di mohonkan sampai dengan keputusan Gubernur, sehingga memakan waktu yang cukup lama;e. Adanya proses persetujuan warga terkait penataan kegiatan, yang menjadi kendala;f. Kegiatan yang di ikat oleh waktu pelaksanaan, menjadi terhambat apabila terjadi gagal lelang.	Melakukan koordinasi baik antar Perangkat Daerah maupun lintas Instansi dan Kementerian untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga perencanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan perencanaan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi dapat berlangsung dengan baik.



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		<p>g. Proses perencanaan yang sejalan dengan proses amdal lalin dengan 2 (dua) penyedia yang berbeda Penganggaran:</p> <p>h. Nilai pembangunan rusun yang besar perlu adanya skema pembiayaan lain selain dari APBD</p>	
		<p>2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>a. Pembangunan rusun tidak menghitung data rencana warga yang di relokasi tetapi tergantung dari lahan yang dimiliki DPRKP dan dari lahan itu dihitung kapasitas daya dukung lingkungannya atau maksimal unit hunian yang bisa dibangun.</p> <p>b. Kalau dalam perhitungan tidak ada masalah karena bisa dihitung yang menjadi masalah adalah ketersediaan lahan yg bisa menopang warga yang akan direlokasi.</p> <p>c. Penganggaran tetap disesuaikan dengan lahan yang ada. Mekanisme ketersediaan dana atau kemampuan anggaran merupakan wewenang Bappeda.</p> <p>d. Mengenai perijinan, tuntutan pemeriksaan sekarang tidak hanya pada IMB tetapi juga sudah sampai SLF sedangkan sequence perijinan tidak sejalan dengan penganggaran dan pelaksanaan APBD.wewenang Bappeda.</p> <p>e. Mengenai perijinan, tuntutan pemeriksaan sekarang tidak hanya pada IMB tetapi juga sudah sampai SLF sedangkan sequence perijinan tidak sejalan dengan penganggaran dan pelaksanaan APBD.</p>	Dinas PRKP sudah melakukan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi melalui penganggaran diluar APBD



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
4.	Pelaksanaan	<p>Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Proses pembayaran kepada penyedia tidak sejalan dengan progres dilapangan sehingga menghambat pekerjaan dilapangan dan <i>cashflow</i> penyediab. Belum ada aturan yang jelas terkait pandemi dalam hal konstruksi baik dari sisi pelaksanaan maupun yang diterapkan seperti kompensasi ataupun definisi keadaan kahar, sehingga akan menjadi perdebatan antara penyedia dan PPK.c. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan salah satu perizinan yang menjadi output dari pembangunan rumah susun. Namun dalam penerbitan SLF tersebut, terdapat perizinan lain yang perlu dilaksanakan dan melibatkan instansi lain.	Melakukan Koordinasi baik antar PD untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga pelaksanaan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan pelaksanaan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi dapat berlangsung dengan baik.
5.	Lain-lain	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi: Keterbatasan lahan, Perundungan Tata Ruang Jakarta yang belum memberi space lebih dalam penyediaan hunian , terdapatnya perbedaan kriteria rumah tidak layak huni pada BPS, maupun Kementerian PUPR dan Komitmen SKPD lain terkait dalam rangka penyelesaian wilayah yang akan dibangun rumah susun, misalnya perbaikan dan pembangunan <i>drainase</i> sesuai dengan perencanaan di KRK oleh Dinas Sumber Daya Air, serta rencana pembangunan jalan sesuai KRK oleh Dinas Bina Marga.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi akan menggunakan Aset Bank Tanah yang dimiliki oleh DPRKP dan Aset Tanah Idle yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta,
2023



4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal penerapan SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dibagi ke dalam 3 (tiga) sub Bidang Urusan yang diatur lebih lanjut melalui :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Bencana Daerah :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran mencakup pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tediri atas :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi (Provinsi);
2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten/Kota).

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Daerah Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal Daerah Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM Daerah Provinsi.



Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah :

1. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Pelaksana Sub Urusan Kebakaran Daerah; dan
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Sub Urusan Bencana Daerah;

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Target Capaian Pencapaian SPM adalah 100 persen.

4.5.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan

a. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi

Tabel IV-23

Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi					100%
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani		2.521	2.521	0	100%
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM					
	1) Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Unit	1.802	1.802	0	100%
	2) Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Dokumen	71	71	0	100%
	3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	Orang	2.788	2.788	0	100%
	4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Dokumen	1	1	0	100%
	5) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil.	Orang	10	0	10	0%
	6) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Orang	10	0	10	0%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2023



Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal dalam Sub Bidang Trantibumlinmas dimaksudkan agar setiap warga negara dapat memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi. Adapun capaian SPM Sub Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023 adalah sebesar 100 persen dimana tidak ada masyarakat atau warga negara yang mengalami kerugian materiil maupun kerugian secara fisik akibat dari kegiatan Penegakan Perda dan/atau Perkada di DKI Jakarta.

Terkait kewajiban untuk penganggaran 2,5 persen dari kegiatan Penegakan Perda dan/atau Perkada belum dapat dipenuhi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2023. Indikator SPM bidang Trantibumlinmas merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis dengan indikator Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Target 100 persen. Hal ini selaras dengan Renstra Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan output kegiatan Penegakan Perda dan/atau Perkada dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.



2. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota

Tabel IV-24
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI PENCAPAIN INDEKS SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)					100
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani		1	1	0	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Unit	21	21	0	100%
	2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	71	71	0	100%
	3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Orang	2.786	2.786	0	100.00%
	4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Dokumen	1	1	0	100.00%
	5) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	1	1	0	100.00%
	6) Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	Orang	1	1	0	100.00%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2023



b. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Bidang Kebencanaan

Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Sub Bidang Kebencanaan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel IV-25
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Sub Bidang Kebencanaan Daerah Kabupaten / Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)					100%
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
A	Jumlah yang Harus Dilayani		250.604	250.604	0	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Doku-men	1	1	0	100%
	2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	250.604	250.604	0	100%
	3) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	250.604	250.604	0	100%
	4) Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	200	200	0	100%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)					100%
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani		267	267	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20%
			Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	4.266	4.266	0	100%
	2) Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	267	267	0	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan) ya		Ya, terjadi bencana			
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
A	Jumlah yang Harus Dilayani		4.189	10.499	-6.310	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam persiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	1	1	0	100%
	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	4.189	4.189	0	100%
	Melakukan respon cepat darurat bencana (persediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	6	6	0	100%
	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	1	1	0	100%
	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	12	12	0	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023



c. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Bidang Kebakaran

1. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Tabel IV-26
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100%
1	Pelayanan penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran (Damkar)					100%
	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
A	Jumlah yang Harus Dilayani		3.769	12.201	-8.432	100%
	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	467	467	0	100%
	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst)	Dokumen	39	39	0	100%
	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar)	Unit	5.099	5.099	0	100%
	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	2.156	2.156	0	100%
	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	687	687	0	100%
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	74	74	0	100%

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2023



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 9 sd Pasal 26), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengemban Urusan Wajib Pelayanan Dasar berdasarkan urusan pemerintahan yang masuk kedalam Pelayanan Trantibum dan Limas yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Adapun turunan pencapaian urusan wajib melalui Jenis Pelayanan Dasar tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian. Adapun Indikator Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar adalah Jumlah yang Harus Dilayani sebanyak 8.440 kejadian dengan capaian 100 persen. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota juga terdapat 4 (empat) indikator mutu pelayanan dasar yang diukur dengan capaian sebagai berikut :

1. Tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dengan capaian 99,83 persen.
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi dengan capaian 100 persen.
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi dengan capaian 100 persen.
4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan capaian 100 persen

Mutu Pelayanan Dasar meliputi waktu tanggap atau lebih dikenal dengan respons time adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman.



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, bahwa waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi Indonesia tidak lebih dari 15 menit.

4.5.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM

- Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel IV-27
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1	APBD DKI Jakarta	79.558.253.790.537
2	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)	1.092.581.090.267
3	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	268.048.380.178
	APBD	
	a) APBD Murni	268.048.380.178
	b) APBD DAU	
	c) APBD DAK Fisik	
	d) APBD DAK Non Fisik	
	e) Dana Bagi Hasi	
	f) Kerjasama	
	g) Otonomi Khusus	
	NON APBD	
	a) APBD DAK Fisik	
	APBN	
	b) APBN - Dekonsentrasi	
	c) APBN - Tugas Pembantuan	
	DANA LAINNYA	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2023

- Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan

Tabel IV-28
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1)	APBD DKI Jakarta	79.558.253.790.537
2)	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	62.304.232.996
3)	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	31.789.737.384
	APBD	
	a) APBD Murni	62.304.232.996
	b) APBD DAU	
	c) APBD DAK Fisik	
	d) APBD DAK Non Fisik	
	e) Dana Bagi Hasi	
	f) Kerjasama	
	g) Otonomi Khusus	



No	Pendanaan	Pagu (Rp)
	NON APBD	
	a) APBD DAK Fisik	
	APBN	
	b) APBN - Dekonsentrasi	
	c) APBN - Tugas Pembantuan	
	DANA LAINNYA	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023

c. Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kebakaran

Tabel IV-29
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1)	APBD DKI Jakarta	79.558.253.790.537
2)	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan)	1.347.916.105.078
3)	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	531.378.088.848
	APBD	
	a) APBD Murni	531.378.088.848
	b) APBD DAU	
	c) APBD DAK Fisik	
	d) APBD DAK Non Fisik	
	e) Dana Bagi Hasil	
	f) Kerjasama	
	g) Otonomi Khusus	
	NON APBD	
	a) APBD DAK Fisik	
	APBN	
	b) APBN - Dekonsentrasi	
	c) APBN - Tugas Pembantuan	
	DANA LAINNYA	

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.5.5 Dukungan Personil

a. Dukungan Personil Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel IV-30
Dukungan Personil SPM

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Provinsi)	267	0	154
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Barat)	443	0	426
3.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Timur)	580	0	514
4.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Pusat)	457	0	405



No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
5.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Selatan)	579	0	522
6.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Utara)	375	0	283
7.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)	101	0	19
	Jumlah	2.802	0	2.323

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2023

b. Dukungan Personil Bidang Kebencanaan

Tabel IV-31
Dukungan Personil

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	11	0	68
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	11	0	12
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	17	0	267
4.	Pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	8	0	
	Jumlah	47	0	347

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023

c. Dukungan Personil Bidang Kebakaran

Tabel IV-32
Dukungan Personil

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2.288	0	1.745
	Jumlah	2.288	0	1.745

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2023



4.5.6 Permasalahan dan Solusi Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a. Permasalahan dan Solusi Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel IV-33
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none">1. Pengumpulan Data (NIK pada KTP dan kartu Keluarga) warga radius 50 m dari lokasi penertiban terkendala pemilik data masih terdapat KTP di luar Jakarta (yang di data pemilik kontrak atau yang menempati kontrak)2. Data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya data warga yang memiliki KTP Jakarta3. Kekhawatiran warga adanya penyalahgunaan dalam Pengumpulan Data (NIK pada KTP dan kartu Keluarga) ketika petugas melakukan pendataan	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun SOP yang mengatur tentang pengumpulan Data pemenuhan SPM2. Mengajukan permohonan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta3. Berpedoman pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
2.	Perhitungan Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 121 tahun 2018 bahwa Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Sehingga perhitungan kebutuhan hanya dapat dilakukan dengan cara menaksir berapa banyak warga negara yang terkena dampak2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. Permendagri Nomor 121 tahun 2018 perlu dikaji ulang2. Rencana penambahan dan penganggaran pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
3.	Perencanaan dan Penganggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam Perencanaan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan masih belum sepenuhnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. belum mengatur komponen-komponen dan kode rekening apa saja yang dapat diterapkan dalam pemenuhan anggaran 2,5 persen bagi warga yang terkena dampak (Indikator kerugian ringan, sedang dan berat tidak ditetapkan dalam Permendagri Nomor 121 Tahun 2018).2. Penganggaran di Pemprov DKI Jakarta menggunakan Prinsip <i>Money Follow Function</i>, penganggaran layanan kerugian materi (Semen, Batubata , Pasir, dsb) dan pengobatan (plester, betadine, alkohol, dsb) tidak sejalan dengan output kegiatan penertiban.	Permendagri Nomor 121 tahun 2018 perlu dikaji ulang. Komponen-komponen dan kode rekening yang jelas secara terperinci dalam penerapan pemenuhan anggaran 2,5 persen bagi warga yang terkena dampak
4.	Pelaksanaan	-	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, 2023

b. Permasalahan dan Solusi Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kebencanaan

Tabel IV-34
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Kendala dalam Pengisian Form Data Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	Rapat Koordinasi Lintas sektoral dengan Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
2.	Perhitungan Kebutuhan	Kendala dalam Penghitungan Kebutuhan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan masih belum sepenuhnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Selanjutnya disesuaikan dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
4.	Pelaksanaan	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2023

c. Permasalahan dan Solusi Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kebakaran

Tabel IV-35
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	1. Penentuan Target Penerima Layanan. Sebagaimana Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang SPM Sub Urusan Kebakaran yang menjadi sasaran adalah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran. Belum tersedianya metode penghitungan dan penentuan jumlah target untuk indikator capaian SPM pada sistem https://spm.bangda.kemdagneg.go.id/ yang memadai dan sesuai dengan PMDN 59 Tahun 2021	Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi antara 3 Peraturan agar tidak bertentangan dengan asas hukum, agar penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		<ol style="list-style-type: none">2. Lampiran Permendagri 59 Tahun 2021 (halaman 230 dan 231) mewajibkan kepada daerah untuk turut serta melaporkan kepada Pemerintah pusat Kejadian Non Kebakaran, apakah hal tersebut masuk ke dalam SPM ? disisi lainnya pengaturan yang bersifat lebih khusus (lex specialist) yakni Permendagri 114/2018 tidak mencantumkan hal tersebut.3. Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Kemendagri (ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Bina Adm Kewilayahannya) perlu mensinkronkan, mengintegrasikan sistem dan upgrade serta penjaminan keamanan data pribadi), saat ini pada E-SPM Bangda belum dilengkapi dengan pelaksanaan verifikasi berjenjang dan ketat layaknya SIOLA yang sudah dilakukan di Kemendagri	
2.	Perhitungan Kebutuhan		
3.	Perencanaan dan Penganggaran		
4.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Kerusakan mobil-mobil pompa yang membutuhkan waktu dalam proses perbaikan/pemeliharaan.2. Kurangnya ketersediaan pos – pos Damkar dan sektor – sektor Damkar untuk lokasi di tengah pemukiman penduduk sebagai ujung tombak upaya penanggulangan bahaya kebakaran. Berdasarkan WMK berjumlah 267 Kelurahan, saat ini tersedia sebanyak 173 Kantor Dinas, Sudin, Sektor dan Pos. (keterbatasan lahan , inovasi : MOU dengan Pengelola Gedung dan Pemanfaatan Fasos Fasum)3. Keterbatasan Jumlah SDM	-



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
5.	Lain-lain	<ol style="list-style-type: none">1. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya kebakaran masih kurang2. Kondisi dan situasi pada saat kejadian menghambat pelaksanaan operasi penanganan kejadian kebakaran, seperti sikap sebagian warga masyarakat yang cenderung destruktif, akses jalan ke dan menuju lokasi terhambat oleh parkir kendaraan, portal, bangunan dibadan jalan3. Masih banyaknya Masyarakat yang harus datang langsung ke Pos Damkar (1.309 kali) untuk melaporkan Kejadian sehingga informasi terlambat / lebih lambat diterima oleh petugas dibandingkan melalui Telepon Darurat 1124. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana.5. Kurang optimalnya peran instansi terkait dalam penanganan perilaku masyarakat yang destruktif pada saat kejadian6. Kurang terurnya penataan pemukiman penduduk dan pedulinya masyarakat dalam rasa aman dan nyaman dari ancaman bahaya kebakaran.7. Keterbatasan Tempat Penampungan Hewan Liar yang berhasil dievakuasi8. Keterbatasan Jumlah Personil Investigator9. Mobilisasi Petugas PLN tidak secepat Damkar, padahal Tim Damkar membutuhkan petugas PLN untuk memastikan tidak ada listrik di TKP10. Kesulitan mencari sumber air di TKP Kebakaran	-



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		11. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas pemadaman 12. Keterbatasan Jumlah dan Kondisi Hidran yang belum memenuhi kebutuhan operasi kebakaran (aliran air kecil, kopling hidran hilang)	

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial tediiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta Standar Pelayanan Minimal secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Daerah Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM Daerah Provinsi.



Adapun ketentuan terhadap kriteria penerima, mutu pelayanan dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Pada indikator kinerja utama Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sasaran strategis “meningkatkan cakupan pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal” dengan indikator kinerja “Persentase ketercapaian pemenuhan standar pelayanan minimal urusan” memiliki target sebesar 100 persen yang dihitung capaiannya pada Triwulan IV. Target 100 persen adalah penjumlahan dari sasaran penerima manfaat tersebut. Target yang dituliskan pada perjanjian kinerja merupakan target untuk pemenuhan kebutuhan dasar Lansia, Disabilitas, Anak terlantar dan gelandangan pengemis dalam panti sedangkan di luar panti yang dipenuhi kebutuhannya melalui kartu, seperti Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta. Sasaran dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perjanjian Kinerja tersebut adalah Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar, dan Anak Terlantar. Berdasarkan Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti meliputi: data dan pengaduan, kedaruratan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi:

1. Permakanan;
2. Sandang;
3. Alat bantu;
4. Perbekalan kesehatan;
5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;



6. Bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Geladangan dan Pengemis serta masyarakat;
7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak;
8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. Penelusuran Keluarga;
10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11. Rujukan.



4.6.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial

Tabel IV-36
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial Daerah Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			100%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Orang	Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
A	Jumlah yang Harus Dilayani		4.841	4.841	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					20.00%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	1) Penyediaan permakanan	Orang	4.841	4.841	0	100%
	2) Penyediaan sandang	Orang	4.841	4.841	0	100%
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	4.841	4.841	0	100%
	4) Penyediaan alat bantu	Orang	33	33	0	
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	4.841	4.841	0	100%
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	4.841	4.841	0	100%
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	4.841	4.841	0	100%
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	990	990	0	100%
	9) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	968	968	0	100%
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	968	968	0	100%
	11) Pemberian pelayanan runifikasi keluarga	Orang	678	678	0	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak Telantar di dalam Panti					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	4.841	4.841	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					20%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
1)	Pengasuhan	Orang	1.448	1.448	0	100%
2)	Penyediaan permakanan	Orang	1.448	1.448	0	100%
3)	Penyediaan sandang	Orang	1.448	1.448	0	100%
4)	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1448	1448	0	100%
5)	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	1.448	1.448	0	100%
6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1.448	1.448	0	100%
7)	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	1.448	1.448	0	100%
8)	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	416	416	0	100%
9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1.448	1.448	0	100%
10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	492	492	0	100%
11)	Pemberian pelayanan reunifikasi	Orang	567	567	0	100%
12)	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	18	18	0	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia Telantar di dalam Panti					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.658	1.658	0	100%
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					20%
C	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
1)	Penyediaan permakanan	Orang	1.658	1.658	0	100%
2)	Penyediaan sandang	Orang	1.658	1.658	0	100%
3)	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1.658	1.658	0	100%
4)	Penyediaan alat bantu	Orang	58	58	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	1.658	1.658	0	100%
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1.658	1.658	0	100%
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	1.658	1.658	0	100%
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	215	215	0	100%
	9) Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	1.658	1.658	0	100%
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	104	104	0	100%
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		54	54	0	100%
	12) Pemulasaraan	Orang	192	192	0	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	6.477	6.477	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					20%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	1) Penyediaan permakanan	Orang	6.477	6.477	0	100%
	2) Penyediaan sandang	Orang	6.477	6.477	0	100%
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	6.477	6.477	0	100%
	4) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	6.477	6.477	0	100%
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	6.477	6.477	0	100%
	6) Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	6.477	6.477	0	100%
	7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	6.477	6.477	0	100%
	8) Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	1.542	1.542	0	100%
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	6.477	6.477	0	100%
	10) Pemulangan ke daerah asal	Orang	774	774	0	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	12.590	12.590	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					20%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
1)	Penyediaan permakanan	Orang	12.590	12.590	0	100%
2)	Penyediaan sandang	Orang	60.500	60.500	0	100%
3)	Peyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	30	30	0	100%
4)	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	5.462	5.462	0	100%
5)	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1.868	1.868	0	100%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta , 2023



Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti dapat tercapai 100 persen karena adanya pengawasan dan monitoring berkelanjutan pada setiap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, adanya koordinasi antar pihak-pihak pemberi pelayanan rehabilitasi sosial, dilakukannya evaluasi pemberian pelayanan sebagai upaya peningkatan mutu dan upaya pemberian pelayanan rehabilitasi dilakukan menurut prosedur secara efektif dan efisien. Adapun faktor pendorong pencapaian target dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyediaan permakanan

Pada Penyediaan Permakanan bagi Warga Binaan Sosial (WBS) Panti Sosial dengan memperhatikan mutu layanan penyediaan permakanan yang memperhatikan Angka Kecukupan Gizi, kesesuaian menu, perlengkapan makanan yang digunakan oleh masing-masing WBS, dan pemberian makan sebanyak 3 kali sehari dan 2 kali pemberian snack dengan menu yang telah disusun bersama Tenaga Gizi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas Kecamatan Setempat.

2. Penyediaan sandang

Penyediaan sandang, dilaksanakan dengan *purchasing* untuk sandang bagi WBS. Pada penyediaan sandang setiap WBS mengganti pakaian dengan kualitas sesuai dengan spesifikasi pemesanan, mendapatkan alas kaki, dan perlengkapan ibadah. Seluruh WBS juga diberikan perlengkapan mandi seperti sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi, bedak penghilang bau keringat (MBK), dan shampo.

3. Penyediaan asrama yang mudah diakses

Pada Penyediaan Asrama yang mudah diakses, telah melakukan pemenuhan kebutuhan dasar WBS dalam akses asrama yang mudah diakses panti memiliki gedung wisma untuk tempat tinggal/ asrama yang cukup bagi seluruh WBS. Hal ini dapat tercapai karena didukung oleh wisma yang bersih didukung dengan tersedianya air bersih dan akses kepada MCK.



4. Penyediaan Alat Bantu

Indikator berhasil dicapai dengan terus melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan sesama petugas dan juga memonitoring kebutuhan WBS khususnya penyediaan alat bantu. Selain itu, juga melaksanakan purchasing tepat waktu sehingga dapat menyediakan alat bantu tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan WBS. Kami terus melaksanakan monitoring dan evaluasi sehingga terus dapat meningkatkan pelayanan kami menjadi lebih baik.

5. Penyediaan Perbekalan kesehatan di dalam panti

Pada Penyediaan perbekalan kesehatan, dilaksanakannya *purchasing* tepat waktu sehingga kami memperoleh Peralatan Kesehatan bagi WBS tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan WBS kami. Kami juga melakukan kerjasama dengan Puskesmas.

6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial

Indikator berhasil dicapai dengan terus melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan tim, staf dan juga petugas lapangan yang langsung menangani WBS dan memonitoring dan kegiatan keterampilan WBS. Selain itu juga terus melaksanakan purchasing tepat waktu sehingga kami memperoleh Peralatan Keterampilan bagi WBS kami tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan Keterampilan WBS.

7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari

Pada Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari, panti memiliki jadwal kegiatan rutin yang jelas, Sumber Daya Manusia pendamping, SOP yang relevan, monitoring yang terjadwal, serta evaluasi yang kami laksanakan secara rutin. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, WBS memiliki jadwal setiap harinya, kegiatan tersebut dibantu dan dibimbing oleh petugas pelayanan sosial untuk meningkatkan keberfungsiannya WBS.



8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK

Indikator berhasil dicapai dengan terus melaksanakan komunikasi dan kerjasama dengan Dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga identitas warga binaan sosial kami sudah dapat tervalidasi dan terverifikasi. Setiap Warga Binaan Sosial yang masuk ke panti akan dilakukan pendataan dan asesmen untuk menggali informasi seperti nomor KTP dan BPJS kesehatan, WBS yang terkonfirmasi tidak memiliki identitas akan diajukan pembuatan KTP dan BPJS Kesehatan serta terdaftar pada Kartu Keluarga Panti.

Pemberian penelusuran keluarga

Indikator Fasilitasi dicapai dengan terus melaksanakan komunikasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait yaitu dengan Fasyankes terdekat sesuai dengan wilayah tinggal, maupun masyarakat luar sehingga warga binaan sosial yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan bisa terpenuhi dengan baik.

9. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

Reunifikasi dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi pada keluarga dan masyarakat sekitar agar dapat kembali menerima WBS. Dinas Sosial melakukan penjajakan melalui beberapa jalur komunikasi terlebih dahulu seperti mengirim pesan, telepon, dan sebagainya. Indikator berhasil dicapai dengan terus melaksanakan pendekatan dan asesmen terhadap warga binaan sosial oleh tim pekerja sosial dan petugas dan juga melakukan komunikasi dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dimana WBS berasal sehingga seluruh warga binaan dapat tertelusuri. Selain itu juga dilaksanakan penelusuran dan pendekatan secara berkelanjutan serta asesmen terhadap WBS untuk mendapatkan informasi yang lebih valid.

10. Pengasuhan

Petugas panti memberikan pengasuhan kepada anak asuh yang ada di panti dalam mendukung perkembangan fisik, psikologis, sosial dan spiritual.



11. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti

Panti Sosial Asuhan Anak melaksanakan layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012.

12. Pemulasaraan

Melakukan pemulasaraan dengan bekerjasama dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Bidang pemakaman.

Standar Pelayanan Minimal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi berupa barang, jasa dan sumber daya manusia yang diterima oleh korban bencana alam dan sosial sesuai dengan hasil asesmen oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial sesuai dengan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi pada Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi dapat mencapai target dikarenakan Penerima Manfaat yang mendapatkan pelayanan berupa penyediaan permakanan, sandang, hunian sementara serta layanan dukungan psikososial. tersebut mampu untuk bangkit dan pulih kembali secara sosial. Dalam proses pemberian pelayanan kebutuhan dasar, Dinas Sosial selalu mengedepankan prinsip pertolongan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana agar bisa berfungsi sosial kembali.



Tabel IV-37
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			100%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	6208	6208	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					20%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	1) Layanan data dan pengaduan	Orang	258	258	0	100%
	2) Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	27	27	0	100%
	3) Penyediaan permakanan	Orang	155	155	0	100%
	4) Penyediaan sandang	Orang	169	169	0	100%
	5) Penyediaan alat bantu	Orang	4.696	4.696	0	100%
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100%
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	180	180	0	100%
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	1	1	0	100%
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100%
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	1	1	0	100%
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	1	1	0	100.00 %
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	1	1	0	100.00 %
	13) Layanan rujukan	orang	878	878	0	



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	286	286	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					20%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	1) Layanan data dan pengaduan	Orang	79	79	0	100%
	2) Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100%
	3) Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100%
	4) Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100%
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100%
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100%
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	1	1	0	100%
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100%
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100%
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100%
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100%
	12) Layanan rujukan	Orang	207	207	0	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1.043	1.043	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					20%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	Layanan data dan pengaduan	Orang	38	38	0	100%
	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100%
	Penyediaan Permakanan	Orang	1	1	0	100%
	Penyediaan Sandang	Orang	2	2	0	100%
	Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100%
	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100%
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	Orang	1	1	0	100%
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/ bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100%
	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	1	1	0	100%
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100%
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100%
	Layanan rujukan	Orang	998	998	0	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tun Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
B	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	7.170	7.170	0	100%
C	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					20%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	1) Layanan data dan pengaduan	Orang	1.805	1.805	0	100%
	2) Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	72	72	0	100%
	3) Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	4) Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100%
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100%
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100%
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100%
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100%
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100%
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100%
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100%
	12) Layanan rujukan	Orang	5.293	5.293	0	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	141.322	141.322	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					20%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	1) Penyediaan permakanan	Orang	141.322	141.322	0	100%
	2) Penyediaan sandang	Orang	15.610	15.610	0	100%
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	47	47	0	100%
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	4.349	4.349	0	100%
	5) Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	963	963	0	100%

Sumber : SPM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Standar Pelayanan Minimal pada indikator mutu minimal dan penerima layanan dasar rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial dapat tercapai berdasarkan hasil perhitungan pada masing-masing sub kegiatan yang mendukung. Pencapaian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Layanan data dan pengaduan

Ketepatan dan kecepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui kanal aduan yang di disposisi ke sudin sosial 5 wilayah.

2. Penyediaan permakanan

Kuantitas dan kualitas permakanan sesuai dengan jumlah penerima manfaat UILS (Unit Informasi dan Layanan Sosial).

3. Penyediaan Sandang

Pemberian sandang berupa diaper dewasa dengan kualitas yang baik tersalurkan sesuai dengan permohonan masyarakat.

4. Penyediaan Alat Bantu Fisik

Pemberian alat bantu fisik, berupa kursi roda dewasa, kursi roda anak, tongkat kaki tiga dan walker serta alat bantu dengar dengan kualitas yang baik tersalurkan sesuai dengan permohonan masyarakat.

5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial

Pemberian bimbingan bagi penerima manfaat UILS berupa kegiatan bimbingan keterampilan berjalan dengan baik dilaksanakan oleh instruktur yang bersertifikat.

6. Layanan Rujukan

Penjangkauan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilaksanakan dengan baik oleh petugas yang terbagi di beberapa posko 5 wilayah.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi diantaranya penyediaan permakanan dengan mempertimbangkan Angka Kesehatan Gizi (AKG), penyediaan sandang kualitas laik pakai, penyediaan tempat penampungan pengungsi mempertimbangkan kelayakan dan kapasitas yang memadai, Penanganan khusus kelompok rentan (Korban Bencana bagi ibu hamil,



Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia) dapat tercukupi sesuai dengan kebutuhannya, Pelayanan Dukungan Psikososial (bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan) dengan tujuan membantu mengembalikan fungsi sosialnya, dan sebagainya.

Tabel IV-38

Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Melalui KLJ, KPDJ Dan KAJ Tahun Anggaran 2023

No	Program	Target APBD-P (Orang)	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
1.	KLJ	200.588	199.991	197.669	193.140	193.109
2.	KPDJ	20.890	20.865	20.658	20.244	20.238
3.	KAJ	15.352	15.282	14.268	13.595	12.227

Sumber data : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2023

Penyaluran bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) Tahun Anggaran 2023 diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 460 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2023 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun 2023, penyaluran bantuan sosial PKD terbagi menjadi 4 (empat) tahap penyaluran yakni tahap 1 (bulan Januari-April), tahap 2 (bulan Mei-Juni), tahap 3 (bulan Juli-Oktober), tahap 4 (November-Desember) dengan nominal bantuan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perorang perbulan. Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan pertahap dikarenakan menyesuaikan dengan terbitnya Keputusan Gubernur, dan juga pendistribusian kartu ATM bagi penerima manfaat baru.

Sedangkan, pengurangan jumlah penerima manfaat pada setiap tahap disebabkan karena terdapat penerima manfaat yang sudah tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial Adapun dana yang tidak terealisasi telah dilakukan pengembalian ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024.



4.6.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM

Tabel IV-39
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sosial

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1	APBD DKI Jakarta	79.558.253.790.537
2	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Pendidikan)	1.621.006.664.742
3	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	1.142.369.781.394
	APBD	1.142.369.781.394
	a) APBD Murni	1.142.369.781.394
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasi	0
	f) Kerjasama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	a) APBD DAK Fisik	0
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.6.5 Dukungan Personil

Tabel IV-40
Dukungan Personil SPM Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	22	-	322
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	18	-	159
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	8	-	157
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	9	-	106
5.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti	-	-	439
6.	Pendamping Sosial	-	-	801
7.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	101	-	1502
	Jumlah	158	-	3486

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2023



4.6.6 Permasalahan dan Solusi Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-41
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none">Dalam pengumpulan data Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di dalam panti masih ada Warga Binaan Sosial yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Petugas panti sudah mengajukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) namun masih proses pengajuan dan petugas selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terkait NIK tersebut
		<ol style="list-style-type: none">2. Data Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti tidak menggunakan PKD (Pemenuhan Kebutuhan Dasar) karena penerima manfaatnya tidak semua terlantar	Data Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti dalam indikator pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial menggunakan data penerima manfaat UILS (Unit Informasi Layanan Sosial) yang ada di tiap Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta
		<ol style="list-style-type: none">3. Perlu adanya definisi operasional terkait kebencanaan, mana saja yang kejadian yang dapat dikategorikan sebagai sebuah bencana dan indikator-indikatornya.	Perlunya pendefinisian operasional terkait kejadian yang dikategorikan sebagai bencana dan dirapatkan bersama dengan SKPD terkait yang menangani kebencanaan di Daerah Provinsi.
		<ol style="list-style-type: none">4. Kesulitan mendapatkan data dengan cepat karena membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan Kelurahan / Kecamatan setempat.	Perlu adanya penyusunan SOP terkait pendataan korban bencana yang dirapatkan dengan PD/UKPD/ stakeholders terkait.
2.	Perhitungan Kebutuhan		-
3.	Perencanaan dan Penganggaran		
4.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none">Warga Binaan Sosial dalam panti yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum memiliki BPJS Kesehatan	Petugas panti bekerjasama dengan Puskesmas setempat supaya semua Warga Binaan Sosial bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
		<ol style="list-style-type: none">2. Dalam proses penelusuran keluarga dan reunifikasi keluarga, pekerja sosial melakukan asesmen lanjutan dengan menggali informasi dari WBS terkait alamat rumah supaya WBS dapat kembali ke keluarga	Pekerja Sosial melakukan koordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial di daerah lain untuk bisa menemukan alamat rumah Warga Binaan Sosial tersebut melalui media elektronik



No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		3. Dalam Indikator akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti tidak semua Panti Sosial Asuhan Anak melakukan pelayanan ini	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti dalam panti hanya dilaksanakan di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa karena merupakan Lembaga Pengasuhan Anak yang mendapatkan izin dari Menteri untuk melaksanakan proses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
		4. Terbatasnya akses penyaluran kerja serta pelatihan bagi WBS Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	Petugas panti melakukan kerjasama dengan Pusat Pelatihan Kerja Jakarta Timur
		5. Beberapa wilayah kejadian bencana memiliki keterbatasan lahan/tempat untuk mendirikan tempat penampungan pengungsi karena berada di lokasi padat penduduk	Mencari lokasi yang memungkinkan untuk pendirian tempat penampungan pengungsi di sekitar lokasi kejadian bencana dan berkoordinasi dengan aparatur kewilayahan setempat

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2023



4.7 Program dan Kegiatan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

4.7.1 Urusan Pendidikan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

a. Urusan Pendidikan Daerah Provinsi

Tabel IV-42
Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Daerah Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	PROVINSI DKI JAKARTA				3.380.774.376.515	3.267.663.866.889	96.65
1.	Program SPM Pendidikan Menengah				3.300.154.009.999	3.192.405.703.214	96.74
	1.	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)			2.862.152.192.361	2.787.284.556.560	97.38
		1)	Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik	0	0	0
		2)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	2.862.152.192.361	2.787.284.556.560	97.38
		3)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	0	0	0
		4)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	0
	JUMLAH INDIKATOR				2.862.152.192.361	2.787.284.556.560	97.38
	2.	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)			379.378.096.334	365.418.055.280	96.32
		1)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
		2)	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	379.378.096.334	365.418.055.280	96.32
		3)	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0
		4)	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
		PROVINSI DKI JAKARTA			3.380.774.376.515	3.267.663.866.889	96.65
1.		Program SPM Pendidikan Menengah			3.300.154.009.999	3.192.405.703.214	96.74
		5)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0
		6)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0
		7)	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			379.378.096.334	365.418.055.280	96.32
3.		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)			21.048.237.878	12.242.573.297	58.16
		1)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas	13.705.489.878	12.242.573.297	89.33
		2)	Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	7.342.748.000	0	7.70
		JUMLAH INDIKATOR			21.048.237.878	12.242.573.297	58.16
4.		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)			26.107.366.262	18.203.179.717	69.72
		1)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0
		2)	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0
		3)	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	26.104.366.262	18.203.179.717	69.72
		4)	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			26.107.366.262	18.203.179.717	69.75
5.		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			11.250.967.950	9.092.448.360	80.81



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
		PROVINSI DKI JAKARTA			3.380.774.376.515	3.267.663.866.889	96.65
1.		Program SPM Pendidikan Menengah			3.300.154.009.999	3.192.405.703.214	96.74
		(SMA/SMK/Paket C)					
		1)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	11.250.967.950	9.092.448.360	80.81
		2)	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
		3)	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			11.250.967.950	9.092.448.360	80.81
6.		Tingkat penyerapan lulusan (SMK)			0	0	0
		1)	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	Lulusan	0	0	0
		2)	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	Lembaga sertifikasi	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			0	0	0
7.		Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)			217.149.214	164.890.000	75.93
		1)	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	Kegiatan	217.149.214	164.890.000	75.93
		JUMLAH INDIKATOR			217.149.214	164.890.000	75.93
		JUMLAH INDIKATOR			3.300.154.009.009	3.192.405.703.214	96.74
		Program SPM Pendidikan Khusus			80,620,366,516	75,258,163,675	93.35
8.		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus			53,438,703,0403	50,274,821,285	94,08
		1)	Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	Peserta Didik	0	0	0
		2)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	53,438,703,040	50,274,821,285	94,08
		3)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan	Peserta Didik	0	0	0



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
		PROVINSI DKI JAKARTA			3.380.774.376.515	3.267.663.866.889	96.65
1.		Program SPM Pendidikan Menengah			3.300.154.009.999	3.192.405.703.214	96.74
		daya tampung					
		4)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	0
			JUMLAH INDIKATOR		53,438,703,040	53,438,703,040	94.08
	9.		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus		2,063,005,661	1,771,806,793	85.88
		1)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas	2,063,005,661	1,771,806,793	85.88
		2)	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0
			JUMLAH INDIKATOR		2,063,005,661	1,771,806,793	85.88
	10.		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan		662,716,0400	572,054,870	86.32
		1)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0
		2)	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0
		3)	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	662,716,0400	572,054,870	86.32
		4)	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0
			JUMLAH INDIKATOR		662,716,0400	572,054,870	86.32
	11.		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan		24,455,941,775	22,639,480,727	92.57



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
			PROVINSI DKI JAKARTA		3.380.774.376.515	3.267.663.866.889	96.65
1.			Program SPM Pendidikan Menengah		3.300.154.009.999	3.192.405.703.214	96.74
		1)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	412,500,000	25,000,000	6.06
		2)	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	24,043,441,775	22,614,480,727	94.06
		3)	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	0
		4)	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	0
		5)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0
		6)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0
		7)	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	0
			JUMLAH INDIKATOR		24,455,941,775	22,639,480,727	92.57
	12.		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus		0	0	0
		1)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	0
		2)	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
		3)	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0
			JUMLAH INDIKATOR		0	0	0
			JUMLAH PROGRAM		80.620.366.516	75.258.163.675	93.35

Sumber : SPM Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2023



b. Urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel IV-43
Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	JAKARTA RAYA				6.064.627.694.246	5.555.763.219.056	91.61
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini				287.223.290.526	97,948,768,254	95.48
	1.	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD			97.948.768.254	95.778.664.116	97.78
		1)	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta Didik	0	0	0
		2)	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	0	0	0
		3)	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik	94.822.637,356	92.998.024.416	98.08
		4)	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik	3.126.130,898	2.780.639.700	88.95
		5)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	0	0	0
		6)	Penyediaan layanan Pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	0
	JUMLAH INDIKATOR				97.948.768.254	95.778.664.116	97.78
	2.	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan			16.417.977,316	8.264.931.926	50.34
		1)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0
		2)	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
		3)	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0
		4)	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0
		5)	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	16,417,977,316	8,264,931,926	50.34
		JUMLAH INDIKATOR			16.417.977.316	8.264.931.926	50.34
3.	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)				170.432.721.502	168.235.861.367	98.71
		1)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
		2)	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	170.432.721.502	168.235.861.367	98.71
		3)	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Guru	0	0	0
		4)	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0
		5)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0
		6)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0
		7)	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			170.432.721.502	168.235.861.367	98.71
4.	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)				2.423.823.454	1.965.671.500	81.10
		1)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	2.423.823.454	1.965.671.500	81.10
		2)	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
		3)	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			2.423.823.454	1.965.671.500	81.10



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
2	Program SPM Pendidikan Dasar				5,599,338,351,705	5,121,686,657,789	91.47
	5.	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/ Paket B)			3,942,925,928,727	3,835,435,170,237	97.27
		1)	Pendaatan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik	0	0	0
		2)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	3,942,925,928,727	3,835,435,170,237	97.27
		3)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	0	0	0
		4)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			3,942,925,928,727	3,835,435,170,237	97.27
	6.	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peser Didik (SD/SMP/MI/ MTs/Paket A/ Paket B)			45.230.283.305	43.767.029.307	96.76
		1)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas	45.230.283.305	43.767.029.307	96.76
		2)	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			45.230.283.305	43.767.029.307	96.76
	7.	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/ MI/MTs/Paket A/Paket B)			511.649.683.470	185.175.139.997	36.19
		1)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0
		2)	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0
		3)	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	511.649.683.470	185.175.139.997	36.19
		4)	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			511.649.683.470	185.175.139.997	36.19



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	8.	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/ Paket A/Paket B)			1.082.691.236.203	1.042.885.598.248	96.32
		1)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
		2)	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	1.082.691.236.203	1.042.885.598.248	96.32
		3)	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Guru	0	0	0
		4)	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0
		5)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0
		6)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0
		7)	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			1.082.691.236.203	1.042.885.598.248	96.32
	9.	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			16.841.220.000	14.423.720.000	85.65
		1)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	16.841.220.000	14.423.720.000	85.65
		2)	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
		3)	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			16.841.220.000	14.423.720.000	85.65



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
3	Program SPM Pendidikan Kesetaraan				54.822.365.447	54.118.598.650	98.72
	10.	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)					
		1)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik	0	0	0
		2)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	54.822.365.447	54.118.598.650	98.72
		3)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	0	0	0
		4)	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			54.822.365.447	54.118.598.650	98.72
	11.	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)			0	0	0
		1)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas	0	0	0
		2)	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			0	0	0
	12.	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)			24.898.471.008	8.964.103.893	36.00
		1)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	0
		2)	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	0
		3)	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	24.898.471.008	8.964.103.893	36.00
		4)	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			24.898.471.008	8.964.103.893	36.00



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	13.		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)		97.528.615.560	95.946.149.815	98.38
		1)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
		2)	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	97.528.615.560	95.946.149.815	98.38
		3)	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Guru	0	0	0
		4)	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	0
		5)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	0
		6)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	0
		7)	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			97.528.615.560	95.946.149.815	98.38
	14.		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)		816.600.000	802.580.000	98.28
		1)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	816.600.000	802.580.000	98.28
		2)	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	0
		3)	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			816.600.000	802.580.000	98.28
		JUMLAH PROGRAM			178.066.052.015	159.831.432.358	89.76

Sumber :SPM Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2023



4.7.2 Urusan Kesehatan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

a. Urusan Kesehatan Daerah Provinsi

Table IV-43
Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Daerah Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	PROVINSI DKI JAKARTA				82.286.767.059	72.202.138.929	87,74
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				82.286.767.059	72.202.138.929	87,74
	1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			82.286.767.059	72.202.138.929	87,74
		1)	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	orang	2.741.045.467	2.433.149.120	88,77
		2)	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	orang	79.545.721.592	69.768.989.809	87,71
	JUMLAH INDIKATOR				82.286.767.059	72.202.138.929	87,74
	JUMLAH PROGRAM				82.286.767.059	72.202.138.929	87,74

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2023



b. Urusan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel IV-44
Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
		JAKARTA RAYA			174.428.801.713	145.536.195.521	83,44
1		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			174.428.801.713	145.536.195.521	83,44
	1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			174.428.801.713	145.536.195.521	83,44
	1)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	orang	orang	4.345.429.897	3.880.321.831	89,30
	2)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	orang	orang	953.256.569	829.633.726	87,03
	3)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	orang	1.466.131,116	1.293.485,160	88,22
	4)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	orang	orang	34.927.256,792	28.461.545,783	81,49
	5)	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	orang	orang	1.809.233.563	1.677.478.520	92,72
	6)	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	orang	orang	8.940.290.434	6.970.379.982	77,97
	7)	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	orang	orang	28.872.221.108	20.974.560.449	72,65
	8)	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	orang	orang	1.988.187.280	1.663.675.536	83,68
	9)	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	orang	orang	2.306.092.049	1.823.477.058	79,07
	10)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	orang	orang	446.434.940	430.628.499	96,46
	11)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang	orang	1.121.911.840	965.376.200	86,05
	12)	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	orang	orang	4.965.589.066	4.363.493.848	87,87
	13)	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	Dokumen	79.545.721.592	69.768.989.809	87,71
	14)	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	Dokumen	2.741.045.467	2.433.149.120	88,77
		JUMLAH INDIKATOR			174.428.801.713	145.536.195.521	83,44
		JUMLAH PROGRAM			174.428.801.713	145.536.195.521	83,44

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta



4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi

Tabel IV-45
Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	PROVINSI DKI JAKARTA				341.301.218.678	270.643.059.763	79.30
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				29,055,979,123	14,586,921,866	50.20
	1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			29,055,979,123	14,586,921,866	50.20
		1)	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	513,999,976	200,282,400	38.97
		2)	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Liter/Detik	0	0	0
		3)	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter/Detik	13,296,590,166	12,395,986,130	93.23
		4)	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0
		5)	Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen	0	0	0
		6)	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0
		7)	Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0
		8)	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	0	0	0
		9)	Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Unit	15,245,388,981	1,990,653,336	13.06
		10)	Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
		11)	Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Ha	0	0	0
		12)	Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	0	0	0
	JUMLAH INDIKATOR				29,055,979,123	14,586,921,866	50.20
	JUMLAH PROGRAM				29,055,979,123	14,586,921,866	50.20



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	2)		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		312,245,239,555	256,056,137,897	82.00
		1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	5,812,255,768	5,078,677,541	87.38
		2)	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Dokumen	0	0	0
		3)	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	303,955,999,663	249,073,000,280	81.94
		4)	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Rumah Tangga	0	0	0
		5)	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen	1,999,989,320	1,463,750,000	73.19
		6)	Pembinaan Teknis Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	476,994,804	440,710,076	92.39
		7)	Pengembangan SDM Dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0
		8)	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	0	0
		9)	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0
	JUMLAH INDIKATOR				312,245,239,555	256,056,137,897	82.00
	JUMLAH PROGRAM				312,245,239,555	256,056,137,897	82.00

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2023



b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Tabel IV-46
Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
		JAKARTA RAYA			90.861.953.894	73.713.455.359	81.13
1		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			0	0	0
	1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			0	0	0
	1)	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen		0	0	0
	2)	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen		0	0	0
	3)	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik		0	0	0
	4)	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR		0	0	0
	5)	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik		0	0	0
	6)	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan			0	0	0
	7)	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR		0	0	0
	8)	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan			0	0	0
	9)	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum			0	0	0
	10)	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha		0	0	0
	11)	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat		0	0	0
	12)	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit		0	0	0
	13)	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit		0	0	0
	14)	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM			0	0	0
	15)	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit		0	0	0
	16)	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit		0	0	0
	17)	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga		0	0	0
	18)	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan			0	0	0
	19)	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan			0	0	0
	20)	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit		0	0	0
	21)	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit		0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			0	0	0
		JUMLAH PROGRAM			0	0	0



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah				48.825.947.377	40.173.984.060	82.28
	2.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			48.825.947.377	40.173.984.060	82.28
		1)	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1.910.000.200	1.676.893.278	87.80
		2)	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0
		3)	Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala kota	Rumah Tangga	0	0	0
		4)	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengeloaan Air limbah Domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga	0	0	0
		5)	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengeloaan Air limbah Domestik terpusat skala kpermukiman	Rumah Tangga	0	0	0
		6)	Pembangunan /penyediaan sub sistem pengelolaan setempat	Rumah Tangga	14.453.550.136	8.969.376.834	62.06
		7)	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0
		8)	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	0
		9)	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0
		10)	Operasi dan pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah Domestik		32.462.397.041	29.527.713.948	90.96
		11)	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman		0	0	0
		12)	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	orang	0	0	0
		13)	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	unit	0	0	0
		14)	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	dokumen	0	0	0
		15)	Pembangunan/Penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0
		16)	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	0
		17)	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			48.825.947.377	40.173.984.060	82.28
		JUMLAH PROGRAM			48.825.947.377	40.173.984.060	82.28



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
3	Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya						
		1)	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten /Kota		8.378.369.374	8.126.695.238	97.00
		2)	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		26.809.619.864	21.154.960.364	78.91
		3)	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		1.667.603.750	1.004.913.200	60.26
		4)	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		5.180.413.529	3.252.902.500	62.79

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2023



4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat Daerah Provinsi

Urusan Perumahan Rakyat Daerah Provinsi

Tabel IV-47
Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	PROVINSI DKI JAKARTA				481,655,194,830	332,980,804,269	69.13
1.	Program Pengembangan Perumahan				481,655,194,830	332,980,804,269	69.13
	1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			0	0	0
		1)	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	0	0	0
		2)	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0
		3)	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0
		4)	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0
		5)	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	0	0	0
		6)	Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			0	0	0
	2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			481,655,194,830	332,980,804,269	69.13
		1)	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0
		2)	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi	Dokumen	63,267,850,522	45,741,346,597	72.30
		3)	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0
		4)	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0
		5)	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	Unit Rumah	223,389,922,397	100,296,764,305	44.90
		6)	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi	Unit Rumah	194,997,421,911	186,942,693,367	95.87
		JUMLAH INDIKATOR			481,655,194,830	332,980,804,269	69.13
		JUMLAH PROGRAM			481,655,194,830	332,980,804,269	69.13

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2023



4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

a. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi

Tabel IV-48

Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)	
	PROVINSI DKI JAKARTA				633,297,450,881	585,931,721,993	92,52	
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)				268,048,380,178	261,666,266,931	97,62	
	1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				264,424,740,051	258,161,935,397	97,63
		1)	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawalan	kasus	262,134,391,545	256,323,347,513	97,78	
		2)	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	kasus	370,332,804	359,812,100	97,16	
		3)	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	dokumen	283,117,225	273,181,284	96,49	
		4)	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	dokumen	661,065,172	548,167,500	82,92	
		5)	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	orang	975,833,305	657,427,000	67,37	
		6)	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	dokumen	0	0	0	
		7)	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0	
		8)	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0	
		9)	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0	
	JUMLAH INDIKATOR				264,424,740,051	258,161,935,397	97,63	



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	2.		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		3,053,803,401	2,971,976,854	97,32
		1)	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1,151,465,500	1,109,851,534	96,39
		2)	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1,223,133,200	1,215,730,320	99,39
		3)	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	679,204,701	646,395,000	95,17
		JUMLAH INDIKATOR			3.053.803.401	2.971.976.854	97.32
	3.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		569,836,726	532,354,680	93,42
		1)	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	569,836,726	532,354,680	93,42
		2)	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Dokumen	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			569.836.726	532.354.680	93.42
		JUMLAH PROGRAM			268.048.380.178	261.666.266.931	97.62
	2.	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaaan)			39,288,484,388	38,457,511,742	97,88
	4.		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		22,867,144,310	22,490,945,275	98,35
		1)	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Dokumen	0	0	0
		2)	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	0	0	0
		3)	Pengendalian pperasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	0	0	0
		4)	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	Unit	0	0	0
		5)	Pengelolaan risiko bencana	Dokumen	0	0	0
		6)	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0
		7)	Penanganan pasca bencana Provinsi		0	0	0
		8)	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana	Orang	0	0	0
		9)	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0
		10)	Gladai kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan	0	0	0
		11)	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			22,867,144,310	22,490,945,275	98,35
	5.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		2,056,827,895	2,041,180,600	99,24
		1)	Penyusunan kajian risiko bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0
		2)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Provinsi (per jenis bencana)	Orang	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			0	0	0



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	6.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			0	0	0
		1) Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan		0	0	0
		2) Respon cepat penanganan darurat bencana	Laporan		0	0	0
		3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Laporan		0	0	0
		4) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang		0	0	0
		5) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan		0	0	0
		6) Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Laporan		0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			0	0	0
	7.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			0	0	0
		1) Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah	Dokumen		0	0	0
		2) Penguatan kelembagaan bencana daerah	Dokumen		0	0	0
		3) Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Dokumen		0	0	0
		4) Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen		0	0	0
		5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Laporan		0	0	0
		6) Pelatihan keluarga tanggap bencana alam			0	0	0
		7) Penanganan pasca bencana Provinsi	Dokumen		0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			0	0	0
		JUMLAH PROGRAM			0	0	0
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)				365,249,070,703	324,265,455,062	88,78
	8.	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			364,925,964,703	323,958,209,062	88,77
		1) Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Dokumen		0	0	0
		2) Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen		116,850,000	116,850,000	100
		3) Pembinaan apparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan		3,730,896,544	3,430,468,370	91,95
		4) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dokumen		0	0	0
		5) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit		354,918,368,524	314,625,348,992	88,65



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
		6)	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	3,876,711,032	3,768,523,960	97,21
		7)	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	627,239,344	597,759,409	95,30
		8)	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	332,497,682	307,505,000	92,48
		9)	Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0
		10)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dokumen	944,219,739	852,570,514	90,29
		11)	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi	Kab/Kota	379,181,838	259,182,817	68,35
		12)	Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan	Dokumen	0	0	0
		13)	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga		0	0	0
JUMLAH INDIKATOR					364,925,964,703	323,958,209,062	88,77
9.	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				323,106,000	307,246,000	95,09
		1)	Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Laporan	323,106,000	307,246,000	95,09
		2)	Pengawasan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Laporan	0	0	0
JUMLAH INDIKATOR					323,106,000	307,246,000	95,09
JUMLAH PROGRAM					365,249,070,703	324,265,455,062	88,78

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2023



b. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel IV-49

Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
			JAKARTA RAYA		216,021,833,431	203,492,624,699	94,20
1.			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)		10,604,330,898	3,452,757,709	32,56
	1.		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3,506,641,507	3,452,757,709	98,46
		1)	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	1,926,858,988	1,908,317,380	99,04
		2)	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	591,360,000	591,360,000	100
		3)	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
		4)	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	542,191,419	522,499,521	96,37
		5)	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0
		6)	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0
		7)	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	446,231,100	430,580,808	96,49
		8)	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0
		9)	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0
			JUMLAH INDIKATOR		3,506,641,507	3,452,757,709	98,46
2.			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		7,097,689,391	0	0
		1)	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0
		2)	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	859,840,000	0	91,78
		3)	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	6,237,849,391	0	52,56
			JUMLAH INDIKATOR		7,097,689,391	0	0



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					
		1) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR		0	0	0	0
		JUMLAH PROGRAM		10,604,330,898	3,452,757,709	32,56	
2.	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)				39.288.484.388	38.457.511.742	97.88
	4.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			2.056.827.895	2.041.180.666	99.28
		1) Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0
		2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	2.056.827.895	2.041.180.666	99.28	
		JUMLAH INDIKATOR		2.056.827.895	2.041.180.666	99.28	
	5.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			22.867.144.310	22.490.945.275	98.35
		1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0
		2) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	588.943.646	553.806.747	94.03	
		3) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	18.567.153.060	18.301.829.044	98.57	
		4) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	1.854.116.792	1.784.546.334	96.25	
		5) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0	0
		6) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	1.199.906.337	1.199.188.500	99.94	
		7) Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0	0	0	0
		8) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	195.719.337	195.689.700	99.98	
		9) Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0	0
		10) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	461.305.138	455.884.950	98.83	
		11) Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0	0
		12) Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR		22.867.144.310	22.490.945.275	98.35	
	6.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			7.542.619.404	7.141.998.373	94.69
		1) Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0	0
		2) Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.608.900.000	1.600.417.000	99.47	
		3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	195.000.000	194.164.000	99.57	
		4) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	5.738.719.404	5.347.417.373	93.18	
		5) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0	0
		6) Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR		7.542.619.404	7.141.998.373	94.69	



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	7.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			6.821.892.779	6.783.387.494	99,44
		1)	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
		2)	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
		3)	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	156.000.000	151.810.000	97,31
		4)	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	5.409.894.109	5.379.220.259	99,77
		5)	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0
		6)	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.255.998.670	1.234.357.235	98,28
		JUMLAH INDIKATOR			6.821.892.779	6.783.387.494	99,44
		JUMLAH PROGRAM			39.288.484.388	38.457.511.742	97,88
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)				166.129.018.145	161.582.355.248	97,26
	8.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			153.881.824.371	150.893.135.470	98,06
		1)	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	23.850,000	23.850,000	100
		2)	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	119.219.667,480	118.407.786,879	99,32
		3)	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0
		4)	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
		5)	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.350.852,907	980.670.106	72,60
		6)	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	27.950.203,535	26.697.712.722	95,52
		7)	Pembinaan apparatur pemadam kebakaran	Dokumen	584.501.478	560.309.650	95,86
		8)	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	4.489.792,502	3.974.647.153	88,53
		9)	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	262.956.469	248.158.960	94,37
		10)	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			153.881.824.371	150.893.135.470	98,06
	9.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			251.089.392	238.651.794	95,05
		1)	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0
		2)	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	251.089.392	238.651.794	95,05
		JUMLAH INDIKATOR					



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	10.	Investigasi Kejadian Kebakaran			3,411,182,926	3,009,974,468	88,24
		3)	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	3,411,182,926	3,009,974,468	88,24
			JUMLAH INDIKATOR		3,411,182,926	3,009,974,468	88,24
	11.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			6,324,148,971	5,987,851,145	94,68
		1)	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	3,892,486,322	3,639,535,520	93,50
		2)	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		1,153,830,649	1,102,429,425	95,55
		3)	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	1,277,832,000	1,245,886,200	97,50
			JUMLAH INDIKATOR		6,324,148,971	5,987,851,145	94,68
	12.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			2,260,772,485	1,452,742,371	64,26
		1)	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0
		2)	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	200,910,666	179,935,242	89,56
		3)	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	2,059,861,819	1,272,807,129	61,79
		4)	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0
			JUMLAH INDIKATOR		2,260,772,485	1,452,742,371	64,26
			JUMLAH PROGRAM		166,129,018,145	161,582,355,248	97,26

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2023



4.7.6 Urusan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

a. Urusan Sosial Daerah Provinsi

Tabel IV-50
Program dan Kegiatan SPM Sosial Daerah Provinsi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	PROVINSI DKI JAKARTA				245.743.700.937	226.575.823.924	92.20
1.	Program Rehabilitasi Sosial				231.822.586.305	213.763.549.424	92.21
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			114.901.344.561	102.215.905.824	88.96
	1)	Penyediaan permakanan	Orang	59.223.980.348	56.964.529.565	96.18	
	2)	Penyediaan sandang	Orang	11.176.956.957	11.054.563.257	98.90	
	3)	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	19.150.250.212	9.158.779.788	47.83	
	4)	Penyediaan alat bantu	Orang	67.951.714	65.911.800	97.00	
	5)	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	1.242.663.310	1.224.943.577	98.57	
	6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	3.013.913.458	2.905.298.887	96.40	
	7)	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	20.807.057.542	20.625.707.930	99.13	
	8)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0	
	9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	
	10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0	
	11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	
	12)	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen	218.571.020	216.171.020	98.90	
	JUMLAH INDIKATOR				114.901.344.561	102.215.905.824	88.96
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				41.286.145.210	38.055.838.203	92.18
	1)	Pengasuhan	Orang	0	0	0	
	2)	Penyediaan makanan	Orang	13.320.658.071	12.820.455.023	96.24	
	3)	Penyediaan sandang	Orang	2.775.603.520	7.726.091.185	98.22	
	4)	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	9.651.910.980	7.108.464.579	73.65	
	5)	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	199.842.059	192.056.316	96.10	
	6)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	3.372.439.410	3.323.134.675	98.54	
	7)	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	11.847.691.170	11.767.636.425	99.32	
	8)	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	
	9)	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	
	10)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0	
	11)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	
	12)	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengantin	Orang	118.000.000	118.000.000	100.00	
	13)	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dokumen	0	0	0	
	JUMLAH INDIKATOR				41.286.145.210	38.055.838.203	92.18



No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					
		1) Penyediaan permakanan		Orang	21.322.344.665	20.967.806.873	98.34
		2) Penyediaan sandang		Orang	2.984.488.669	2.917.890.941	97.77
		3) Penyediaan asrama yang mudah diakses		Orang	103.097.144	102.262.651	99.19
		4) Penyediaan alat bantu		Orang	0	0	0
		5) Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial		Orang	289.878.126	286.762.258	98.93
		6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		Orang	1.024.000.774	1.022.547.486	99.86
		7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		Orang	0	0	0
		8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas		Orang	0	0	0
		9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	0	0	0
		10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Orang	0	0	0
		11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Orang	0	0	0
		12) Pemulasaraan		Orang	0	0	0
		13) Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti		Dokumen	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			36.221.374.376	35.719.365.938	98.61
	4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			39.413.722.158	37.772.439.459	95.84
		1) Penyediaan permakanan		Orang	25.966.841.267	24.540.677.494	94.54
		2) Penyediaan sandang		Orang	3.355.679.386	3.287.256.205	97.48
		3) Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses		Orang	1.799.518.374	1.788.414.889	99.38
		4) Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		Orang	501.888.600	480.076.390	95.65
		5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		Orang	675.530.071	625.370.412	92.57
		6) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		Orang	7.114.264.460	7.066.644.069	99.33
		7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar		Orang	0	0	0
		8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak		Orang	0	0	0
		9) Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	0	0	0
		10) Pemulangan ke daerah asal		Orang	0	0	0
		11) Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti		Dokumen	0	0	0
		JUMLAH INDIKATOR			39.413.722.158	37.772.439.459	95.84
		JUMLAH PROGRAM			231.822.586.305	213.763.549.424	92.21
	Program Penanganan Bencana				13.921.114.632	12.812.274.500	92.03
	5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			13.921.114.632	12.812.274.500	92.03
		1) Penyediaan Permakanan		Orang	1.429.967.431	854.493.600	59.76
		2) Penyediaan Sandang		Orang	9.697.094.588	9.199.054.100	94.86
		3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Unit	2.533.704.870	2.503.700.000	98.82
		4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Orang	0	0	0
		5) Pelayanan Dukungan Psikososial		Orang	260.374.743	255.026.800	97.96
		JUMLAH INDIKATOR			13.921.114.632	12.812.274.500	92.03
		JUMLAH PROGRAM			13.921.114.632	12.812.274.500	92.03

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2023



b. Urusan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Tabel IV-51
Program dan Kegiatan SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota

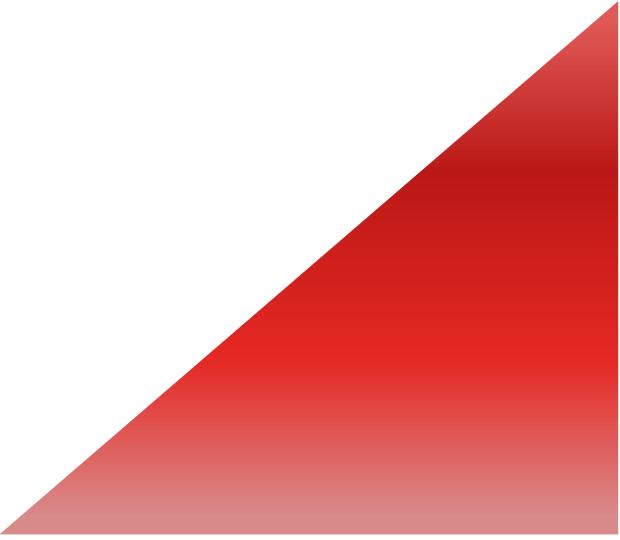
No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan (Rp)	Pelaksanaan (Rp)	Serapan (%)
	JAKARTA RAYA				53.977.079.763	48.554.208.771	89.95
1.	Program Rehabilitasi Sosial				53.977.079.763	48.554.208.771	89.95
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Orang	41.561.096.584	40.876.756.640	98.35
	1)	Penyediaan permakanan		Orang	0	0	0
	2)	Penyediaan sandang		Orang	172.973.853	161.640.500	93.45
	3)	Penyediaan alat bantu		Orang	11.009.944.446	10.771.574.275	97.83
	4)	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		Orang	0	0	0
	5)	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial		Orang	2.165.172.725	2.003.892.778	92.55
	6)	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat		Orang	0	0	0
	7)	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Orang	0	0	0
	8)	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Orang	0	0	0
	9)	Pemberian layanan data dan pengaduan		Orang	0	0	0
	10)	Pemberian layanan kedaruratan		Orang	0	0	0
	11)	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Orang	0	0	0
	12)	Pemberian layanan rujukan		Dokumen	28.213.005.560	27.939.649.087	99.03
	JUMLAH INDIKATOR				41.561.096.584	40.876.756.640	98.35
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				12.415.983.179	7.677.452.131	61.84
	1)	Penyediaan makanan		Orang	9.917.711.895	5.499.080.222	55.45
	2)	Penyediaan sandang		Orang	2.498.271.284	2.178.371.909	87.20
	3)	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		Unit	0	0	0
	4)	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		Orang	0	0	0
	5)	Pelayanan dukungan Psikososial		Orang	0	0	0
	JUMLAH INDIKATOR				12.415.983.179	7.677.452.131	61.84
	JUMLAH PROGRAM				53.977.079.763	48.554.208.771	89.95

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2023



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

BAB V PENUTUP



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMERINTAHAN**



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah satu-satunya Provinsi yang memiliki kewenangan penuh penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena tidak terbagi dengan Kabupaten/Kota otonom. Otonomi pada tingkat Provinsi menjadikan Provinsi DKI Jakarta memiliki perbedaan dibandingkan dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia sehingga masih ditemukan ketimpangan data atau ketidaktersediaan data pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) (baik IKK *outcome* maupun IKK *output*) dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta.
2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 melalui sistem informasi elektronik SILPPD Kemendagri yang telah dilakukan pembaharuan pada sistem tersebut dengan tujuan agar seluruh data dan informasi yang dituangkan dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif
3. Terkait dengan pengumpulan elemen data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah serta unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Adapun sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya..
4. Pada panyusunan LPPD tahun 2023 ini sudah mengakomodir elemen data Asimetris yang di miliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejatinya data tersebut dapat memberikan nilai tambah serta memberikan informasi yang lebih spesifik terhadap kondisi Provinsi DKI Jakarta



5.2 Saran

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2023 ini, secara teknis pengisian data melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) Kemendagri dalam pengisian nilai capaian Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Indikator Kinerja Kunci Output mohon kiranya pada sistem tersebut dapat disesuaikan dengan existing Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena secara kewenangan dan tugas fungsi Perangkat Daerah yang ada berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia.
2. Pembaharuan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya terkait dengan data Asimetris yang dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semoga dapat memberikan gambaran secara jelas kondisi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Terkait dengan sumber data yang tertuang dalam LPPD semoga dapat dijadikan basis data oleh Pemerintah Pusat dalam membangun konstruksi kebijakan serta sasaran strategis guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023 ini dapat memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas daerah dalam rangka Provinsi DKI Jakarta bertransformasi menjadi kota Global.



**Biro Pemerintahan
Setda Provinsi DKI Jakarta
Gedung Grha Ali Sadikin
Blok G Lt 10**